15 Rekomendasi Paket Kebijakan

untuk Mendukung Agenda Pembangunan
Presiden & Wakil Presiden Indonesia 2024 - 2029

IBC
Indonesian Business Council

15

Rekomendasi

Paket Kebijakan

untuk Mendukung Agenda Pembangunan
Presiden & Wakil Presiden Indonesia 2024 - 2029

Daftar Isi

DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv
KATA PENGANTAR v
RINGKASAN EKSEKUTIF vi
UCAPAN TERIMA KASIH ix
PENDAHULUAN 1
KESIMPULAN DAN PENUTUP 216

Ekonomi

FOKUS AREA 1
Hilirisasi SDA dan Maritim: Membangkitkan Industrialisasi Nasional
hlm. 07

FOKUS AREA 2
Food Estate dan Penguatan Kemitraan Sektor Pertanian: Menggencarkan Realisasi Swasembada Pangan
hlm. 23

FOKUS AREA 3
Program Makan Bergizi Gratis: Mencerdaskan Anak Bangsa
hlm. 37

FOKUS AREA 4
B50-B100, E10, dan Bioavtur: Menuju Swasembada Energi Nasional
hlm. 51

Sumber Daya Manusia

FOKUS AREA 5
Sekolah Unggulan dan Guru Berkualitas: Mencetak Manusia Unggul dan Menyambut Bonus Demografi
hlm. 69

FOKUS AREA 6
Penyediaan Rumah Sakit Lengkap: Menjamin Ketersediaan Faskes dan Nakes serta Kualitas Layanan Kesehatan Bermutu
hlm. 81

FOKUS AREA 7
3 Juta Rumah: Mengurangi Ketimpangan Akses Hunian untuk Gen Z, Milenial, dan Pekerja Informal
hlm. 97

FOKUS AREA 8
Digitalisasi Birokrasi: Memudahkan Perizinan dan Menurunkan Biaya Berusaha
hlm. 109

Tata Kelola Negara

FOKUS AREA 9
Sistem Logistik Nasional: Menurunkan Biaya Logistik dan Membuat Sistem Logistik yang Handal
hlm. 119

FOKUS AREA 10
BUMN Indonesia *Incorporated* & Integrasi Kebijakan: Memperbaiki Iklim dan Layanan Usaha
hlm. 131

FOKUS AREA 11
Inovasi Produk Keuangan, Perluasan Pembiayaan untuk UMKM, Suku Bunga Rendah & Pembaharuan Kebijakan Fiskal-Makroekonomi: Mengoptimalkan Sektor Keuangan Nasional
hlm. 145

Inovasi

FOKUS AREA 12
Pasar Karbon: Membiayai Implementasi Emisi Nol Bersih
hlm. 159

FOKUS AREA 13
2 Juta Mobil Listrik dan 13 Juta Motor Listrik: Menjamin Swasembada Energi dan Mempercepat Realisasi Transisi Energi
hlm. 171

FOKUS AREA 14
Produksi Teknologi Maju dan Tepat Guna: Membangkitkan Ekosistem Riset dan Mendukung Agenda Industrialisasi Nasional
hlm. 187

FOKUS AREA 15
Industri Kreatif dan Sektor Pariwisata: Memaksimalkan Realisasi Potensi Industri Kreatif dan Sektor Pariwisata
hlm. 201

Daftar Tabel

Tabel 2.1	10 Tantangan Utama Menuju Swasembada Pangan	26
Tabel 3.1	Beberapa Negara yang Menerapkan Program Makan di Sekolah	40
Tabel 4.1	Realisasi Implementasi Kebijakan Biofuel di Indonesia	54
Tabel 4.2	Tantangan Pengembangan PSR dan Konversi Lahan	58
Tabel 6.1	Rasio Dokter per 1.000 Penduduk di 10 Negara ASEAN	83
Tabel 8.1	Peringkat Indonesia dalam *e-Government Index* di ASEAN	112
Tabel 9.1	Perbandingan Rasio Biaya Logistik terhadap PDB	121
Tabel 11.1	Rasio Uang Beredar (M2) Indonesia Termasuk yang Terendah di antara ASEAN-5	148
Tabel 11.2	Kedalaman Keuangan Indonesia Termasuk yang Terendah di antara Negara ASEAN-5	148
Tabel 11.3	Akses Masyarakat Indonesia terhadap Layanan Keuangan Masih Terbatas di antara ASEAN-5	148
Tabel 12.1	Tantangan Pasar Karbon Indonesia	164
Tabel 14.1	Tren Pengeluaran R&D Indonesia Masih di Bawah Mayoritas Negara ASEAN-5	189
Tabel 14.2	Transformasi Kebijakan Riset di Indonesia	190
Tabel 14.3	Tantangan yang Menghambat Penguatan Ekosistem Riset di Indonesia	191
Tabel 15.1	Skor Negara-negara ASEAN pada Aspek Layanan dan Infrastruktur Pariwisata TTDI 2024	204

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Pertumbuhan PDB Indonesia Belum Kembali ke Level Pra-1997/98	9
Gambar 1.2	Kontribusi Sektor Manufaktur Indonesia terhadap PDB di Bawah Negara-Negara Asia	9
Gambar 1.3	Fondasi Solid Ekonomi Indonesia	10
Gambar 1.4	Pencapaian Kebijakan Hilirisasi pada Era Presiden Joko Widodo	12
Gambar 2.1	Skor GFSI Indonesia Masih Berada di Bawah Rata-Rata Global	25
Gambar 2.2	Model *Inclusive Closed Loop*	29
Gambar 3.1	Cakupan Kebijakan Program Makan di Sekolah dalam Sejumlah Negara	40
Gambar 3.2	Penciptaan Lapangan Kerja dalam Setiap 100 Ribu Penerima Manfaat Program Makan di Sekolah	41
Gambar 3.3	Tren Produksi Susu Nasional (1980-2023)	42
Gambar 4.1	Ekspor Kelapa Sawit Meningkat Jauh di Atas Komoditas Agro Lainnya	53
Gambar 4.2	Produksi CPO Sebagian Besar Berasal dari Perkebunan Besar Swasta (PBS) dan Perkebunan Rakyat (PR)	55
Gambar 4.3	Tantangan dan Kebijakan yang Diperlukan untuk Menyukseskan PSR dan Konversi Lahan	57
Gambar 5.1	Proporsi Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (Maret 2023)	71
Gambar 5.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), Februari 2022–Februari 2024	72
Gambar 6.1	Enam Pilar Transformasi Kesehatan	84
Gambar 7.1	Angka *Backlog* Kepemilikan Rumah (2020-2023)	99
Gambar 10.1	Performa Kebebasan Berinvestasi di Indonesia Masih Tertinggal dari Beberapa Negara ASEAN	133
Gambar 10.2	Distribusi PDB Indonesia Berdasarkan Pengeluaran (2019-2023)	134
Gambar 10.3	Aset BUMN sebagai Persentase dari PDB Indonesia	135
Gambar 11.1	*Financial Development Index*	147
Gambar 12.1	Tren Emisi yang Dihasilkan Indonesia Terus Meningkat (1990-2022)	161
Gambar 12.2	Anggaran Ketahanan Iklim Indonesia	163
Gambar 13.1	Produksi Minyak Domestik Belum Dapat Memenuhi Konsumsi BBM yang Terus Meningkat	173

Kata Pengantar

Sofyan Djalil
Chief Executive Officer IBC

Oktober 2024 menandai dimulainya babak baru dalam kepemimpinan Indonesia dengan visi **Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**. Dengan tantangan yang semakin kompleks, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci utama untuk mencapai visi tersebut. Untuk itu, *Indonesian Business Council* (IBC) siap mendukung pemerintah baru dalam meraih tujuan-tujuan strategis bangsa dengan semangat dan komitmen tinggi.

Dalam upaya mendukung kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih, IBC dengan bangga mempersembahkan buku putih berjudul ***"15 Rekomendasi Paket Kebijakan untuk Mendukung Agenda Pembangunan Presiden & Wakil Presiden Indonesia 2024 - 2029."*** Dokumen ini tidak hanya memetakan tantangan yang dihadapi di berbagai fokus area, tetapi juga menawarkan rekomendasi paket kebijakan yang strategis untuk mendukung pasangan pemimpin terpilih dalam menjalankan 8 Misi Asta Cita, 8 Program Hasil Terbaik Cepat, 17 Program Prioritas, serta program kerja lainnya.

Sejak didirikan pada Februari 2023, IBC telah berfungsi sebagai platform dinamis bagi para pemimpin bisnis dan pelopor industri di Indonesia yang ingin memberikan kontribusi bagi kepentingan bersama untuk mendorong kemajuan bangsa. Misi kami adalah memperkuat kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil guna membangun Indonesia yang lebih kompetitif dan sejahtera melalui kebijakan publik yang transparan dan berkelanjutan.

Buku putih ini adalah hasil kerja keras dan kolaborasi antar berbagai pihak. Dalam proses penyusunannya, kami mendapatkan banyak sekali masukan yang berharga dari diskusi mendalam dengan Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, para ahli, dan praktisi terkemuka. Diskusi-diskusi ini memperkaya pemahaman kami tentang gagasan dan komitmen Presiden serta Wakil Presiden terpilih, serta menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi kebijakan yang selaras dengan arah pemerintahan mendatang.

Sebagai CEO dari IBC, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi tak ternilai bagi buku putih ini. Melalui upaya bersama, mari kita dukung pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara yang lebih berdaya saing, makmur, dan mampu berpengaruh di kancah global.

Terima kasih atas kepercayaan dan kolaborasi yang terus-menerus.

Ringkasan Eksekutif

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk periode 2024 - 2029. Dengan visi membawa Indonesia menjadi negara maju, terutama dalam konteks ekonomi global dan geopolitik yang semakin dinamis dan penuh tantangan, pemerintahan ini perlu berfokus pada stabilitas politik, pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, serta penguatan sistem pertahanan dan keamanan yang berkesinambungan. Terpilihnya pasangan Prabowo-Gibran menandai momentum untuk mengakselerasi upaya mewujudkan visi Indonesia yang lebih berdaya saing. Periode kepemimpinan ini tidak hanya membawa harapan baru, tetapi juga tanggung jawab besar untuk merealisasikan aspirasi kolektif seluruh rakyat Indonesia.

Menuju usia 100 tahun pada proklamasi kemerdekaan tahun 2045, Indonesia memiliki cita-cita untuk mewujudkan "Indonesia Emas" pada atau sebelum tahun tersebut. Untuk itu, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menyusun rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) 2025-2045. Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian tersebut, diperlukan penguatan peran pemerintah dan pembangunan bangsa berdasarkan falsafah Pancasila. Menyikapi hal ini, Prabowo-Gibran menghadirkan visi **Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**, yang diwujudkan melalui 8 Misi Utama atau Asta Cita, 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), 17 Program Prioritas, serta Program Kerja lainnya.

Menyambut periode kepemimpinan baru, *Indonesian Business Council* (IBC) telah menyusun buku putih berjudul "***15 Rekomendasi Paket Kebijakan untuk Mendukung Agenda Pembangunan Presiden & Wakil Presiden Indonesia 2024 - 2029.***" Dokumen ini memetakan situasi dan tantangan di berbagai bidang serta memberikan usulan rekomendasi paket kebijakan sebagai alat bantu bagi pasangan pemimpin terpilih dalam menjalankan pemerintahan kedepan.

Kami telah mengidentifikasi beberapa tantangan utama yang patut diperhatikan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan. Penting untuk menemukan solusi atas tantangan-tantangan ini demi kelancaran dan kesuksesan pemerintahan baru.

Pertama, Indonesia harus segera lepas landas mengejar kemajuan dengan mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi untuk keluar dari *middle income trap*. Pembangunan Ekonomi diperkirakan terus berlanjut dengan pertumbuhan pada triwulan I 2024 sebesar 5,11% dan proyeksi pertumbuhan sebesar 5,2% pada 2025. Angka ini perlu didorong agar lebih tinggi lagi, sehingga target ambisius mencapai 8% pertumbuhan per tahun dapat dicapai, sebagaimana disampaikan oleh Presiden Terpilih pada tanggal 18 Juli 2024.

Kedua, untuk mendukung agenda pembangunan ekonomi, isu kesehatan dan pendidikan di Indonesia juga menjadi perhatian penting. Presiden Terpilih menekankan pentingnya memperbaiki kualitas hidup masyarakat Indonesia. "Rakyat kita, bukan sumber daya alam kita, adalah sumber daya nomor 1 Indonesia," ujar Prabowo pada Juni 2024. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, remaja Indonesia (5-12 tahun) mengalami sejumlah beban gizi: sekitar 3,5% terlalu kurus, sekitar 7,8% kelebihan berat badan atau obesitas, dan sekitar 16,3 remaja (5-14 tahun) menderita anemia. Selain itu, kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah, tercermin dari penurunan skor PISA 2022 dalam membaca, matematika, dan sains, dengan rata-rata skor yang lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand.

Ketiga, Indonesia perlu meningkatkan produktivitas sektor pangan. Sektor pangan merupakan sektor strategis nasional yang diunggulkan. Dengan potensi lahan yang luas dan kondisi geografis yang mendukung, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan sektor ini. Salah satu contohnya, Indonesia dikenal sebagai produsen *crude palm oil* (CPO) terbesar dunia dengan *output* mencapai 50 juta ton per tahun. Di sisi lain, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat terdapat sekitar 31 juta ha kawasan hutan yang tidak memiliki tutupan hutan yang berpotensi menjadi lahan produktif. Menakar potensi lahan yang besar, kebutuhan pangan yang meningkat, krisis iklim yang kian mengkhawatirkan, dan program peningkatan pangan seperti *Food Estate* yang perlu digalakkan, Indonesia harus bergerak cepat

untuk menjawab tantangan-tantangan terkait pangan.

Keempat, Indonesia juga perlu mempercepat peningkatan implementasi *biofuel* untuk mendukung agenda swasembada energi. Dengan potensi agroindustri dan luasnya lahan yang tersedia, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan pengembangan produk-produk bioenergi, khususnya *biofuel.* Sayangnya, Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan dalam pengembangan bahan baku *biofuel,* diantaranya dalam hal produktivitas sawit, legalitas lahan, dan akses pembiayaan untuk petani.

Kelima, birokrasi dan tata kelola keuangan yang kurang efektif mempengaruhi iklim kemudahan berusaha di Indonesia. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, diperlukan peningkatan investasi yang signifikan. Perbaikan iklim investasi dan usaha harus menjadi prioritas utama. Dari sisi birokrasi, salah satu pemicunya adalah proses perizinan yang kompleks dan tidak terintegrasi. Berdasarkan Laporan pemerintah Amerika Serikat tentang *"2024 Investment Climate Statements: Indonesia"* menggarisbawahi adanya sejumlah kendala dalam investasi di Indonesia, termasuk inefisiensi birokrasi, kesulitan dalam memperoleh izin, dan lemahnya penegakan kontrak dalam proses berinvestasi di Indonesia.

Selain iklim investasi yang kurang kompetitif, mekanisme penganggaran pemerintah saat ini dinilai kaku dan lebih berorientasi lebih pada pengeluaran *(spending)* dari pada hasil *(outcome)*. Akibatnya, keberhasilan anggaran cenderung diukur dari sejauh mana anggaran dapat dihabiskan, bukan pada seberapa *outcome* dapat dicapai secara efektif dan efisien. Hal ini menghambat kreativitas dan inovasi pada instansi negara dalam memanfaatkan anggaran secara lebih efektif dan produktif.

Keenam, Indonesia perlu menggalakkan pasar karbon sebagai agenda strategis nasional. Indonesia adalah negara dengan emisi karbon terbesar ke-6 di dunia (1,2 $GtCO_2eq$ di tahun 2022) dengan kontribusi sebesar 2,31% dari total emisi global pada tahun 2022. Di lain sisi, Indonesia memiliki 80% area penyerap karbon dunia, dengan potensi ekonomi hingga Rp8000 triliun. Meskipun sejumlah kebijakan telah diterapkan untuk memperkenalkan pasar karbon, optimalisasinya masih terkendala oleh regulasi dan *roadmap* yang belum memadai serta infrastruktur yang terbatas.

Dalam menyusun Visi, Asta Cita, dan program kerja periode 2024-2029, Prabowo-Gibran melihat beberapa tantangan strategis yang dihadapi demi mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. IBC, yang mempunyai semangat yang sama, melihat bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, IBC merumuskan 15 rekomendasi paket kebijakan berdasarkan kerangka acuan pengelolaan bangsa untuk Indonesia yang Berdaya Saing dan Sejahtera. Kerangka acuan ini terdiri dari 4 pilar utama: Ekonomi, Sumber Daya Manusia, Tata Kelola Negara, dan Inovasi.

15 rekomendasi paket kebijakan ini dirumuskan secara lebih spesifik melalui 15 bidang atau fokus area. Fokus area tersebut mencakup isu-isu berikut:

1. Hilirisasi SDA dan Maritim
2. Food Estate dan Penguatan Kemitraan Sektor Pertanian
3. Program Makan Bergizi Gratis
4. B50-B100, E10, dan Bioavtur
5. Sekolah Unggulan dan Guru Yang Berkualitas
6. Penyediaan Fasilitas Rumah Sakit Lengkap
7. Program 3 juta rumah
8. Digitalisasi Birokrasi
9. Sistem Logistik Nasional
10. BUMN Indonesia Incorporated & Integrasi Kebijakan Terpadu
11. Inovasi Produk Keuangan, Perluasan Pembiayaan untuk UMKM, Suku Bunga Rendah & Pembaharuan Kebijakan Fiskal-Makroekonomi
12. Pasar Karbon
13. 2 juta mobil listrik dan 13 juta motor listrik
14. Produksi Teknologi Maju dan Tepat Guna
15. Ekonomi kreatif & Industri Jasa

Rekomendasi paket kebijakan untuk masing-masing fokus area disusun secara modular, sehingga memungkinkan pembaca untuk memilih bagian-bagian yang paling relevan dengan minat dan bidangnya masing-masing, secara independen. Berikut adalah beberapa *highlight* rekomendasi kebijakan, antara lain:

1. Merealisasikan potensi penambahan 6-9 juta hektare lahan pertanian baru

Sebagai negara dengan potensi pertanian yang besar, Indonesia memiliki luas lahan pangan per kapita yang relatif rendah, bahkan lebih kecil dibandingkan dengan Vietnam dan Thailand. Dengan mengoptimalkan pengelolaan tata ruang secara *fit for purpose,* Indonesia memiliki potensi besar untuk memperluas lahan pertanian. Hal

ini pada gilirannya dapat mendukung ketahanan pangan nasional.

Rekomendasi:
- Penyatuan pengelolaan tata ruang dan tenurial dalam satu institusi dan menerapkan tata ruang *fit for purpose*.
- Memfokuskan tugas institusi kehutanan pada pengelolaan hutan dan kewenangan yang terkait lainnya tanpa mengatur masalah tata ruang atau tenurial.

2. Melakukan terobosan dalam eksekusi pembangunan menggunakan APBN

Pemerintah Indonesia memiliki dua mekanisme perencanaan pembangunan dan penganggaran yang terpisah: UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU KN) yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) yang dilaksanakan oleh Bappenas. Regulasi yang berbeda dan tanggung jawab yang terpisah antara perencanaan dan penganggaran menyebabkan ketidakselarasan antara perencanaan dan penganggaran.

Rekomendasi:
- Revisi UU KN dan UU SPPN menggunakan pendekatan "*money follows program*" bukan "*money follows function*."

3. Meningkatkan ketahanan energi menggunakan biodiesel

Pemerintahan Prabowo-Gibran menargetkan realisasi implementasi B50-B100, namun target ini tampaknya akan sulit dicapai. Pada tahun 2023, produktivitas sawit nasional baru mencapai sekitar 50 juta ton CPO, dan proyeksi ke depan menunjukkan pertumbuhan yang stagnan atau tidak signifikan. Sedangkan, untuk mencapai implementasi B50, diperlukan sekitar 70 juta ton CPO. Salah satu penyebabnya adalah lambatnya progres peremajaan sawit yang baru mencapai 45% dari target tahap 1. Hal ini dapat berdampak pada penurunan produktivitas bahan mentah biodiesel dan juga memicu persaingan antara pasokan CPO untuk energi dan makanan. Untuk itu, perlu pendekatan baru untuk meningkatkan produktivitas sawit.

Rekomendasi:
- Meningkatkan produksi sawit dengan menyukseskan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
- Konversi lahan pertanian komoditas non unggulan sebagian menjadi lahan perkebunan sawit dan atau relaksasi moratorium.

4. Mempercepat realisasi potensi ekonomi dari pengelolaan karbon senilai Rp8000 triliun

Pasar karbon Indonesia berpotensi menghasilkan pendapatan yang besar, yaitu Rp3000 - 8000 triliun. Potensi ini bisa terealisasi jika ada iklim dan atau ekosistem yang kondusif untuk perkembangan pasar karbon, meliputi roadmap yang jelas, regulasi yang mendukung, dan infrastruktur yang memadai.

Rekomendasi:
- Pengembangan pasar karbon sebagai prioritas strategis nasional
- Pembentukan *Indonesia Carbon Market Alliance* untuk memajukan pasar karbon Indonesia bersama para stakeholder

5. Memastikan agenda Prioritas Presiden-Wakil Presiden Terpilih terealisasi

Peran Menteri Koordinator (Menko) saat ini terbagi dengan masing-masing Menko bertanggung jawab atas bidang tertentu, namun keterlibatan dalam mengintegrasikan kebijakan lintas sektor masih terbatas. Ditambah lagi, *silo mentality* yang terbentuk di berbagai K/L menghambat koordinasi dan implementasi kebijakan.

Rekomendasi:
- Penyesuaian peran Menteri Koordinator sebagai Sistem Integrator (PMO Nasional) yang bertanggung jawab atas pengelolaan program lintas sektor dan memastikan agenda prioritas terealisasi.

Melalui buku putih 15 paket rekomendasi ini, IBC mengambil inisiatif untuk menjembatani dialog antara pemerintahan Prabowo-Gibran dan komunitas bisnis. Inisiatif ini diambil guna memperkuat komunikasi dan kolaborasi kedua pihak, sehingga tercipta sinergi yang kuat dalam menghadapi peluang dan tantangan di masa depan. Tujuan utamanya adalah mewujudkan Indonesia yang berdaya saing, dengan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan ***"15 Rekomendasi Paket Kebijakan untuk Mendukung Agenda Pembangunan Presiden & Wakil Presiden Indonesia 2024 - 2029"***.

Buku putih ini disiapkan oleh IBC bekerjasama dengan Katadata Insight Center, dengan masukan pemikiran dan umpan balik yang sangat berharga dari berbagai pihak, termasuk *members* IBC, para ahli dan praktisi terkemuka di bidangnya masing-masing, serta dari Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran yang dipimpin oleh Bapak Dr. Burhanuddin Abdullah. Masukan tersebut kami dapatkan melalui diskusi individual untuk topik-topik tertentu, maupun melalui rangkaian lokakarya mingguan yang diselenggarakan di kawasan Hang Tuah, Jakarta Selatan antara tanggal 8 Juli sampai 6 Agustus 2024.

Pendahuluan

Latar Belakang

Terpilihnya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024-2029 membawa Indonesia pada momentum yang menjanjikan untuk semakin mewujudkan tujuan bernegara. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, tujuan tersebut adalah "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."

Untuk mencapai tujuan bangsa tersebut, pemerintahan Prabowo-Gibran perlu melibatkan seluruh pihak, termasuk dunia bisnis. Selain memberikan perspektif baru, dunia bisnis membuka akses pada sumber daya yang lebih luas, demi mewujudkan Indonesia yang berdaya saing tinggi dan makmur. IBC ingin menjembatani kerja sama yang lebih erat antara pemerintah dengan dunia bisnis, khususnya dalam mengidentifikasi permasalahan utama yang perlu diselesaikan dan peluang kunci yang perlu dimanfaatkan. Melalui penelitian dan rekomendasi kebijakan, IBC mendukung terwujudnya kebijakan publik yang lebih baik untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju.

Tantangan Bangsa ke Depan

Di tengah lanskap geopolitik dan ekonomi global yang dinamis dan penuh tantangan, kepemimpinan yang kuat dan mandiri menjadi kunci bagi kemajuan Indonesia. IBC telah mengidentifikasi sejumlah tantangan global dan nasional bagi pemerintahan Prabowo-Gibran selama masa jabatannya. Mengatasi tantangan ini melalui kebijakan yang tepat akan menentukan keberhasilan pemerintahan baru dalam merealisasikan program pembangunan yang mensejahterakan, inklusif, dan berkelanjutan.

Isu Strategis Global

Pada skala global, berbagai negara di dunia menghadapi tantangan perubahan iklim, disrupsi teknologi, ketegangan geopolitik, dan perlambatan ekonomi global.

Pertama, perubahan iklim dan disrupsi teknologi menimbulkan risiko sistemik bagi perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Pemanasan global yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca telah memicu berbagai kerugian seperti kenaikan muka air laut, meningkatnya kejadian cuaca yang ekstrim, dan bencana alam. Akibatnya terjadi perubahan pada pola permintaan pasar dunia: semakin banyak konsumen dan standar perdagangan yang menuntut produk, layanan, dan proses produksi yang rendah karbon. Sementara itu, perkembangan teknologi digital dan *artificial intelligence* kian memacu perusahaan untuk melakukan otomatisasi dan efisiensi tenaga kerja, meningkatkan angka pengangguran.

Kedua, ketidakstabilan geopolitik dunia mengganggu rantai nilai global dan meningkatkan proteksionisme. Konflik Rusia-Ukraina mengguncang stabilitas rantai nilai global di semua sektor, terutama untuk pangan dan energi. Banyak negara bergantung pada Rusia dan Ukraina untuk gandum dan pupuk sehingga perang tersebut menyebabkan lonjakan harga pangan di pasar global. Selain itu, meningkatnya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Asia serta munculnya perang antara Israel dan Hamas di Timur Tengah semakin memperumit situasi. Beberapa negara semakin proteksionis dan meningkatkan tarif, sehingga menurunkan volume perdagangan.

Ketiga, perlambatan pertumbuhan ekonomi global dapat berdampak langsung pada perekonomian Indonesia. Dunia yang baru saja keluar dari pandemi COVID-19 harus langsung menghadapi berbagai konflik geopolitik. Menurunnya permintaan secara global berdampak pada penurunan ekspor

dan investasi. Sementara, kenaikan suku bunga acuan di negara-negara maju memberikan tekanan yang signifikan terhadap nilai tukar Rupiah. Kondisi ini berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi domestik dan meningkatkan ketidakpastian bagi pelaku usaha.

Isu Strategis Nasional

Pada skala nasional, Indonesia harus bergerak cepat mengatasi isu dan tantangan strategis untuk mencapai target Indonesia Emas 2045.

Pertama, Indonesia Indonesia harus segera lepas landas mengejar kemajuan dengan mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi untuk keluar dari *middle income trap*. Pembangunan Ekonomi diperkirakan terus berlanjut dengan pertumbuhan pada triwulan I 2024 sebesar 5,11%[1] dan proyeksi pertumbuhan sebesar 5,2%[2] pada 2025. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi, bahkan mencapai 8% per tahun sebagaimana disampaikan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto, diperlukan sinergi yang solid antara kebijakan makro dan sektoral, sebagaimana ditekankan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.[3]

Kedua, untuk mendukung pembangunan ekonomi, isu kesehatan dan pendidikan di Indonesia menjadi perhatian penting. Tantangan di bidang gizi dan kemampuan membaca, matematika, dan sains masih besar. Presiden Terpilih Prabowo Subianto menekankan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur dasar akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, "Jika kita perbaiki gizi, dan perbaiki kualitas hidup masyarakat Indonesia dengan peningkatan protein dan listrik saja, maka sudah secara signifikan akan meningkatkan konsumsi rumah tangga - dan PDB Indonesia" di buku "*Strategi Transformasi Bangsa*" tahun 2024.

Ketiga, Indonesia perlu meningkatkan produktivitas sektor pangan. Sektor pangan memiliki potensi besar di Indonesia, didukung oleh iklim tropis serta ketersediaan lahan yang luas. Sebagai contoh, Indonesia dikenal sebagai produsen terbesar dunia untuk *CPO* dengan *output* 50 juta ton.[4] Di sisi lain, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat terdapat sekitar 31 juta ha kawasan hutan yang tidak memiliki tutupan hutan yang berpotensi menjadi lahan produktif. Menakar potensi lahan yang besar, kebutuhan pangan yang meningkat, krisis iklim yang kian mengkhawatirkan, dan program peningkatan pangan seperti *Food Estate* yang perlu digalakkan, Indonesia harus bergerak cepat untuk menjawab tantangan-tantangan terkait pangan.

Keempat, Indonesia juga perlu mempercepat implementasi biofuel untuk mendukung agenda swasembada energi. Dengan potensi lahan yang luas dan iklim yang tepat, Indonesia berpeluang besar mengembangkan agroindustri dan produk-produk bioenergi, khususnya biofuel. Pengembangan biofuel tidak hanya penting untuk ketahanan energi nasional, tetapi juga untuk meningkatkan daya saing Indonesia di pasar internasional. Sayangnya, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pengembangan bahan baku biofuel, khususnya untuk biodiesel, seperti rendahnya produktivitas sawit, tantangan legalitas lahan, dan perlunya akses pembiayaan untuk petani sawit.

Kelima, birokrasi dan tata kelola keuangan yang kurang efektif mempengaruhi iklim usaha di Indonesia. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, perlu ada peningkatan investasi yang signifikan, dengan prioritas utama pada perbaikan iklim investasi dan usaha. Dari sisi birokrasi, salah satu penghambatnya adalah proses perizinan yang rumit dan tidak terintegrasi. Laporan pemerintah Amerika Serikat tentang "*2024 Investment Climate Statements: Indonesia*" menggarisbawahi adanya sejumlah kendala dalam investasi di Indonesia, termasuk inefisiensi birokrasi, kesulitan dalam memperoleh izin, dan lemahnya penegakan kontrak dalam proses berinvestasi di Indonesia.

Selain iklim investasi yang kurang kompetitif, mekanisme penganggaran pemerintah saat ini dinilai kaku dan lebih berorientasi pada pengeluaran daripada hasil. Akibatnya, keberhasilan anggaran lebih sering diukur dari seberapa banyak yang dihabiskan, bukan dari efektivitas dan efisiensi hasil yang dicapai, sehingga menghambat kreativitas dan inovasi instansi negara dalam memanfaatkan anggaran secara lebih efektif dan produktif.

Keenam, Indonesia perlu menggalakkan pasar karbon sebagai agenda strategis nasional. Indonesia menghasilkan emisi karbon terbesar ke-6 di dunia (1,2 $GtCO_2eq$ di tahun 2022), setara dengan 2,31% dari total emisi global di tahun yang sama.[5] Di lain

sisi, Indonesia memiliki 80% area penyerap karbon dunia, setara dengan potensi ekonomi hingga Rp8.000 triliun. Dalam jangka panjang, pasar karbon dapat menjadi katalisator bagi transformasi ekonomi Indonesia menuju ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan. Melalui sejumlah kebijakan, Indonesia telah memperkenalkan perdagangan karbon, namun optimalisasi pasar karbon masih terhambat antara lain oleh regulasi dan roadmap yang belum memadai serta infrastruktur yang terbatas.

Dengan menavigasi berbagai tantangan global dan nasional di atas, diharapkan Indonesia dapat *on-track* merealisasi pencapaian target Indonesia Emas 2045.

Kerangka Acuan Pengelolaan Bangsa untuk Indonesia yang Berdaya Saing dan Sejahtera

IBC telah merumuskan kerangka acuan sebagai pedoman strategis untuk mendukung pencapaian visi-misi Pemerintahan Prabowo-Gibran, serta mengatasi isu strategis global dan nasional, sebagaimana disampaikan di atas. Kerangka tersebut, terdiri dari 4 pilar, yaitu: Pilar Ekonomi untuk membangun ekonomi yang diperkuat (*strengthened economy*), Pilar Sumber Daya Manusia untuk menciptakan masyarakat yang berdaya (*empowered citizens*), Pilar Tata Kelola Negara untuk menciptakan institusi yang ter-oskrestasi (*orchestrated institution*), dan Pilar Inovasi untuk mendorong inovasi yang termajukan (*advanced innovations*). Masing-masing pilar akan dijelaskan di bawah.

1. Strengthened Economy (Ekonomi yang Diperkuat)

Pilar ini memadukan tiga strategi pembangunan ekonomi Indonesia, yaitu mengatasi hambatan saat ini (*tackled obstacles*), memanfaatkan peluang masa depan (*leveraged opportunities*), dan meningkatkan ketahanan ekonomi (*enhanced resilience*) terhadap dinamika global. Diharapkan pilar ini dapat menciptakan sinergi antar-aspek, dan menjamin pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kebutuhan akan strategi ini berakar pada pemahaman bahwa kemajuan ekonomi memerlukan fondasi yang kuat, adaptasi yang cerdas, dan kondisi yang tangguh terhadap perubahan global.

2. *Empowered Citizens* (Masyarakat yang Berdaya)

Pilar ini mengedepankan pentingnya penduduk yang produktif (*productive population*), tidak terpecah belah dengan dasar apapun (*cohesive unity*), serta dapat bergotong royong dalam memajukan Indonesia (*collective cooperation*). Diharapkan pilar ini dapat menjadi dasar untuk memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan, memperluas akses ke layanan kesehatan yang terjangkau, dan mengembangkan sistem jaminan sosial yang inklusif, berkelanjutan, dan adaptif. Ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga menciptakan masyarakat yang produktif dan berkontribusi pada pembangunan nasional.

3. Orchestrated Institution (Institusi yang Terorkestrasi)

Pilar ini menitikberatkan pada institusi pemerintah yang secara tunggal dapat menghasilkan output yang berkualitas (*solid delivery*), secara kolektif harmonis dan saling mendukung (*synchronized structure*), dan memiliki tata kelola yang baik dan kuat (*sound governance*). Untuk memastikan rangkaian kebijakan dan program yang disusun pemerintah dapat terimplementasi, Presiden dan Wakil Presiden terpilih memerlukan dukungan dari seluruh komponen pemerintahan yang berfungsi dengan baik. Keberhasilan implementasi dari visi-misi pemerintahan mendatang akan sangat bergantung pada institusi pemerintahan yang mampu mengimplementasikan program pembangunan dengan baik.

4. Advanced Innovation (Inovasi yang Termajukan)

Pilar ini berbasis pada semangat untuk menerapkan dan mengembangkan teknologi tinggi (*advanced technologies*), mengembangkan produk-produk yang inovatif dan unggul (*innovative products*), serta mentransformasikan pondasi ekonomi Indonesia dengan prinsip-prinsip dasar yang lebih maju (*transformative building blocks*). Hal-hal ini secara sinergis akan menjadi *enabler* untuk menjadikan Indonesia sebagai negara dengan daya saing dan tingkat produktivitas yang tinggi, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan dan membawa Indonesia menjadi negara maju.

Proses Penyusunan dan Kerangka Buku Putih IBC

Untuk menyongsong era kepemimpinan baru, IBC merumuskan buku putih berjudul *"15 Rekomendasi Kebijakan Strategis untuk Mendukung Agenda Pembangunan Presiden & Wakil Presiden Indonesia 2024 - 2029."* IBC percaya bahwa pencapaian tujuan-tujuan strategis nasional akan dapat dicapai melalui kolaborasi erat antara pemerintah dan berbagai pihak, termasuk sektor swasta. Melalui buku putih ini, IBC menyajikan gagasan serta rekomendasi kebijakan berlandaskan analisis mendalam terhadap isu-isu faktual yang dihadapi bangsa.

Buku Putih ini merupakan kontribusi IBC untuk pemerintah selanjutnya yang berbasis pada penelitian dan diskusi kebijakan yang mendalam. Proses penyiapan buku putih mencakup analisis data, kebijakan, dan review hasil-hasil penelitian sebelumnya, penggalangan masukan dari *members* IBC, diskusi mendalam dengan para praktisi dan akademisi terkemuka, serta rangkaian *focus group discussion* tematik dengan Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran yang dilakukan pada bulan Juli-Agustus 2024.

Melalui rangkaian proses tersebut, IBC memetakan berbagai isu dan rekomendasi kebijakan yang diperlukan, yang kemudian disaring lagi dan dipaparkan di dokumen ini. Prioritas diberikan pada rekomendasi yang yang memenuhi kebutuhan dasar seluruh warga; memperkuat pembangunan kualitas manusia; meningkatkan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi; mengembangkan infrastruktur berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi dan transisi energi; pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; mempercepat penanganan perubahan iklim; serta memperkuat kelembagaan.

Prioritas kebijakan ini dirumuskan secara lebih spesifik melalui rekomendasi untuk 15 bidang atau fokus area. Fokus area tersebut mencakup isu-isu berikut, yang akan disampaikan secara lebih detail di bagian selanjutnya dari buku putih ini:

1. Hilirisasi SDA dan Maritim
2. *Food Estate* dan Penguatan Kemitraan Sektor Pertanian
3. Program Makan Bergizi Gratis
4. B50-B100, E10, dan Bioavtur
5. Sekolah Unggulan dan Guru Yang Berkualitas
6. Penyediaan Fasilitas Rumah Sakit Lengkap
7. Program 3 juta rumah
8. Digitalisasi Birokrasi
9. Sistem Logistik Nasional
10. BUMN Indonesia *Incorporated* & Integrasi Kebijakan Terpadu
11. Inovasi Produk Keuangan, Perluasan Pembiayaan untuk UMKM, Suku Bunga Rendah & Pembaharuan Kebijakan Fiskal-Makroekonomi
12. Pasar Karbon
13. 2 Juta Mobil Listrik dan 13 Juta Motor Listrik
14. Produksi Teknologi Maju dan Tepat Guna
15. Ekonomi kreatif & Industri Jasa

Rekomendasi paket kebijakan untuk masing-masing fokus area disusun secara modular, sehingga memungkinkan pembaca untuk memilih bagian-bagian yang paling relevan dengan minat dan bidangnya masing-masing, secara independen.

Besar harapan kami, buku putih ini dapat menjadi sumber informasi dan panduan kebijakan bagi pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih beserta timnya dalam menyusun dan menerapkan kebijakan-kebijakan untuk mencapai Indonesia Maju. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kami berharap Indonesia dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional, meningkatkan kesejahteraan untuk semua rakyat Indonesia, dan meraih prestasi yang lebih tinggi di kancah global.

Referensi

1. Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). *BPS: Statistik Terbaru Tentang Ekonomi Indonesia*. Diakses pada 30 Juni 2024, dari https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/05/06/2380.
2. Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2024). *RAPBN 2025: Pertumbuhan Ekonomi Diperkirakan Sebesar 5,2%*. Diakses pada 25 Juni 2024, dari https://setneg.go.id/baca/index/rapbn_2025_pertumbuhan_ekonomi_diperkirakan_sebesar_52.
3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS. (2023). *Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029*. Diakses pada 26 Juni 2024, dari https://rpjmn.bappenas.go.id/.
4. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). (2024). *Kinerja Industri Minyak Sawit Tahun 2023 & Prospek Tahun 2024*. Diakses pada 27 Juni 2024, dari https://gapki.id/news/2024/02/27/kinerja-industri-minyak-sawit-tahun-2023-prospek-tahun-2024.
5. European Union. (2023). *GHG Emissions of All World Countries*. Diakses pada 29 Juni 2024, dari https://edgar.jrc.ec.europa.eu/report_2023.

"15 Rekomendasi Paket Kebijakan untuk Mendukung Agenda Pembangunan Presiden & Wakil Presiden Indonesia 2024 - 2029"

Fokus Area 1

Hilirisasi SDA dan Maritim:
Membangkitkan Industrialisasi Nasional

1

IBC
Indonesian Business Council

Sumber Gambar: freepik

Hilirisasi SDA dan Maritim: Membangkitkan Industrialisasi Nasional

Misi Asta Cita 2 Prabowo-Gibran

Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Program Prioritas No. 1 Prabowo-Gibran

Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi

Stakeholders: *Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves); Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian); Kementerian Keuangan (Kemenkeu); Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM); Kementerian Perindustrian (Kemenperin); Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker); Kementerian Perdagangan (Kemendag); Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP); Kementerian Pertanian (Kementan); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek); Kementerian Luar Negeri (Kemenlu); Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).*

> *Jadi, kalau sumber alam kita dalam bentuk mentah, itu berarti hulu. Kita tidak mau izinkan dijual murah, dalam bentuk mentah lagi. Harus diolah, diolah, diolah sampai pabrik-pabrik hilirnya ada di bumi Indonesia.*
> ***Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia Periode 2024 - 2029***

Percepatan Revitalisasi Industri Manufaktur Indonesia

Pertumbuhan ekonomi Indonesia belum berhasil kembali ke tingkat yang dicapai sebelum masa reformasi. Rata-rata pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per tahun antara 1990-1997 adalah 6,9%, tapi antara 2001-2019 hanya 5,3%. Tanpa pertumbuhan ekonomi 6-7% per tahun, Indonesia berisiko terjebak menjadi negara berpenghasilan menengah.[1] Menurut ekonom senior Faisal Basri, kegagalan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi disebabkan penurunan daya saing manufaktur.[2]

Gambar 1.1 Pertumbuhan PDB Indonesia Belum Kembali ke Level Pra-1997/98

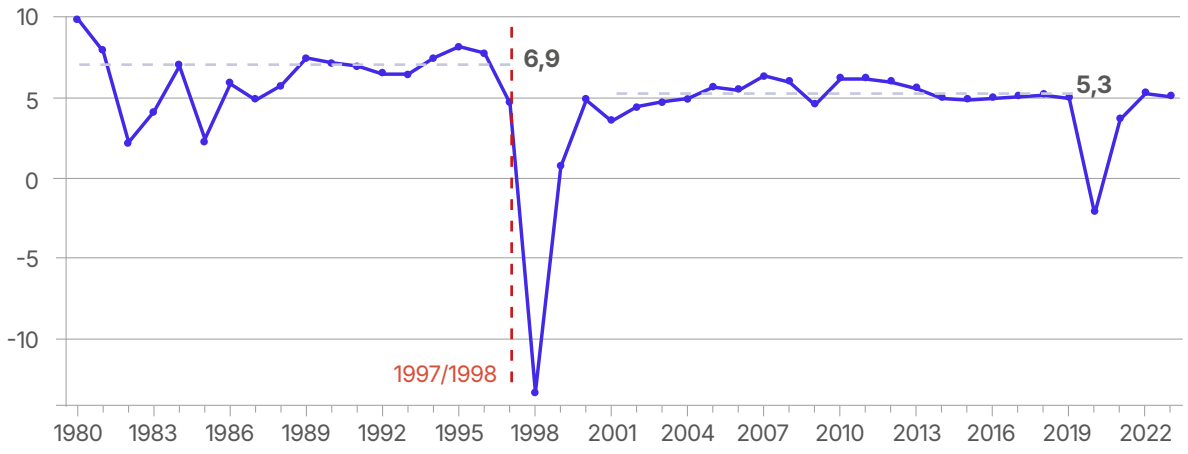

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2023

Sejak awal dekade 2000-an, kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB Indonesia terus menurun dari 28,3% (2003) ke 18,3% (2022).[3] Secara absolut, sektor manufaktur Indonesia masih tumbuh antara 2014-2022, dengan laju pertumbuhan rata-rata 3,4% per tahun. Namun sektor-sektor lain tumbuh lebih pesat (misalnya, untuk periode yang sama, pertumbuhan rata-rata sektor informasi dan komunikasi 8,9% per tahun, sektor transportasi dan pergudangan 5,72% per tahun).[4] Tren penurunan kontribusi manufaktur terhadap PDB juga dialami oleh banyak negara lain, tapi Indonesia lebih dalam penurunannya dibanding Malaysia, Thailand, China dan Korea Selatan. Saat kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB negara-negara tersebut masih di atas 23%, Indonesia lebih rendah di angka 18,3%.

Gambar 1.2 Kontribusi Sektor Manufaktur Indonesia Terhadap PDB di Bawah Negara-Negara Asia

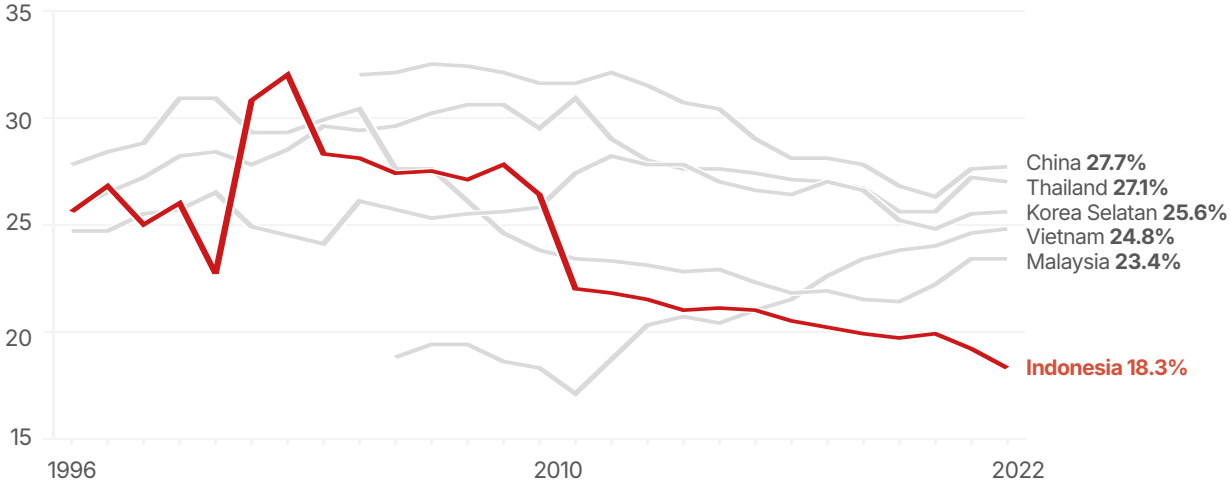

Sumber: *World Development Indicator, World Bank* 2024

Perlambatan pertumbuhan industri di Indonesia disebabkan oleh tiga hal: peningkatan kapasitas industri global, fenomena *Dutch Disease*, dan biaya produksi tinggi.

- Terkait kapasitas industri global, Bambang Prijambodo, Ekonom Kantor Staf Presiden, menyoroti meningkatnya persaingan global terutama setelah Tiongkok sukses memperkuat industrinya dan bergabung dengan *World Trade Organization* (WTO) pada 2001.[5]
- Terkait *Dutch Disease*, tingginya harga komoditas SDA di pasar internasional memancing Indonesia untuk memprioritaskan ekstraksi dan ekspor SDA berbentuk mentah, dengan risiko mengorbankan pengembangan industri dalam negeri.
- Terkait tingginya biaya produksi, faktor utamanya biaya logistik tinggi, infrastruktur belum memadai, upah pekerja mahal, dan birokrasi tidak efisien.[6]

Untuk merevitalisasi industri pengolahan, Visi Indonesia 2045 menargetkan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB di atas 25% pada 2030.[7] Strategi untuk mensukseskan revitalisasi industri, sebagaimana tertuang di studi ADB-Bappenas, mencakup: (1) pengembangan sektor manufaktur bernilai tambah tinggi (2) peningkatan produktivitas melalui adopsi teknologi baru & efisiensi proses produksi, (3) diversifikasi produk manufaktur, (4) pembentukan jaringan kuat antara perusahaan besar domestik dan perusahaan kecil menengah, serta koneksi dengan pasar internasional.[8]

Transformasi SDA Menjadi Nilai Tambah, Meningkatkan Lapangan Kerja dan Daya Saing

Indonesia harus memanfaatkan SDA yang melimpah untuk memacu sektor manufaktur. Ketersediaan mineral, logam, hasil hutan dan pertanian dapat menjadi tulang punggung pengembangan industri nasional. Indonesia dikenal sebagai produsen terbesar dunia untuk *Crude Palm Oil* (CPO) dengan *output* 47 juta ton, dan untuk nikel dengan produksi 1,8 juta ton, pada 2023-2024. Indonesia juga memiliki cadangan besar untuk tembaga, batu bara, bauksit, aluminium, serta mineral kritis seperti Zircon dan Monazite.[9]

Kini, Indonesia fokus pada hilirisasi untuk mengolah SDA menjadi produk bernilai tambah tinggi. Terdapat delapan sektor prioritas, yakni mineral dan batubara, migas, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan, yang dipilih berdasarkan potensi dampaknya terhadap peningkatan PDB.[10]

Gambar 1.3. Fondasi Solid Ekonomi Indonesia

Sumber: Paparan Presiden Terpilih, Prabowo Subianto, dalam Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045.[11]

Perkembangan Kebijakan Hilirisasi di Indonesia.
Kebijakan hilirisasi industri dan minerba di Indonesia didasari oleh dua Undang-Undang:

1. UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Pemerintah dapat melarang atau membatasi ekspor sumber daya alam untuk mendorong pengembangan industri pengolahan di dalam negeri).
2. UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Pemerintah dapat menetapkan jumlah produksi, penjualan, dan harga minerba demi pengutamaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri).

Selain itu, juga ada sejumlah UU dan peraturan yang mendukung hilirisasi di sektor-sektor lain (seperti perkebunan, pertanian dan perikanan), seperti:

1. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan (mengatur berbagai aspek terkait pangan, termasuk sawit, kelapa, dan tebu untuk biofuel).
2. UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (memastikan keberlanjutan produksi pangan dan melindungi dari konversi lahan yang merugikan).
3. UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (mengatur hilirisasi hasil perkebunan).
4. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (mengatur pengelolaan hutan, SDA, dan hilirisasi hasil hutan).

UU No. 3 Tahun 2020 berhasil menciptakan surplus neraca perdagangan, dengan pencapaian signifikan di ekspor nikel dan turunannya. Berkat kebijakan ini, ekspor nikel yang di tahun 2019 hanya US$3 miliar, naik menjadi US$20 miliar (2021) dan US$33 miliar (2023).[12] Peningkatan juga terjadi setelah larangan ekspor nikel mentah pada 1 Januari 2020. Keberhasilan ini menunjukkan dampak positif dari hilirisasi industri pertambangan dalam meningkatkan nilai tambah ekspor mineral Indonesia.

Kebijakan Hilirisasi berhasil meningkatkan investasi dan memperluas lapangan kerja. Setelah penghentian ekspor *nickel ore* pada 2020, investasi untuk hilirisasi nikel meningkat sehingga kini terdapat 43 pabrik pengolahan nikel di seluruh Indonesia.[13] Berkat pengembangan kawasan industri nikel, provinsi Maluku Utara dan Sulawesi Tengah mencatat laju pertumbuhan PDRB sebesar dua digit, dengan Maluku Utara mengalami pertumbuhan tertinggi (22,9%) se-Indonesia.[14] Di Sulawesi Tengah, pengolahan nikel yang awalnya menyerap 1.800 pekerja, meningkat menjadi 71.500 pekerja setelah hilirisasi.[15]

Sumber Gambar: katadata/Ai

Gambar 1.4. Pencapaian Kebijakan Hilirisasi Pada Era Presiden Joko Widodo

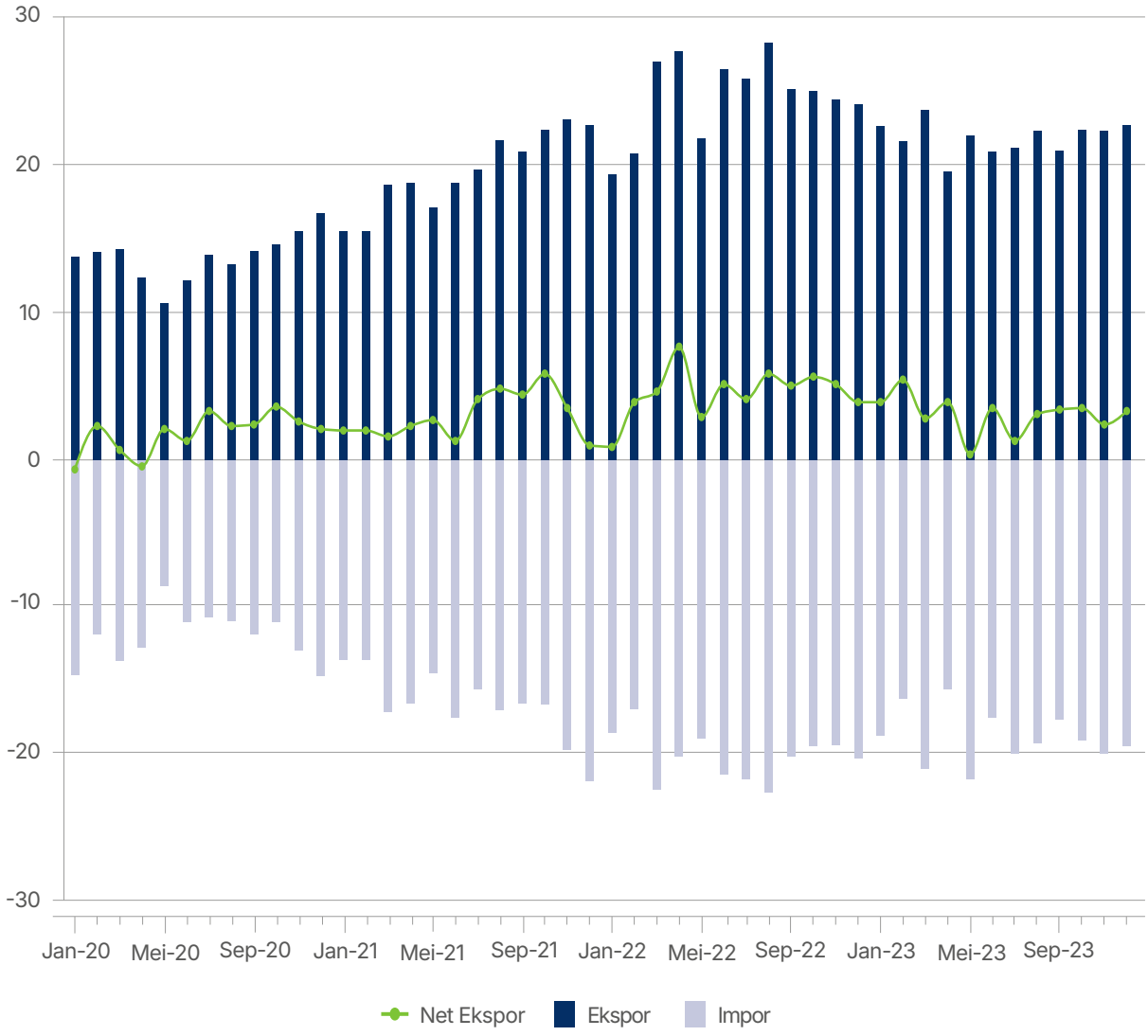

Indikator	Pencapaian 2019	Pencapaian 2020	Pencapaian 2021
Ekspor nikel dan turunannya	US$3 miliar	US$20 miliar	US$33 miliar
Ekspor bauksit dan turunannya	US$467 juta	US$628 juta	US$623 juta
Ekspor sawit dan turunannya	US$20 miliar	US$35 miliar	US$39 miliar

- Pemerintah Indonesia melarang ekspor nikel mentah sejak 1 Januari 2020.
- Pemerintah Indonesia melarang ekspor bauksit mentah sejak 10 Juni 2023.

Sumber: BPS

Problematika Hilirisasi Industri di Indonesia: Dari SDM Hingga Tekanan Eksternal

Meskipun memberikan dampak nyata, program kebijakan hilirisasi masih menghadapi beberapa tantangan. Kemenperin mengidentifikasi 4 tantangan utama, yakni: kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) dan teknologi yang berkualitas, iklim investasi kurang kondusif, perluasan kerja sama internasional, dan tekanan eksternal.[16] [17]

Kompetensi SDM Indonesia untuk hilirisasi belum memadai,[18] sementara hilirisasi sendiri semakin padat modal. Kemenperin menyelenggarakan program pelatihan bagi 250 ribu orang sepanjang 2014-2022, namun kebutuhan industri jauh lebih besar: 682.000 pekerja per tahun.[19] Di sisi lain, hilirisasi SDA cenderung semakin padat modal. Menurut Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, investasi sebesar Rp 1 triliun pada 2013 menyerap 4.954 pekerja, lalu turun ke 1.438 orang (2019) dan 1.340 orang (2022).[20] *Upskilling*, khususnya bagi yang berketerampilan rendah, perlu menjadi prioritas agar pekerja Indonesia tidak terpuruk dalam industri padat karya yang kian berkurang.

Keterbatasan Indonesia dalam adopsi teknologi juga menghambat upaya hilirisasi. Survei ADB menunjukkan, kebanyakan perusahaan manufaktur di Indonesia (64%) baru mengadopsi teknologi dasar dalam operasinya, sedangkan 30% telah mengadopsi teknologi pada tingkat menengah, dan hanya 6% yang menggunakan teknologi terbaru.[21] Faktor-faktor ini berdampak pada rendahnya produktivitas dan nilai tambah, dan menjadi salah satu penghambat upaya hilirisasi.

Hilirisasi minerba membutuhkan energi yang besar, sedangkan kebutuhan energinya masih dipasok dari impor. Sektor industri menyerap 40% dari total kebutuhan energi nasional, dan salah satu bentuk energi yang dibutuhkan industri adalah migas.[22] Dengan agenda hilirisasi, kebutuhan energi - termasuk dalam bentuk migas - akan bertambah. Masalahnya, 60% kebutuhan BBM nasional masih didapatkan dari impor. Untuk mengurangi impor dan meningkatkan ketahanan energi nasional, produksi migas dalam negeri harus ditingkatkan, antara lain dengan eksplorasi sumber daya migas domestik.

Terakhir, tekanan internasional yang tidak setuju dengan kebijakan hilirisasi Indonesia. Contohnya, larangan Indonesia untuk mengekspor komoditas mentah digugat oleh Uni Eropa di WTO pada Oktober 2022. WTO menyetujui gugatan tersebut dan Indonesia sudah mengajukan banding.[23] Senada dengan Uni Eropa, *International Monetary Fund* (IMF) juga menyampaikan kritiknya terhadap kebijakan hilirisasi Indonesia. Meskipun menghadapi tantangan internasional, pemerintah Indonesia tetap berkomitmen pada kebijakan ini.

Box 1. Memaksimalkan Potensi Non-SDA: Besarnya Peluang Ekonomi dari Pengembangan *Specific Skilled Worker* (SSW)

Indonesia saat ini berada di puncak bonus demografi, dengan populasi usia produktif (15 – 64 tahun) mencapai sekitar 70% dari total penduduk atau sekitar 191 juta jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020.[24] Kondisi ini menghadirkan peluang emas bagi Indonesia untuk mempercepat kemajuan, terutama dalam pembangunan ekonomi. Salah satu cara memanfaatkan peluang tersebut adalah dengan memberdayakan tenaga kerja terampil untuk berkontribusi di pasar kerja global yang sedang banyak membutuhkan pekerja terampil. Misalnya, Jepang dan Jerman yang sedang kekurangan tenaga kerja terampil akibat populasi yang menua, dengan proyeksi defisit masing-masing 7 juta dan 6,44 juta pekerja pada tahun 2030-an.[25,26] Namun, untuk mencapai potensi ini, diperlukan **penguatan ekosistem ketenagakerjaan berstandar internasional** sehingga pekerja migran Indonesia dapat terus menjadi "pahlawan devisa" yang memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional.

4 Rekomendasi Strategis untuk Memperkuat Ekosistem "Pahlawan Devisa" Negara

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan memaksimalkan potensi pekerja migran Indonesia sebagai *specific skilled* worker (SSW), berikut adalah rekomendasi yang dapat diimplementasikan:

1. **Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan:** Menyusun kurikulum berbasis kebutuhan pasar global, mendirikan pusat pelatihan di berbagai daerah, serta mendorong sertifikasi internasional yang diakui untuk meningkatkan daya saing SSW.
2. **Penyederhanaan Administrasi:** Menyediakan layanan terpadu satu atap yang mempermudah pengurusan dokumen dan pelatihan, mempercepat proses administrasi, serta mengurangi hambatan birokrasi bagi pekerja migran.
3. **Perluasan Akses Informasi dan Jaringan:** Mengembangkan portal digital yang menyediakan informasi lengkap dan membangun jaringan profesional bagi SSW, serta memperkuat kemitraan dengan perusahaan internasional untuk memperbaiki aliran informasi dan proses rekrutmen.
4. **Penguatan Diplomasi Ketenagakerjaan:** Memperluas kerja sama bilateral dengan negara tujuan untuk melindungi hak pekerja migran, memperluas peluang kerja, dan meningkatkan promosi citra positif pekerja migran Indonesia di mata dunia.

Dengan menerapkan rekomendasi ini, Indonesia diharapkan dapat membangun ekosistem pekerja migran yang lebih solid dan terintegrasi, sehingga dapat mengoptimalkan potensi "pahlawan devisa" dalam berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Navigasi Indonesia: Gagasan dan Komitment Presiden-Wakil Presiden Republik Indonesia 2024-2029

Pasangan Presiden-Wakil Presiden Terpilih, Prabowo-Gibran dalam deklarasi Pilpres di GBK Senayan pada 25 Oktober 2023, menegaskan komitmennya melanjutkan dan memperkuat hilirisasi di sektor pertambangan, pertanian, dan perikanan. Contohnya, hilirisasi nikel diperluas menuju *superalloy steel* dan EV *battery pack*, bauksit menuju *solar photovoltaic* (PV) dan PV *component*, tembaga menuju kabel dan *electro motor*, timah menuju PVC dan PCB, rumput laut menuju *carrageenan* dan *biostimulant* serta produk agro dan maritim sebagai penunjang kegiatan industrialisasi dan pengembangan ekonomi biru.[27]

Dalam Visi Misi Asta Cita 5 dan 17 Program Prioritas disebutkan soal pengembangan hilirisasi untuk membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru. Untuk mewujudkannya, Prabowo-Gibran akan mengembangkan pembiayaan inovatif guna menarik investasi ke dalam negeri.[28] Khususnya pada Program Prioritas No. 15, program hilirisasi dan industrialisasi akan dilanjutkan dengan berbasis SDA untuk memperluas lapangan kerja dan keadilan ekonomi.

Rekomendasi Paket Kebijakan 1

A	**Memperluas Program Hilirisasi Industri Berbasis SDA**
B	**Memperkuat Iklim Investasi Hulu Migas untuk Mendukung Ketersediaan Sumber Energi Industri**
C	**Meningkatkan Kerja Sama Internasional untuk Penguatan Produksi dan Perluasan Pasar**

Rincian Rekomendasi A: Memperluas Program Hilirisasi Industri Berbasis SDA

I	**Memperluas Insentif Pajak**
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Insentif yang diberikan antara lain *tax holiday* dan *tax allowance*. • Insentif pajak diberikan selektif, khususnya untuk sektor dengan *Internal Rate of Return* (IRR) berkategori rendah.[29] o Contoh Industri Nikel: Rata-rata smelter di Indonesia mendapatkan tax holiday 7-10 tahun, tergantung besaran investasinya.[30]	a. **Perluasan pemberian insentif pajak kepada industri strategis secara selektif** yang berpotensi untuk menjadi **industri unggulan** Indonesia di masa depan.
II	**Mengevaluasi Kebijakan Tarif Bea**
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Bea keluar dikenakan sebagai kebijakan fiskal pengendalian ekspor, diatur dalam PMK No. 39/PMK.010/2022.	a. **Evaluasi kebijakan tarif bea dan memastikan diberikan insentif bagi komoditas yang membutuhkan.**
III	**Meningkatkan Pengawasan dan Perbaikan Tata Kelola Praktik Bisnis untuk Terciptanya Iklim Usaha yang Sehat dan Memastikan Majunya Industri Dalam Negeri**
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Masih terdapat praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab yang melakukan *predatory pricing* dan *dumping* yang dapat merusak pasar Indonesia.[31] Contoh: seperti *predatory pricing* yang dilakukan TikTok Shop serta dumping besi dan baja dari China. • Masih terdapat pabrik yang lolos pengawasan standar kepatuhan kualitas, keamanan (co: SNI) dan lingkungan Indonesia. Contoh: April 2024, Kemenperin menemukan 40 pabrik baja tidak sesuai standar	a. **Mencegah *predatory pricing & dumping*** dengan sanksi yang tegas **melalui *anti dumping, non-tariff measure & safeguard protection.*** b. **Memberlakukan sanksi yang tegas dan konsisten pada perusahaan tak bertanggung jawab** yang merusak pasar karena adanya *excess capacity* melalui pengawasan praktek bisnis yang etis secara ketat. c. **Memberikan sanksi tegas pada pabrik yang tidak memenuhi SNI dan standar lingkungan Indonesia.*** **Saat ini standar lingkungan Indonesia sudah mengacu pada standar global yang baik.*

IV	Modernisasi Mesin Manufaktur
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**

• Berdasarkan survei yang dilakukan kepada industri manufaktur:
  ° Hanya 64% perusahaan manufaktur masih mengadopsi teknologi rendah dan hanya 6% perusahaan manufaktur yang mengadopsi teknologi canggih.[32]
  ° Hanya 27% yang ada menggunakan *robotics* dan 7% yang menggunakan AI.[33]
	a. Memberikan insentif fiskal dan keringanan pajak pada investasi yang membawa teknologi modern* dan atau untuk industri yang berhasil melakukan modernisasi alat produksi.
	b. Mempertimbangkan pemberian dukungan modernisasi alat produksi melalui kebijakan terobosan kebijakan seperti pemberian *grant.*
	**Perlu dipastikan teknologi modern yang diinvestasikan adalah teknologi yang memberikan daya saing secara jangka panjang.*

V	**Mendorong Adopsi Teknologi Tinggi dalam Mendukung Agenda Hilirisasi**
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Industri manufaktur di Indonesia masih terbatas dalam penggunaan teknologi tinggi untuk memproduksi komponen maupun mengembangkan produk akhir yang berdaya saing global.	a. Memberikan insentif bagi industri yang mengadopsi penggunaan teknologi tinggi dalam mendukung kemajuan industri unggulan/ strategis nasional.
VI	**Meningkatkan Produktivitas Sumber Daya Manusia**
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
Rendahnya tingkat pendidikan dan rata-rata lama sekolah • Sebanyak **4 dari 10 pekerja** Indonesia **berlatar pendidikan SD dan bahkan tidak sekolah**.[34] • **Rata-rata lama sekolah di Indonesia baru mencapai 9,13 tahun**,[35] sedangkan sejak 2019 rata-rata lama sekolah di Malaysia sudah mencapai 10,2 tahun, Filipina 9,3 tahun, dan Singapura 11,5 tahun.[36] • 60% pekerja di sektor informal mengindikasikan tingkat produktivitas yang masih rendah menurut paparan Wapres Ma'ruf Amin 2023.	**a. Memastikan akses dan kualitas pendidikan yang merata** dari PAUD hingga SMA. **b. Memperbanyak program Triple skilling (*skilling, upskilling, reskilling*) di tingkat SMA/ SMK/ Sederajat** agar siswa memiliki bekal keahlian untuk bekerja.
VII	**Memperbanyak Keterlibatan Swasta dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)**
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Pemanfaatan insentif *tax holiday* dan *tax allowance* untuk KEK masih sepi peminat.[37] • Infrastruktur KEK di Pulau Jawa unggul karena memiliki akses yang baik ke pasar regional dan internasional namun masih terdapat kendala pada penyediaan aksesibilitas infrastruktur KEK.[38]	**a. Memperbanyak keterlibatan swasta dalam pengembangan KEK melalui berbagai insentif fiskal, dukungan infrastruktur pendukung hingga kemudahan perizinan.**

Rincian Rekomendasi B: Menerbitkan Paket Kebijakan Iklim Investasi Hulu Migas untuk Mendukung Ketersediaan Sumber Energi Industri

I Memperbaiki Kebijakan Fiskal Eksplorasi Migas

Kondisi Eksisting	Rekomendasi
Kondisi Umum • Impor migas memberatkan keuangan negara. Pada November 2023, defisit neraca perdagangan migas mencapai US$2,21 miliar, dan diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan perkembangan program hilirisasi dan industrialisasi.[39] • Tingginya biaya investasi dan rendahnya *success ratio* untuk eksplorasi migas masih menjadi tantangan, meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan untuk menarik investor.	a. Memastikan kebijakan fiskal untuk kegiatan eksplorasi hulu migas **memberikan insentif fiskal yang menarik dan alternatif bentuk kontrak kerja sama yang sesuai profil risiko proyek.** **b. Memberikan insentif yang cukup atraktif terutama untuk investor migas global** karena besarnya investasi hulu migas khususnya di laut dalam.

II Melakukan Deregulasi Sektor Migas

Kondisi Eksisting	Rekomendasi
• Per 2021, perizinan dan pengadaan lahan migas membutuhkan waktu antara 30-50% dari seluruh waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan eksplorasi.[40,41]	**a. Membuat KPI standarisasi perizinan agar selesai dalam waktu yang lebih singkat** (misal: maksimal 1 bulan), **dan masa berlaku yang lebih panjang** (misal: diatas 1 tahun). **b. Memastikan kelancaran proses *Online Single Submission (OSS)* hingga ke tingkat pemerintah daerah**, khususnya dalam pengajuan perizinan pada sektor migas.

III Menghadirkan Kebijakan Devisa Hasil Ekspor yang *Win-Win*

Kondisi Eksisting	Rekomendasi
• Saat ini, industri hulu migas yang melakukan ekspor diharuskan untuk 4 menahan penerimaan ekspornya di bank devisa dalam negeri sebanyak minimal 30% selama minimum 3 bulan. Hal ini mengganggu pengelolaan keuangan Industri hulu migas secara umum serta mengganggu pelaksanaan investasi eksplorasi migas.	**a. Evaluasi kebijakan PP 36 tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor** dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam **untuk memastikan tercapainya target DHE.**

IV Melakukan Konsolidasi Data Migas dan Dukungan Studi Seismik

Kondisi Eksisting	Rekomendasi
• Ada perbedaan data perdagangan migas yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM dengan yang diterbitkan BPS terkait komponen produk yang dicatat. o Kementerian ESDM mencatat ada 29 jenis produk, sedangkan BPS mencatat 58 jenis produk.[42] • Menurut data Kementerian ESDM, dengan asumsi produksi yang sama (700 bopd dan 6 miliar bscfd) dan tanpa ada penemuan baru.[43]	**a. Melanjutkan agenda konsolidasi data migas** untuk mempermudah proses investasi dan pengambilan keputusan. **b. Melanjutkan memberi dukungan studi seismik**, termasuk untuk mendukung eksplorasi migas laut dalam.

Rincian Rekomendasi C: Meningkatkan Kerja Sama Internasional untuk Penguatan Produksi dan Perluasan Pasar

I Memperkuat Kebijakan Perdagangan Internasional dan Memperbanyak Negara Tujuan Ekspor

Kondisi Eksisting	Rekomendasi
• Indonesia menempati urutan ke 26 dan 27 dalam hal ekspor dan impor.[44] dengan mitra ekspor utama yaitu Tiongkok dan AS. • Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan bahwa pemerintah sedang membidik 12 tujuan ekspor baru dari kawasan Amerika Latin, Afrika, Timur Tengah, dan Asia Selatan.[45] • Iklim perdagangan internasional sedang tidak stabil akibat berbagai ketegangan geopolitik.	a. **Membuat strategi kebijakan perdagangan yang komprehensif, terukur, dan strategis termasuk untuk mendukung agenda perluasan pasar pada regional** Amerika, Eropa dan negara-negara dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan (KKS). b. **Pembentukan *Special Trade Envoy*** untuk memastikan realisasi target perluasan pasar.

II Mengurangi Impor Bahan Baku Industri dan Meningkatkan Produksi Bahan Baku Dalam Negeri Khususnya untuk Mendukung Majunya Industri Unggulan Nasional

Kondisi Eksisting	Rekomendasi
• Pada tahun 2022, Sektor industri kimia, farmasi dan tekstil (IKFT) masih mengandalkan bahan baku impor hingga 90%, terbesar dari China yang setara 30% dari total impor bahan baku.[46] • Produk kosmetik impor seringkali lebih murah dibandingkan dengan kosmetik lokal. Hal ini terjadi akibat bahan baku yang digunakan masih impor sehingga mengurangi efisiensi produksi.[47]	a. **Meningkatkan produksi bahan baku dalam negeri (domestikasi bahan baku)** bagi bahan baku yang lebih potensial dibuat dalam negeri untuk mendukung industri strategis nasional. b. **Meningkatkan pengawasan dan standarisasi untuk memastikan bahan baku yang diimpor sesuai dengan kebutuhan industri**.

III Perlindungan Kebijakan Perdagangan Internasional yang Berdampak pada Industri Dalam Negeri

Kondisi Eksisting	Rekomendasi
• Diperkirakan Indonesia akan kehilangan penerimaan dari ekspor ke UE sekitar US$5,15 miliar akibat Penetapan Undang-Undang Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR). Tujuh komoditas yang diatur dalam UU tersebut, yaitu minyak sawit mentah atau CPO, kopi, daging, kayu, kakao, kedelai, dan karet.	a. **Melanjutkan dan mendukung *task force* nasional yang sudah dibentuk untuk menghadapi kebijakan EUDR**. b. **Menjalankan komunikasi** *double track* **perdagangan dengan Uni Eropa** sekaligus dengan dengan negara-negara anggotanya.

IV	Memastikan Realisasi Komitmen Transfer Teknologi
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) mewajibkan investor asing untuk melakukan alih atau transfer teknologi kepada pekerja Indonesia. • Investasi asing yang besar tidak dibarengi dengan transfer teknologi yang optimal:[48] o Banyaknya Tenaga Kerja Asing (TKA) di yang bukan merupakan tenaga ahli, sehingga tidak terjadi transfer teknologi.	**a. Membuat perencanaan dan implementasi transfer teknologi yang terstruktur dan sistematis** untuk memastikan majunya industri strategis nasional. **b. Memastikan TKA** yang bekerja kompetensi tertentu yang **mampu memberikan pengetahuan dan teknologi yang relevan bagi perkembangan industri nasional.** **c. Melakukan pendampingan TKA dengan tenaga lokal** untuk memastikan realisasi transfer pengetahuan.

V	Memberikan Kemudahan Produksi dalam Negeri dan Memperkuat Keberpihakan pada Produk Lokal
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Mengurangi kebijakan yang menambah panjang jalur birokrasi. Contoh: Penetapan aturan Sertifikat Halal pada berbagai komoditas barang. • Aturan tentang pedoman pengembangan, penataan, dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan masih belum banyak berpihak kepada produk lokal.	**a. Memastikan agar kebijakan Sertifikat Halal** bukan hanya dalam rangka proteksi konsumen tapi juga untuk **mendukung pengembangan industri strategis nasional.** **b. Menghadirkan kebijakan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan alokasi produk lokal dalam pasar nasional**, khususnya pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

Referensi

1. World Bank. (2023). *Data for Middle Income, Indonesia*. Diakses pada 3 April 2024, dari https://data.worldbank.org/?locations=XP-ID
2. CNBC Indonesia. (2023). *Penyebab RI Susah Jadi Negara Maju*. Diakses pada 4 April 2024, dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20230509122558-4-435751/miris-ini-ternyata-penyebab-ri-susah-jadi-negara-maju
3. World Bank. (2024). *World Development Indicators*.
4. Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010*.
5. Kompas. (2024). *Deindustrialisasi Dini*. Diakses pada 5 April 2024, dari https://www.kompas.id/baca/opini/2024/03/21/deindustrialisasi-dini
6. Eksplorasi lebih dalam terkait perbaikan sistem logistik nasional dan peningkatan efisiensi birokrasi akan dibahas dalam FA 06 tentang Iklim dan Layanan Usaha, FA 07 tentang Sistem Logistik Nasional, dan FA 8 tentang Digitalisasi Birokrasi.
7. Kementerian PPN/Bappenas. (2019). *Menteri Bambang Brodjonegoro Dorong Kontribusi Industri Manufaktur 26 Persen untuk Capai Indonesia Emas 2045*. Diakses pada 6 April 2024, dari https://www.bappenas.go.id/berita/menteri-bambang-brodjonegoro-dorong-kontribusi-industri-manufaktur-26-persen-untuk-capai-indonesia-emas-2045
8. Ibid.
9. Subianto, P. (2024). *Keynote Address – National Transformation Strategy: Towards an Advanced & Prosperous Indonesia in 2045*.
10. Bank Indonesia. (2023). *Laporan Perekonomian Indonesia*. Diakses pada 7 April 2024, dari https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/9_LPI2023_BAB7.pdf
11. Gerindra. (2023). *Pandangan Prabowo Subianto: Transformasi Bangsa 2045*. Diakses pada 8 April 2024, dari https://gerindra.id/wp-content/uploads/2023/09/Pandangan-Prabowo-Subianto-Transformasi-Bangsa-2045-1.pdf
12. Ibid.
13. IDN Times. (n.d.). *Hilirisasi Berbagai Industri Ciptakan Lapangan Kerja Baru*. Diakses pada 9 April 2024, dari https://www.idntimes.com/business/economy/masrurotul-hikmah/hilirisasi-ciptakan-lapangan-kerja-c1c2
14. Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Laju PDRB Menurut Provinsi*. Diakses pada 10 April 2024, dari https://sumsel.bps.go.id/indicator/104/856/1/laju-pdrb-menurut-provinsi.html
15. Presiden Republik Indonesia. (2023). *Hilirisasi, Langkah Penting Indonesia Jadi Negara Maju 2045*. Diakses pada 11 April 2024, dari https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-hilirisasi-langkah-penting-indonesia-jadi-negara-maju-2045/
16. Danareksa. (2023). *Hilirisasi Industri Indonesia dan Dampaknya Pada Investasi dan Kinerja Ekspor*. Diakses pada 12 April 2024, dari https://www.danareksa.co.id/storage/2023/other/63ef58be192c9.pdf
17. Parlemen Eropa. (2020). *Towards a Mandatory EU System of Due Diligence for Supply Chains*. Diakses pada 13 April 2024, dari https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659299/EPRS_BRI(2020)659299_EN.pdf
18. Kompas. (2023). *Pembangunan SDM Jadi Kunci Hilirisasi Sumber Daya Alam*. Diakses pada 14 April 2024, dari https://lestari.kompas.com/read/2023/12/08/090000186/pembangunan-sdm-jadi-kunci-hilirisasi-sumber-daya-alam
19. Kementerian Perindustrian. (n.d.). *Dukung Hilirisasi Industri, Kemenperin Cetak Lebih 250 Ribu SDM Kompeten*. Diakses pada 15 April 2024, dari https://kemenperin.go.id/artikel/24317/Dukung-Hilirisasi-Industri,-Kemenperin-Cetak-Lebih-250-Ribu-SDM-Kompeten
20. Kompas. (2022). *Hilirisasi Kian Gencar, Pengembangan SDM Jadi Pekerjaan Rumah*. Diakses pada 16 April 2024, dari https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/10/07/hilirisasi-kian-gencar-pengembangan-sdm-jadi-pekerjaan-rumah
21. Asian Development Bank. (2020). *Innovate Indonesia: Unlocking Growth Through Technological Transformation*.
22. Universitas Pertamina. (n.d.). *Menperin: Sektor Industri Serap 40% dari Total Kebutuhan Energi Nasional*. Diakses pada 17 April 2024, dari https://universitaspertamina.ac.id/berita/detail/menperin-sektor-industri-serap-40-dari-total-kebutuhan-energi-nasional
23. Katadata. (n.d.). *Banding Nikel di WTO Untungkan RI, Hilirisasi Bisa Terus Berjalan*. Diakses pada 18 April 2024, dari https://industri.katadata.co.id/read/2024/01/30/banding-nikel-di-wto-untungkan-ri-hilirisasi-bisa-terus-berjalan
24. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (n.d.). *Hasil Survei Penduduk 2020: Peluang Indonesia Maksimalkan Bonus Demografi*. Diakses pada 19 April 2024, dari https://www.kemenkopmk.go.id/hasil-survei-penduduk-2020-peluang-indonesia-maksimalkan-bonus-demografi
25. World Economic Forum. (2019). *Japan Reskilling Aging Workforce*. Diakses pada 20 April 2024, dari https://www.weforum.org/agenda/2019/05/japan-reskilling-aging-workforce/
26. DW. (2023). *Germany Targeting Indian Students to Address Labor Shortages*. Diakses pada 21 April 2024, dari https://www.dw.com/en/germany-targeting-indian-students-to-address-labor-shortages/a-68890502
27. Prabowo-Gibran. (2024). *Prabowo-Gibran 2024: Mengingat Janji Ekonomi Usai Menang Pilpres*. Diakses pada 22 April 2024, dari https://prabowogibran2.id/
28. Bisnis Indonesia. (2024). *Mengingat Janji Ekonomi Prabowo-Gibran Usai Menang Pilpres 2024*. Diakses pada 23 April 2024, dari https://ekonomi.bisnis.com/read/20240321/9/1751431/mengingat-janji-ekonomi-prabowo-gibran-usai-menang-pilpres-2024
29. Pajak.com. (n.d.). *Insentif Pajak Industri Hilirisasi Diberikan Selektif*. Diakses pada 24 April 2024, dari https://www.pajak.com/pajak/insentif-pajak-industri-hilirisasi-diberikan-selektif/

30. CNBC Indonesia. (2023). *Faisal Basri: Pajak Hilirisasi 0%, Anak Buah Luhut Balas Gini*. Diakses pada 25 April 2024, dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20230814105634-4-462688/faisal-basri-pajak-hilirisasi-0-anak-buah-luhut-balas-gini
31. Kompas. (2024). *Nakalnya Seller TikTok Shop, Kemenkop UKM Temukan Masih Ada Predatory Pricing*. Diakses pada 26 April 2024, dari https://money.kompas.com/read/2024/02/29/091000526/-nakalnya-seller-tiktok-shop-kemenkop-ukm-temukan-masih-ada-predatory-pricing
32. Asian Development Bank. (2020). *Innovate Indonesia: Unlocking Growth Through Technological Transformation*.
33. Ibid.
34. Kompas. (2023). *Penduduk Bekerja Berpendidikan Rendah Masih Dominan*. Diakses pada 27 April 2024, dari https://www.kompas.id/baca/riset/2023/11/07/penduduk-bekerja-berpendidikan-rendah-masih-dominan
35. Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi*. Diakses pada 28 April 2024, dari https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQyOSMy/rata-rata-lama-sekolah-penduduk-umur--15-tahun-menurut-provinsi.html
36. Kompas. (2023). *Intensitas Liburan dan Tantangan Produktivitas Tenaga Kerja*. Diakses pada 29 April 2024, dari https://www.kompas.id/baca/english/2023/07/09/intensitas-liburan-dan-tantangan-produktivitas-tenaga-kerja?open_from=Translator_Mark
37. Kontan. (2024). *Pemanfaatan Insentif Pajak di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Masih Sepi Peminat*. Diakses pada 30 April 2024, dari https://nasional.kontan.co.id/news/pemanfaatan-insentif-pajak-di-kawasan-ekonomi-khusus-kek-masih-sepi-peminat
38. Antara News. (2024). *Infrastruktur Kunci Tingkatkan Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus*. Diakses pada 1 April 2024, dari https://antaranews.com/berita/3730335/infrastruktur-kunci-tingkatkan-investasi-di-kawasan-ekonomi-khusus
39. Bank Indonesia. (2024). *Surplus Neraca Perdagangan Berlanjut*. Diakses pada 2 April 2024, dari https://bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/neraca-perdagangan.aspx
40. Antara News. (2023). *SKK Migas: Hulu Migas Butuh Penyederhanaan Percepatan Perizinan*. Diakses pada 3 April 2024, dari https://www.antaranews.com/berita/2107530/skk-migas-hulu-migas-butuh-penyederhanaan-percepatan-perizinan
41. Katadata. (2024). *SKK Migas: Butuh Minimal 7 Tahun Sebelum Sumur Migas Bisa Berproduksi*. Diakses pada 4 April 2024, dari https://energi.katadata.co.id/read/2024/02/29/skk-migas-butuh-minimal-7-tahun-sebelum-sumur-migas-bisa-berproduksi
42. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2023). *Samakan Data Perdagangan Migas, KESDM Lakukan Konsolidasi dengan BPS dan BI*. Diakses pada 5 April 2024, dari https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-minyak-dan-gas-bumi/samakan-data-perdagangan-migas-kesdm-lakukan-konsolidasi-dengan-bps-dan-bi
43. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2024). *Cadangan Minyak Indonesia Tersedia untuk 9,5 Tahun dan Cadangan Gas 19,9 Tahun*. Diakses pada 6 April 2024, dari https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/menteri-esdm-cadangan-minyak-indonesia-tersedia-untuk-95-tahun-dan-cadangan-gas-199-tahun
44. Observatory of Economic Complexity. (n.d.). *Indonesia Country Profile*. Diakses pada 7 April 2024, dari https://oec.world/en/profile/country/idn
45. Infobank News. (2024). *Pemerintah Bidik 12 Negara Tujuan Ekspor Baru, Mulai dari Amerika Latin Hingga Timur Tengah*. Diakses pada 8 April 2024, dari https://infobanknews.com/pemerintah-bidik-12-negara-tujuan-ekspor-baru-mulai-dari-amerika-latin-hingga-timur-tengah/
46. CNN Indonesia. (2022). *90 Persen Bahan Baku Manufaktur RI Impor, 30 Persen dari China*. Diakses pada 9 April 2024, dari https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220214175143-92-759089/90-persen-bahan-baku-manufaktur-ri-impor-30-persen-dari-china
47. Liputan6. (2024). *Harga Produk Impor Kok Lebih Murah dari Lokal, Ternyata Gara-gara Ini*. Diakses pada 10 April 2024, dari https://www.liputan6.com/bisnis/read/5196666/harga-produk-impor-kok-lebih-murah-dari-lokal-ternyata-gara-gara-ini?page=3
48. Bisnis Indonesia. (2023). *JK Prihatin Puluhan Ribu TKA Morowali, Ternyata Buruh Bukan Tenaga Ahli*. Diakses pada 11 April 2024, dari https://kabar24.bisnis.com/read/20230611/15/1664239/jk-prihatin-puluhan-ribu-tka-morowali-ternyata-buruh-bukan-tenaga-ahli

"15 Rekomendasi Paket Kebijakan untuk Mendukung Agenda Pembangunan Presiden & Wakil Presiden Indonesia 2024 - 2029"

Fokus Area 2

Food Estate dan Penguatan Kemitraan Sektor Pertanian:

Menggencarkan Realisasi Swasembada Pangan

2

IBC
Indonesian Business Council

Sumber Gambar: freepik

Food Estate **dan Penguatan Kemitraan Sektor Pertanian:**
Menggencarkan Realisasi Swasembada Pangan

Misi Asta Cita 2 Prabowo-Gibran
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Program Hasil Terbaik Cepat No. 3 Prabowo-Gibran
Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.

Program Hasil Terbaik Cepat No. 3 Prabowo-Gibran
Mencapai swasembada pangan, energi, dan air.

Stakeholders: *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian); Kementerian Pertanian (Kementan); Kementerian Perdagangan (Kemendag); Kementerian Perindustrian (Kemenperin); Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN); Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN); Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK); Kementerian Pertahanan (Kemenhan); Badan Pangan Nasional (BAPANAS); Perusahaan Umum BULOG (Perum BULOG).*

> *Fokus saya yang pertama adalah ketahanan pangan. Indonesia harus swasembada pangan, kemudian ketahanan energi, swasembada energi. Kami bertekad untuk mengentaskan kemiskinan, dengan upaya besar-besaran.*
> ***Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia Periode 2024 - 2029***

Kerentanan Pangan Indonesia: Urgensi Mencapai Swasembada Pangan[1]

Dengan populasi yang terus bertumbuh, kebutuhan pangan Indonesia semakin meningkat. Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksikan bahwa jumlah penduduk pada 2050 mencapai 328 juta jiwa, menyebabkan semakin tingginya permintaan berbagai komoditas pangan utama, termasuk 40-50 juta ton beras di 2050.[2]

Selama 10 tahun terakhir, ketahanan pangan Indonesia berada di bawah rata-rata global, menurut *Global Food Security Index (GFSI)* (lihat Gambar 2.1). Pada 2022, skor GFSI global 62,2 dan Asia Pasifik 63,4; sedangkan Indonesia 60,2. Di ASEAN, Indonesia (peringkat ke-63) tertinggal dari Singapura (28), Malaysia (41), dan Vietnam (46).

Gambar 2.1 Skor GFSI Indonesia Masih Berada di Bawah Rata-Rata Global

Sumber: *Economics Impact,* 2022

Saat ini, produksi pangan strategis Indonesia belum dapat memenuhi kebutuhan domestik. Berdasarkan Peraturan Presiden tentang Cadangan Pangan Pemerintah, dari 11 komoditas pangan utama, enam diantaranya dilaksanakan melalui impor.[3] Hingga tahun 2023, impor terbesar ada pada komoditas beras (12% impor) dan gula (74%), meski Indonesia menjadi negara penghasil beras ke-4 di dunia dan memiliki potensi lahan tebu yang luas.[4]

Impor pangan harus dilakukan secara terukur, hati-hati, dan memperhatikan dampak yang holistik, baik pada petani maupun konsumen dalam negeri. Kebanyakan petani di Indonesia adalah petani kecil dan penggarap, sehingga kebijakan impor yang terlalu longgar akan meningkatkan kerentanan ekonomi mereka. Tapi kebijakan impor yang terlalu ketat juga berpotensi merugikan konsumen, yang sangat sensitif terhadap harga. Penting untuk mengambil kebijakan yang seimbang, memperkuat produksi lokal, dan memastikan impor hanya untuk kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi secara domestik.

Mendukung mewujudkan swasembada pangan, pemerintah telah melaksanakan program *Food Estate* atau Lumbung Pangan. Program ini berintikan pada sektor pertanian, perkebunan dan peternakan di suatu kawasan.[5] Pelaksanaannya tersebar di beberapa titik di Indonesia, antara lain Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua. Program *Food Estate* mengadopsi integrasi sistem pertanian dengan ekstensifikasi lahan sebagai pendekatan utama.

Tingkat keberhasilan program *Food Estate* bervariasi. Contohnya, produksi jagung di Sumatera Utara meningkat dari 1 juta menjadi 1,7 juta ton (2020-2022). Tapi di periode yang sama, produksi padi di Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Timur tidak mengalami kenaikan signifikan. Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap program ini untuk tahun anggaran 2020-2021 menemukan kelemahan dalam hal perencanaan kegiatan, ketidakcocokan lahan, dan pengelolaan kegiatan secara swakelola.

Untuk menjawab tantangan keterbatasan lahan pertanian, pemerintah dapat memanfaatkan potensi 31 juta hektare (ha) lahan non-hutan yang teridentifikasi berada dalam kawasan hutan. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki luas lahan pangan per kapita yang relatif rendah, bahkan lebih kecil dibandingkan dengan Vietnam dan Thailand. Kondisi ini menyebabkan kerugian besar karena lahan tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dengan mengoptimalkan penggunaan lahan non-hutan yang berada dalam kawasan hutan, Indonesia memiliki potensi besar untuk memperluas lahan pertanian. Hal ini pada gilirannya dapat mendukung ketahanan pangan nasional.

10 Tantangan Utama Menuju Indonesia Swasembada Pangan

Menurut BAPANAS, tantangan swasembada pangan di Indonesia terletak pada ketersediaan pangan di tengah ketidakpastian global, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.[6,7,8] Secara lebih detail, berikut 10 tantangan utama yang dihadapi untuk menuju swasembada pangan.

Tabel 2.1 10 Tantangan Utama Menuju Swasembada Pangan

Tantangan Utama	Data/Situasi
1. Terbatasnya Lahan Pertanian	• Mayoritas petani Indonesia (15,9 juta dari 39,3 juta orang di tahun 2023) memiliki lahan kurang dari 0,5 ha.[9] Kepemilikan lahan yang minim berkontribusi pada rendahnya output pertanian.[10] • Setiap tahun terjadi konversi lahan sawah menjadi non-sawah seluas 100.000-150.000 ha (ATR/BPN, 2022). Sepanjang 2015-2019, luas sawah menurun dari 8,1 juta ha menjadi 7,5 juta ha.[11]
2. Tingginya Biaya Produksi	• Biaya produksi padi di Indonesia lebih dari dua kali lipat dibandingkan Vietnam dan China.[12] Komponen termahal dalam produksi padi tersebut yaitu biaya sewa lahan, biaya tenaga kerja, dan harga pupuk.[13]
3. Sulitnya memperoleh Sarana Produksi Pertanian	• Sulitnya akses benih menjadi salah satu faktor yang menghambat pencapaian produktivitas pangan di Indonesia, contohnya pada komoditas padi.[14] • Harga pupuk masih tinggi karena ketersediaan dan distribusi pupuk belum bisa memenuhi permintaan nasional.[15] Efisiensi harga pupuk dapat didukung dengan peninjauan ekosistem pasar. Saat ini, dinilai terdapat dominasi BUMN pada sektor strategis termasuk pupuk yang dapat menghambat kompetisi pasar dan investasi/peran swasta.[16] • Akses pada pestisida yang aman masih sulit. Indonesia adalah salah satu negara pengguna pestisida terbesar di dunia, dengan dominasi pestisida sintetis yang berpotensi merusak kualitas pertanian dalam jangka panjang. Dalam kasus gagal panen ratusan ha sawah di Indramayu, 99% petaninya menggunakan pestisida sintetis.[17]

<table>
<tr><th>Tantangan Utama</th><th>Data/Situasi</th></tr>
<tr><td>4. Minimnya Akses Pembiayaan dan Pasar</td><td>• Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021-2023 menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil rumah tangga pertanian di Indonesia (kurang dari 30%), yang memiliki akses terhadap kredit usaha. Hal ini mencerminkan kesenjangan dalam akses pendanaan bagi para petani.[18] Akibatnya petani banyak mengandalkan pembiayaan dari tengkulak dengan bunga yang tinggi.
• 44% petani padi belum tergabung ke dalam kelompok tani (penerima bantuan benih), sehingga sulit menerima pembiayaan.[19]</td></tr>
<tr><td>5. Keterbatasan Infrastruktur</td><td>• Keterbatasan infrastruktur terkait distribusi pangan menjadi titik perhatian bagi Indonesia, menurut GFSI. Sebagian infrastruktur pedesaan (13% wilayah desa/kelurahan) belum bisa dilalui kendaraan roda 4.[20]
• Hasil kajian Bappenas tahun 2021 mencatat limbah dan susut pangan atau Food Loss and Waste (FLW) di Indonesia mencapai 115-184 kg/kapita/tahun.[21] Ini disebabkan rantai pasok pangan yang panjang dan tidak efisien.
• Belum terpenuhinya sarana dan prasarana cold chain, termasuk cold storage untuk menyimpan dan mendistribusikan hasil produksi pertanian, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:
<table><tr><th>Produk</th><th>Produksi (ton/tahun)</th><th>Kebutuhan Cold Storage (ton/tahun)</th><th>Persentase Kebutuhan Penyimpanan (%)</th></tr><tr><td>Daging Sapi</td><td>496.3</td><td>397.04</td><td>80</td></tr><tr><td>Perikanan</td><td>25.011.000</td><td>12.505.500</td><td>50</td></tr><tr><td>Ayam</td><td>2.144.000</td><td>1.715.200</td><td>80</td></tr><tr><td>Buah-buahan</td><td>19.021.099</td><td>2.853.165</td><td>15</td></tr><tr><td>Sayur</td><td>480.483</td><td>48.048</td><td>10</td></tr><tr><td>Es Krim</td><td>42</td><td>42</td><td>100</td></tr><tr><td>Lainnya</td><td>95</td><td>24.7</td><td>26</td></tr><tr><td>JUMLAH</td><td>47.289.882</td><td>17.585.653</td><td>37</td></tr></table>Sumber: Studi ERIA, A Cold Chain Study of Indonesia, 2018</td></tr>
<tr><td>6. Keterbatasan SDM</td><td>• Berdasarkan Sensus Pertanian/ST 2023, mayoritas petani Indonesia berusia 55 tahun ke atas dengan upah yang terus menurun dan produktivitas yang rendah.[22]
• Jumlah petani yang berusia 55 tahun ke atas pada 2023 meningkat 7,4% dibandingkan 2013, sedangkan jumlah petani muda (25-34 tahun) turun dari 11,97% pada 2013 menjadi 10,24% pada 2023.
• Berdasarkan studi World Bank 2018, tingkat profitabilitas dan produktivitas kerja petani di Indonesia tergolong moderat hingga rendah untuk sebagian besar tanaman hortikultura dan tanaman minuman.[23]</td></tr>
<tr><td>7. Keterbatasan Anggaran untuk Sektor Pangan</td><td>• Alokasi anggaran untuk Kementerian Pertanian mengalami penurunan signifikan. Awalnya, pagu indikatif anggaran mencapai 34 triliun, kemudian mengalami penurunan drastis hingga tersisa 8 triliun.[24]
• Alokasi anggaran untuk dana ketahanan pangan terbatas. Di tahun 2024 pagunya (Rp114,3 triliun) jauh lebih rendah dari program prioritas lainnya seperti pendidikan (Rp660,8 triliun) dan perlindungan sosial (Rp493,5 triliun).[24]
• Dana ketahanan pangan difokuskan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan stabilitas harga pangan, antara lain melalui perbaikan infrastruktur, optimalisasi lahan, pengendalian hama serta dampak perubahan iklim, dan penguatan penelitian terkait budidaya dan pascapanen.</td></tr>
</table>

Tantangan Utama	Data/Situasi
8. Sulitnya Adopsi Teknologi dan Rendahnya Mekanisasi	• Tingkat adopsi digital di kalangan petani di kisaran 47% pada Laporan Sensus Pertanian 2023. Akibatnya, petani memiliki akses informasi yang terbatas terhadap praktik-praktik pertanian terbaik dan cenderung menggunakan metode konvensional. • Terbatasnya infrastruktur digital. Sebagai contoh, pada 2024, hanya 33,4% daerah Maluku dan Papua yang terhubung dengan sinyal seluler kuat, jauh tertinggal dibandingkan 90,6% wilayah di Jawa yang memiliki sinyal kuat.[26] • Kementerian Pertanian menyampaikan level mekanisasi pertanian di Indonesia masih di angka 2,1 *horsepower* (hp) per ha pada 2021. Angka ini masih jauh lebih kecil dibandingkan Jepang yang telah mencapai 16 hp per ha pada 2015.[27]
9. Terbatasnya R&D, termasuk teknologi pangan	• Rasio pengeluaran R&D pertanian terhadap PDB sektor pertanian di Indonesia hanya mencapai 0,17%, sementara Malaysia 0,85% dan Thailand 0,94% di tahun 2016.[28] • Data yang tidak akurat atau lengkap mengganggu stabilitas pasar pertanian karena tidak mampu memberikan perkiraan harga pangan secara tepat. Sejak akhir 2023, BAPANAS bekerja sama dengan BRIN dan Telkom University untuk mengembangkan sistem perhitungan perkiraan harga pangan berbasis *machine learning*.[29]
10. Kerentanan terhadap Perubahan Iklim	• Menurut laporan World Bank 2022, Indonesia adalah negara dengan tingkat kerentanan pangan tertinggi akibat perubahan iklim di Asia Tenggara, setelah Filipina dan Vietnam. Kekeringan parah yang disebabkan perubahan iklim dapat menyebabkan jutaan orang jatuh miskin. • Sebagai contoh, pada komoditas beras: meskipun impornya terhitung kecil, tapi pertumbuhan impor dari 2022 ke 2023 cukup signifikan yaitu 833.1%. Impor dilakukan karena produksi nasional menurun akibat dampak *El Nino*.

Navigasi Indonesia: Gagasan dan Komitmen Presiden-Wakil Presiden Republik Indonesia 2024-2029

Ketahanan dan swasembada pangan menjadi perhatian penting Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Peningkatan produktivitas lahan dinyatakan sebagai salah satu dari 8 Program Hasil Terbaik Cepat yang diusung.

Program peningkatan produktivitas sektor pangan merupakan inti dari upaya mencapai swasembada pangan. Prabowo-Gibran berencana mengembangkan program *Food Estate* terutama untuk tanaman padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu. Targetnya adalah menambah minimal 4 juta ha lahan panen tanaman pangan hingga 2029.

Prabowo-Gibran melihat isu pangan tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari ketersediaan lahan dan kesejahteraan petani. Mereka menganggap penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan yang menjadi tulang punggung produksi pangan nasional. Dalam dokumen visi-misi, Prabowo menegaskan pentingnya revitalisasi lahan pertanian dan program ekstensifikasi yang terencana dengan baik untuk mencapai swasembada pangan.

Untuk mendukung petani, Prabowo-Gibran telah merencanakan program kredit usaha tani, peternakan, dan perikanan. Mereka juga akan memberikan insentif teknis berupa pelatihan dan dukungan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian. Program ini mencakup penyediaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah dan akses yang lebih mudah bagi petani kecil.

Rekomendasi Paket Kebijakan 2:

A	**Melakukan Penyesuaian Tata Ruang Tunggal dengan Prinsip *Fit For Purpose***
B	**Mentransformasi Sektor Pertanian dengan Menerapkan Model *Inclusive Closed Loop***
c	**Meningkatkan Industri Sektor Pertanian Khusus Komoditas Pilihan: Beras, Jagung, Teh, Karet, dan Hortikultura**

Rincian Rekomendasi A: Melakukan Penyesuaian Tata Ruang Tunggal dengan Prinsip *Fit For Purpose*

Kondisi Eksisting	Rekomendasi*
• Indonesia memiliki luas lahan sebesar 188 juta ha, terdiri dari ±64% Kawasan Hutan dan ±36% area produktif/area penggunaan lain (APL), dengan potensi 31,8 juta ha dari tutupan non hutan pada Kawasan hutan yang bisa dijadikan area produktif/APL. • Terdapat tumpang tindih dua peraturan yang mengatur tata ruang, yaitu UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. • Terdapat konflik tata ruang antara ATR/BPN dan KLHK.	**a. Menyatukan pengelolaan tata ruang dan tenurial dalam satu institusi dan menerapkan tata ruang *fit for purpose*.** **b. Memfokuskan tugas institusi kehutanan pada pengelolaan hutan dan kewenangan yang terkait lainnya tanpa mengatur masalah tata ruang atau tenurial.** ***Realisasi potensi penambahan 6-9 juta ha lahan pertanian baru***

Rincian Rekomendasi B: Mentransformasi Sektor Pertanian dengan Menerapkan Model *Inclusive Closed Loop*

Inclusive Closed Loop adalah kemitraan antar *stakeholder* yang menempatkan petani sebagai pusat atau pemain utama dalam ekosistem pertanian yang berkelanjutan. Kemitraan ini bertujuan untuk membuka akses petani ke prasarana dan faktor produksi berkualitas, teknologi dan penyuluhan, serta pembiayaan dan pasar.

Gambar 2.2 Model Inclusive Closed Loop

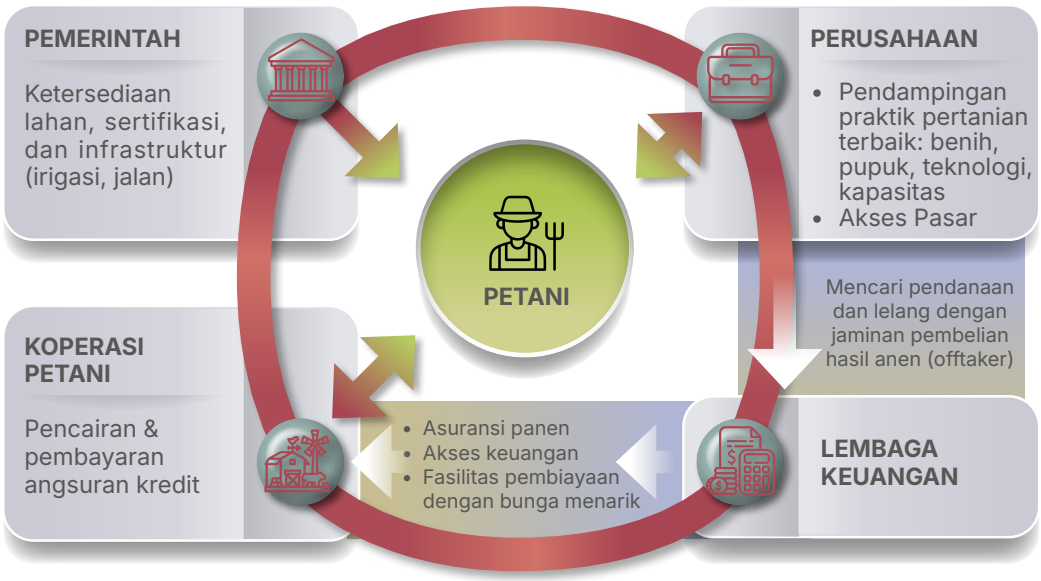

Sumber: Dokumen Narasi Tunggal Pertanian KADIN, PISAgro, dan APINDO 2023

I	Memperkuat Aspek Kelembagaan
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Terdapat kecenderungan Kementerian/ Lembaga mengerjakan program lintas aktor secara parsial dan tidak holistik/terintegrasi.	a. **Memastikan semua pihak dapat berkontribusi secara optimal pada ketercapaian program dengan pemetaan serta kejelasan peran setiap pihak** dalam eksekusi programnya. b. **Memperkuat peran pemerintah sebagai fasilitator dan katalisator** terhadap kebutuhan dukungan dan kendala di lapangan. c. **Memperkuat koperasi dan menjadikannya independen** salah satunya **melalui peningkatan kualitas manajemen**. d. **Menjadikan perusahaan sebagai "bapak angkat"** untuk **mendukung berbagai kebutuhan pengembangan program** termasuk bibit, pupuk, air, serta ***offtaker***.
II	**Mekanisasi dan Perluasan Teknologi Digital Sektor Pertanian**
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Sebesar 52% keluarga petani belum menggunakan teknologi mekanisasi maupun non-mekanisasi.[30]	a. **Memberikan insentif bagi petani untuk mengadopsi teknologi mekanisasi, terutama untuk komoditas prioritas nasional.** b. **Mengoptimalkan infrastruktur digital pertanian** untuk memperluas informasi dasar bagi petani.
III	**Mengoptimalisasi Penggunaan Lahan untuk Pertanian**
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Petani kecil adalah petani yang memiliki lahan kurang dari setengah ha. Tahun 2021, petani skala kecil mencapai 72%.[31]	a. **Meningkatkan efektivitas lahan pertanian pertanian kecil di Pulau Jawa.** Dapat dilakukan **uji coba konsep demutualisasi batas lahan** pada lahan pertanian kecil. b. **Redistribusi lahan pertanian melalui kolaborasi korporasi & pemerintah.** c. **Meningkatkan penyediaan lahan pertanian yang berkelanjutan dan sesuai spesifikasi** yang dibutuhkan.
IV	**Memberikan Kepastian Pembelian bagi Petani**
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Petani belum mendapatkan kepastian pembeli dan harga jual.[32]	a. **Membangun kemitraan antara petani dengan perusahaan agribisnis, koperasi dan BUMDes pilihan** untuk menjamin pembelian hasil tani melalui kontrak pertanian. b. **Menyediakan platform digital untuk memperluas akses pasar bagi petani** dengan harga yang transparan dan kompetitif.

V	Memperluas dan Memberikan Keringanan Akses ke Permodalan
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Mayoritas petani tidak memiliki agunan dan penghasilan tetap. Beberapa petani yang dapat mengakses permodalan pun menghadapi banyak kendala dalam pengembaliannya.	**a. Memberikan pendanaan dengan bunga rendah dan memperkuat partisipasi lembaga keuangan non-bank**, seperti koperasi terpilih, untuk memudahkan akses kredit bagi petani. **b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas manajemen koperasi melalui pendampingan dan audit berkala**. c. Melakukan pengembangan kapasitas petani terkait pengelolaan pinjaman salah satunya untuk memastikan ketepatan waktu dan besaran pengembalian pinjaman.

VI	Menyediakan Benih Berkualitas dan Pupuk yang Memadai
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Suplai benih belum memadai dan distribusinya belum merata.[33] • Petani menghadapi tekanan akibat kelangkaan pupuk subsidi dan melonjaknya harga pupuk nonsubsidi. Distribusi pupuk bersubsidi juga belum tepat sasaran karena kurangnya validasi data, ditambah dengan penurunan kualitas lahan pertanian akibat penggunaan pupuk kimia yang berlebihan.[34]	**a. Desentralisasi produksi dan penelitian benih melalui Sentra Benih Daerah** yang melibatkan petani, perguruan tinggi, koperasi, dan BUMDes Pilihan. **b. Mengevaluasi sistem distribusi pupuk dan mempertimbangkan pemberian bantuan pupuk langsung kepada petani** dengan sistem digital yang andal dan efektif. **c. Meningkatkan persentase bauran penggunaan pupuk organik** dan hayati untuk meningkatkan kualitas lahan pertanian.

VII	Memberikan Perlindungan Gagal Panen
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Kementerian Pertanian mencatat 41.000 lahan padi terancam gagal panen karena terkena dampak perubahan iklim.[35] • Terjadi penurunan peserta asuransi dari satu juta lebih pada tahun 2020 menjadi 353 ribu petani pada tahun 2022.[36]	**a. Memperluas cakupan asuransi pertanian** untuk komoditas utama nasional. **b. Menerbitkan terobosan kebijakan yang memungkinkan berkembangnya asuransi pertanian**.

VIII	Memperkuat Infrastruktur Pertanian
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Ketersediaan suplai air masih menjadi masalah yang dihadapi mayoritas petani, terutama ketika muncul fenomena ***el nino***.[37] • Akses jalan yang buruk menyulitkan warga dalam bertani.[38] • Petani di daerah terpencil seringkali memiliki akses terbatas ke energi listrik, yang penting untuk mengoperasikan peralatan pertanian.[39]	a. **Melakukan pembangunan irigasi secara holistik** mulai dari irigasi primer, sekunder hingga tersier **didukung oleh anggaran yang cukup hingga tingkat desa**. b. **Kerjasama dengan pihak korporasi yang bisa memberikan layanan pengairan dan menerapkan *performance-based contract*** untuk menjaga kualitas layanan yang diberikan. c. **Memperbaiki kualitas jalan dan meningkatkan aksesibilitas jalan pertanian** hingga pada tingkat desa. d. **Meningkatkan akses energi listrik di daerah terpencil dan mendorong pemanfaatan energi terbarukan**.

IX	Meningkatkan Kapasitas Dinas Pertanian serta Memberikan Pendampingan kepada Petani
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Dinas Pertanian masih kekurangan jumlah tenaga ahli dan penyuluh yang kompeten, terutama di daerah terpencil, sehingga petani belum cukup terdampingi.[40,41]	a. **Evaluasi mekanisme penyuluh pertanianan** untuk meningkatkan efektivitas pendampingan serta **menggunakan mekanisme digital** dalam pengelolaannya. b. **Memperkuat program pendampingan petani dengan** memperkenalkan berbagai topik pertanian terkini di antaranya, **penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP), *Good Handling Practices* (GHP), teknologi mekanisasi, asuransi, dan lain-lain.**

Rincian Rekomendasi C: Meningkatkan Industri Sektor Pertanian Khusus Komoditas Pilihan: Beras, Jagung, Teh, Karet, dan Holtikultura

Rekomendasi berikut merujuk pada dokumen Narasi Tunggal Pertanian, yang disusun melalui kolaborasi antara KADIN, PISAgro, dan APINDO, yang merupakan mitra dari IBC. Usulan rekomendasi lengkap terhadap masing-masing komoditas pilihan ini dapat dilihat langsung pada Dokumen Narasi Tunggal Pertanian.

I	Memperkuat Industri Beras Nasional
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Menurut data BPS (2021) produktivitas padi rata-rata nasional masih sangat rendah, yaitu 52,26 kwintal Gabah Kering Giling (GKG)/ha.[42] • Fluktuasi harga komoditas gabah sebagai komoditas Bahan Pokok dan Penting (Bapokting) mengganggu stabilitas pangan nasional.	a. **Melakukan intensifikasi melalui pengembangan dan penerapan bioteknologi serta ekstensifikasi melalui kegiatan agroforestri dan pemanfaatan area *food estate* yang *suitable*.** b. **Mengkolaborasikan BUMN dengan swasta** untuk **menjaga harga beras kualitas menengah-rendah menjadi stabil dan terjangkau**.

II	Mengoptimalkan Industri Jagung Nasional
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Volatilitas harga jagung relatif tinggi salah satunya akibat sulitnya akses air ketika musim panas. • Terbatasnya ketersediaan varietas dan volume benih jagung.	**a. Menetapkan harga jagung yang konstan atau harga regional yang wajar bagi petani**. b. Membangun penampungan air (embung) terutama pada sentra jagung hibrida. c. Menyediakan infrastruktur yang berkualitas seperti alat pengering yang handal pada fasilitas penyimpanan.
III	**Membangkitkan Industri Teh Nasional**
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Luas area perkebunan teh terus menurun akibat tingginya biaya produksi teh membuat kebun teh mengalami kerugian. • Volume impor teh terus mengalami kenaikan dengan telah mendominasi pasar domestik Indonesia. • Kebijakan Anti Deforestasi Uni Eropa (EUDR) semakin menekan posisi teh Indonesia di pasar global.	**a. Meningkatkan pelaksanaan program Gerakan Penyelamatan Agribisnis Teh Nasional (GPATN) dan mengkampanyekan Gerakan Minum Teh Nasional.** **b. Memberlakukan *non-tariff measures* untuk komoditas teh seperti SNI dan sertifikasi halal.**
IV	**Memperkuat Industri Karet Nasional**
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Harga karet saat ini belum sesuai dengan dinamika permintaan dan penawaran, sementara Kebijakan Anti Deforestasi Uni Eropa (EUDR) semakin menekan posisi karet Indonesia di pasar global. • Produktivitas karet Indonesia masih rendah, yaitu 1.015 kg/ha, dibawah Thailand yang sebesar 1.379 kg/ha.	**a. Mengembangkan bursa berjangka karet nasional** agar pembentukan harga ***Standard Indonesian Rubber*** (SIR) sesuai dinamika permintaan dan penawaran. b. Memperjuangkan kebijakan regional untuk pembatasan ekspor sementara. **c. Menyempurnakan rencana induk industri perkaretan berbasis keunggulan kompetitif melalui program peremajaan karet rakyat nasional yang komprehensif dan sistem sertifikasi karet berkelanjutan**.
V	**Mengoptimalkan Industri Holtikultura Nasional**
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Produksi holtikultura lebih tinggi dari kebutuhan, sehingga harga jatuh yang merugikan petani. • Penggunaan teknologi yang minim dan banyaknya usaha tani skala kecil menyebabkan mutu produksi rendah dan sulit bersaing di pasar global.	**a. Membangun pusat distribusi atau hub distribusi di kawasan perkotaan.** **b. Mengembangkan kawasan produksi pedesaan** meliputi penetapan kawasan, pembentukan koperasi petani holtikultura, dan bekerja sama dengan pusat distribusi. **c. Mengembangkan kawasan produksi khusus yang memiliki infrastruktur pertanian lengkap bagi perusahaan inti dan petani plasma serta memastikan pembagian yang adil.**

Referensi

1. Fokus Area 2 ini lebih fokus membahas pangan dalam konteks produk-produk pertanian dan perkebunan. Produk perikanan tidak menjadi fokus dalam laporan ini, sedangkan produk-produk sapi dan turunannya (sebagai bagian dari sektor peternakan) akan dibahas dalam Fokus Area 3: "Program Makan Bergizi Gratis: Memberantas Stunting", di mana susu akan menjadi bagian penting dari makanan yang disalurkan.
2. Ritung, S. (2010). *Lahan Sawah dan Kecukupan Produksi Bahan Pangan*. Jurnal Sumberdaya Lahan, 4(1), Juli. Diakses pada 12 April 2024, dari https://media.neliti.com/media/publications/133885-ID-none.pdf
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2022 tentang Cadangan Pangan Pemerintah.
4. Tempo. (2023). *10 Negara Penghasil Beras Terbesar di Dunia: Indonesia di Urutan ke Berapa?*. Diakses pada 15 April 2024, dari https://bisnis.tempo.co/read/1749972/10-negara-penghasil-beras-terbesar-di-dunia-indonesia-di-urutan-ke-berapa?page_num=2
5. Kompas. (2023). *Apa Itu Food Estate? Program Jokowi yang Diakuinya Gagal di Sejumlah Daerah*. Diakses pada 20 April 2024, dari https://www.kompas.com/tren/read/2023/08/19/170000565/apa-itu-food-estate-program-jokowi-yang-diakuinya-gagal-di-sejumlah-daerah
6. Badan Pangan Nasional. (n.d.). *Jawab Tantangan Ketahanan Pangan 2024: Kepala NFA Paparkan Strategi Penugasan Perum Bulog dalam Pengelolaan CPP*. Diakses pada 22 April 2024, dari https://badanpangan.go.id/blog/post/jawab-tantangan-ketahanan-pangan-2024-kepala-nfa-paparkan-strategi-penugasan-perum-bulog-dalam-pengelolaan-cpp
7. Badan Pangan Nasional. (n.d.). *Fokus NFA dalam Tata Kelola Pangan*. Diakses pada 18 April 2024, dari https://badanpangan.go.id/blog/post/fokus-nfa-dalam-tata-kelola-pangan
8. Badan Pangan Nasional. (n.d.). *Jawab Tantangan Pembangunan Pangan Nasional: NFA Beberkan Implementasi Kedaulatan dan Penganekaragaman Pangan dalam Sidang Tahunan Ekonomi Umat 2023*. Diakses pada 10 April 2024, dari https://badanpangan.go.id/blog/post/jawab-tantangan-pembangunan-pangan-nasional-nfa-beberkan-implementasi-kedaulatan-dan-penganekaragaman-pangan-dalam-sidang-tahunan-ekonomi-umat-2023
9. Kompas. (2024). *Cek Fakta: Mahfud Sebut Jumlah Petani dan Lahan Pertanian RI Makin*. Diakses pada 11 April 2024, dari https://www.kompas.com/cekfakta/read/2024/01/21/211037782/cek-fakta-mahfud-sebut-jumlah-petani-dan-lahan-pertanian-ri-makin
10. Food and Agriculture Organization. (2018). *Small Family Farms Country Factsheet Indonesia*. Diakses pada 25 April 2024, dari https://www.fao.org/3/ca4930en/ca4930en.pdf
11. Kompas. (2024). *Mengendalikan Alih Fungsi Lahan Pertanian*. Diakses pada 5 April 2024, dari https://www.kompas.id/baca/opini/2024/05/11/mengendalikan-alih-fungsi-lahan-pertanian
12. Detik Finance. (2016). *Biaya Produksi Padi di RI Lebih Mahal dari Vietnam Hingga China*. Diakses pada 8 April 2024, dari https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3554841/biaya-produksi-padi-di-ri-lebih-mahal-dari-vietnam-hingga-china
13. Republika. (2023). *Rektor IPB: Produksi Beras RI Lebih Mahal dari Negara Lain*. Diakses pada 8 April 2024, dari https://ekonomi.republika.co.id/berita/qoo9yf370/rektor-ipb-produksi-beras-ri-lebih-mahal-dari-negara-lain
14. LPEM FEB UI. (2022). *Policy Brief: Analisis Kebijakan*. Diakses pada 12 April 2024, dari https://www.lpem.org/wp-content/uploads/2022/09/2022-09-29_Final_Policy_Brief_2.pdf
15. Republika. (2023). *Jokowi Ungkap Penyebab Tingginya Harga Pupuk di Indonesia*. Diakses pada 7 April 2024, dari https://ekonomi.republika.co.id/berita/rrb0fm490/jokowi-ungkap-penyebab-tingginya-harga-pupuk-di-indonesia
16. Medcom. (2023). *Holding BUMN Dinilai Bisa Hambat Investasi: Benarkah?*. Diakses pada 18 April 2024, dari https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/gNQjZaqb-holding-bumn-dinilai-bisa-hambat-investasi-benarkah
17. The Conversation. (2023). *Analisis: Petani Terus Dicekoki Pestisida Sintetis Sehingga Kian Rapuh Hadapi Perubahan Iklim*. Diakses pada 14 April 2024, dari https://theconversation.com/analisis-petani-terus-dicekoki-pestisida-sintetis-sehingga-kian-rapuh-hadapi-perubahan-iklim-182943
18. Kementerian Pertanian. (2023). *Buku Analisis Kestanan 2023*. Diakses pada 9 April 2024, dari https://satudata.pertanian.go.id/assets/docs/publikasi/Buku_analisis_Kestan_2023.pdf
19. LPEM FEB UI. (2022). *Policy Brief: Analisis Kebijakan*. Diakses pada 12 April 2024, dari https://www.lpem.org/wp-content/uploads/2022/09/2022-09-29_Final_Policy_Brief_2.pdf
20. Ibid.
21. Badan Pangan Nasional. (n.d.). *GRASP 2030: NFA Ajak Semua Pihak Kolaborasi Tekan Food Loss and Waste (FLW)*. Diakses pada 15 April 2024, dari https://badanpangan.go.id/blog/post/grasp-2030-nfa-ajak-semua-pihak-kolaborasi-tekan-food-loss-and-waste-flw
22. Kompas. (2023). *Sensus Pertanian 2023: Petani Menua, Upah Kecil, dan Produktivitas Turun*. Diakses pada 3 April 2024, dari https://money.kompas.com/read/2023/12/05/110100026/sensus-pertanian-2023--petani-menua-upah-kecil-dan-produktivitas-turun
23. World Bank. (2021). *Profitability and Labor Productivity in Indonesian Agriculture*. Diakses pada 17 April 2024, dari https://documents1.worldbank.org/curated/en/739411554283544226/pdf/Profitability-and-Labor-Productivity-in-Indonesian-Agriculture.pdf
24. Kementerian Pertanian. (2023). *Berita Pertanian*. Diakses pada 16 April 2024, dari https://pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=6158
25. Kompas. (2023). *Ketahanan Pangan Belum Tuntas, Anggaran Kian Terbatas*. Diakses pada 6 April 2024, dari https://www.kompas.id/baca/riset/2023/10/21/ketahanan-pangan-belum-tuntas-anggaran-kian-terbatas
26. East Ventures. (2024). *Digital Competitiveness Index 2024*.
27. Republika. (2023). *Mentan: Level Mekanisasi Pertanian RI Melonjak 236 Persen*. Diakses pada 10 April 2024, dari https://ekonomi.republika.co.id/berita/r971me380/mentan-level-mekanisasi-pertanian-ri-melonjak-236-persen

28. International Food Policy Research Institute. (2020). *Agricultural Science and Technology Data Indonesia-CountryBrief-2020*. Diakses pada 20 April 2024, dari https://cgiar.org
29. Badan Pangan Nasional. (n.d.). *Badan Pangan Nasional Gandeng BRIN dan Telkom University Kembangkan Sistem Perhitungan Perkiraan Harga Pangan Berbasis Machine Learning*. Diakses pada 2 April 2024, dari https://badanpangan.go.id/blog/post/badan-pangan-nasional-gandeng-brin-dan-telkom-university-kembangkan-sistem-perhitungan-perkiraan-harga-pangan-berbasis-machine-learning
30. Purnawan, E., Brunori, G., & Prosperi, P. (2020). *Berdasarkan Data BPS*.
31. Ombudsman Republik Indonesia. (2021). *BPS Diseminasikan Hasil Survei Pertanian Terintegrasi 2021: Rata-Rata Pendapatan Bersih Petani Skala Kecil Rp 523 Juta per Tahun*. Diakses pada 4 April 2024, dari https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-bps-diseminasikan-hasil-survei-pertanian-terintegrasi-2021-rata-rata-pendapatan-bersih-petani-skala-kecil-rp-523-juta-pertahun
32. Antara News. (2023). *Jokowi Ingin Ada Kepastian Harga dan Pembeli Bawang Merah Petani*. Diakses pada 27 April 2024, dari https://www.antaranews.com/berita/2584393/jokowi-ingin-ada-kepastian-harga-dan-pembeli-bawang-merah-petani
33. Kompas. (2023). *Pemanfaatan Benih Unggul Terhambat Regulasi dan Distribusi*. Diakses pada 14 April 2024, dari https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/03/11/pemanfaatan-benih-unggul-terhambat-regulasi-dan-distribusi
34. CNBC Indonesia. (2023). *Pupuk Subsidi Belum Tepat Sasaran: Kementan Janjikan Ini*. Diakses pada 13 April 2024, dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20231123124331-8-491389/pupuk-subsidi-belum-tepat-sasaran-kementan-janjikan-ini
35. CNBC Indonesia. (2023). *Awas Petaka: 41.000 Ha Lahan Padi RI Terancam Gagal Panen*. Diakses pada 7 April 2024, dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20230807153040-4-460855/awas-petaka-41000-ha-lahan-padi-ri-terancam-gagal-panen
36. Ibid.
37. Kompas. (2023). *Minimnya Tampungan Air untuk Irigasi Pertanian*. Diakses pada 6 April 2024, dari https://www.kompas.id/baca/riset/2023/10/12/minimnya-tampungan-air-untuk-irigasi-pertanian
38. Detik News. (2023). *Petani di Sumut Resah Harga Gabah Anjlok Gegara Jalan Rusak Parah*. Diakses pada 9 April 2024, dari https://news.detik.com/berita/d-5850794/petani-di-sumut-resah-harga-gabah-anjlok-gegara-jalan-rusak-parah
39. Kompas TV. (2023). *Akses Terbatas: Harga Panen Petani di TNLL Rendah*. Diakses pada 11 April 2024, dari https://www.kompas.tv/regional/504368/akses-terbatas-harga-panen-petani-di-tnll-rendah
40. Antara News. (2023). *Purwakarta Masih Kekurangan Tenaga Penyuluh Pertanian*. Diakses pada 8 April 2024, dari https://megapolitan.antaranews.com/berita/226437/purwakarta-masih-kekurangan-tenaga-penyuluh-pertanian
41. Kompas. (2023). *Program Makmur Terhambat Minimnya Tenaga Pendamping*. Diakses pada 15 April 2024, dari https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/03/01/program-makmur-terhambat-minimnya-tenaga-pendamping
42. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. (n.d.). *Informasi Teknologi Pangan*. Diakses pada 30 April 2024, dari https://tanamanpangan.pertanian.go.id/detil-konten/iptek/45

"15 Rekomendasi Paket Kebijakan untuk Mendukung Agenda Pembangunan Presiden & Wakil Presiden Indonesia 2024 - 2029"

Fokus Area 3

Program Makan Bergizi Gratis: Mencerdaskan Anak Bangsa

3

IBC
Indonesian Business Council

Sumber Gambar: freepik

Program Makan Bergizi Gratis: Mencerdaskan Anak Bangsa

Misi Asta Cita 4 Prabowo-Gibran

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

Program Hasil Terbaik Cepat No. 1 Prabowo-Gibran

Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.

Stakeholders: *Kementerian Pertanian (Kementan); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek); Kementerian Kesehatan (Kemenkes); Kementerian Sosial (Kemensos); Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri); Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas); Kementerian Keuangan (Kemenkeu); Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN); Pemerintah Daerah (Pemda); Badan Pangan Nasional (BAPANAS).*

> *Semua anak Indonesia dan anak yang masih di kandungan ibu, kita sediakan makanan. Termasuk usia dini, termasuk semua anak di pesantren. Kita akan bangun manusia Indonesia dari dalam kandungan ibunya.*
> ***Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia Periode 2024 - 2029***

Makanan Bergizi Gratis untuk Meningkatkan Kesehatan dan Pendidikan Anak serta Mendukung Perekonomian Lokal

Prabowo Subianto, Presiden Indonesia Terpilih tahun 2024-2029, menempatkan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai kunci utama pembangunan bangsa. Dalam studi *International Monetary Fund* (IMF), investasi SDM melalui pendidikan dan kesehatan di 120 negara berkembang (periode 1975-2000) berdampak signifikan dalam pembangunan SDM yang selanjutnya mendorong pertumbuhan ekonomi kelompok negara tersebut.[1] Saat ini, SDM yang unggul diperlukan untuk menghadapi masa pemulihan yang masih rentan pasca pandemi, krisis iklim, perubahan demografis, dan pertumbuhan ekonomi yang melambat.[2]

Dalam menciptakan SDM unggul Indonesia, salah satu langkah Prabowo-Gibran dengan melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis. Pemerintahan Prabowo-Gibran memperkenalkan Program Makan Bergizi Gratis sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kesehatan dan gizi anak-anak di Indonesia. Berdasarkan survei kesehatan Indonesia (SKI) 2023, remaja Indonesia (5-12 tahun) mengalami sejumlah beban gizi: sekitar 3,5% terlalu kurus, sekitar 7,8% kelebihan berat badan atau obesitas, dan sekitar 16,3% remaja (5-14 tahun) menderita anemia.[3]

Selain Program Makan Bergizi Gratis, Prabowo-Gibran juga akan memberi bantuan gizi kepada ibu hamil dan balita. Berdasarkan data status gizi nasional (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting[4] di Indonesia mengalami penurunan dari 24,4% di tahun 2021 menjadi 21,6% di tahun 2022, namun masih tergolong tinggi dan perlu diturunkan lebih lanjut untuk mencapai target 14% di tahun 2024 dan standar WHO di bawah 20%.[5] Dengan bantuan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), harapannya prevalensi stunting dapat diturunkan.

Program makan di sekolah marak diimplementasikan secara global. Menurut laporan *World Food Programme* (WFP) 2022, diperkirakan sekitar 41% anak yang terdaftar di sekolah dasar mendapatkan manfaat dari program makan di sekolah.[6] Negara berpenghasilan rendah, menengah bawah, menengah atas, dan tinggi masing-masing memiliki cakupan program makan di sekolah sebesar 18%, 39%, 48%, dan 61%. Temuan menarik pada negara-negara berpenghasilan rendah, yaitu negara-negara tersebut justru meningkatkan pendanaan domestik untuk program makanan sekolah. Peningkatan pendanaan dilakukan di tengah kondisi pengetatan fiskal dan penurunan dukungan donor internasional.[7] Ini dilandasi oleh bukti empiris yang menunjukkan dampak positif program terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak.[8]

Program makan di sekolah menjadi bagian integral kebijakan dan program kesehatan sejumlah negara. Lebih dari 87% negara di dunia saat ini memiliki kebijakan makan di sekolah (lihat Gambar 3.1). Di antara negara-negara berpenghasilan rendah, yang menerapkan kebijakan ini juga semakin banyak: 73% di tahun 2020, 82% di tahun 2022.

Gambar 3.1 Cakupan Kebijakan Program Makan di Sekolah dalam Sejumlah Negara

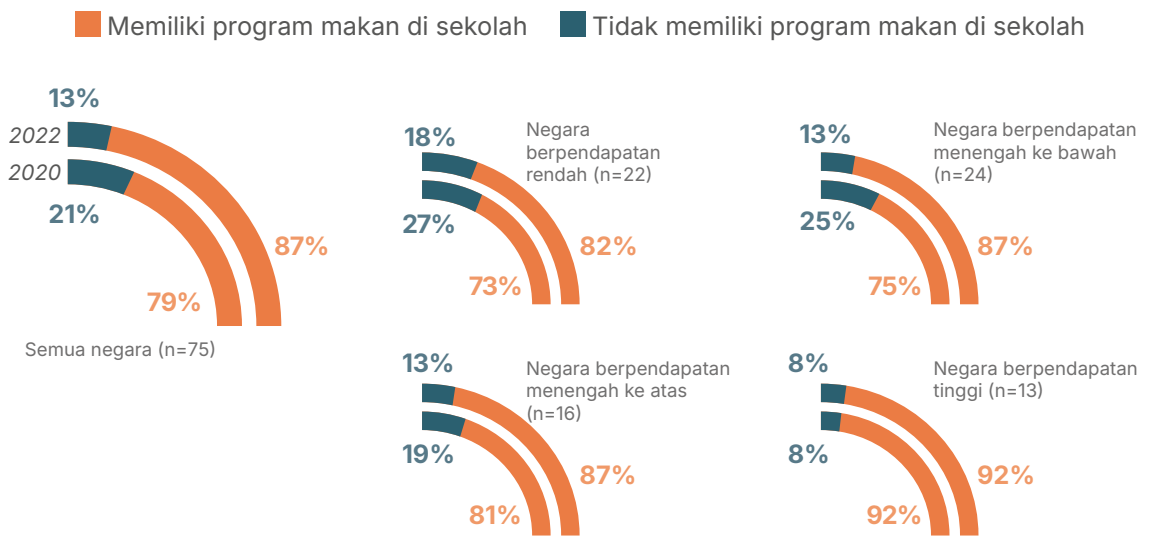

Sumber: *World Food Program Report* 2022

Program makan siang di sekolah di berbagai negara memiliki cakupan yang berbeda-beda. Namun demikian, mayoritas negara tersebut menargetkan pemberian makan di sekolah untuk: (1) siswa sekolah negeri, (2) anak dengan rentang umur rentang usia SD-SMP, dan (3) anak di daerah yang kurang berkembang.

Tabel 3.1 Beberapa Negara yang Menerapkan Program Makan di Sekolah

Komponen	India	Jepang	China	Brazil	Nigeria
Tahun Dimulai	**1995**	**1954**	**2011**	**1940**	**2016**
Sasaran Program	125 juta (sekitar 64%) anak umur di antara 6-14 tahun	99% siswa sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sebagian siswa sekolah menengah atas	40 juta (sekitar 18%) anak yang berada di daerah pedalaman	40 juta anak di semua sekolah negeri	9 juta siswa sekolah dasar di 26 provinsi
Koordinator	Dimasak di sekolah oleh ibu-ibu sekitar sekolah atau *self-help group* (*cooked on-site*)	• Dapur umum (*central kitchen*) • Dimasak di sekolah (*cooked on-site*) • Membeli dari vendor	• Dapur umum (*central kitchen*) • Dimasak di sekolah (*cooked on-site*)	• Dapur umum (*central kitchen*) • Dimasak di sekolah (*cooked on-site*)	Dimasak di sekolah (*cooked on-site*)

Komponen	India	Jepang	China	Brasil	Nigeria
Tahun Dimulai	**1995**	**1954**	**2011**	**1940**	**2016**
Target	• Kehadiran & keikutsertaan siswa • Hasil belajar siswa • Kesetaraan gender	• Keberhasilan edukasi gizi • Performa akademik	• Status & pertumbuhan nutrisi siswa • Perkembangan kognitif siswa	• Ketahanan pangan • Status kesehatan siswa	• Keikutsertaan sekolah • Kehadiran dan hasil belajar siswa

Sumber: *World Bank* 2016, *World Food Programme Report* 2022

Hingga tahun 2022, tercatat 418 juta pelajar di dunia yang telah menerima manfaat program makan di sekolah.[9] Ke depannya, WFP mencanangkan pembentukan Koalisi Program Makan di sekolah, sebuah kerjasama multilateral dan multisektor, dengan target:

1. Memulihkan semua program makan di sekolah nasional yang hilang akibat pandemi pada tahun 2023,
2. Menjangkau 73 juta anak yang paling rentan yang tidak terjangkau bahkan sebelum pandemi pada tahun 2030, dan
3. Meningkatkan kualitas dan efisiensi program kesehatan dan gizi sekolah secara global pada tahun 2030.

Program makan di sekolah tak hanya berdampak pada kesehatan dan pendidikan anak, namun juga turut berkontribusi pada perekonomian. Analisis WFP tahun 2020 menunjukkan bahwa program makan di sekolah secara global telah menciptakan 4 juta pekerja. Setiap 100.000 anak penerima manfaat program makan di sekolah berkontribusi pada penciptaan 1.377 lapangan kerja baru. Mayoritas penyerapan tenaga kerja didominasi juru masak dan tenaga penyiapan makanan. Data ini hanya mencerminkan dampak langsung program, tidak termasuk lapangan kerja tidak langsung atau peluang usaha yang muncul, seperti keuntungan bagi petani lokal yang memasok bahan makanan dalam model "makanan sekolah berbasis pangan lokal". Oleh karena itu, dampak ekonomi yang disajikan dalam Fokus Area ini merupakan perkiraan minimal dengan potensi yang jauh lebih luas.

Gambar 3.2 Penciptaan Lapangan Kerja dalam Setiap 100 Ribu Penerima Manfaat Program Makan di Sekolah

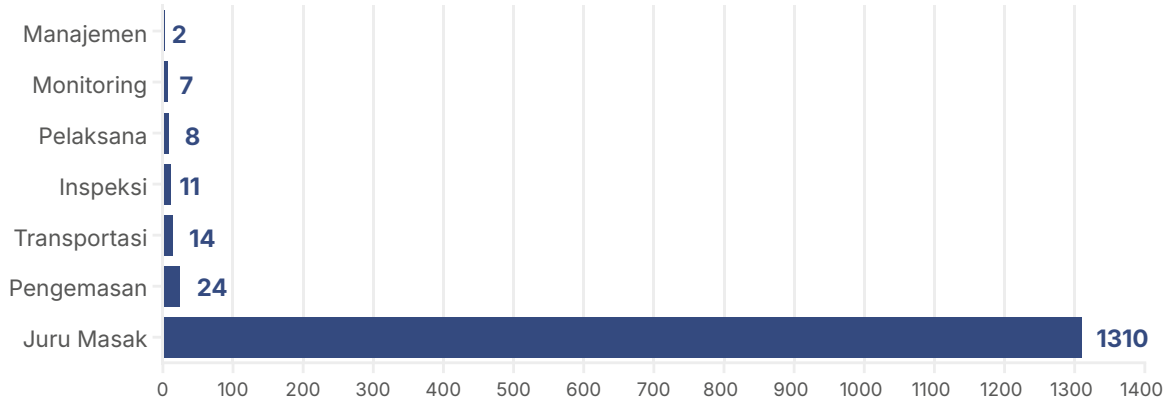

Sumber: *World Food Programme Report* 2020

Program Susu Gratis dan Polemik *Supply* Susu Nasional

Selain memberikan makanan bergizi gratis, Prabowo-Gibran juga berencana menyediakan Program Minum Susu Gratis. Program Minum Susu Gratis akan dilaksanakan bersamaan dengan Program Makan Bergizi Gratis yang menargetkan 82,9 juta orang, termasuk pelajar, santri, dan ibu hamil.[10]

Produksi susu di Indonesia mengalami tren kenaikan, tapi masih jauh dari yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan 4,6 juta ton per tahun. Dalam 3 dekade terakhir, tren produksi susu nasional terus meningkat (lihat Gambar 3.3). Meski demikian, BRIN mengungkapkan bahwa terdapat kesenjangan antara jumlah produksi susu nasional dan konsumsi susu.[11] Pada tahun 2024, konsumsi susu di Indonesia mencapai 4,6 juta ton per tahun sedangkan produksi dalam negeri hanya bisa memasok 0,9 juta ton atau 22% dari total kebutuhan.

Gambar 3.3 Tren Produksi Susu Nasional (1980-2023)

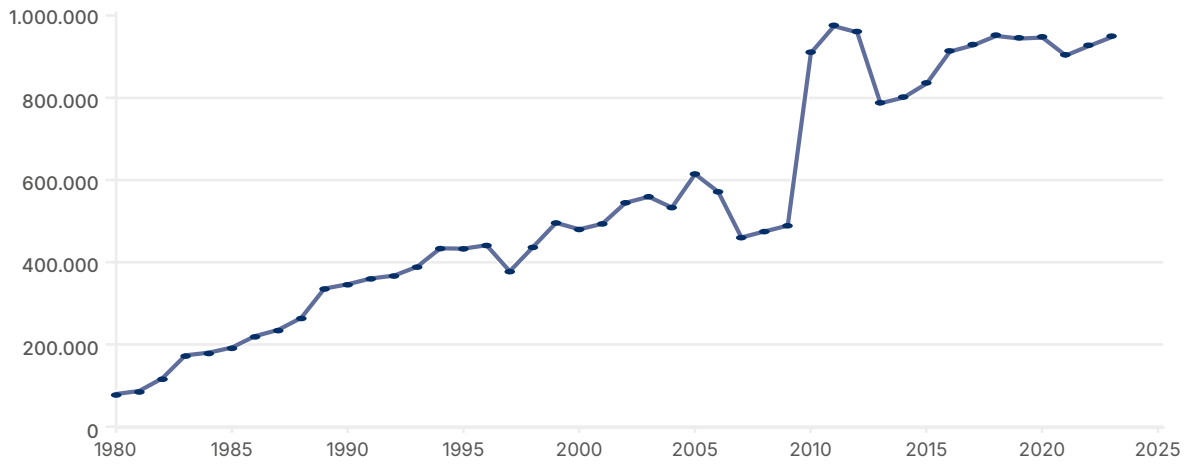

Sumber: Satu Data Pertanian 2023

Untuk mengatasi produksi yang terbatas, kebutuhan susu nasional disokong oleh impor susu yang besar. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, kebutuhan susu Indonesia yang tinggi saat ini masih bergantung pada impor, utamanya dari Selandia Baru dan Australia.[12]

Di tengah situasi ini, pola pengadaan susu untuk program minum susu gratis perlu dikaji lebih mendalam agar tidak memperbesar defisit neraca susu nasional. Dengan target 82,9 juta orang penerima manfaat, diperkirakan kebutuhan susu tahunan akan melonjak dari 4,6 juta ton menjadi 8,7 juta ton. Sementara itu, dengan rata-rata produksi susu tahunan hanya 0,9 juta ton, defisit susu ditaksir mencapai 7,8 juta ton. Lonjakan ini setara dengan kebutuhan 2 juta sapi perah.

Saat ini, pemerintah berencana meningkatkan populasi sapi perah guna mendukung program minum susu gratis dan memenuhi kebutuhan susu nasional secara domestik. Dalam beberapa kesempatan, pemerintah melakukan studi banding ke negara-negara yang telah mengimplementasikan program susu gratis seperti India dan Brazil, Thailand, Filipina, dan Malaysia.[13] Direktur Pengembangan dan Pengendalian Usaha ID Food, Dirgayuza Setiawan, menuturkan, "Saat ini kita punya 400 ribuan sapi perah produktif di Indonesia. Kalau kita mau memenuhi kebutuhan nasional kita, kita perlu meningkatkan jumlah populasinya 4x lipat ke 1,2 juta, itu belum memperhitungkan tambahan kebutuhan program susu gratis. Kalau semua proteinnya benar dari susu, maka kita butuh sekitar 2-2,5 juta sapi perah aktif." Pernyataan ini disampaikan Dirgayuza dalam acara CNBC *Indonesia Economic Outlook* 2024 di Jakarta.[14]

Tantangan

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, saat ini tengah mengkaji tata laksana Program Makan Bergizi dan Susu Gratis.[15] Di antara aspek yang perlu diperhatikan adalah:

- Memetakan dengan tepat dan terukur target penerima program.
- Memprioritaskan sumber pangan lokal sebagai pasokan program.
- Memperhatikan tata kelola dan pelaksanaan antara pemerintah pusat dan daerah.
- Mengintegrasikan kebutuhan program dan kemampuan fiskal Indonesia.

Navigasi Indonesia: Gagasan dan Komitmen Presiden-Wakil Presiden Republik Indonesia 2024 - 2029

Prabowo-Gibran menekankan pentingnya kesehatan dan kesejahteraan anak-anak sebagai bagian dari program kerja pemerintahan mereka. Dalam program prioritas ke-4, Prabowo-Gibran memprioritaskan peningkatan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat melalui inisiatif Makan Siang Gratis di sekolah-sekolah. Program ini bertujuan untuk memastikan setiap anak di Indonesia mendapatkan akses ke makanan bergizi yang mereka butuhkan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Upaya ini mencakup penyediaan makan siang gratis bagi siswa sekolah di seluruh Indonesia, dengan fokus pada pengurangan angka malnutrisi, dan peningkatan prestasi akademik.

Di bawah Asta Cita 4, fokus diberikan pada peningkatan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Ini termasuk menyusun menu makan siang yang seimbang dan bergizi, distribusi makanan melalui dapur umum atau sekolah, dan edukasi gizi bagi siswa dan orang tua. Ahli gizi dilibatkan untuk menyusun menu yang sesuai dengan kebutuhan gizi anak-anak, memastikan variasi dan keseimbangan nutrisi.

Prabowo-Gibran berencana memberikan Makan Siang Gratis kepada murid prasekolah, SD, SMP, SMA, dan pesantren untuk membantu mereka belajar dan bertumbuh kembang. Bantuan makanan bergizi juga diberikan kepada ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia untuk menjaga kesehatan mereka dan membantu ekonomi keluarga. Program ini ditargetkan untuk menjangkau lebih dari 80 juta orang dan diharapkan dapat menjangkau 100% target pada tahun 2029.

Prabowo-Gibran berencana membentuk Badan Gizi Nasional untuk mengimplementasikan program makan bergizi dan susu gratis. Program tersebut memerlukan pendekatan khusus dan badan khusus karena urgensinya. Sebagai bagian dari program prioritas, tidak menutup kemungkinan juga akan dibentuk Kementerian Koordinator (Kemenko) khusus untuk mempercepat pelaksanaannya.[16]

Program ini bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut dengan menyediakan makanan bergizi secara gratis kepada siswa prasekolah, SD, SMP, SMA, dan pesantren. Harapannya, program ini dapat meningkatkan performa belajar siswa serta peningkatan gizi siswa. Dengan adanya peningkatan performa belajar dan kesehatan, diharapkan tercipta generasi muda yang cerdas, sehat, dan berdaya saing tinggi, yang akan menjadi penggerak utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Selain itu, program ini juga diharapkan dapat mendorong perekonomian dengan memberikan kepastian pembelian produk pangan dari petani lokal. Dengan demikian, program makan bergizi gratis tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan anak-anak Indonesia, tetapi juga berkontribusi dalam menggerakkan roda ekonomi nasional melalui sektor pertanian.

***Best practice* dari negara-negara tersebut perlu diadaptasi dan disesuaikan dengan kondisi lokal di Indonesia.** Ini memastikan bahwa program makan siang gratis dapat diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi anak-anak Indonesia.

Rekomendasi Paket Kebijakan 3:

A	**Menciptakan Ekosistem Program Makan Bergizi Gratis yang Holistik dan Berkelanjutan**
B	**Memperkuat Industri Peternakan Sapi Nasional**

Rincian Rekomendasi A: Menciptakan Ekosistem Program Makan Bergizi Gratis yang Holistik dan Berkelanjutan

I Menyiapkan Tata Kelola Program yang Terintegrasi dan Kolaboratif

Program makan bergizi gratis di Indonesia perlu memiliki tata kelola yang terintegrasi dan kolaboratif agar dapat efektif menyasar penerima manfaat serta memastikan penerapan yang tepat sasaran. Antara lain dengan:

a. **Mengembangkan kebijakan nasional yang komprehensif** untuk mendukung program makan bergizi gratis yang didukung oleh berbagai kebijakan terkait, **termasuk pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pangan**.
b. **Mengembangkan skema kemitraan publik-swasta dan kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah lainnya** untuk memanfaatkan sumber daya, keahlian, dan keunggulan masing-masing sektor/lembaga dalam rangka meningkatkan dampak, jangkauan, dan keberlanjutan program.
c. **Mempertimbangkan pembentukan badan koordinasi, regional, dan daerah sebagai pengendali, percepatan dan penyempurnaan program di seluruh wilayah Indonesia**, termasuk memastikan adanya pendampingan dan pelatihan kapasitas tim pelaksana di setiap daerah, pengkajian inovasi berdasarkan umpan balik dan hasil evaluasi, serta pusat jaringan kolaborasi.
d. **Memastikan peraturan daerah dapat mendukung pelaksanaan program di tingkat lokal.**
e. **Melakukan survei umpan balik secara rutin untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan mengevaluasi** program berdasarkan hasil yang diperoleh.
f. **Menggunakan teknologi untuk mengelola logistik dan rantai pasokan secara efisien**.

II Melibatkan Aktor Pembangunan pada Tingkat Lokal secara Aktif

Keberhasilan program makan bergizi gratis sangat bergantung pada keterlibatan aktif aktor-aktor pembangunan di tingkat lokal, untuk memastikan program berjalan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Antara lain dengan:

a. **Melibatkan komunitas lokal, termasuk orang tua, guru, dan pelaku bisnis lokal, untuk berperan aktif dalam pelaksanaan program.**
b. **Mempertimbangkan pembentukan komite lokal untuk mengawasi pelaksanaan program**, memastikan transparansi dan akuntabilitas di tingkat komunitas.
c. **Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya nutrisi anak dan manfaat dari program makan bergizi gratis.**
d. **Mengaktifkan relawan komunitas** untuk membantu implementasi program di lapangan.

III Memastikan Keberlanjutan Program Berlangsung secara Jangka Panjang

Krusial untuk merancang strategi yang memastikan program makan bergizi gratis dapat bertahan dan berkembang dalam jangka panjang, dengan mempertimbangkan aspek finansial dan sumber daya lokal. Antara lain dengan:

a. Memastikan anggaran pemerintah cukup dan digunakan secara efisien untuk memastikan stabilitas finansial program.
b. Menjalin **kerja sama dengan petani lokal sebagai pemasok bahan baku makanan serta memberikan pendampingan tentang *Good Farming Practices* (GFP)** untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memastikan makanan yang segar dan bergizi.
c. Mendorong **produksi pangan lokal** untuk mengurangi ketergantungan impor pangan.
d. Mengembangkan **praktik berkelanjutan dalam proses produksi dan distribusi makanan**.
e. Mengembangkan **sistem yang mampu menyesuaikan program dengan kondisi anak secara khusus termasuk alergi, diet khusus, dan penyakit**.
f. Melakukan **audit berkala** untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
g. Menggunakan sistem pelacakan dan manajemen digital untuk memonitor pelaksanaan program.

IV Mengembangkan Skalabilitas Program secara Komprehensif

Untuk mencapai dampak yang lebih luas, program makan bergizi gratis harus dirancang agar dapat diperluas ke berbagai wilayah dengan penyesuaian yang tepat sesuai dengan kebutuhan setempat. Antara lain dengan:

a. Memetakan kebutuhan di setiap daerah untuk menyesuaikan implementasi program dengan kondisi dan kebutuhan lokal.
b. Mengembangkan rencana ekspansi bertahap untuk mencakup lebih banyak wilayah.
c. Membangun koordinasi yang kuat antara pusat dan daerah untuk memastikan operasional yang optimal melalui mekanisme pemantauan dan pelaporan yang handal.
d. Mengembangkan sistem rantai pasokan yang efisien untuk memastikan pengiriman bahan makanan yang tepat waktu dan konsisten, mengurangi pemborosan dan memastikan keamanan pangan melalui pelibatan dengan sektor swasta.
e. Mengadopsi model "*train-the-trainer*" untuk memperluas pelatihan secara regional.

V Memastikan Replikabilitas yang Terstandar dan Aman bagi Penerima Manfaat

Menjamin replikabilitas yang konsisten, terstandar, dan aman di berbagai daerah menjadi keharusan untuk memberikan jaminan kualitas terhadap program ini. Antara lain dengan:

a. Menetapkan panduan standar operasional yang jelas dan terperinci untuk seluruh aspek program, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.
b. Menunjuk daerah *champion* dengan operasional terbaik dan dampak paling besar sebagai model percontohan untuk beberapa daerah lain.

VI Memastikan Indikator Keberhasilan Program Berdampak Multidimensi dan Multi Sektor

Evaluasi keberhasilan program makan bergizi gratis harus mencakup berbagai aspek, untuk memastikan dampak yang luas dan berkelanjutan. Antara lain dengan:

a. Menyusun indikator keberhasilan yang komprehensif, termasuk aspek perkembangan nutrisi anak, pertumbuhan pertanian dan ekonomi lokal, serta efisiensi dan transparansi operasional.
b. Mendukung petani lokal dan merangsang ekonomi lokal dengan meningkatkan pendapatan mereka.
c. Memastikan operasi nasional yang efisien dan transparan dengan target biaya per makanan yang terukur.
d. Memastikan distribusi makanan tepat waktu ke semua sekolah yang ditargetkan.
e. Meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan melalui survei dan umpan balik rutin.

Beberapa rekomendasi di atas merujuk pada temuan IBC bahwa replikabilitas, skalabilitas, dan keberlanjutan adalah tiga elemen yang selama ini menjadi isu dalam keberhasilan program pembangunan sosial-ekonomi yang diinisiasi oleh sektor swasta. Ketiga elemen ini dapat dipertimbangkan oleh pemerintah dalam mengembangkan dan mencapai kesuksesan program makan bergizi gratis. Rincian lebih lanjut terdapat dalam dokumen "*Leveraging Private Sector Initiatives to Support Socio-Economic Development Agenda*".

Rincian Rekomendasi B: Memperkuat Industri Peternakan Sapi Nasional

Rekomendasi berikut merujuk pada dokumen Narasi Tunggal Pertanian, yang disusun melalui kolaborasi antara KADIN, PISAgro, dan APINDO, yang merupakan mitra dari IBC. Usulan rekomendasi lengkap Sektor Peternakan ini dapat dilihat langsung pada Dokumen Narasi Tunggal Pertanian.

I	Meningkatkan Populasi Sapi Perah dan Produksi Susu Segar Dalam Negeri
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Produksi susu segar dalam negeri (SSDN) hanya mampu memenuhi 22% dari total kebutuhan nasional. • Populasi sapi perah terkonsentrasi di Jawa, mencapai 98%. Selain itu, perkembangan populasi sapi perah nasional juga menurun.	**a. Menyusun program peningkatan populasi sapi perah dan produksi susu segar dalam negeri.** **b. Memastikan peternak kecil dan menengah mendapat manfaat dari impor sapi perah melalui pembiayaan inovatif dan keterlibatan pada *mega-farm*.** c. Menyediakan sapi dara dan bunting yang dapat dibeli oleh peternak rakyat dengan harga terjangkau.
II	**Meningkatkan Produksi Dalam Negeri dan Mengurangi Impor Sapi Potong**
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Kebutuhan daging sapi/kerbau meningkat 4,75% per tahun, sementara produksi domestik belum mencukupi. Impor daging sapi mencapai 228 ribu ton pada 2022.[17]	**a. Mengkaji ulang kebijakan importasi ternak sapi dan daging sapi** untuk fokus pada nilai tambah di hulu, sehingga memberikan *multiplier effect* kepada peternak. **b. Mengkaji ulang kebijakan impor daging kerbau dengan mengontrol jumlah dan membatasi wilayah edar.** **c. Memberikan dukungan insentif untuk industri peternakan sapi nasional.** **d. Melanjutkan kewajiban bagi importir sapi untuk melakukan pembiakan sesuai kapasitas kandang.**
III	**Mencegah dan Mengendalikan Penyakit Hewan**
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Wabah penyakit hewan seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan *Lumpy Skin Disease* (LSD) mengancam produktivitas peternakan di Indonesia.[18] • Ketersediaan vaksin dan obat-obatan untuk penyakit hewan tertentu masih terbatas.[19]	**a. Meningkatkan alokasi anggaran untuk melakukan vaksinasi dan biosekuriti secara menyeluruh.** b. Mengembangkan sistem informasi kesehatan hewan yang terintegrasi. **c. Meningkatkan pengawasan inspeksi kesehatan dan sertifikasi yang jelas untuk semua daging impor.**

IV	Mengoptimalkan Pemanfaatan Lahan Ternak
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Indonesia memiliki lahan yang luas untuk peternakan sapi, namun pembebasannya sulit.[20] • Peternakan masih terfokus di Pulau Jawa dan mayoritas peternak masih tradisional dengan sapi yang sedikit.[21]	**a. Mendorong pengembangan sentra peternakan di luar Jawa dengan dukungan insentif dan infrastruktur.** **b. Mengembangkan model integrasi peternakan-hutan, seperti sistem *silvopastura*.** **c. Menetapkan regulasi tentang penyediaan lahan dari lahan *idle* milik negara.**

V	Menyediakan Air Bersih dan Pakan Ternak Bernutrisi Tinggi
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Peternak kesulitan dalam mendapatkan air bersih, terutama pada musim kemarau.[22] • Mayoritas peternak sapi masih menggunakan pakan hijauan yang rendah nutrisi dan sulit untuk diperoleh.[23]	**a. Meningkatkan infrastruktur penyediaan air peternakan secara holistik yang dilakukan secara kolaboratif** dari Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah. b. Melanjutkan program penanaman benih hijauan secara lebih luas. **c. Memperkuat program pendampingan peternak dengan memperkenalkan topik peternakan terkini seperti, penerapan *Good Farming Practices* (GFP), pembuatan pakan komplit fermentasi, dan lain-lain.**

Referensi

1. International Monetary Fund. (2016). *Social Spending, Human Capital, and Growth in Developing Countries: Implications for Achieving SDGs*. Diakses pada 3 April 2024, dari https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Social-Spending-Human-Capital-and-Growth-in-Developing-Countries-Implications-for-Achieving-17781
2. World Bank. (2023). *The Changing Nature of Work in Indonesia*. Diakses pada 5 April 2024, dari https://documents1.worldbank.org/curated/en/099429105152431304/pdf/IDU1271f7d29163a714b1018d49145c67b70577b.pdf
3. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. (2023). *Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023*. Kementerian Kesehatan. Diakses pada 8 April 2024, dari https://kemkes.go.id
4. Stunting adalah kondisi dimana anak lebih pendek dari usia seharusnya karena kekurangan gizi kronis.
5. Kementerian Kesehatan. (2023). *Mengenal Lebih Jauh Tentang Stunting*. Diakses pada 10 April 2024, dari https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2657/mengenal-lebih-jauh-tentang%2520stunting
6. World Food Programme. (2022). *State of School Feeding Worldwide 2022*. Diakses pada 12 April 2024, dari https://www.wfp.org/publications/state-school-feeding-worldwide-2022
7. Ibid.
8. Ibid.
9. Ibid.
10. Kompas. (2024). *1001 Konsekuensi Program Minum Susu Gratis*. Diakses pada 14 April 2024, dari https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/04/19/1001-konsekuensi-program-minum-susu-gratis
11. Tabloid Sinartani. (2023). *BRIN: Gap Kebutuhan dan Produksi Besar Belum Ditambah Program Susu Gratis*. Diakses pada 16 April 2024, dari https://tabloidsinartani.com/detail/indeks/ternak/24065-BRIN-Gap-Kebutuhan-dan-Produksi-Besar-Belum-Ditambah-Program-Susu-Gratis
12. Detik Finance. (2023). *Airlangga Buka-Bukaan Soal Susu Gratis: Prabowo-Gibran*. Diakses pada 18 April 2024, dari https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7346151/airlangga-buka-bukaan-soal-susu-gratis-prabowo-gibran
13. Bisnis.com. (2024). *RI Butuh 2,5 Juta Sapi Perah Aktif Untuk Jalankan Program Susu Gratis*. Diakses pada 20 April 2024, dari https://ekonomi.bisnis.com/read/20240301/12/1745433/ri-butuh-25-juta-sapi-perah-aktif-untuk-jalankan-program-susu-gratis
14. Ibid.
15. Detik News. (2023). *Bappenas Kaji Makan Siang Gratis: Siapa Pantas Menerima Hingga Soal Gizi*. Diakses pada 22 April 2024, dari https://news.detik.com/berita/d-7327255/bappenas-kaji-makan-siang-gratis-siapa-pantas-menerima-hingga-soal-gizi
16. Kompas. (2024). *Prabowo Bakal Bentuk Badan Gizi Nasional Untuk Urus Program Makan Siang*. Diakses pada 24 April 2024, dari https://nasional.kompas.com/read/2024/02/22/14590361/prabowo-bakal-bentuk-badan-gizi-nasional-untuk-urus-program-makan-siang
17. CNBC Indonesia. (2023). *Masih Tergantung Impor: RI Jauh Dari Swasembada Daging Sapi*. Diakses pada 26 April 2024, dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20231030091814-8-484704/masih-tergantung-impor-ri-jauh-dari-swasembada-daging-sapi
18. Kementerian Pertanian. (2023). *Laporan: Analisis Kebutuhan dan Produksi Sapi*. Diakses pada 28 April 2024, dari https://repository.pertanian.go.id/server/api/core/bitstreams/857fce99-381b-4ae3-8203-ea37c4f06f79/content
19. Kontan. (2023). *Vaksin dan Obat-Obatan Untuk Wabah PMK Masih Belum Maksimal: Begini Dampaknya*. Diakses pada 30 April 2024, dari https://industri.kontan.co.id/news/vaksin-dan-obat-obatan-untuk-wabah-pmk-masih-belum-maksimal-begini-dampaknya
20. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. (2023). *Kebijakan Pembebasan Lahan Untuk Peternakan Sapi*. Diakses pada 3 April 2024, dari https://ditjenpkh.pertanian.go.id/berita/324-ri-punya-banyak-lahan-buat-peternakan-sapi-tapi-pembebasannya-sulit
21. Kompas. (2023). *Sudah Saatnya Peternakan Sapi Tak Lagi Berfokus di Jawa*. Diakses pada 5 April 2024, dari https://www.kompas.id/baca/riset/2023/03/31/sudah-saatnya-peternakan-sapi-tak-lagi-berfokus-di-jawa
22. Kompas. (2015). *Krisis Air Bersih: Warga Beri Ternak Minum Air Bekas Mandi*. Diakses pada 7 April 2024, dari https://regional.kompas.com/read/xml/2015/09/02/18003511/Krisis.Air.Bersih.Warga.Beri.Ternak.Minum.Air.Bekas.Mandi
23. RRI. (2023). *Sulit Cari Pakan: Petani Terpaksa Jual Ternak*. Diakses pada 9 April 2024, dari https://www.rri.co.id/index.php/daerah/407870/sulit-cari-pakan-petani-terpaksa-jual-ternak

"15 Rekomendasi Paket Kebijakan untuk Mendukung Agenda Pembangunan Presiden & Wakil Presiden Indonesia 2024 - 2029"

Fokus Area 4

B50-B100, E10, dan Bioavtur:
Menuju Swasembada Energi Nasional

4

IBC
Indonesian Business Council

Sumber Gambar: freepik

B50-B100, E10, dan Bioavtur: Menuju Swasembada Energi Nasional

Misi Asta Cita 5 Prabowo-Gibran

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Program Prioritas No. 15 Prabowo-Gibran

Mencapai swasembada pangan, energi, dan air.

Stakeholders: *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian); Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves); Kementerian Pertanian (Kementan); Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM); Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK); Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN); Kementerian Perindustrian (Kemenperin); Kementerian Perdagangan (Kemendag); Kementerian Luar Negeri (Kemenlu); Kementerian Keuangan (Kemenkeu); Kementerian Perhubungan (Kemenhub); Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).*

> *Kita sudah bisa bikin B100, artinya biodiesel dari kelapa sawit 100 persen. Bisa kita bayangkan tidak? Kita tidak akan impor lagi solar dari luar negeri, karena kita punya produksi kelapa sawit sekarang 48 juta ton.*
>
> ***Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia Periode 2024 - 2029***

Menuju Swasembada Energi

Seiring progres menjadi negara maju, kebutuhan energi Indonesia semakin meningkat. Di tahun 2022, penggunaan energi per kapita Indonesia 35,5 GJ, sedangkan Thailand dan Malaysia masing-masing 70,62 GJ dan 142,51 GJ. Pemerintah telah menerbitkan Kebijakan Energi Nasional untuk memastikan kebutuhan energi ini dapat dipenuhi dengan cara yang ramah lingkungan, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan membangun ketahanan energi nasional dengan mengurangi impor energi.

Di balik tren impor BBM yang meningkat, terdapat potensi swasembada energi yang belum dioptimalkan secara maksimal. Selama 10 tahun terakhir, Indonesia masih terjebak dalam kebutuhan impor BBM yang besar. Tren konsumsi BBM terus meningkat (5,3% per tahun) sedangkan produksi menurun (-6,6% per tahun), sejak 2019.[1] Di lain sisi, Indonesia memiliki potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang besar untuk memenuhi kebutuhan energi domestik.[2]

Energi Baru dan Terbarukan (EBT) memungkinkan Indonesia memenuhi kebutuhan energinya sambil mengurangi emisi karbon dan ketergantungan pada impor. Indonesia telah berkomitmen meningkatkan kontribusi EBT dalam bauran energi primer hingga 17-19% pada tahun 2025.[3] Salah satu bentuk EBT adalah biofuel (bahan bakar nabati atau BBN) yang terdiri dari biodiesel, bioavtur, dan bioetanol. Bahan-bakar ini dihasilkan dari kelapa sawit, singkong, tebu, jagung, dan biomassa lainnya yang berpotensi besar untuk dikembangkan di Indonesia.

Percepatan Implementasi Biofuel

Indonesia produsen terbesar *Crude Palm Oil* (CPO), yang merupakan bahan baku untuk biodiesel. Kontribusi Indonesia sebesar 67% dari produksi CPO global (sekitar 50 juta ton per tahun). Selama dua dekade terakhir, industri CPO Indonesia tumbuh cepat. Volume Ekspor CPO meningkat 254 kali lipat dari 0,11 juta ton (1980) menjadi 27 juta ton (2020), demikian pula nilai ekspornya meningkat 175 kali lipat dalam periode yang sama. Selain itu, produk sampingan CPO, yaitu POME (*Palm Oil Mill Effluent*, limbah cair dari ekstraksi minyak) dan UCO (*Used Cooking Oil*, minyak goreng bekas) bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku bioavtur.

Gambar 4.1 Ekspor Kelapa Sawit Meningkat Jauh di Atas Komoditas Agro Lainnya

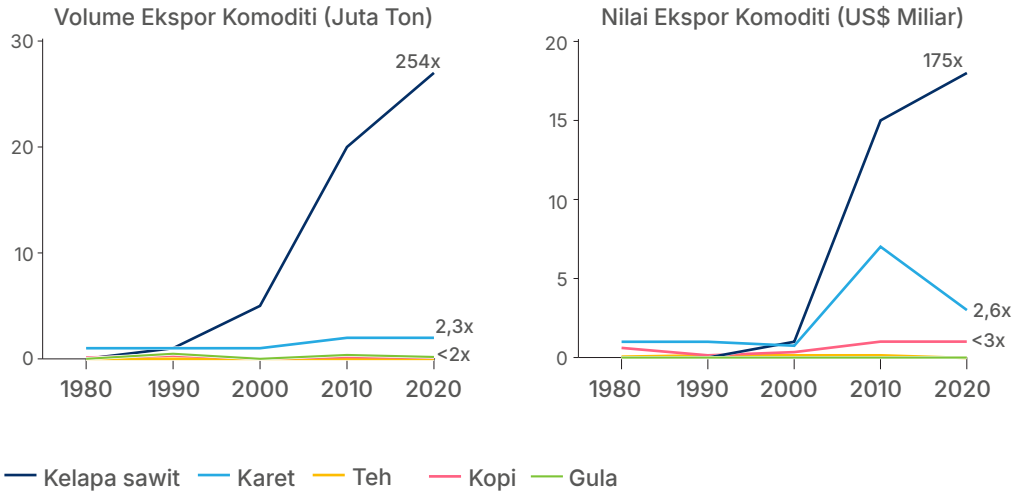

Sumber: Dirjenbun 2022

Singkong, tebu dan jagung, yang merupakan bahan baku bioetanol, sangat berpotensi untuk dikembangkan di Indonesia. Pemerintah telah memasukkan singkong sebagai komoditas utama dalam program pembangunan lumbung pangan (*Food Estate*),[4] dengan potensi bioetanol nasional mencapai 2,9 - 6,3 miliar liter per tahun.[5] Pada komoditas gula, pemerintah telah menargetkan perluasan lahan hingga 700.000 hektare (ha) untuk menghasilkan 35 juta ton tebu.[6] Selain itu, lahan kering di Indonesia memiliki potensi besar untuk ditanami jagung hibrida, yang dapat meningkatkan hasil panen jagung secara signifikan.[7] Produksi jagung juga terus meningkat dalam 20 tahun terakhir, dan diproyeksikan mencapai 16 juta ton pada tahun 2024.[8]

Indonesia memiliki visi mencapai swasembada energi melalui biofuel. Komitmen ini ditetapkan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) tahun 2017. Saat ini, implementasi biodiesel telah mencapai target RUEN tahun 2025, di mana realisasi penyaluran B35 di tahun 2023 telah mencapai 12,2 juta kiloliter, sementara targetnya 6,9 juta kiloliter di tahun 2025 (lihat Tabel 4.1). Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Yudo Dwinanda Priaadi menyampaikan: "Indonesia telah menerapkan B35 dan akan ditingkatkan menjadi B40 pada 2030 mendatang dan E50 (bioetanol) pada 2050," ujarnya saat membuka *Asean Renewable Energy International Seminar* di Jakarta, Agustus 2023.

Tabel 4.1 Realisasi Implementasi Kebijakan Biofuel di Indonesia

Produk Biofuel	Komponen	2016	2025	2050	Realisasi 2023[9]
Biodiesel	Tingkat Campuran (%)	20,0	30,0	30,0	35,0
	Volume (juta kl)	2,5	6,9	17,1	12,2
Bioetanol	Tingkat Campuran (%)	5,0	20,0	20,0	1. *Market trial bioetanol* dengan campuran 5% (E5) dilakukan 2023 2. Bauran biofuel dalam bioetanol akan ditingkatkan hingga 20% pada tahun 2025.[10]
	Volume (juta kl)	0,1	2,6	11,4	
Sustainable Aviation Fuel **(SAF) atau Bioavtur**	Tingkat Campuran (%)	2,0	5,0	10,0	1. Uji Terbang Bioavtur campuran 2% (J2) pada pesawat komersial dilakukan 2023,[11] 2. Sudah ada *roadmap* produksi bioavtur berbasis *Palm Kernel Oil* (PKO) oleh Kementerian ESDM.[12]
	Volume (juta kl)	0,0	0,1	2,7	

Sumber: Perpres No 22 Tahun 2017 dan Laporan Kerja Kementerian ESDM 2023

Pengembangan bioavtur di Indonesia telah dilakukan sejak 2010. Bioavtur merupakan bahan bakar pesawat yang dibuat dari campuran avtur dan biofuel. Perkembangan bioavtur di Indonesia sebagai berikut:

- **2010:** Pertamina memulai inisiasi *Sustainable Aviation Fuel* (SAF).
- **2021:** PT Kilang Pertamina Internasional berhasil memproduksi SAF J2.4.
- **2023:** Uji coba produk SAF ke pesawat komersial milik Garuda Indonesia. Hasil pengujian menunjukkan bahwa SAF J2.4 memiliki kualitas yang sama dengan avtur konvensional.[13]
- **2025:** Target bioavtur dengan campuran 5%, sesuai RUEN.

Untuk percepatan bioetanol, Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden No 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel). Percepatan tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan gula konsumsi dan industri, serta peningkatan produksi bioetanol yang berasal dari tebu. Peraturan tersebut menetapkan peta jalan untuk mempercepat swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol sebagai biofuel. Peta jalan ini mencakup peningkatan produktivitas tebu menjadi 93 ton per ha melalui perbaikan praktik agrikultur, penambahan lahan perkebunan tebu baru seluas 700 ribu ha, peningkatan efisiensi pabrik gula, peningkatan kesejahteraan petani tebu, dan produksi bioetanol dari tebu sebesar minimal 1,2 juta kiloliter (kl).[14]

Menciptakan Lapangan Kerja, Mengentaskan Kemiskinan, Membangun Energi Berkelanjutan

Pengembangan biofuel menciptakan lapangan kerja di sektor pertanian dan industri pengolahan. Ini membantu mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan di pedesaan. Produksi sawit belum bisa dilakukan dengan mekanisasi secara penuh, sehingga masih banyak membutuhkan tenaga kerja. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memperkirakan pada tahun 2022 penyerapan tenaga kerja mencapai 5 juta orang di sentra sawit dengan total luas perkebunan 16,3 juta ha.[15]

Industri sawit juga berkontribusi pada penurunan kemiskinan dan ketimpangan. Studi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tahun 2016 menemukan bahwa sekitar 1,3 juta penduduk pedesaan di Indonesia berhasil keluar dari kemiskinan melalui pertumbuhan industri kelapa sawit. Daerah pedesaan dengan lahan kelapa sawit yang lebih besar mengalami penurunan kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Diperkirakan sekitar 10 juta penduduk telah berhasil keluar dari kemiskinan berkat industri kelapa sawit.[16]

Perkebunan rakyat merupakan kontributor terbesar kedua (34%) dari produksi CPO nasional. Status pengusahaan lahan sawit di Indonesia dibagi menjadi tiga jenis, yaitu Perkebunan Rakyat (PR), Perkebunan Besar Negara (PBN), dan Perkebunan Besar Swasta (PBS). Dalam lima tahun terakhir (2019-2023), komposisi produksi CPO relatif konstan, yaitu rata-rata 33,9% berasal dari PR, 4,8% dari PBN, dan 61,3% dari PBS.[17]

Gambar 4.2 Produksi CPO Sebagian Besar Berasal dari Perkebunan Besar Swasta (PBS) dan Perkebunan Rakyat (PR)

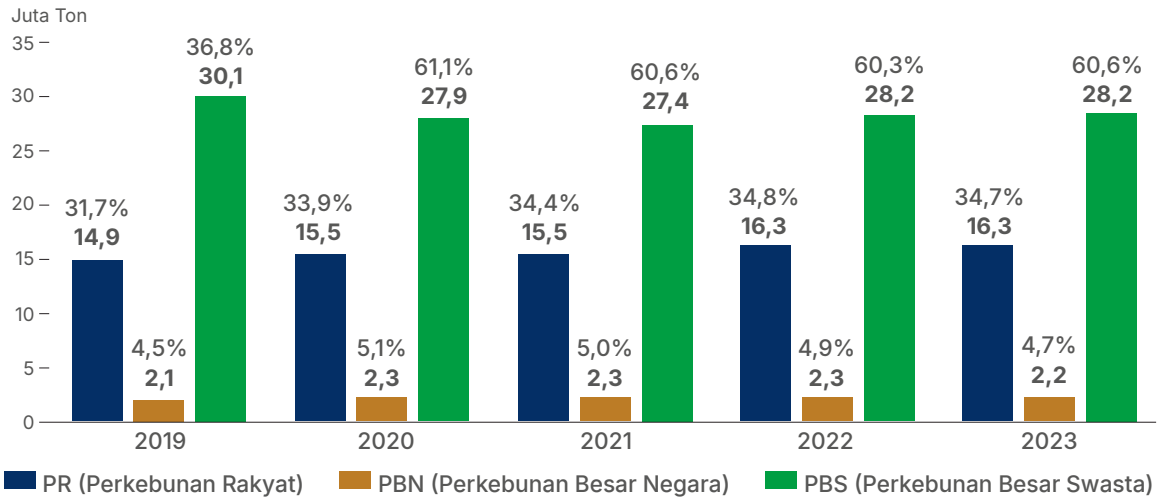

Sumber: Statistik Perkebunan, Kementan 2024

Tantangan Pengembangan Biodiesel, Bioetanol, dan Bioavtur

Pengembangan biodiesel menghadapi tantangan berikut:

1. **Harga biodiesel yang kurang kompetitif**. Menurut IPOSS, harga indeks pasar biodiesel sebesar Rp12.453 per liter. Ini cukup tinggi, namun bisa diturunkan lagi apabila dana subsidi BBM solar impor dialihkan untuk biofuel yang merupakan produksi dalam negeri.
2. **Legalitas lahan perkebunan sawit menghambat penyaluran dana bantuan**. Ada 2,2 juta ha perkebunan rakyat yang berada di kawasan hutan dan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengklaim lebih dari 70% perkebunan rakyat saat ini belum memiliki sertifikat (2018).[18] Ketidakjelasan status ini menghambat penyaluran dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).[19]
3. **Kebutuhan CPO yang semakin meningkat memerlukan strategi intensifikasi.** CPO dimanfaatkan tidak hanya sebagai bahan baku biodiesel, tetapi juga untuk kebutuhan pangan, industri oleokimia, dan ekspor. Intensifikasi produksi sawit diperlukan untuk memastikan peningkatan campuran biodiesel.

Pengembangan bioavtur memiliki sejumlah tantangan:

1. Terbatasnya jumlah dan jenis bahan baku untuk produksi bioavtur, karena bahan bakunya juga digunakan sebagai bahan baku makanan dan industri lainnya seperti sawit dan tebu.
2. Tingginya biaya produksi bioavtur.
3. Terbatasnya infrastruktur termasuk untuk produksi, penyimpanan, dan distribusi bioavtur.
4. Proses sertifikasi yang rumit.[20]

Pengembangan bioetanol juga memiliki sejumlah tantangan:

1. **Harga bioetanol tidak kompetitif.** Harga bioetanol lebih mahal dibandingkan solar dan bensin non-subsidi, dan lebih tinggi dari biodiesel.[21] Sedikitnya insentif pada produk bioetanol juga membuatnya memasuki pasar.[22]
2. **Kepastian pasokan bahan baku.** Saat ini produksi tebu, jagung, dan singkong belum memberi kepastian untuk produksi bioetanol.[23] Dengan penetapan target bauran bioetanol hingga 20% pada tahun 2025, pasokan bahan baku untuk bioetanol harus terus dipastikan dengan dukungan ekosistem yang baik.
3. **Tingginya biaya investasi.** Tanpa insentif pemerintah yang signifikan, bioetanol tidak akan dapat bersaing dengan harga bahan bakar fosil, sehingga menghambat adopsinya secara luas. Di Brasil, yang dikenal sebagai pemimpin dunia dalam produksi etanol, pemerintah telah berinvestasi besar-besaran dalam infrastruktur, termasuk fasilitas produksi, penyimpanan, jaringan distribusi, dan stasiun pengisian bahan bakar etanol.[24]
4. **Belum ada kaitan kebijakan dengan industri kendaraan.** Berdasarkan data GAIKINDO, rata-rata mesin mobil yang beredar di Indonesia saat ini baru bisa menerima bahan bakar minyak (BBM) bioetanol 10%.[25] Peningkatan bauran bioetanol hingga 20% pada 2025 memerlukan penyesuaian terhadap mesin pada mobil-mobil di Indonesia.

Sumber Gambar: freepik

Tantangan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan Konversi Lahan untuk Komoditas Biofuel

Untuk mendukung ketersediaan bahan baku utama biofuel, IPOSS telah mengidentifikasi empat tantangan utama yang perlu diatasi:

Gambar 4.3 Tantangan Dan Kebijakan Yang Diperlukan Untuk Menyukseskan PSR dan Konversi Lahan

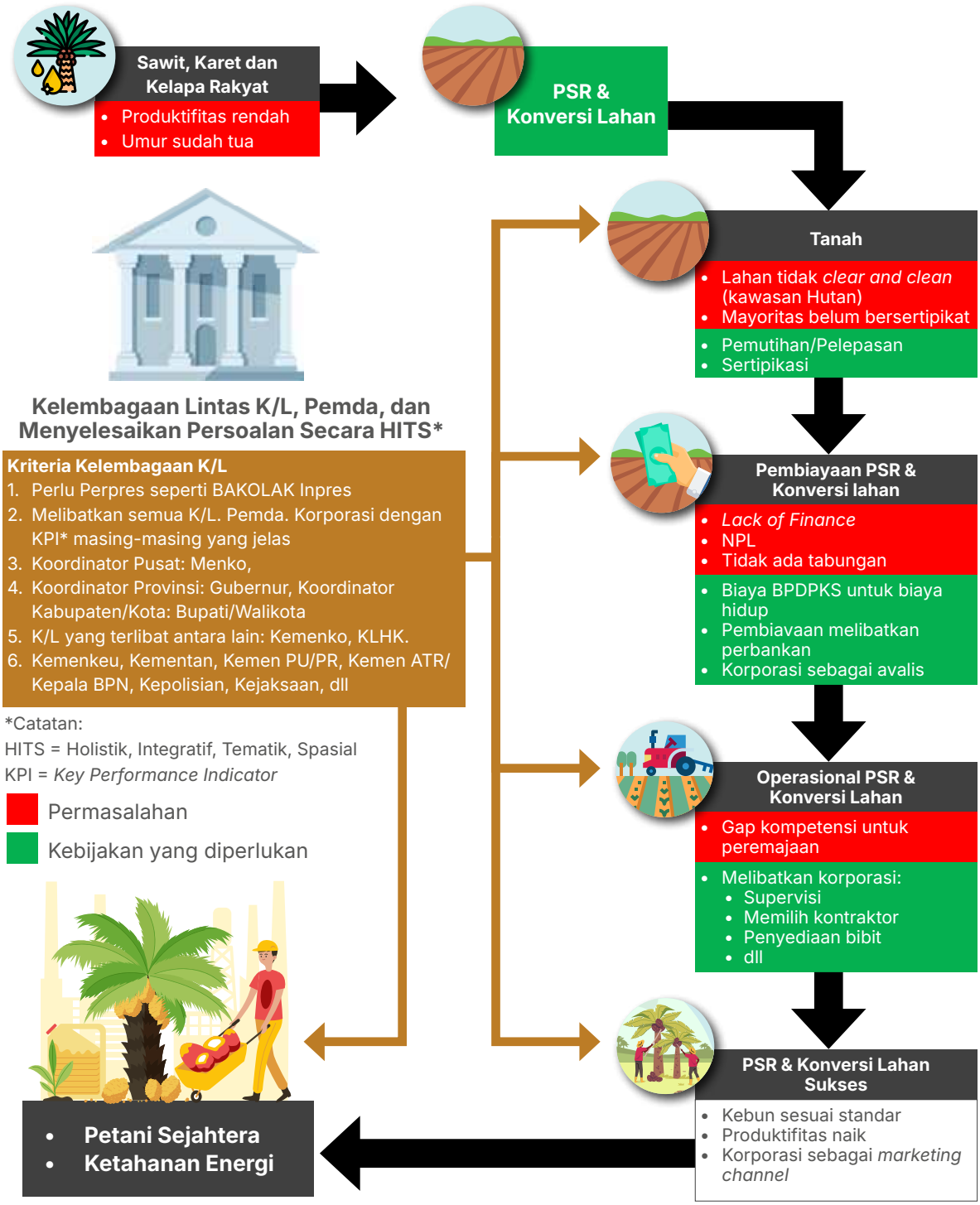

Sumber: Studi IPOSS, *Kebijakan untuk Ketahanan Energi Nasional,* 2024

Tabel 4.2 Tantangan Pengembangan PSR dan Konversi Lahan

1.	**Tantangan: Produktivitas Sawit Rakyat Tergolong Rendah**

Data/situasi:

1. Produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat diperkirakan turun 50% pada 2023[26] karena:
   a. rendahnya harga jual tandan buah segar (TBS) sawit,
   b. naiknya harga pupuk hingga 300%, dan
   c. dihapusnya perkebunan sawit dari daftar penerima pupuk bersubsidi mulai Juli 2022.
2. Pohon sawit di Indonesia banyak yang sudah tua (25-30 tahun). Skema peremajaan kelapa sawit rakyat telah diluncurkan tahun 2016 untuk mengganti 2,5 juta ha pohon kelapa sawit yang sudah tua pada tahun 2025. Namun hingga akhir tahun 2023, baru 326.308 ha yang disetujui untuk peremajaan.[27]

Implikasi produktivitas sawit rendah:

1. Ketika produktivitas rendah, harga pokok penjualan (HPP) minyak sawit meningkat. Ini mengakibatkan menurunnya daya saing minyak sawit Indonesia.[28]

2.	**Tantangan: Legalitas Lahan**

Data/situasi:

1. Sekitar 3,47 juta ha kebun sawit (setara 36% dari total luas kebun sawit swadaya) berada di dalam kawasan hutan (2019). Artinya, industri kelapa sawit menghadapi ketidakpastian hukum terkait legalitas lahan.
2. Kewenangan izin lokasi dan izin prinsip perkebunan ada di pemerintah kabupaten dan provinsi, sementara izin pelepasan kawasan hutan menjadi kebun ada di KLHK. Ini menyebabkan ketidakjelasan dalam perizinan.

Implikasi legalitas lahan:

1. Tanpa legalitas lahan, dana PSR tidak bisa disalurkan. Berdasarkan Permentan No. 19 Tahun 2023, salah satu persyaratan penerima PSR adalah memiliki dokumen penguasaan lahan dan status lahan tidak berada di kawasan hutan.

3.	**Tantangan: Akses Pembiayaan Percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)**

Data/situasi:

Lack of Finance

Sekitar 70% dari total 6,9 juta ha kebun sawit dikelola oleh petani yang belum berkelompok dan memiliki sumber pendanaan yang terbatas.[29] Sebagian besar pinjaman yang disetujui untuk petani kecil hanya dapat digunakan sebagai modal kerja dan tidak dapat untuk menutupi biaya peremajaan. Jangka waktu pinjaman yang pendek menjadi tantangan mengingat *gestation period* (waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan buah yang layak panen) yang cukup panjang pada kelapa sawit.[30]

Tidak ada *safety net*/tabungan

1. Studi di Kalimantan menemukan bahwa hanya 46% petani yang memiliki tabungan, dan hanya 10.8% yang sanggup membiayai sendiri investasi *replanting* (2018).[31] Studi *Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab* (J-PAL, 2019) menemukan bahwa tekanan sosial, pengendalian diri, dan kebutuhan rumah tangga mempersulit petani menabung.[32]

Implikasi:

Kebun kelapa sawit membutuhkan investasi dengan nilai yang signifikan sepanjang siklus hidupnya. Meningkatkan akses petani terhadap kredit dan layanan keuangan lainnya, seperti asuransi pertanian, dapat meningkatkan produktivitas. Pembiayaan juga penting untuk petani dalam melakukan sertifikasi.

4. Tantangan: Operasional PSR dan Konversi Lahan

Data/situasi:

Gap Kompetensi untuk PSR

1. Terdapat perbedaan tingkat produktivitas antara perkebunan besar dan kecil, dan antara pekebun mandiri (swadaya) dan pekebun plasma (yang didukung oleh perusahaan inti). Rendahnya produktivitas perkebunan rakyat juga disebabkan petani sawit kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan serta kemampuan manajerial perkebunan.
2. Dalam pengembangan perkebunan, petani sawit swadaya menghadapi beberapa tantangan, seperti:[33]
    - kendala terhadap akses bibit yang berkualitas
    - kesulitan akses mendapatkan pupuk
    - rendahnya pengetahuan praktik pengelolaan kelapa sawit.

Implikasi:

Baru 278.200 ha lahan sawit yang sudah tersentuh PSR dari total 2,8 juta ha atau baru 9,93% perkebunan rakyat yang berhasil diremajakan. Rata-rata realisasi program PSR sejak tahun 2016 adalah sebesar 50.000 ha per tahunnya, jauh di bawah target 180.000 ha per tahun.[34]

Navigasi Indonesia: Gagasan dan Komitmen Presiden-Wakil Presiden Republik Indonesia 2024 - 2029

Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo-Gibran, berambisi mempercepat penerapan biofuel. Perhatian terhadap percepatan penerapan biofuel tertuang dalam visi-misinya, yaitu Asta Cita 2: Swasembada energi bertujuan untuk memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa, beriringan dengan swasembada pangan, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Untuk mendukung program ini, Prabowo-Gibran merencanakan minimal 4 juta ha tambahan luas panen tanaman pangan tercapai pada tahun 2029. Target ini dicapai melalui revitalisasi sebagian besar hutan rusak dan tidak termanfaatkan. Revitalisasi ini bertujuan untuk menjadikan lahan tersebut sebagai lahan untuk aren, ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorghum, kelapa, dan bahan baku bioetanol lainnya dengan pendekatan sistem tumpang sari. Dalam pelaksanaan revitalisasi hutan, Prabowo-Gibran akan mengimplementasikan ekonomi hijau yaitu meningkatkan peran multipihak dalam pengawasan potensi kebakaran dan perambahan hutan.

Sumber Gambar: freepik

Rekomendasi Paket Kebijakan 4:

A	**Meningkatkan Implementasi Biodiesel, Bioavtur/SAF dan Bioetanol**
B	**Menetapkan Peta Jalan B50-100, E10, dan Bioavtur, Penguatan *Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC), serta Membentuk Lembaga *Integrated Food and Energy Systems* (IFES)**

Rincian Rekomendasi A: Meningkatkan Implementasi Biodiesel, Bioavtur/SAF dan Bioetanol

I	**Mempercepat Penyelesaian Status Lahan untuk Mendukung Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)**
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Hingga pertengahan 2023 capaian PSR sebesar 280.620 ha atau 56% dari target tahap 1 seluas 500 ribu hektare salah satunya akibat masalah status lahan sawit.[35] • Terdapat potensi konversi lahan karet sebesar 0,94 juta ha dan kelapa sebesar 0,84 juta ha menjadi lahan kelapa sawit, yang dapat meningkatkan pendapatan hingga lebih dari dua kali lipat.[36] • Banyak lahan belum memiliki kepastian hukum. Ketidakpastian tata ruang dan semakin berkurangnya lahan untuk usaha pertanian dan perkebunanan.	**a. Menyelesaikan status lahan dalam kawasan hutan dengan mengevaluasi PP yang tidak sesuai** **b. Meningkatkan sertifikasi lahan yang belum *clean and clear*, termasuk kebun sawit eks-transmigrasi, dengan mempercepat program PTSL.** **c. Mengembangkan program konversi lahan pertanian komoditas non unggulan menjadi lahan perkebunan sawit.** **d. Bentuk badan koordinasi kecil dengan wakil-wakil dari K/L terkait, Pemda, dan korporasi dengan KPI yang jelas,** dikoordinir secara berjenjang dari pusat hingga kabupaten/kota. **e. Mengevaluasi dan memperbaharui RTRW dan RDTR dalam kerangka *One Map Policy*** untuk menyelesaikan ketidakpastian tata ruang dan mencegah peralihan lahan pangan. **f. Mengoptimalisasi program perhutanan sosial untuk memberikan akses lahan kepada masyarakat** **g. Mempercepat program PSR dengan model *inclusive closed loop*.**

II	Mengoptimalkan Sertifikasi ISPO dan Meningkatkan Efisiensi Rantai Pasok Sawit
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
Sertifikasi RSPO • Masih terbatasnya lahan petani kelapa sawit yang telah bersertifikat *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) menghambat akses sawit ke pasar global.[37] **Rantai Pasok** • Berdasarkan survei, 73% petani sawit swadaya masih menjual buah sawitnya ke tengkulak, 8% ke *Loading Ramp* dan CV, 2% ke Koperasi, dan 17% langsung ke pabrik kelapa sawit.[38] • Rantai pasok sawit rakyat yang panjang membuat harga jual petani rendah.[39]	**Sertifikasi RSPO** **a. Menyediakan akses pendanaan yang mudah** untuk mendukung organisasi serta unit usaha pekebun swadaya, **terutama klaster pekebun kecil dengan lahan dan anggota yang terbatas**. **b. Mempercepat proses perizinan** yang diperlukan **untuk memperoleh sertifikat RSPO** dan **menerapkan tata kelola kelapa sawit yang berkelanjutan.** **Rantai Pasok** **a. Mendorong kemitraan langsung antara petani dengan perusahaan/mitra dengan harga yang wajar melalui skema kontrak pembelian atau kemitraan inti-plasma.**

III	Memperluas Akses Pendanaan untuk Petani Sawit
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• 54% petani sawit tidak memiliki tabungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau untuk *replanting*.[40] • 70% petani sawit adalah petani yang belum berkelompok dan memiliki akses pendanaan terbatas. • Hanya 37% petani yang memiliki akses pendanaan (hutang, pinjaman dan KUR).	**a. Mengevaluasi pemanfaatan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dalam rangka mendukung PSR.** **b. Menetapkan kebijakan agar perbankan dapat memberikan pendanaan murah dan untuk bekerja sama dengan korporasi sebagai penjamin (avalis)** dalam skema pembiayaan bagi petani sawit. c. Meningkatkan indeks literasi keuangan petani sawit d. Menerbitkan terobosan kebijakan yang memungkinkan berkembangnya asuransi pertanian.

IV	Menyediakan Benih Sawit Berkualitas
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Produktivitas kebun sawit rakyat hanya 3,4 ton CPO/ha, dibandingkan dengan kebun sawit perusahaan yang mencapai 4,5 ton CPO/ha. Penyebabnya termasuk usia pohon yang tua dan benih tidak berkualitas.[41] • Petani sawit swadaya seringkali tidak terakomodir dalam sistem layanan sumber benih sehingga marak penggunaan benih ilegitim.[42]	**a. Menyediakan platform yang menyediakan informasi akurat dan akses terhadap benih unggul, bermutu, dan bersertifikat.** **b. Mengembangkan teknologi terbaru untuk memverifikasi kualitas dan keaslian bibit unggul, bermutu, dan bersertifikat.**

V	Meningkatkan Kapasitas Petani Sawit
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Perbedaan tingkat produktivitas antara pekebun dengan perkebunan besar. • Hanya 33% petani yang berpartisipasi dalam training *Good Agriculture Practice* (GAP) perusahaan.	**a. Memberikan pendampingan petani sawit di daerah melalui koperasi/kelompok tani untuk menerapkan GAP.** b. Mendorong kolaborasi antara petani, peneliti, perguruan tinggi, dan perusahaan besar.

VI	Memberikan Perlindungan Kebijakan Perdagangan Internasional yang Berdampak pada Industri Sawit Dalam Negeri
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Kebijakan Anti-Deforestasi Uni Eropa (EUDR) berpotensi menghambat ekspor sawit Indonesia.[43] • Gugatan Indonesia terhadap EUDR di WTO masih berlangsung, belum ada keputusan final.[44] • Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) masih dalam tahap negosiasi, belum memberikan perlindungan khusus untuk sawit Indonesia dari EUDR.[45]	**a. Melanjutkan gugatan dan perlawanan terkait kebijakan EUDR untuk menegakkan keadilan dan non-diskriminasi dalam kebijakan perdagangan Uni Eropa.** **b. Memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi IEU-CEPA** yang berpihak industri sawit dan petani kecil, memastikan akses pasar yang adil dan tidak diskriminatif.

VII	Menyesuaikan Alokasi Subsidi BBM dan BBN
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Pemerintah memberikan subsidi solar Rp1.200/L untuk menjaga harga BBM tetap lebih rendah, meskipun sebagian besar solar yang disubsidi adalah impor.	**a. Menyesuaikan harga BBM mengikuti harga keekonomian.** **b. Mengalihkan subsidi BBM solar impor untuk BBN dalam negeri.** **c. Memastikan keberlanjutan skema BPDPKS dan menyesuaikan beban *cost sharing* dalam subsidi BBN.**

VIII	Membentuk Pusat Riset Nasional Khusus untuk Biofuel
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Berbagai Pusat Riset yang melakukan penelitian terkait Biofuel di Indonesia: Pusat Riset Rekayasa Molekul Hayati (*Research Center for Bio-Molecule Engineering*) dan Pusat Riset Sistem Produksi Berkelanjutan dan Penilaian Daur Hidup (BRIN). • Riset biofuel di Indonesia dilakukan sporadis oleh lembaga pendidikan, perusahaan swasta, dan instansi pemerintah, yang kurang terkoordinasi dan terintegrasi. • Tiga kebijakan terkait energi bersih di Indonesia (RUEN, RUKN dan RUPTL) masing-masing menggunakan model dan asumsi yang berbeda, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi calon investor.	**a. Mengonsolidasikan kegiatan riset biofuel yang tersebar di berbagai pusat riset di Indonesia ke dalam satu pusat riset nasional khusus untuk biofuel.** Contohnya, Amerika Serikat memiliki *Biomass Research and Development* (BR&D) *Board* yang mengkoordinasikan penelitian biofuel dari berbagai lembaga federal. **b. Pusat Riset Nasional Biofuel untuk menetapkan fokus riset yang jelas dan terarah** dalam pengembangan teknologi produksi, pengolahan, dan pemanfaatan biofuel yang inovatif dan berkelanjutan.

IX	Mengimplementasikan Kebijakan Mandatori Bioavtur secara Efektif
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Terdapat Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015 mewajibkan pencampuran bahan bakar nabati dalam avtur sebesar 3% pada 2020 dan 5% pada 2025. • Pertamina mampu memproduksi sekitar 445 ribu kiloliter bioavtur per tahun.[46] Untuk memenuhi bioavtur 1% pada 2030, diperlukan produksi sebesar 21,4 juta kiloliter bioavtur per tahun.[47] Artinya perlu peningkatan produksi sebesar 20,9 juta KL dalam waktu 6 tahun. • Belum ada insentif khusus untuk program bioavtur, sementara produksi SAF membutuhkan investasi besar, sehingga harganya lebih tinggi dibandingkan bahan bakar fosil.	a. **Merealisasi kebijakan mandatori bioavtur/ SAF secara agresif dan meningkat bertahap.** b. **Menerapkan kebijakan insentif dan disentif dalam meningkatkan implementasi bioavtur/ SAF** bagi korporasi, pabrik, maskapai, dan investor industri hilir SAF.

X	Menyediakan Lahan dan Mendorong Infrastruktur Industri Bioetanol
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Luas panen ubi kayu dan tebu nasional, bahan baku bioetanol, selama kurun waktu tahun 1980 hingga 2019 cenderung mengalami penurunan.[48] • Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencatat 1,2 juta ha lahan terindikasi terlantar di Indonesia.[49] • Ekstensifikasi lahan masih sulit, ditambah persaingan kebutuhan bahan baku untuk etanol dan pangan serta ketergantungan produksi etanol Indonesia pada molase dari perusahaan tebu di Jawa Timur. • Terbatasnya pupuk bersubsidi bagi petani singkong karena Permentan No. 10 Tahun 2022 hanya mencakup 9 komoditas utama, tidak termasuk singkong. • Belum adanya kejelasan tentang insentif bagi investor pabrik etanol. • Infrastruktur pendukung produksi bioetanol di Indonesia masih terbatas, khususnya pada sistem irigasi.	a. **Memetakan dan menetapkan lahan terlantar potensial khusus bahan baku bioetanol**, dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan, ketersediaan air, dan aksesibilitas. b. **Mengembangkan *one-stop service* dan digitalisasi perizinan.** c. **Memberlakukan sistem insentif dan disinsentif dalam mendorong penerapan dan/atau produksi etanol** mendukung pencapaian target swasembada energi. d. **Mendorong investasi dan pembangunan pabrik bioetanol dengan teknologi dalam negeri.** e. **Membangun infrastruktur *on-farm*** (lahan, sistem irigasi, dst) **dan *off-farm*** (fasilitas penyimpanan dan pencampuran, jaringan transportasi dan distribusi, dsb) **termasuk melalui pemberian insentif dan disentif.**

Rincian Rekomendasi B: Menetapkan Peta Jalan B50-100, E10, dan Bioavtur/SAF, Penguatan Diplomasi, serta Menerbitkan Kebijakan terkait *Integrated Food and Energy Systems* (IFES)

I Memastikan Integrasi Pengembangan Biofuel dengan Industri Otomotif

Kondisi Eksisting	Rekomendasi
• Sudah ada beberapa kegiatan kolaborasi antara industri biofuel dengan industri otomotif. Contoh: Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Tenaga Ahli Alat Berat Indonesia (PERTAABI) bersama dengan PT ExxonMobil Lubricants Indonesia (EMLI).[50] • Integrasi pengembangan biofuel dengan industri otomotif sangat penting untuk menjamin kesiapan kendaraan untuk menggunakan biofuel.[51]	a. **Menetapkan peta jalan yang jelas dan komprehensif** meliputi pemetaan kebutuhan, penetapan target, langkah strategis, pihak terlibat, serta indikator keberhasilan yang terukur. b. **Mendorong kolaborasi yang lebih luas antara industri biofuel dan otomotif melalui kegiatan** diantaranya penelitian bersama, pengembangan produk, uji coba lapangan, **serta membangun platform kolaborasi yang terarah** seperti forum diskusi, kelompok kerja, atau konsorsium. c. **Harmonisasi target, roadmap, dan regulasi biofuel dengan standar dan kebutuhan industri otomotif.** d. **Memberikan insentif bagi produsen otomotif untuk memproduksi kendaraan yang kompatibel dengan biofuel.**

II Memperkuat Posisi CPO dalam Skala Global melalui Diplomasi Aktif

Kondisi Eksisting	Rekomendasi
• CPO menghadapi persaingan ketat dari minyak nabati lain seperti minyak kedelai dan minyak bunga matahari di pasar global.[52]	a. **Melakukan diplomasi aktif dengan negara-negara konsumen minyak sawit dan organisasi internasional terkait.** b. **Memperkuat hubungan dagang dengan negara-negara mitra dan mengeksplorasi pasar-pasar baru.** c. Meningkatkan kolaborasi antar negara produsen sawit untuk memperkuat kapasitas advokasi dan diplomasi dalam menghadapi persaingan dan hambatan perdagangan CPO.

III Menerbitkan Kebijakan terkait *Integrated Food and Energy Systems* (IFES)

Kondisi Eksisting	Rekomendasi
• Tarik-menarik antara kebutuhan pangan dan energi pada implementasi biofuel dapat mengganggu ketahanan pangan dan energi nasional. • Menteri perdagangan, menyatakan bahwa program B35 merupakan salah satu penyebab kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng di pasar.	a. **Menerbitkan Kebijakan terkait *Integrated Food and Energy System* (IFES)** untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pangan dan energi, khususnya dalam implementasi biofuel. b. **Melakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan dan program biofuel**, termasuk dampaknya terhadap produksi pangan, harga pangan, dan ketahanan energi.

Referensi

1. Kementerian ESDM. (2023). *Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia 2023*. Diakses pada 3 April 2024, dari https://ebtke.esdm.go.id/post/2023/03/01/3284/handbook-of-energy-and-economic-statistics-of-indonesia-2023
2. Kementerian ESDM. (2023). *Energi Baru dan Terbarukan Berperan Besar dalam Upaya Penurunan Emisi di Sektor Energi*. Diakses pada 10 April 2024, dari https://ebtke.esdm.go.id/post/2022/09/14/3260/energi-baru-terbarukan-berperan-besar-dalam-upaya-penurunan-emisi-di-sektor-energi
3. Antara News. (2023). *Pemerintah revisi target bauran EBT pada 2025 jadi 17-19 persen*. Diakses pada 2 Mei 2024, dari https://www.antaranews.com/berita/3920271/pemerintah-revisi-target-bauran-ebt-pada-2025-jadi-17-19-persen
4. Badan Pangan Nasional. (2023). NFA dukung pengembangan singkong sebagai bahan pangan pokok strategis. *Badan Pangan Nasional*. Diakses pada 3 Mei 2024, dari https://badanpangan.go.id/blog/post/nfa-dukung-pengembangan-singkong-sebagai-bahan-pangan-pokok-strategis
5. Dinata, F. S., & Kartawiria, I. S. (2021). Bioethanol potential from whole parts of cassava plant in Indonesia. *Jurnal Teknologi Industri Pertanian, 31*(1), 20-33.
6. Kontan. (2023). Pemerintah dorong produksi bioetanol hingga 12 juta kiloliter pada 2030. Diakses pada 4 Mei 2024, dari https://industri.kontan.co.id/news/pemerintah-dorong-produksi-bioetanol-hingga-12-juta-kiloliter-pada-2030
7. ResearchGate. (2023). *Potensi dan Pengembangan Jagung Hibrida di Indonesia*. Diakses pada 5 Mei 2024, dari https://www.researchgate.net/publication/375428454_POTENSI_DAN_PENGEMBANGAN_JAGUNG_HIBRIDA_DI_INDONESIA
8. Katadata. (2019). *Berapa Produktivitas Jagung Nasional*. Diakses pada 6 Mei 2024, dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/28/berapa-produktivitas-jagung-nasional
9. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2023). *Kinerja Subsektor EBTKE 2023 dan Program 2024*. Diakses pada 7 Mei 2024.
10. Bloomberg Technoz. (2023). *Akan Gantikan Pertalite, Bauran Bioetanol Dinaikkan 20% pada 2025*. Diakses pada 8 Mei 2024, dari https://bloombergtechnoz.com/energi/akan-gantikan-pertalite-bauran-bioetanol-dinaikkan-20-pada-2025
11. Direktorat Jenderal EBTKE - Kementerian ESDM. (2023). *Govt Drafting Roadmap On Palm-Based Bioavtur Production*. Diakses pada 9 Mei 2024.
12. Gapki. (2023). *Govt Drafting Roadmap on Palm-Based Bioavtur Production*. Diakses pada 8 Mei 2024, dari https://gapki.id/en/news/2023/10/11/govt-drafting-roadmap-on-palm-based-bioavtur-production/
13. Indonesia.go.id. (2023). *Mengukir Sejarah Melayang dengan Bioavtur*. Diakses pada 10 Mei 2024, dari https://indonesia.go.id/mengukir-sejarah-melayang-dengan-bioavtur
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2023. (2023). *Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023*. Diakses pada 11 Mei 2024.
15. GAPKI. (2023). Statement: Jumlah penyerapan tenaga kerja di industri sawit bakal terus meningkat. Diakses pada 12 Mei 2024, dari https://kontan.co.id/gapki-penyerapan-tenaga-kerja-sawit
16. TNP2K. (2023). *Ringkasan Kebijakan: Industri Kelapa Sawit, Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan*. Diakses pada 13 Mei 2024, dari https://tnp2k.go.id/industri-kelapa-sawit-kemiskinan-ketimpangan
17. BPS. (2023). *Statistik Perkebunan 2022-2024*. Diakses pada 14 Mei 2024.
18. Kontan. (2023). 70% lahan sawit tak bersertifikasi, mungkinkah wajib ISPO? Diakses pada 15 Mei 2024, dari https://kontan.co.id/lahan-sawit-tak-bersertifikasi-ispo
19. BPDPKS. (2023). *Jokowi Minta Percepat Penerbitan Sertifikat Lahan Sawit Rakyat*. Diakses pada 8 Mei 2024, dari https://www.bpdp.or.id/Jokowi-Minta-Percepat-Penerbitan-Sertifikat-Lahan-Sawit-Rakyat
20. Katadata. (2023). *ESDM ungkap 6 tantangan produksi bioavtur di RI, termasuk sertifikasi*. Diakses pada 17 Mei 2024, dari https://katadata.co.id/esdm-tantangan-produksi-bioavtur
21. Harga Bioetanol sebesar Rp 14,528 dan harga Biodiesel Rp 12,453 per Mei 2024.
22. IESR. (2021). *Critical Review on Biofuel*. Diakses pada 18 Mei 2024, dari https://iesr.or.id/wp-content/uploads/2021/05/Critical-review-on-biofuel_IESR040521
23. Kontan. (2024). *Impor bioetanol belum jadi opsi pemerintah jaga pasokan bahan baku jangka panjang*. Diakses pada 19 Mei 2024, dari https://industri.kontan.co.id/news/impor-bioetanol-belum-jadi-opsi-pemerintah-jaga-pasokan-bahan-baku-jangka-panjang
24. Alfa Laval. (2023). *Brazil's Future Within Its Grasp*. Diakses pada 20 Mei 2024, dari https://www.alfalaval.com/media/stories/biofuels/brazils-future-within-its-grasp/
25. GAIKINDO. (2023). *Mesin mobil di RI baru siap pakai bioetanol 10 persen*. Diakses pada 21 Mei 2024, dari https://www.gaikindo.or.id/gaikindo-mesin-mobil-di-ri-baru-siap-pakai-bioetanol-10-persen/
26. Katadata. (2023). *Produksi perkebunan sawit rakyat diprediksi turun 50% pada 2023.* Diakses pada 22 Mei 2024, dari https://katadata.co.id/apkasindo-produksi-sawit
27. Katadata. (2023). *Data BPDPKS: Indonesia setujui peremajaan lahan sawit 53.012 hektare di 2023.* Diakses pada 23 Mei 2024, dari https://katadata.co.id/bpdpks-peremajaan-lahan-sawit
28. Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute. (2023). *Strategi Industrialisasi dan Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit*. Diakses pada 24 Mei 2024, dari https://palmoilina.asia/strategi-industrialisasi
29. SPKS. (2023). *Isu akses pendanaan ISPO bagi petani sawit swadaya butuh solusi.* Diakses pada 25 Mei 2024, dari https://spks.or.id/isu-akses-pendanaan-ispo
30. CIFOR. (2023). *Pembiayaan bagi Petani Kecil di Sektor Kelapa Sawit*. Diakses pada 26 Mei 2024, dari https://cifor-icraf.org/pembiayaan-petani-kecil
31. RePEc. (2023). *The Role of Farm Household Saving for Oil Palm Replanting at Paser Regency, East Kalimantan*. Diakses pada 27 Mei 2024, dari https://ideas.repec.org/a/eco/journ1/2018-05-18.html

32. Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab. (2023). *Facilitating Savings Among Smallholder Farmers to Smooth or Increase Consumption*. Diakses pada 28 Mei 2024, dari https://www.povertyactionlab.org/policy-insight/facilitating-savings-among-smallholder-farmers-smooth-or-increase-consumption
33. SPKS. (2023). *Perkuat kapasitas petani sawit swadaya di Kabupaten Konawe Utara melalui Pelatihan Good Agricultural Practice (GAP)*. Diakses pada 29 Mei 2024, dari https://spks.or.id/detail-berita-spks-perkuat-kapasitas-petani-sawit-swadaya-di-kabupaten-konawe-utara-melalui-pelatihan-good-agricultural-practice-gap
34. GAPKI. (2023). Mencatat sejumlah penyebab PSR tidak mencapai target. Diakses pada 30 Mei 2024, dari https://gapki.id/news/2024/03/31/realisasi-psr-masih-rendah-ini-penyebabnya/
35. CNBC Indonesia. (2023). Peremajaan sawit rakyat cuma 56%, ini biang keroknya. Diakses pada 31 Mei 2024, dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20231115193802-4-489410/peremajaan-sawit-rakyat-cuma-56-ini-biang-keroknya
36. Indonesia Palm Oil Strategic Studies. (2024). *Kebijakan untuk Ketahanan Energi Nasional*. Diakses pada 1 Mei 2024.
37. Infosawit. (2023). Baru 0,2 persen petani sawit penerima sertifikat ISPO. Diakses pada 2 Mei 2024, dari https://www.infosawit.com/2023/10/15/baru-02-persen-petani-sawit-penerima-sertifikat-ispo/
38. SPKS. (2023). Benang kusut petani sawit yang mesti dituntaskan. Diakses pada 3 Mei 2024, dari https://spks.or.id/detail-berita-benang-kusut-petani-sawit-yang-mesti-dituntaskan
39. GAPKI. (2024). Realisasi PSR masih rendah, ini penyebabnya. Diakses pada 4 Mei 2024, dari https://gapki.id/news/2024/03/31/realisasi-psr-masih-rendah-ini
40. Indonesia Palm Oil Strategic Studies. (2024). *Kebijakan untuk Ketahanan Energi Nasional*. Diakses pada 1 Mei 2024. [Link tidak ditemukan]
41. Katadata. (2021). *Produktivitas Perkebunan Sawit Rakyat Berpotensi Ditingkatkan*. Diakses pada 2 Mei 2024, dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/10/produktivitas-perkebunan-sawit-rakyat-berpotensi-ditingkatkan
42. Infosawit. (2024). *Produksi Benih Sawit Nasional Capai 24,2 Juta Benih*. Diakses pada 3 Mei 2024, dari https://www.infosawit.com/2024/05/20/produksi-benih-sawit-nasional-capai-242-juta-benih/
43. Tempo. (2023). *4 Dampak UU Anti-Deforestasi Uni Eropa Bagi Indonesia: Dari Sawit Hingga Kopi*. Diakses pada 4 Mei 2024, dari https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/482214/4-dampak-uu-anti-deforestasi-uni-eropa-bagi-indonesia-dari-sawit-hingga-kopi
44. Antara News. (2023). *Wamendag Jerry Yakin Indonesia Menang Gugatan Minyak Sawit*. Diakses pada 5 Mei 2024, dari https://www.antaranews.com/berita/3989100/wamendag-jerry-yakin-indonesia-menang-gugatan-minyak-sawit
45. Kompas. (2023). *Perundingan IEU-CEPA Bakal Semakin Penuh Syarat Kepentingan*. Diakses pada 6 Mei 2024, dari https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/07/06/perundingan-ieu-cepa-bakal-semakin-penuh-syarat-kepentingan
46. Kompas. (2023). *Pertamina Siapkan Kilang Plaju dan Dumai Buat Genjot Produksi Bioavtur*. Diakses pada 7 Mei 2024, dari https://money.kompas.com/read/2023/10/28/110000326/pertamina-siapkan-kilang-plaju-dan-dumai-buat-genjot-produksi-bioavtur
47. Pertamina. (2022). *Pertamina Energy Outlook 2022*. Diakses pada 8 Mei 2024.
48. Satu Data Pertanian. (n.d.). *Publikasi*. Diakses pada 9 Mei 2024, dari https://satudata.pertanian.go.id/details/publikasi/
49. CNN Indonesia. (2021). *BPN: 12 Juta Hektare Lahan RI Terindikasi Terlantar*. Diakses pada 10 Mei 2024, dari https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211214161122-92-733968/bpn-12-juta-hektare-lahan-ri-terindikasi-terlantar
50. Antara News. (2023). *ExxonMobil Lubricants Gelar Seminar Bersama Pertaabi*. Diakses pada 11 Mei 2024, dari https://otomotif.antaranews.com/berita/3537759/exxonmobil-lubricants-gelar-seminar-bersama-pertaabi
51. GAIKINDO. (2023). *Pengembangan Biofuel Perlu Dorongan Lebih Kuat*. Diakses pada 12 Mei 2024, dari https://www.gaikindo.or.id/gaikindo-pengembangan-biofuel-perlu-dorongan-lebih-kuat/
52. Kontan. (2023). *Persaingan Industri Sawit Nasional Diproyeksi Semakin Ketat Pada Tahun Ini*. Diakses pada 13 Mei 2024, dari https://industri.kontan.co.id/news/persaingan-industri-sawit-nasional-diproyeksi-semakin-ketat-pada-tahun-ini

"15 Rekomendasi Paket Kebijakan untuk Mendukung Agenda Pembangunan Presiden & Wakil Presiden Indonesia 2024 - 2029"

Fokus Area 5

Sekolah Unggulan dan Guru Berkualitas:

Mencetak Manusia Unggul dan Menyambut Bonus Demografi

5

IBC
Indonesian Business Council

Sumber Gambar: freepik

Sekolah Unggulan dan Guru Berkualitas: Mencetak Manusia Unggul dan Menyambut Bonus Demografi

Misi Asta Cita 4 Prabowo-Gibran

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Program Hasil Terbaik Cepat No. 4 Prabowo-Gibran

Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.

Program Hasil Terbaik Cepat No. 6 Prabowo-Gibran

Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan), TNI/POLRI, dan pejabat negara.

Stakeholders: *Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek); Kementerian Agama (Kemenag); Kementerian Keuangan (Kemenkeu); Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri); Pemerintah Daerah (Pemda).*

> *Kita yakin bahwa pendidikan strategis, kita harus memperbaiki gaji guru, termasuk gaji honorer. Dan juga seluruh penyelenggara negara, ASN, TNI, Polri, dan penyuluh pertanian. Kita harus perbaiki gajinya, sehingga kualitas hidup mereka akan baik, sehingga mereka bisa memberi pelayanan kepada rakyat dengan sebaik-baiknya.*
>
> ***Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia Periode 2024 - 2029***

Kualitas Pendidikan di Indonesia Masih Rendah, Akses Pendidikan Perlu Ditingkatkan

Pendidikan memainkan peran penting dalam meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan yang baik, setiap orang mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi untuk berkontribusi di masyarakat. Saat ini, 69,25%[1] dari total penduduk Indonesia berada dalam usia produktif (15-64 tahun) dan menciptakan "bonus demografi". Namun, bonus tersebut hanya akan bermanfaat ketika populasi berusia tersebut berkualitas. Sebaliknya, ketika populasi tersebut berkualitas rendah, akan menciptakan permasalahan pada jangka panjang.

Kualitas pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah jika ditilik dari tingkat pendidikan. Dengan bonus demografi tersebut, hanya 10,15% dari populasi Indonesia yang mencapai pendidikan tinggi dan 30,22% berpendidikan SMA. Selebihnya, lebih dari separuh, hanya mencapai pendidikan menengah dan rendah.[2]

Gambar 5.1 Proporsi Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (Maret 2023)

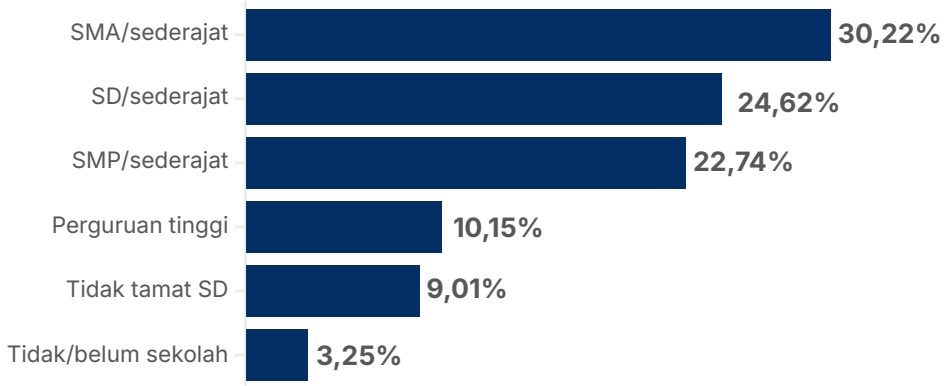

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Indonesia mengalami penurunan skor PISA dan menempati peringkat rendah dalam Indeks Kemampuan Global, mencerminkan masih rendahnya kualitas/mutu sistem pendidikan. Skor PISA 2022 menunjukkan penurunan dalam kemampuan membaca, matematika, dan sains, menunjukkan adanya masalah kompetensi akademik di Indonesia.[3] Rata-rata skor Indonesia pada matematika, membaca, dan sains masing-masing 366, 359, dan 383. Angka ini lebih rendah dibandingkan Vietnam (469, 462, 472), Malaysia (409, 388, 416), dan Thailand (394, 379, 409). Selain itu, Indonesia juga menempati peringkat 80 dari 134 negara dalam Global Talent Competitiveness Index atau Indeks Kemampuan Global 2023.[4] Juga lebih rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, seperti Singapura (peringkat 2), Malaysia (42), dan Vietnam (75).

Rendahnya kualitas guru menjadi salah satu isu serius dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kemendikbudristek menyatakan, sekitar 260 ribu guru di Indonesia belum menyelesaikan pendidikan S1[5] dan 1,55 juta (51,9%) guru belum bersertifikasi.[6] Hal ini mengakibatkan tidak meratanya kualitas pendidikan yang diterima siswa sehingga sulit memenuhi standar yang diharapkan.

Selain itu, infrastruktur pendidikan yang terbatas menjadi salah satu penghambat utama peningkatan kualitas pendidikan. Banyak sekolah, terutama di daerah pedesaan, tidak memiliki ruang kelas yang memadai, minim perpustakaan, dan memiliki fasilitas olahraga yang terbatas. Hal ini menyebabkan siswa tidak mendapatkan lingkungan belajar yang memadai, sehingga proses belajar mengajar menjadi kurang optimal.

Akibatnya, kualitas lulusan tidak terserap dengan maksimal dan berkontribusi pada meningkatnya pengangguran. Pada Februari 2024, tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,82%, dengan TPT lebih banyak terjadi pada pendidikan tinggi. Ini menjadi salah satu indikator yang menunjukkan perlunya perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia. Berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, TPT lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi yang tertinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu 8,62%.[7] Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan SMK dan kebutuhan industri.

Gambar 5.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), Februari 2022–Februari 2024

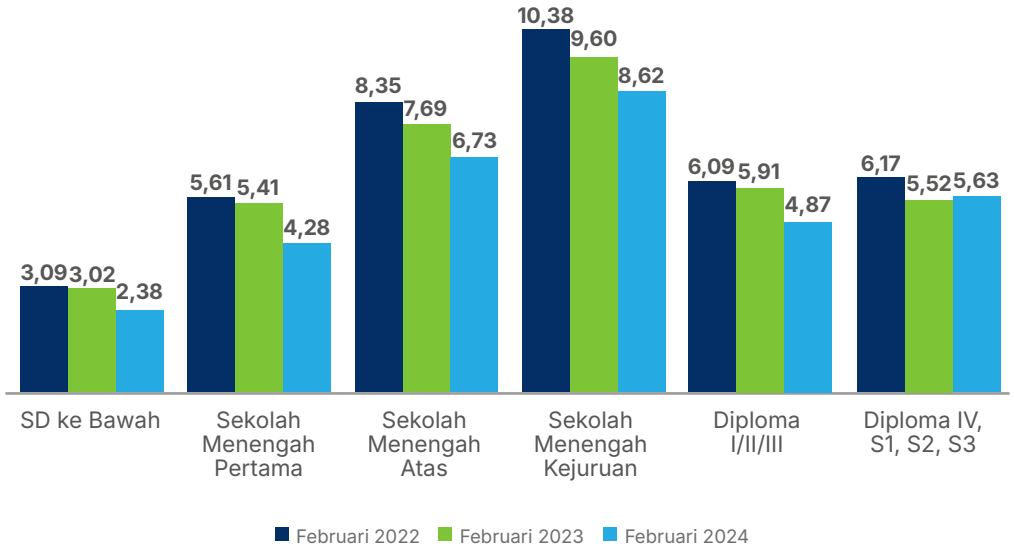

Sumber: BPS

Program Sekolah Unggulan penting untuk fokus pada pembentukan manusia yang unggul dan memastikan tidak menimbulkan kesenjangan akses pendidikan berkualitas. Pengembangan sekolah unggulan perlu dilakukan secara terintegrasi untuk memastikan memastikan bahwa sekolah-sekolah lai, baik negeri maupun swasta di wilayah sekitarnya, juga dapat ikut berkembang. Selain itu, pendidikan karakter perlu ditekankan sejak PAUD hingga SMA. Dalam perencanaannya, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali kebijakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang dihapuskan.[8]

Tantangan Peningkatan Kualitas Pendidikan Indonesia

Menurut studi Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK),[9] berbagai hal dapat menghambat peningkatan kualitas pendidikan, terutama dalam menghadirkan sekolah unggulan dan guru yang berkualitas. Tantangan tersebut termasuk belum meratanya kualitas dan distribusi guru, akses pendidikan yang belum merata, hingga kualitas lulusan pendidikan kejuruan.

- **Kesejahteraan, distribusi, dan kompetensi guru masih rendah.** Hal ini salah satunya disebabkan oleh disparitas gaji dan kondisi kerja, terutama antara daerah perkotaan dan perdesaan. Banyak guru honorer yang memiliki akses terbatas terhadap pelatihan yang memadai sehingga menghambat pengembangan kompetensi mereka. Tidak meratanya sebaran dan distribusi guru yang kompeten berpotensi menghambat pembelajaran yang berkualitas bagi siswa.

- **Masih banyak infrastruktur sekolah yang belum memadai, salah satunya disebabkan anggaran pemerintah daerah yang terbatas.** Pada tahun ajaran 2021/2022, 60,60% ruangan kelas SD dalam kondisi rusak ringan. Kondisi ruangan kelas pada jenjang pendidikan lain yang mengalami rusak ringan, yaitu SMP (53,30%), SMA (45,03%), dan SMK (45,23%).[10] Hal ini berpotensi menghambat akses siswa terhadap akses yang berkeadilan ke sekolah yang berkualitas dan terjangkau.

- **Akses ke pendidikan tidak cukup untuk menjamin kesempatan yang sama bagi semua anak.** Selain akses, penting untuk memastikan pembelajaran yang didapat siswa berkualitas dan berkeadilan, termasuk untuk siswa dari keluarga miskin. Disparitas hasil PISA 2022 menunjukkan siswa dari *socio-economic status* (SES) lebih tinggi (25% teratas) unggul 34 poin dalam matematika dibandingkan siswa SES lebih rendah (25% terbawah).[11]

- **Kurikulum pendidikan kejuruan dan vokasi belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan kualitas fasilitasnya rendah.** Hal ini tercermin dari tingginya tingkat pengangguran lulusan SMK yang menjadi penyumbang terbesar TPT pada 2024.

Navigasi Indonesia: Gagasan dan Komitmen Presiden-Wakil Presiden Republik Indonesia 2024 - 2029

Untuk meningkatkan kualitas sekolah, Presiden Terpilih memiliki gagasan program sekolah unggulan. Dalam Program Hasil Terbaik Cepat No. 4, Prabowo-Gibran menghadirkan upaya membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.

Perbaikan kualitas guru juga menjadi perhatian Presiden Terpilih. Dalam Program Hasil Terbaik Cepat No. 6, Prabowo-Gibran berencana menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan), TNI/POLRI, dan pejabat negara. Hal ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan guru sehingga bisa memberikan pelayanan terbaik untuk menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Indonesia memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan agar bonus demografi dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Rekomendasi Paket Kebijakan 5:

A	**Meningkatkan Kualitas Guru**
B	**Memprioritaskan Pengembangan Karakter Anak dan Pengembangan Kebijakan Inklusif Program Sekolah Unggulan**
C	**Meningkatkan Pemberian Anggaran ke Pemerintah Daerah Disertai dengan Pengawasan KPI Capaian Pendidikan yang Menyeluruh dan Kolaborasi Sektor Swasta**
D	**Mencanangkan Program Transformasi Pendidikan Vokasi Nasional**
E	**Melanjutkan Program Pra-kerja sebagai Perangkat *Upskilling* SDM dan Pengembangan Program Kepemimpinan**

Rincian Rekomendasi A: Meningkatkan Kualitas Guru

I	**Menjamin Kelayakan Gaji Guru**
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Terdapat kekurangan guru ASN yang selama ini diisi oleh tenaga non-ASN (guru honorer) yang jumlahnya mencapai 704 ribu.[12] Guru honorer tidak punya kepastian karir dan mayoritas digaji rendah. • Sebanyak 1,6 juta guru ASN dan swasta masih menunggu sertifikasi program Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagai syarat untuk memperoleh Tunjangan Profesi Guru (TPG).[13] • Banyaknya pemerintah daerah yang tidak melaporkan kebutuhan guru karena dikhawatirkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) membebani APBD, sehingga banyak honorer lulusan PPPK berpotensi tidak mendapatkan penempatan.[14]	**a. Menjamin kepastian karir serta hak keuangan bulanan kepada guru dengan mempercepat kenaikan status guru honorer menjadi PPPK dengan tetap memastikan standar kualitas guru.** **b. Mempercepat sertifikasi dan keterbukaan TPG bagi guru ASN dan swasta agar menerima TPG bulanan yang berkeadilan serta tetap memastikan standar kualitas guru.**
II	**Memastikan Distribusi Guru Tersebar Merata**
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Ketersediaan guru masih kurang, diperlukan 1.3 juta guru tambahan. Selain itu, distribusi juga timpang, dengan 1 dari 3 guru PNS berada di Jawa.[15]	**a. Memastikan distribusi guru tersebar merata dengan memberikan tunjangan khusus untuk guru di kawasan pesisir, kepulauan, dan pedalaman.** **b. Mendorong mekanisme yang transparan dan efektif dalam proses rekrutmen dan penempatan guru** untuk memastikan kebutuhan guru kompeten terpenuhi di setiap satuan pendidikan. **c. Mempertimbangkan untuk mengembangkan program pendidikan jarak jauh yang terarah dan terawasi didukung infrastruktur yang handal.**

III	Menjamin Kepastian Jenjang Karir Guru
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Profesi guru minim insentif untuk pengembangan karir dan kompetensi. Saat ini, hanya 12,4% lulusan PPG yang merasa menguasai materi yang dibutuhkan siswa.[16] • Kenaikan pangkat guru lebih banyak bergantung pada lamanya masa jabatan daripada pada pemenuhan kompetensi.[17]	a. **Memberikan insentif bagi guru berprestasi dan merumuskan standar kompetensi yang jelas** untuk struktur karir dan pengembangan profesional guru. b. **Memastikan terdapatnya jenjang karir yang jelas**, seperti: fungsional (guru muda-madya-utama), struktural (kepala sekolah/struktur dinas), dan profesi (guru instruktur).
IV	**Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi Guru**
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• 7 dari 10 calon guru Matematika dan 5 dari 10 calon guru Kimia serta Bahasa Indonesia tidak lolos tes substantif pada seleksi PPG Pra-Jabatan.[18] • Proses rekrutmen guru ASN belum mempertimbangkan "*good-teaching performance*" dan memperhitungkan kebutuhan pendidikan lokal.[19]	a. **Menyelenggarakan pelatihan dan pengawasan guru berbasis kompetensi melalui kurikulum yang sesuai kebutuhan guru dan murid, termasuk juga teknik pembelajaran interaktif.** b. **Menciptakan sistem evaluasi, seperti sesi supervisi satu lawan satu atau pengamatan langsung oleh pengawas tanpa membebani beban belajar siswa.**
V	**Meningkatkan Kapasitas Dinas Pendidikan Daerah**
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Terdapat ketidakseimbangan kapasitas Dinas Pendidikan antar daerah dalam mengelola layanan pendidikan.[20]	a. **Meningkatkan kapasitas Dinas Pendidikan tingkat daerah secara merata,** khususnya dalam hal pengelolaan layanan pendidikan.

Rincian Rekomendasi B: Memprioritaskan Pengembangan Karakter Anak dan Pengembangan Kebijakan Inklusif Program Sekolah Unggulan

I	Memprioritaskan Pengembangan Perilaku Anak
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Perkembangan tekonologi yang pesat semakin memudahkan manusia untuk menyelesaikan permasalahan dasar dibantu oleh teknologi. Ke depan, perlu prioritas terhadap pembentukan perilaku yang baik.	a. **Memprioritaskan pengembangan perilaku anak melalui pendidikan karakter dari tingkat PAUD hingga SMA, termasuk belajar *Sosio-Emotional Learning*.** b. **Menyediakan kepala sekolah dan guru yang kompeten untuk menghasilkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif.**

II	Mengembangkan Kebijakan Inklusif Program Sekolah Unggulan
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Terdapat kebutuhan akan sekolah unggulan yang terintegrasi di setiap kabupaten untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah, serta meningkatkan kualitas infrastruktur, sarana pendukung, dan lulusan.	**a. Melibatkan sekolah unggulan dalam pengembangan sekolah-sekolah lain di wilayahnya.** **b. Memperkuat regulasi untuk meningkatkan keterlibatan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dalam membangun sekolah unggulan dan guru berkualitas.** **c. Mempermudah prosedur dan perizinan pendirian sekolah unggulan didukung dengan insentif dan pelibatan swasta.**

Rincian Rekomendasi C: Meningkatkan Pemberian Anggaran ke Pemerintah Daerah Disertai dengan Pengawasan KPI Capaian Pendidikan yang Menyeluruh dan Kolaborasi Sektor Swasta

I	Meningkatkan Pemberian Anggaran untuk Pendidikan ke Pemerintah Daerah
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Terbatasnya anggaran pemerintah daerah sedangkan terdapat kebutuhan yang besar untuk memberikan layanan kepada masyarakat. • >40% sekolah kekurangan infrastruktur dasar, seperti toilet & cahaya ruang kelas.[21] • Dari total 148.673 sekolah, baru 66% yang memiliki perpustakaan.[22]	a. Meningkatkan alokasi dana transfer ke daerah, misalnya melalui Dana Alokasi Umum/Dana Alokasi Khusus (DAU/DAK), yang disertai dengan sinkronisasi dan pengawasan KPI ketercapaian perbaikan kualitas dan akses pendidikan.
II	**Mendukung Perkuatan Kolaborasi Antar Sektor Swasta**
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) pendidikan dari sektor swasta minim dukungan pemerintah dan mayoritas berjalan sendiri tanpa rencana eskalasi.[23]	a. Memperkuat kolaborasi melalui platform dan panduan kolaborasi swasta-pemerintah di bidang pendidikan, termasuk pembentukan *database* CSR dan perluasan program yang sukses sebagai percontohan untuk inisiatif lain yang memastikan keberlanjutannya.

Rincian Rekomendasi D: Mencanangkan Program Transformasi Pendidikan Vokasi Nasional

I	Memperbaharui Sistem Pendidikan Vokasi
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• TPT lulusan SMK tertinggi, mencapai 8,62%, diikuti lulusan SMA dengan 6,37%. Salah satu faktor utamanya karena ketidakselarasan kompetensi lulusan SMK dengan kebutuhan industri atau dunia kerja.[24]	**a. Membentuk *grand design* industri untuk memetakan sumber daya manusia dan kurikulum vokasi.** **b. Menyusun kurikulum bersama industri** untuk memastikan relevansi dengan kebutuhan terkini (*hard skill & soft skill)*, potensi wilayah, dan kebutuhan karir.

II	Meningkatkan Fasilitas Sekolah Vokasi
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Sebanyak 80% SMK di Indonesia adalah SMK swasta, di mana 40% dari mereka memiliki masalah seperti kurangnya fasilitas dan kurangnya kemitraan dengan industri.[25] • Kondisi SMK di Kota Solo yang ditinjau oleh Walikota Gibran saat awal memimpin Kota Solo menggunakan fasilitas jadul dan belum menggunakan alat-alatnya terbaru.[26]	**a. Memberikan insentif pada sekolah atau industri yang meningkatkan fasilitasnya.** **b. Melakukan evaluasi performa sekolah kejuruan yang tidak memenuhi standar.**
III	**Memperkuat Kemitraan Sekolah Kejuruan dengan Dunia Usaha**
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Kurangnya literasi teknologi, literasi data, pemahaman perilaku manusia, dan jiwa kewirausahaan menjadi faktor penyebab banyaknya lulusan SMK yang menganggur dan kurang bersaing di dunia kerja.[27]	**a. Menyediakan *grant*/hibah untuk sekolah vokasi yang mememiliki performa bagus.** **b. Memberikan kebijakan *Super Tax Deduction* kepada perusahan yang kontribusi dalam pengembangan sekolah vokasi sebagai insentif.** **c. Meningkatkan hubungan kerja sama dengan mendata estimasi lapangan kerja dan spesifikasinya saat investasi dan memberikan insentif kepada industri yang terlibat dalam program vokasi dan kejuruan.** d. Mengevaluasi dan menyesuaikan kembali jumlah dan jenis jurusan SMK mempertimbangkan kesesuaian dengan pasar kerja. e. Meningkatkan kualitas jurusan yang dibutuhkan oleh pasar kerja dengan melibatkan industri dalam penentuan fokus keahlian. **f. Memberikan insentif kepada industri yang menyelenggarakan program magang siswa kejuruan dengan pelatihan, sertifikat, dan remunerasi.**

Rincian Rekomendasi E: Melanjutkan Program Pra-kerja sebagai Perangkat *Upskilling* SDM dan Pengembangan Program Kepemimpinan

Kondisi Eksisting	Rekomendasi
• Angkatan kerja yang sudah bekerja saat ini didominasi oleh pekerja sektor informal dengan jumlah 83,3 juta atau 60,1% dari total pekerja.[28] • Daya saing dan produktivitas tenaga kerja di Indonesia tergolong rendah: urutan 37 dari 64 negara.[29] • Evaluasi Program Pra-kerja menunjukkan bahwa 99% materi masih berfokus pada masyarakat perkotaan, sementara 2,1 juta pengangguran ada di desa. Selain itu, hanya 3 dari 10 peserta yang berhasil mendapatkan pekerjaan setelah mengikuti program ini.[30,31,32]	**a. Memprioritaskan penyediaan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar.** **b. Memperkuat dan memperluas hubungan lulusan pelatihan dengan pemberi kerja.** **c. Memperluas penerima manfaat program pekerja dan memastikan insentif dan *benefit* yang sesuai.** **d. Menambahkan materi yang menekankan pentingnya memiliki *leadership* dalam bekerja.**

Referensi

1. Katadata. (2023). *Piramida Penduduk Indonesia 2022: Usia Produktif Mendominasi*. Diakses pada 5 Juli 2024, dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/05/piramida-penduduk-indonesia-2022-usia-produktif-mendominasi
2. Katadata. (2023). *Tamatan Tingkat Pendidikan Warga Indonesia Terbanyak dari SMA pada Maret 2023*. Diakses pada 27 Mei 2024, dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/27/tamatan-tingkat-pendidikan-warga-indonesia-terbanyak-dari-sma-pada-maret-2023
3. OECD. (n.d.). *Country Profile: Indonesia*. Diakses pada 17 Mei 2024, dari https://gpseducation.oecd.org/CountryProfile?primaryCountry=IDN&treshold=10&topic=PI
4. INSEAD. (n.d.). *Global Talent Competitiveness Index*. Diakses pada 17 Mei 2024, dari https://www.insead.edu/global-talent-competitiveness-index
5. RRI. (2024). *Kemendikbudristek Ungkap Ratusan Ribu Guru Belum S1*. Diakses pada 17 Mei 2024, dari https://www.rri.co.id/iptek/339884/kemendikbudristek-ungkap-ratusan-ribu-guru-belum-s1
6. Katadata. (2024). *Cek Data: Anies Sebut 1,6 Juta Guru Belum Tersertifikasi, Ini Data Kemendikbudristek*. Diakses pada 5 Februari 2024, dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/05/cek-data-anies-sebut-16-juta-guru-belum-tersertifikasi-ini-data-kemendikbudristek
7. BPS. (2024). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sebesar 4,82% dan Rata-Rata Upah Buruh Sebesar 3,04 Juta Rupiah per Bulan*. Diakses pada 6 Mei 2024, dari https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/05/06/2372/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-82-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-04-juta-rupiah-per-bulan.html
8. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2013). *Putusan MK No. 10/PUU-XI/2013*. Diakses pada 21 Mei 2024, dari https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7971#:~=Sebelumnya%2C%20Mahkamah%20Konstitusi%20(MK),1945%20dan%20bentuk%20liberalisasi%20pendidikan
9. PSPK. (n.d.). *Rekomendasi Kebijakan untuk Pendidikan Berkualitas yang Berkeadilan*. Diakses pada 22 Mei 2024, dari https://pspk.id/rekomendasi-kebijakan-untuk-pendidikan-berkualitas-yang-berkeadilan/3/#split_content
10. CNBC Indonesia. (2023). *Potret Suram Pendidikan RI: 60% Sekolah SD Rusak*. Diakses pada 23 Mei 2024, dari https://www.cnbcindonesia.com/research/20230502113207-128-433664/potret-suram-pendidikan-ri-60-sekolah-sd-rusak
11. OECD. (n.d.). *Country Profile: Indonesia*. Diakses pada 2024, dari https://gpseducation.oecd.org/CountryProfile?primaryCountry=IDN&treshold=10&topic=PI
12. Tempo. (2024). *Benar Klaim Anies Baswedan Bahwa Puluhan Ribu Guru Honorer Belum Diangkat dan 1,6 Juta Guru Belum Tersertifikasi*. Diakses pada 24 Mei 2024, dari https://cekfakta.tempo.co/fakta/2744/benar-klaim-anies-baswedan-bahwa-puluhan-ribu-guru-honorer-belum-diangkat-dan-16-juta-guru-belum-tersertifikasi
13. Ibid.
14. Republika. (2024). *12 Ribu Guru Honorer P1 Batal Diangkat PPPK Tahun Ini*. Diakses pada 25 Mei 2024, dari https://republika.id/posts/45779/12-ribu-guru-honorer-p1-batal-diangkat-pppk-tahun-ini
15. Kompas. (2021). *BKN Ungkap Data Tiga Provinsi Ini Kurang Guru PNS*. Diakses pada 26 Mei 2024, dari https://nasional.kompas.com/read/2021/03/30/12031801/bkn-ungkap-data-tiga-provinsi-ini-kurang-guru-pns
16. The Conversation. (2021). *Dukungan Pengembangan Karier Bagi Guru Sangat Lemah dan Membuat Status ASN Hanya Jadi Zona Nyaman*. Diakses pada 27 Mei 2024, dari https://theconversation.com/dukungan-pengembangan-karier-bagi-guru-sangat-lemah-dan-membuat-status-asn-hanya-jadi-zona-nyaman-169159
17. Ibid.
18. Sumber Neraca Pendidikan Daerah (NPD) Kemendikbud.
19. Smeru Institute. (2020). *Pengembangan Profesionalisme Guru dalam Empat Dekade Terakhir di Indonesia: Satu Langkah Maju*. Diakses pada 18 Mei 2024, dari https://rise.smeru.or.id/id/blog/pengembangan-profesionalisme-guru-dalam-empat-dekade-terakhir-di-indonesia-satu-langkah-maju
20. The Conversation. (2023). *Kapasitas Beberapa Pemerintah Daerah Naik dalam Mengelola Pendidikan Dasar: Apa Pendongkraknya?*. Diakses pada 30 Mei 2024, dari https://theconversation.com/kapasitas-beberapa-pemerintah-daerah-naik-dalam-mengelola-pendidikan-dasar-apa-pendongkraknya-119489
21. Kompas. (2020). *Memacu Pendidikan Indonesia*. Diakses pada 31 Mei 2024, dari https://www.kompas.id/baca/opini/2020/11/20/memacu-pendidikan-indonesia
22. Katadata. (2020). *Belum Semua Sekolah di Indonesia Memiliki Perpustakaan*. Diakses pada 26 Februari 2020, dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/26/belum-semua-sekolah-di-indonesia-memiliki-perpustakaan
23. Indonesia Business Council (IBC). (2024). *Leveraging Private Sector Initiatives to Support Socio-Economic Development Agenda*. Diakses pada 31 Mei 2024, dari https://business-council.id/wp-content/uploads/2024/04/01Feb-Riset-1-18Mar-1.pdf
24. CNBC Indonesia. (2024). *Lulusan SMK Paling Banyak Nganggur, Pemerintah Kudu Piye?*. Diakses pada 8 Mei 2024, dari https://www.cnbcindonesia.com/research/20240508113817-128-536658/lulusan-smk-paling-banyak-nganggur-pemerintah-kudu-piye
25. Berita Satu. (2019). *Pemerintah Harus Berani Tutup SMK yang Tak Sesuai Standar*. Diakses pada 29 Mei 2024, dari https://www.beritasatu.com/news/550514/pemerintah-harus-berani-tutup-smk-yang-tak-sesuai-standar
26. Detik. (2024). *Ganjar Balas Gibran: Fasilitas Jadul Saja Hasilkan Pekerja, Apalagi Modern*. Diakses pada 19 Mei 2024, dari https://news.detik.com/pemilu/d-7074948/ganjar-balas-gibran-fasilitas-jadul-saja-hasilkan-pekerja-apalagi-modern
27. CNBC Indonesia. (2020). *Miris! Mayoritas Pengangguran dari SMK Padahal Punya Skill*. Diakses pada 9 Juli 2024, dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20200709181342-4-171560/miris-mayoritas-pengangguran-dari-smk-padahal-punya-skill

28. Tempo. (2024). *Jumlah Pekerja Informal Terus Meningkat*. Diakses pada 7 Mei 2024, dari https://koran.tempo.co/read/berita-utama/481951/jumlah-pekerja-informal-terus-meningkat
29. IMD World Competitiveness Center. (2024). *World Digital Competitiveness Ranking*. Diakses pada 8 Mei 2024, dari https://www.imd.org/centers/wcc/world-competitiveness-center/rankings/world-digital-competitiveness-ranking/
30. BRIN. (2020). *Laporan Penelitian*. Diakses pada 6 April 2024, dari https://www.brin.go.id
31. BPS. (2023). *Indikator Pekerjaan Layak di Indonesia 2022*. Diakses pada 17 April 2024, dari https://www.bps.go.id/id/publication/2023/04/17/65695a2b5a039c58071d23b6/indikator-pekerjaan-layak-di-indonesia-2022.html
32. CNBC Indonesia. (2021). *Survei Cyrus Network: Mayoritas Penerima Kartu Prakerja Puas*. Diakses pada 23 Mei 2024, dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20210523133436-4-247659/survei-cyrus-network-mayoritas-penerima-kartu-prakerja-puas

"15 Rekomendasi Paket Kebijakan untuk Mendukung Agenda Pembangunan Presiden & Wakil Presiden Indonesia 2024 - 2029"

Fokus Area 6

Penyediaan Rumah Sakit Lengkap: Menjamin Ketersediaan Faskes dan Nakes serta Kualitas Layanan Kesehatan Bermutu

6

IBC
Indonesian Business Council

Sumber Gambar: freepik

Penyediaan Rumah Sakit Lengkap: Menjamin Ketersediaan Faskes dan Nakes serta Kualitas Layanan Kesehatan Bermutu

Misi Asta Cita 4 Prabowo-Gibran

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Program Hasil Terbaik Cepat No. 4 Prabowo-Gibran

Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten.

Stakeholders: *Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK); Kementerian Kesehatan (Kemenkes); Kementerian Sosial (Kemensos); Kementerian Keuangan (Kemenkeu); Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri); Pemerintah Daerah (Pemda); Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).*

> *Di bidang kesehatan, kami akan membangun rumah sakit modern di setiap kabupaten dan kota, dan puskesmas modern di setiap desa di seluruh Indonesia.*
>
> ***Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia Periode 2024 - 2029***

Akses dan Kualitas pada Layanan Kesehatan Lengkap Masih Terbatas, Industri Farmasi Belum Berkembang Pesat, dan Masih Rentannya Masyarakat terhadap Berbagai Penyakit

Akses dan kualitas layanan kesehatan yang bermutu merupakan syarat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tanpa akses yang memadai, masyarakat tidak dapat memperoleh layanan kesehatan. Keberadaan fasilitas kesehatan (faskes) dan tenaga kesehatan (nakes) yang berkualitas juga menentukan efektivitas pelayanan kesehatan. Kedua faktor ini membantu memastikan setiap warga hidup sehat dan produktif.

Akses terhadap nakes, khususnya dokter, masih terbatas. Ketersediaan dokter umum maupun dokter spesialis sangat terbatas. Rasio dokter Indonesia sebesar 0,69 dokter per 1.000 penduduk, lebih rendah dibandingkan standar *World Health Organization* (WHO), yaitu 1 dokter per 1.000 penduduk dan menempati peringkat ke-8 dari 10 negara ASEAN (lihat Tabel 6.1).[1] Sebaran dokter di Indonesia pun timpang. Bahkan, di beberapa daerah dapat ditemukan faskes dengan jumlah nakes yang jauh dari memadai. Selain itu, ketersediaan dan keterjangkauan peralatan medis dan obat di Indonesia juga perlu dipastikan.

Tabel 6.1 Rasio Dokter per 1.000 Penduduk di 10 Negara ASEAN

Negara	Rasio (per 1.000 Penduduk)	Tahun Data
Singapura	2,60	2021
Malaysia	2,32	2021
Brunei	1,91	2021
Thailand	0,93	2020
Vietnam	0,83	2016
Filipina	0,79	2021
Myanmar	0,75	2019
Indonesia	**0,69**	**2022**
Laos	0,33	2021
Kamboja	0,21	2019

Sumber: WHO

Akses terhadap faskes masih menjadi kendala untuk memperoleh layanan kesehatan. Sebanyak 42,4% masyarakat pedesaan menganggap akses menuju rumah sakit masih sulit, bahkan 36,8% masyarakat masih kesulitan mengakses faskes tingkat I seperti Puskesmas.[2]

Indonesia masih rentan terhadap berbagai penyakit, baik menular maupun tidak menular. Penyakit menular seperti TBC, diare, dan polio masih menjadi ancaman serius. Adapun penyakit tidak menular seperti diabetes dan obesitas terus meningkat. Kekurangan gizi juga menjadi isu utama, dengan satu dari lima anak mengalami stunting.[3] Kondisi ini menunjukkan perlunya perhatian khusus dalam edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai kesehatan dan gizi untuk mencegah permasalahan jangka panjang.

Di sisi lain, industri hulu farmasi bahan baku obat masih belum berkembang, sehingga belum bisa memasok bahan baku yang diperlukan di industri hilir manufaktur farmasi. Sekitar 90% bahan baku industri farmasi saat ini berasal dari impor, utamanya dari China dan India. Hal ini karena mayoritas perusahaan di industri ini masih fokus pada formulasi produk-produk obat *copy* atau *off-patent*.[4]

Program Jaminan Kesehatan oleh BPJS Kesehatan sudah memiliki cakupan luas namun kualitas layanannya perlu ditingkatkan. Ombudsman RI menerima banyak pengaduan terkait praktik pembatasan layanan pasien peserta BPJS Kesehatan di sejumlah faskes.[5] Pembatasan ini salah satunya dipengaruhi oleh tingginya biaya yang harus ditanggung BPJS, terutama untuk penyakit kronis. Jika tidak ada penyesuaian dari sisi pendanaan maupun cakupan, beban BPJS akan kian membesar dan berpotensi menghambat perbaikan kualitas pelayanan lembaga tersebut.

Kementerian Kesehatan menginisiasi Transformasi Sistem Kesehatan di Indonesia yang tujuannya menjadikan masyarakat sehat dan kuat. Terdapat enam pilar Transformasi Kesehatan:

Gambar 6.1 Enam Pilar Transformasi Kesehatan

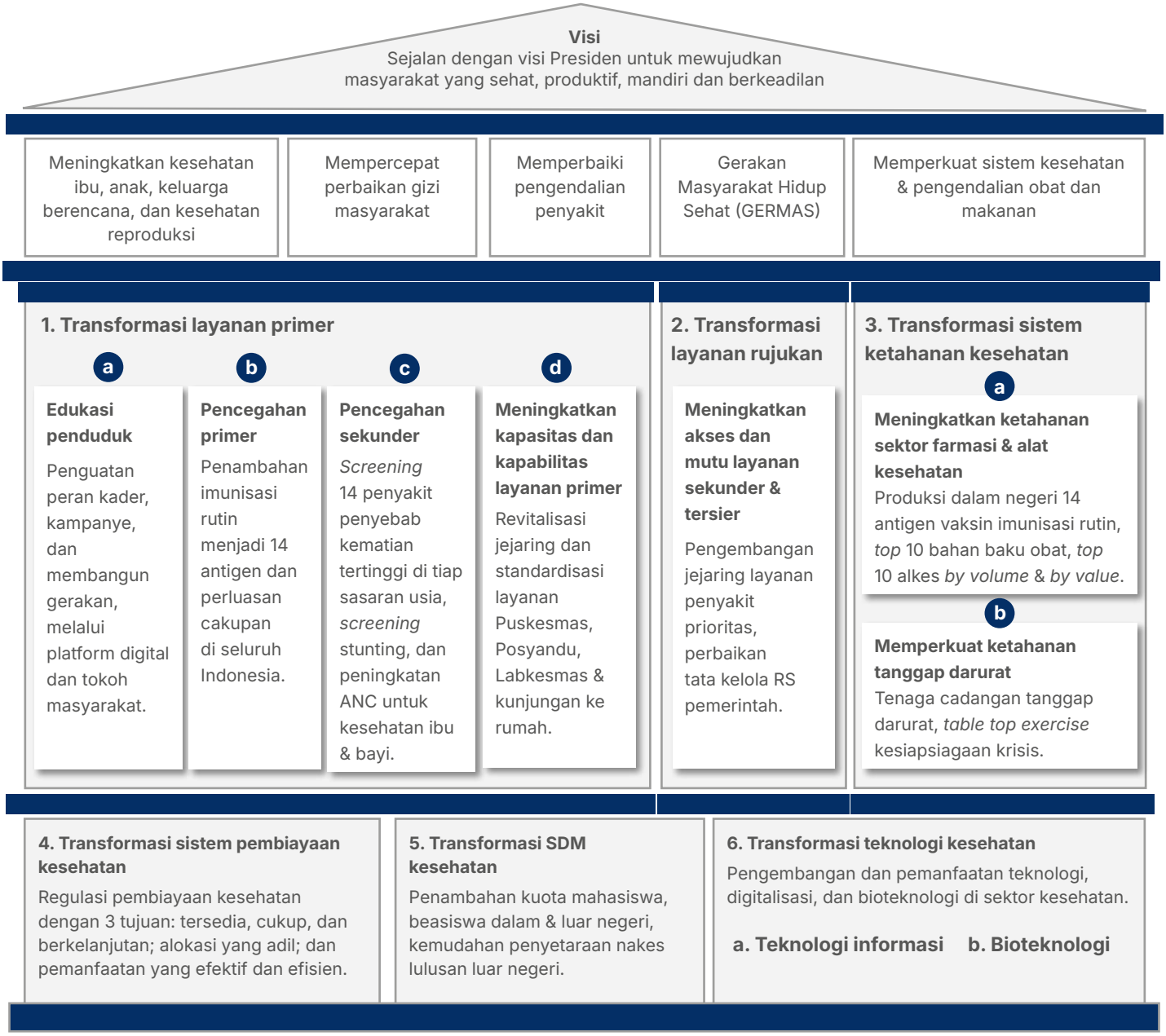

Sumber: Kementerian Kesehatan

1. **Transformasi layanan primer**, melalui integrasi layanan primer dengan mengubah pemberian layanan dari yang selama ini berbasis program menjadi layanan yang sesuai dengan siklus kehidupan. Upaya ini meliputi edukasi penduduk, pencegahan primer melalui penambahan imunisasi dan perluasan cakupan, pencegahan sekunder melalui *screening* 14 penyakit prioritas, dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan primer.
2. **Transformasi layanan rujukan**, berfokus pada penyakit penyebab kematian tertinggi dan beban besar. Kementerian Kesehatan melaksanakan program Pengampuan Jejaring Rujukan yang bertujuan meningkatkan kompetensi layanan penyakit prioritas di masing-masing strata RS. Program tersebut meliputi layanan di tiga strata RS, yaitu madya, utama, dan paripurna untuk penyakit prioritas seperti jantung dan *stroke*, kanker, ginjal, serta kesehatan ibu dan anak.
3. **Transformasi sistem ketahanan kesehatan**, meliputi upaya untuk meningkatkan ketahanan sektor farmasi dan alat kesehatan dan memperkuat ketahanan tanggap darurat.
4. **Transformasi sistem pembiayaan kesehatan**, untuk memastikan pembiayaan yang cukup, adil, efektif, dan efisien.
5. **Transformasi SDM kesehatan**, melalui penambahan kuota mahasiswa, beasiswa dalam dan luar negeri, serta kemudahan penyetaraan nakes lulusan luar negeri.
6. **Transformasi teknologi kesehatan**, meliputi pengembangan dan pemanfaatan teknologi, digitalisasi, dan bioteknologi.

Pencapaian inisiatif transformasi kesehatan tersebut telah terlihat pada beberapa aspek. Salah satunya, jumlah produsen vaksin dalam negeri meningkat dari 1 menjadi 3 produsen. Indonesia juga telah mampu memproduksi 4 tipe vaksin. Selain itu, 9 dari 10 bahan baku obat kini telah bisa diproduksi di dalam negeri. Ini berdampak terhadap peningkatan realisasi belanja farmasi dan alat kesehatan dalam negeri. Melihat kemajuan tersebut, inisiatif ini perlu dilanjutkan untuk memastikan akses kesehatan yang dekat, bermutu, dan murah kepada masyarakat di seluruh Indonesia.[6]

Tantangan dalam Peningkatan Akses dan Kualitas pada Layanan Kesehatan

Teridentifikasi beberapa tantangan utama dalam peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan. Tantangan tersebut, yaitu *hard and soft* infrastruktur sektor kesehatan dan pendukungnya yang masih terbatas, rendahnya kapasitas dan kapabilitas dalam industri kesehatan, dan perlunya peningkatan tata kelola penanganan penyakit.

- **Keterbatasan anggaran dan kapasitas pada berbagai tingkat pemerintahan dalam menyediakan fasilitas kesehatan**. Anggaran kesehatan Indonesia, (5,6%[7] dari APBN 2024) lebih rendah dari standar WHO, yaitu 15% dari APBN. Selain itu, baru sekitar 41% puskesmas di Indonesia yang menyediakan pelayanan rawat inap.[8] Perbedaan besaran APBD antar daerah juga menyebabkan kesenjangan pada fasilitas kesehatan.
- **Tidak semua sekolah memiliki layanan dasar seperti air, sanitasi, dan kebersihan serta masih banyak warga yang tinggal di permukiman kumuh sehingga rentan terinfeksi penyakit menular.** Hingga 2022, hanya 11,43% sekolah di Indonesia yang memiliki jamban terpisah dan berfungsi dengan baik.[9] Selain itu, masih banyak masyarakat yang tinggal di pemukiman kumuh, menyebabkan mereka rentan terhadap penyakit menular, seperti diare dan gangguan pernapasan.
- **Sulitnya melakukan integrasi layanan antara faskes publik dan faskes swasta (*integrated care*) di tingkat layanan kesehatan primer maupun sekunder.** Integrasi layanan antara faskes publik dan swasta sulit terwujud. Sistem rujukan seringkali tidak berjalan baik, sehingga pasien harus menunggu lama untuk mendapatkan perawatan. Hal ini juga disebabkan perbedaan standar layanan pada setiap faskes.
- **Terbatasnya kesempatan untuk mengakses pendidikan kedokteran.** Akses terhadap pendidikan kedokteran di Indonesia saat ini masih terbatas, salah satunya karena biaya yang mahal. Total biaya pendidikan kedokteran Indonesia tercatat sebagai yang termahal ke-8 di dunia, yaitu Rp911,9 juta.[10]

- **Minimnya insentif bagi nakes untuk bekerja di daerah terpencil.** Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mencatat insentif nakes di daerah terpencil kurang menjadi perhatian pemerintah. Kementerian Kesehatan sudah menempatkan dokter yang baru lulus pendidikan di Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan (DTPK) melalui program Nusantara Sehat. Kementerian Kesehatan juga berencana memberikan insentif Rp30 juta melalui subsidi pemerintah untuk pemerataan dokter spesialis.[11]
- **Besarnya ketergantungan impor pada bahan baku obat dan alat kesehatan.** Saat ini, Indonesia mengimpor 90% bahan baku obat dan 80% alat kesehatan.[12,13] Hal ini menyebabkan tingginya ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri, sehingga sistem kesehatan di dalam negeri rentan terhadap fluktuasi harga dan gangguan pasokan global.
- **Masih banyaknya warga peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang tidak aktif karena menunggak iuran atau pindah kepesertaan dan proses administrasi yang berbelit**. Sekitar 20%[14] status peserta JKN tidak aktif karena menunggak iuran, akibatnya mereka kehilangan akses ke layanan kesehatan. Proses administrasi yang berbelit juga menjadi hambatan peserta untuk mengakses layanan dengan optimal.
- **Meningkatnya beban penyakit kronis mendongkrak biaya layanan kesehatan yang harus ditanggung oleh negara.** Beberapa penyakit kronis mendominasi pembiayaan pelayanan kesehatan di Indonesia. Pada 2022, penyakit dengan total biaya tertinggi, yaitu jantung (Rp12,14 triliun), kanker (Rp4,5 triliun), dan *stroke* (Rp3,24 triliun).[15]
- **Masih banyak orang yang belum menerapkan pola gaya hidup sehat dan tingginya konsumsi warga pada makan-makanan tidak bergizi.** Kementerian Pemuda dan Olahraga mencatat hanya 31%[16] masyarakat Indonesia yang rutin berolahraga. Ini menunjukkan rendahnya adopsi perilaku hidup sehat. Selain itu, tingginya konsumsi makanan cepat saji dan rendahnya konsumsi buah dan sayur menunjukkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang gizi yang seimbang.
- **Banyak ibu hamil yang mengalami anemia, kurang gizi pada ibu hamil dan anak, dan minimnya sanitasi yang bersih menyebabkan tingginya kasus stunting.** Sekitar 48,9%[17] ibu hamil di Indonesia mengalami anemia, yang kemudian memengaruhi kondisi ibu dan janin. Kurangnya gizi pada ibu hamil dan anak menyebabkan prevalensi stunting mencapai 21,6%.[18]

Navigasi Indonesia: Gagasan dan Komitmen Presiden-Wakil Presiden Republik Indonesia 2024 - 2029

Sektor kesehatan menjadi salah satu perhatian penting Presiden Terpilih. Dalam Asta Cita No. 4, Prabowo-Gibran berencana memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Salah satu perhatian penting Presiden Terpilih adalah akses ke layanan kesehatan. Melalui Program Hasil Terbaik Cepat No. 4, Prabowo-Gibran akan menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit (RS) lengkap berkualitas di kabupaten.

Jumlah faskes dan nakes yang memadai juga menjadi perhatian penting Presiden Terpilih. Pada Debat Calon Presiden Ke-5, Prabowo Subianto menjanjikan penambahan fakultas kedokteran dan beasiswa bagi 10 ribu mahasiswa untuk belajar kedokteran di luar negeri guna mengatasi kekurangan 140 ribu dokter di Indonesia. Selain itu Prabowo menyatakan akan membangun rumah sakit modern di setiap kabupaten/kota.

Rekomendasi Paket Kebijakan 6:

A	**Meningkatkan Pemberian Anggaran ke Pemerintah Daerah dan Memperkuat Skema KPBU untuk Meningkatkan Jumlah Fasilitas Kesehatan**
B	**Mendukung Pemenuhan dan Pemerataan Tenaga Kesehatan melalui Pemberian Insentif, Peningkatan Jumlah Program Pendidikan, dan Beasiswa Afirmasi**
C	**Membangun Industri Farmasi dan Alat Kesehatan yang Tangguh untuk Membangun Ketahan Sektor Kesehatan Nasional**
D	**Meningkatkan Kualitas Layanan BPJS Kesehatan sekaligus Memastikan Tercapainya *Universal Health Coverage***
E	**Memprioritaskan Penanganan Stunting dan Penyakit Menular/Tidak Menular yang Mengancam Keberhasilan Pencapaian Indonesia Emas 2045**

Rincian Rekomendasi A: Meningkatkan Pemberian Anggaran ke Pemerintah Daerah dan Memperkuat Skema KPBU untuk Meningkatkan Jumlah Fasilitas Kesehatan

I	**Melanjutkan Transformasi Layanan Kesehatan Primer**
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• 36,8% masyarakat masih kesulitan mengakses faskes tingkat I seperti Puskesmas.[19] • Untuk mendukung gagasan Presiden Terpilih "pemeriksaan kesehatan gratis", artinya pelaksanaannya paling baik dilakukan di tingkat komunitas/layanan kesehatan primer. • Kementerian Kesehatan sudah memiliki kerangka kebijakan dan program untuk Transformasi Layanan Kesehatan Primer.	a. **Melanjutkan kebijakan Transformasi Layanan Primer** yang mencakup edukasi penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder, serta meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan primer. b. **Mempertimbangkan meningkatkan jumlah dan mendayagunakan Puskesmas Pembantu (Pustu)** untuk memperluas akses layanan pada daerah terpencil.

II	**Mendukung Pemberian Anggaran ke Pemerintah Daerah sesuai *Performance Based Budgeting* dan Dukungan Bantuan Lainnya**
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Terbatasnya anggaran pemerintah daerah sedangkan terdapat kebutuhan yang besar untuk memberikan layanan kepada masyarakat. • Fasilitas kesehatan belum sepenuhnya merata: o 15 dari 38 provinsi belum memiliki RS Kelas A.[20] o 171 kecamatan di 8 provinsi belum ada Puskesmas, mayoritas di Papua.[21]	a. **Meningkatkan alokasi dana transfer ke daerah (dapat dalam bentuk Dana Alokasi Usaha/Dana Usaha Khusus) yang disertai dengan pengawasan *Key Performance Index* (KPI)** atas ketercapaian penambahan jumlah fasilitas kesehatan dan kualitas layanan yang diberikannya. b. **Memberikan dukungan bantuan alat kesehatan langsung kepada pemerintah daerah.** c. **Melanjutkan dukungan pembangunan RS Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Vertikal yang dilakukan Kementerian Kesehatan.**

III	Memperkuat Skema Kerjasama Publik dan Badan Usaha (KPBU)
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Tingginya kebutuhan investasi infrastruktur memerlukan dukungan pendanaan di luar APBN. Perlu pelibatan investor dalam penyediaan infrastruktur salah satunya melalui skema Kerjasama Publik dan Badan Usaha (KPBU). • Masih lambatnya pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU.	a. **Meningkatkan kolaborasi antar institusi melalui kerangka kerjasama/kewenangan lembaga** yang memastikan percepatan dan efisiensi implementasi KPBU. b. Menyusun prosedur yang efektif dan berkelanjutan, khususnya dalam memperkuat metode dan kaidah *screening* proyek KPBU. c. **Memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam implementasi KPBU.**

Rincian Rekomendasi B: Mendukung Pemenuhan dan Pemerataan Tenaga Kesehatan melalui Pemberian Insentif, Peningkatan Jumlah Program Pendidikan, dan Beasiswa Afirmasi

I	Memastikan Pemenuhan dan Pemerataan 9 Jenis Tenaga Kesehatan sesuai UU, Baik dalam Hal Produksi, Distribusi, dan Utilisasinya.
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• **Jumlah nakes masih kurang.** Terdapat kekurangan lebih dari 130 ribu dokter dan 31 ribu dokter spesialis.[22,23] • **Distribusi tenaga kesehatannya juga masih timpang.** Mayoritas dokter (64%) dokter terpusat di daerah perkotaan seperti di Pulau Jawa dan Sumatera, kemudian belum semua Puskesmas memiliki standar minimal 9 nakes utama (45%), terutama Papua (92%), Papua Barat (83%).[24]	a. **Memberikan insentif untuk nakes**, termasuk tunjangan khusus bagi nakes yang bertugas di daerah terpencil. b. **Memperbanyak kesempatan menjadi nakes dengan meningkatkan distribusi fakultas/ sekolah ilmu-ilmu kesehatan secara dan dengan biaya yang terjangkau.** c. **Memperbanyak pemberian beasiswa afirmasi dan profesi** khususnya untuk keluarga pra sejahtera dan daerah minim nakes. d. **Memberikan dukungan pelatihan untuk dalam memastikan peningkatan kualitas tenaga kesehatan.**
II	**Mengoptimalkan Pendayagunaan Kader Kesehatan**
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Kader kesehatan terbukti banyak membantu penanganan pandemi COVID-19, berjumlah hampir mencapai 1 juta orang.	a. **Memberikan pemenuhan insentif kader kesehatan yang layak dengan prinsip *merit-based*.** b. **Meningkatkan kapasitas kader kesehatan untuk memenuhi tingkat *skill set* yang dibutuhkan.** Bisa menjadikan India, Thailand, Amerika sebagai referensi. c. **Mempertimbangkan untuk mendayagunakan kader kesehatan dalam rangka mendukung operasional program Makan Bergizi Gratis.**

Rincian Rekomendasi C: Membangun Industri Farmasi dan Alat Kesehatan yang Tangguh untuk Membangun Ketahan Sektor Kesehatan Nasional

Rekomendasi berikut merujuk pada dokumen Buku Putih Indonesia Emas yang disusun oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia. Usulan rekomendasi lengkap terhadap pembangunan industri farmasi yang unggul untuk membuat Indonesia berketahanan dapat dilihat langsung pada dokumen tersebut.

Kondisi Eksisting	Rekomendasi
• Tingginya ketergantungan impor Bahan Baku Obat/*Active Pharmaceutical Ingredient* (API) dan alat kesehatan. o 95% dari Bahan Baku Obat/Active Pharmaceutical Ingredient (API) diimpor.[25] o 70% peralatan medis diimpor.[26] o Hampir dari setengah antigen vaksin secara rutin diimpor. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kapabilitas dan kapasitas dalam negeri untuk mendorong manufaktur farmasi.	**a. Melakukan ekspansi manufaktur domestik** dengan memanfaatkan kapabilitas yang ada: **i. Memprioritaskan produksi produk medis dan alat medis esensial** secara domestik. **ii. Membangun rantai pasok yang menyeluruh** mulai dari sumber bahan baku hingga distribusi dan R&D. **iii. Meningkatkan kualitas produksi dan kapasitas produk fitofarmasi*.** **salah satu jenis obat tradisional yang bahan baku dan produknya sudah terstandardisasi.* **b. Membangun kapabilitas manufaktur mutakhir** untuk produk baru: **i. Bermitra dengan pemain asing terkemuka untuk teknologi dan transfer R&D/pembangunan pabrik.** **ii. Memperkuat lingkungan R&D** (misal CRO, fasilitas riset). c. **Membangun cadangan strategis produk medis esensial:** **i. Menentukan daftar produk esensial dan membangun stok strategis produk tersebut.** **ii. Membangun manajemen inventori kuat** guna menghindari pemborosan. **iii. Menegosiasikan perjanjian suplai yang menguntungkan untuk mendapatkan "hak prioritas" saat terjadi krisis.**

Rincian Rekomendasi D: Meningkatkan Kualitas Layanan BPJS Kesehatan sekaligus Memastikan Tercapainya *Universal Health Coverage*

Kondisi Eksisting	Rekomendasi
• Cakupan JKN sudah mencapai 94,77% penduduk. Tantangannya, masih terdapat 54 juta peserta JKN yang tidak aktif karena menunggak iuran atau pindah kepesertaan yang mengakibatkan terancam tidak dijamin jika tiba-tiba jatuh sakit.[27,28] • Masih banyak dirasakan oleh pasien BPJS yang mengeluhkan kualitas pelayanannya, khususnya pada proses administrasi yang sulit.[29]	**a. Memperkuat komitmen politik dan anggaran pemerintah untuk mencapai *Universal Health Coverage*** untuk memastikan akses dan kualitas layanan kesehatan untuk semua secara berkelanjutan. **b. Memastikan efisiensi program BPJS melalui perbaikan tata kelola dengan mempertimbangkan tercapainya *Universal Health Coverage* secara berkelanjutan.** **c. Meningkatkan fokus program JKN pada kualitas layanan sekaligus memastikan kemudahan akses** bagi peserta JKN yang kesulitan sehingga menghilangkan *financial barriers* yang dihadapi oleh siapapun, dimanapun, untuk menerima layanan kesehatan berkualitas. **d. Meningkatkan pelayanan program BPJS antara lain dengan:** **i. Menyederhanakan dan memudahkan sistem rujukan JKN disertai penambahan jumlah fasilitas kesehatan untuk mengurai antrian.** **ii. Mengevaluasi berkala besaran pembayaran fasilitas kesehatan.** **iii. Memastikan pendanaan program BPJS tersedia dan tidak mengganggu pelayanan pada warga penerima manfaat.**

Rincian Rekomendasi E: Memprioritaskan Penanganan Stunting dan Penyakit Menular/ Tidak Menular yang Mengancam Keberhasilan Pencapaian Indonesia Emas 2045

I	Melakukan Intervensi pada Calon Ibu, Ibu Hamil, dan 1.000 Hari Pertama Kehidupan Anak
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Kasus stunting masih marak terjadi pada anak Indonesia (1 dari 5 anak Indonesia mengalami stunting).[30] Beberapa penyebab dari tingginya kasus stunting antara lain: o Kurangnya gizi ibu hamil menyebabkan 23% bayi di Indonesia lahir stunting.[31] o 48% ibu hamil mengalami anemia dikarenakan kekurangan zat besi. Hal ini memperbesar risiko stunting anaknya.[32] o Diare jadi penyakit paling sering terjadi pada anak dan infeksi diare berulang menyebabkan risiko anak stunting.[33]	**a. Untuk calon ibu:** **i. Melakukan edukasi pencegahan stunting dalam program Cek Kesehatan Calon Pengantin (CATIN).** **b. Untuk ibu hamil:** **i. Menyediakan makan sehat sehat gratis dan tambahan tablet zat besi bagi yang warga kurang mampu.** **ii. Memberikan pendampingan pada ibu hamil hingga proses persalinan untuk memastikan kesehatan ibu dan anak dalam kondisi terbaik.** **c. 1000 hari pertama anak:** **i. Memantau tumbuh kembang secara intensif.** **ii. Menyediakan makanan gratis bagi anak yang lahir pada keluarga tidak mampu.**
II	**Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Penyakit Tidak Menular dan Penyakit Menular yang Rentan Terkena pada Masyarakat**
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
Indonesia masih rentan terhadap: • **Penyakit Tidak Menular (PTM)** o Indonesia 5 besar dunia kasus diabetes tertinggi.[34] o Angka obesitas meningkat dari 14% di tahun 2019 menjadi 25% tahun 2023.[35] • **Penyakit Menular** o Indonesia posisi ke-2 dunia kasus TBC terbanyak.[36] o Polio kembali ke Indonesia setelah eradikasi polio tahun 2014. Pada tahun 2023 teridentifikasi 415 kab/kota memiliki risiko tinggi polio karena vaksinasi rendah.[37] o Diare masih menjadi 10 penyakit penyebab kematian tertinggi di Indonesia.[38] o Hanya 1/3 dari seluruh sekolah yang memiliki akses layanan dasar air, sanitasi, dan kebersihan.[39]	**a. Memperkenalkan kebijakan *nutrition labeling* untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pada produk yang mengandung kadar gula tinggi dan dapat meningkatkan risiko terkena diabetes.** Contoh: Singapura memiliki kebijakan *nutrition labeling* dinamakan *nutri grade* yang memberikan penilaian kadar gula pada produk makanan kemasan. **b. Meningkatkan jangkauan dan kualitas transportasi publik serta ruang publik** untuk memperbesar kesempatan warga beraktivitas fisik dalam lingkungan tempat tinggal dan kerjanya, merujuk pada kebijakan *Health in All Policies*. **c. Meningkatkan jangkauan layanan air bersih, air limbah**, khususnya pada kawasan hunian kumuh serta memastikan sekolah memiliki WC, air bersih dan kualitas sanitasi yang baik. **d. Meningkatkan proses skrining TBC dan memastikan imunisasi dilakukan secara merata.** **e. Meningkatkan intensitas imunisasi universal (termasuk polio) pada daerah yang membutuhkan dan dilakukan secara merata.**

III	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Penyakit Tidak Menular dan Penyakit Menular yang Rentan Terkena pada Masyarakat
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Gaya hidup sedentari dan minimnya partisipasi olahraga menyebabkan rendahnya tingkat kebugaran masyarakat Indonesia, dengan hanya 5,86% bugar dan 35,2% aktif berolahraga.[40] • Angka prevalensi kelebihan berat badan secara nasional masih tinggi sekitar 27%, dengan prevalensi pada laki-laki sebesar 20,3% dan pada perempuan sebesar 33,9%.[41] • Rasio ruang terbuka olahraga per jumlah penduduk masih rendah, yaitu sebesar 1,78 m^2, jauh dari standar kelayakan.[42]	a. **Meningkatkan jumlah dan kualitas ruang terbuka olahraga di berbagai daerah, khususnya di daerah perkotaan dan padat penduduk,** untuk memastikan akses yang lebih baik bagi masyarakat. Termasuk stadion, lapangan, atau pusat kebugaran. b. **Membangun kemitraan dengan sektor swasta melalui pemberian insentif untuk menyediakan fasilitas berbiaya rendah bagi masyarakat, serta mendukung kegiatan olahraga komunitas.** c. **Melakukan kampanye secara konsisten mengenai pentingnya olahraga dan gaya hidup sehat** melalui media massa, media sosial, dan kegiatan komunitas.

Referensi

1. World Health Organization. (n.d.). *Indicators*. Diakses pada 5 Juni 2024, dari https://data.who.int/indicators
2. Digital Transformation. (2022). *Tantangan Layanan Kesehatan di Wilayah Pedesaan*. Diakses pada 12 Juni 2024, dari https://digitaltransformation.co.id/tantangan-layanan-kesehatan-di-wilayah-pedesaan/
3. Kumparan. (2023). *Survei: 1 dari 5 Anak di Indonesia Mengalami Stunting*. Diakses pada 18 Juni 2024, dari https://kumparan.com/beritaanaksurabaya/survei-1-dari-5-anak-di-indonesia-mengalami-stunting-21UH5DMm3gv
4. Kompas. (2024). *Hulu Industri Belum Berkembang: Industri Farmasi Masih Bergantung Bahan Baku Impor*. Diakses pada 20 Juni 2024, dari https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/07/12/hulu-industri-belum-berkembang-industri-farmasi-masih-bergantung-bahan-baku-impor
5. Ombudsman Republik Indonesia. (2023). *Pembatasan Layanan Pasien BPJS Kesehatan Diskriminatif*. Diakses pada 15 Juni 2024, dari https://ombudsman.go.id/news/r/pembatasan-layanan-pasien-bpjs-kesehatan-diskriminatif
6. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Menkes Ungkap Capaian Positif Transformasi Ketahanan Kesehatan*. Diakses pada 22 Juni 2024, dari https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20231109/4044228/menkes-ungkap-capaian-positif-transformasi-ketahanan-kesehatan/
7. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Anggaran Kesehatan 2024 Ditetapkan Sebesar 5,6% dari APBN, Naik 8,1% Dibanding 2023*. Diakses pada 25 Juni 2024, dari https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230816/0643661/anggaran-kesehatan-2024-ditetapkan-sebesar-5-6-dari-apbn-naik-8-1-dibanding-2023
8. Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Indonesia 2024*. Diakses pada 10 Juni 2024, dari https://www.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/c1bacde03256343b2bf769b0/statistik-indonesia-2024.html
9. Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (n.d.). *Roadmap Sanitasi Sekolah 2024–2030: Bukti Nyata Upaya Kemendikbudristek Capai Sekolah Sehat*. Diakses pada 28 Juni 2024, dari https://itjen.kemdikbud.go.id/web/roadmap-sanitasi-sekolah-2024-2030-bukti-nyata-upaya-kemendikbudristek-capai-sekolah-sehat/
10. N26. (2022). *The Education Price Index*. Diakses pada 5 Juni 2024, dari https://n26.com/en-eu/the-education-price-index
11. CNBC Indonesia. (2024). *Kebijakan Menkes: Dokter Spesialis Daerah Terpencil Digaji Rp30 Juta*. Diakses pada 15 Juni 2024, dari https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20240703155859-33-551507/kebijakan-menkes-dokter-spesialis-daerah-terpencil-digaji-rp-30-juta
12. Detik Finance. (2024). *Jokowi Ungkap Fakta Mengejutkan: 90% Bahan Baku Obat di RI Impor*. Diakses pada 20 Juni 2024, dari https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7308027/jokowi-ungkap-fakta-mengejutkan-90-bahan-baku-obat-di-ri-impor
13. Jawa Pos. (2024). *80 Persen Alkes Masih Didatangkan dari Luar Negeri*. Diakses pada 22 Juni 2024, dari https://www.jawapos.com/ekonomi/01330800/80-persen-alkes-masih-didatangkan-dari-luar-negeri
14. Katadata. (2024). *Hampir 5,5 Juta Peserta BPJS Kesehatan Menunggak Iuran*. Diakses pada 25 Juni 2024, dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/05/13/hampir-55-juta-peserta-bpjs-kesehatan-menunggak-iuran
15. Indonesia.go.id. (2024). *Pelayanan Penyakit Kronis Terus Diperluas*. Diakses pada 12 Juni 2024, dari https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7908/pelayanan-penyakit-kronis-terus-diperluas?lang=1
16. Katadata. (2023). *10 Provinsi dengan Jumlah Penduduk Rajin Berolahraga Tertinggi Nasional 2022*. Diakses pada 28 Juni 2024, dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/03/10-provinsi-dengan-jumlah-penduduk-rajin-berolahraga-tertinggi-nasional-2022
17. Badan Pusat Statistik. (2024). *Prevalensi Anemia pada Ibu Hamil*. Diakses pada 5 Juni 2024, dari https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTMzMyMy/prevalensi-anemia-pada-ibu-hamil.html
18. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Prevalensi Stunting di Indonesia Turun ke 21,6% dari 24,4%*. Diakses pada 5 Juni 2024, dari https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230125/3142280/prevalensi-stunting-di-indonesia-turun-ke-216-dari-244/
19. Digital Transformation. (2022). *Tantangan Layanan Kesehatan di Wilayah Pedesaan*. Diakses pada 10 Juni 2024, dari https://digitaltransformation.co.id/tantangan-layanan-kesehatan-di-wilayah-pedesaan/
20. Sistem Informasi Rumah Sakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (n.d.). *Dashboard RS*. Diakses pada 15 Juni 2024, dari https://sirs.kemkes.go.id/fo/home/dashboard_rs?id=0
21. Antara News. (2023). *Kemenkes: Fasyankes Belum Merata, 171 Kecamatan Belum Ada Puskesmas*. Diakses pada 20 Juni 2024, dari https://www.antaranews.com/berita/3463977/kemenkes-fasyankes-belum-merata-171-kecamatan-belum-ada-puskesmas
22. Katadata. (2022). *Indonesia Masih Kekurangan 130 Ribu Dokter pada Juli 2022*. Diakses pada 25 Juni 2024, dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/13/indonesia-masih-kekurangan-130-ribu-dokter-pada-juli-2022
23. Kompas. (2023). *Kemenkes: Indonesia Masih Kekurangan 31.481 Dokter Spesialis*. Diakses pada 5 Juni 2024, dari https://nasional.kompas.com/read/2023/06/26/15323601/kemenkes-indonesia-masih-kekurangan-31481-dokter-spesialis
24. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Profil Kesehatan 2022*. Diakses pada 12 Juni 2024, dari https://p2p.kemkes.go.id/profil-kesehatan-2022/
25. CNN Indonesia. (2021). *Kimia Farma Ingin Tekan Impor Bahan Baku Obat 23 Persen 2024*. Diakses pada 18 Juni 2024, dari https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210216180748-92-607012/kimia-farma-ingin-tekan-impor-bahan-baku-obat-23-persen-2024
26. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Transformasi Berhasil Turunkan Transaksi Alat Kesehatan Impor*. Diakses pada 22 Juni 2024, dari https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20221220/5742065/transformasi-berhasil-turunkan-transaksi-alat-kesehatan-impor/

27. Bisnis Finansial. (2024). *Peserta BPJS Kesehatan Tembus 9,477 Juta dari Total Penduduk RI*. Diakses pada 25 Juni 2024, dari https://finansial.bisnis.com/read/20240108/215/1730492/peserta-bpjs-kesehatan-tembus-9477-dari-total-penduduk-ri
28. Kompas. (2023). *5,4 Juta Peserta JKN-KIS Tidak Aktif: Dibutuhkan Dana Penyangga Alternatif*. Diakses pada 28 Juni 2024, dari https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/12/21/54-juta-peserta-jkn-kis-tidak-aktif-dibutuhkan-dana-penyangga-alternatif
29. Berita Satu. (2023). *Puas Dilayani BPJS Kesehatan tetapi Terkendala Administrasi*. Diakses pada 30 Juni 2024, dari https://www.beritasatu.com/news/896149/puas-dilayani-bpjs-kesehatan-tetapi-terkendala-administrasi
30. Kumparan. (2023). *Survei: 1 dari 5 Anak di Indonesia Mengalami Stunting*. Diakses pada 1 Juni 2024, dari https://kumparan.com/beritaanaksurabaya/survei-1-dari-5-anak-di-indonesia-mengalami-stunting-21UH5DMm3gv
31. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (n.d.). *Materi KABKPK SOS SSGI*. Diakses pada 3 Juni 2024, dari https://ayosehat.kemkes.go.id/pub/files/files46531._MATERI_KABKPK_SOS_SSGI.pdf
32. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (n.d.). *Bumil Sehat Turunkan Stunting dan Angka Kematian Ibu*. Diakses pada 8 Juni 2024, dari https://kesmas.kemkes.go.id/konten/133/0/bumil-sehat-turunkan-stunting-dan-angka-kematian-ibu
33. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (n.d.). *Informasi Publik*. Diakses pada 12 Juni 2024, dari https://p2pm.kemkes.go.id/storage/informasi-publik/content/GHwE3BiLbOrvZZPKY1Pm91BIRWqzE4-metaTGFwa2IuIFAyUE0gMjAyMi5wZGY=-.pdf
34. CNN Indonesia. (2021). *Indonesia Masuk 5 Besar Negara Kasus Diabetes Tertinggi di Dunia*. Diakses pada 18 Juni 2024, dari https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20211206080008-255-730258/indonesia-masuk-5-besar-negara-kasus-diabetes-tertinggi-di-dunia
35. CNBC Indonesia. (2023). *RI Darurat Obesitas dan Diabetes: Kemenkes Lakukan Hal Ini*. Diakses pada 22 Juni 2024, dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20230925165310-4-475397/ri-darurat-obesitas-dan-diabetes-kemenkes-lakukan-hal-ini
36. Yayasan Kesehatan Indonesia. (2022). *Laporan Kasus TBC Global dan Indonesia 2022*. Diakses pada 25 Juni 2024, dari https://yki4tbc.org/laporan-kasus-tbc-global-dan-indonesia-2022/
37. Kompas. (2023). *Polio dan Tantangan yang Belum Terpenuhi*. Diakses pada 28 Juni 2024, dari https://www.kompas.id/baca/opini/2023/04/02/polio-dan-tantangan-yang-belum-terpenuhi?open_from=Search_Result_Page
38. CNBC Indonesia. (2023). *Baca: Penyakit Ini Penyebab Kematian Tertinggi di RI*. Diakses pada 30 Juni 2024, dari https://www.cnbcindonesia.com/research/20230301081522-128-417816/baca-penyakit-ini-penyebab-kematian-tertinggi-di-ri
39. UNICEF Indonesia. (2023). *Kompilasi WASH Acts 2023*. Diakses pada 1 Juni 2024, dari https://www.unicef.org/indonesia/media/20851/file/Kompilasi%20WASH%20Acts%202023.pdf.pdf
40. Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. (2021). *Laporan Nasional Sport Development Index Tahun 2021*. Diakses pada 5 Juni 2024, dari https://img-deputi3.kemenpora.go.id/files/document_file/2023/07/17/30/634laporan-nasional-sport-development-index-tahun-2021.pdf
41. Ibid.
42. Ibid.

"15 Rekomendasi Paket Kebijakan untuk Mendukung Agenda Pembangunan Presiden & Wakil Presiden Indonesia 2024 - 2029"

Fokus Area 7

3 Juta Rumah:
Mengurangi Ketimpangan Akses Hunian untuk Gen Z, Milenial, dan Pekerja Informal

7

IBC
Indonesian Business Council

Sumber Gambar: freepik

3 Juta Rumah:
Mengurangi Ketimpangan Akses Hunian untuk Gen Z, Milenial, dan Pekerja Informal

Misi Asta Cita 6 Prabowo-Gibran
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

Program Hasil Terbaik Cepat No. 7 Prabowo-Gibran
Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Program Prioritas No. 13 Prabowo-Gibran
Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat pedesaan/ perkotaan dan rakyat yang membutuhkan.

Stakeholders: *Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR); Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN); Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri); Kementerian Keuangan (Kemenkeu); Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/ Bappenas); Kementerian Sosial (Kemensos); Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (Kementerian Investasi/BKPM).*

> *"Saudara-saudara, kita akan membangun tiga juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. Satu juta di pedesaan, satu juta di pesisir, satu juta di perkotaan."*
> ***Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia Periode 2024 - 2029***

Tantangan Penyediaan Hunian yang Layak dan Terjangkau di Kota, Desa dan Pesisir, dan bagi yang Muda dan Informal

Tempat tinggal yang baik dan sehat menjadi hak setiap warga negara,[1] tetapi masih banyak rumah tangga Indonesia yang belum memiliki akses terhadap hunian. Rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri *(backlog)* di tahun 2023 sebesar 9,9 juta, atau setara dengan 13,56% dari seluruh rumah tangga di Indonesia.[2] Salah satu faktor utamanya adalah harga rumah yang tinggi di perkotaan. Padahal lebih dari separuh (56,7%) masyarakat Indonesia tinggal di daerah perkotaan, berdasarkan Sensus Penduduk 2020. Akibatnya, banyak rumah tangga menunda membeli atau membangun rumah, terpaksa tinggal di kawasan padat dan kumuh, atau memilih tinggal di pinggiran kota. Hal ini menambah beban masyarakat karena meningkatnya biaya transportasi dan banyaknya waktu yang terbuang di perjalanan, atau terpaksa berjibaku dengan kondisi sanitasi yang buruk dan infrastruktur serta fasilitas publik yang minim.[3]

Gambar 7.1 Angka* Backlog *Kepemilikan Rumah (2020-2023)

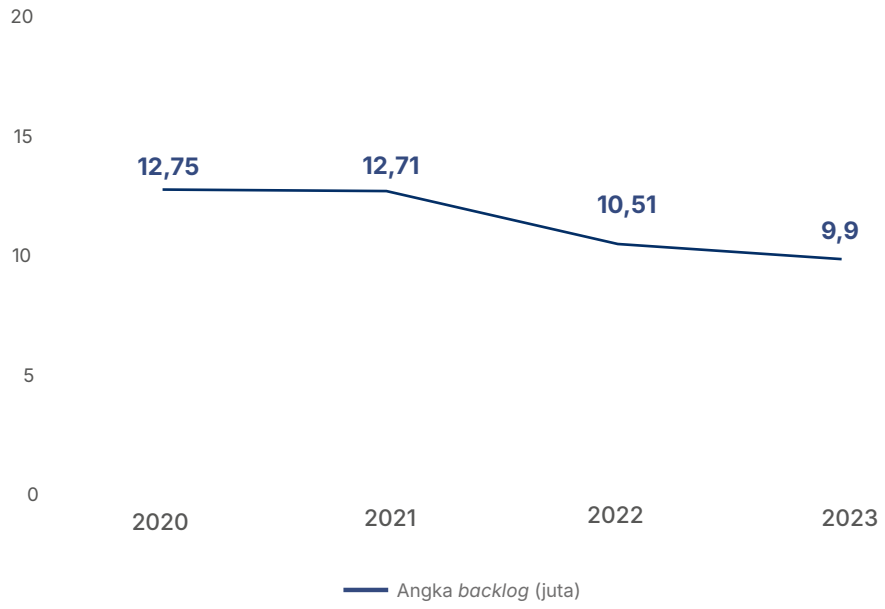

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS

Keterbatasan lahan di daerah perkotaan menjadi tantangan bagi upaya penyediaan hunian yang terjangkau. Tingkat urbanisasi dan pembangunan fisik yang tinggi, disertai lemahnya proses perencanaan tata ruang untuk pembangunan perkotaan menyebabkan semakin sulitnya mencari lahan yang terjangkau untuk kebutuhan hunian. Rasio harga rumah dibandingkan pendapatan tahunan bagi rata-rata penduduk Jakarta mencapai 10,3, lebih tinggi daripada London (8,5) dan New York (5,7), mengindikasikan tidak terjangkaunya hunian yang layak bagi kebanyakan warga perkotaan.[4]

Kesulitan mendapatkan akses hunian layak dirasakan berat, utamanya oleh generasi muda dan tenaga kerja informal. Generasi muda, yang mayoritasnya masih dalam tahap awal karir, sering kali tidak memiliki histori kredit yang kuat, sehingga sulit untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan. Ditambah kenaikan harga rumah di kota besar rata-rata hingga 10-20% per tahun[5], tidak

sebanding dengan kenaikan upah yang hanya naik sekitar 3-5% per tahun[6]. Selain itu, mayoritas tenaga kerja di Indonesia berada di sektor informal, mencakup sekitar 55,9% dari total angkatan kerja.[7] Mereka sering kali tidak memiliki pendapatan tetap atau dokumentasi keuangan yang memadai untuk memenuhi persyaratan mendapat kredit perumahan.

Bagi masyarakat pedesaan dan pesisir yang memiliki hunian, banyak yang tinggal di rumah tidak layak huni. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), 40,1% rumah tangga di perdesaan tinggal di rumah tidak layak huni. Masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya fasilitas air bersih dan sanitasi yang memadai, struktur bangunan yang tidak aman, dan minimnya akses terhadap infrastruktur dasar. Di daerah pesisir, ancaman bencana alam seperti banjir rob dan abrasi juga memperburuk kondisi hunian. Bencana alam tersebut menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur, termasuk rumah, jalan, dan fasilitas umum.[8]

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi *backlog*. Pemerintah memiliki beberapa program bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah, antara lain: bantuan stimulan perumahan swadaya untuk masyarakat yang membangun rumah sendiri, pembangunan rumah susun sederhana dan rumah khusus, bantuan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), serta berbagai program membantu pembiayaan perumahan, seperti fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan untuk lembaga keuangan agar masyarakat dapat mencicil rumah dengan bunga rendah, Subsidi Selisih Bunga untuk mensubsidi bunga cicilan rumah yang tinggi, dan pengurangan atau peniadaan uang muka (0% *down payment*).

Pemerintah juga telah melakukan strategi kolaboratif dengan para *stakeholder* perumahan melalui Program Sejuta Rumah (PSR). Program ini bertujuan menyediakan satu juta unit hunian setiap tahun, dengan mayoritas rumah diberikan untuk MBR. Tercatat sejak tahun 2015-2023, angka capaian PSR sudah mencapai 9,2 juta unit.[9]

Tantangan Utama Penyediaan Hunian

Tantangan utama yang menyebabkan ketimpangan akses hunian terletak pada: (1) lemahnya kebijakan tata ruang dan perizinan, (2) skema pembiayaan yang belum mendorong hunian layak & terjangkau tersedia secara masif, dan (3) minimnya transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi dengan perumahan.

Perbaikan regulasi dibutuhkan untuk mendukung pengembangan perumahan secara masif, khususnya dalam aspek tata ruang dan perizinan pada tingkat Pemerintah Daerah. Banyak daerah belum memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang memadai, sehingga menyulitkan pengembang mendapatkan izin lokasi dan pembangunan.[10] Birokrasi yang kompleks dan prosedur perizinan yang berbelit-belit juga sering kali menghambat investor dan pengembang dalam membangun perumahan baru.[11] Situasi ini menyebabkan ketersediaan perumahan layak dan terjangkau menjadi sangat terbatas, terutama di daerah perkotaan yang padat penduduk.

Skema pembiayaan, baik untuk sewa maupun kepemilikan, khususnya bagi pekerja informal sangat terbatas. Dirjen Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna, menyebutkan kendala dari banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan kredit perumahan karena tidak memiliki pendapatan tetap atau catatan keuangan *(credit history)* yang memadai.[12] Perbankan mencatat pada 2022, sektor informal yang menerima pembiayaan rumah subsidi baru sekitar 7%.[13] Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah, harus menunda atau bahkan mengurungkan niat mereka untuk memiliki rumah sendiri, memperparah masalah perumahan di Indonesia.

Bagi masyarakat yang tinggal di pinggiran, kurangnya transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi menyebabkan biaya hidup dan waktu perjalanan meningkat. Menurut data BPS, rata-rata biaya transportasi mencapai 30% dari total pengeluaran rumah tangga per bulan[14], terutama bagi mereka yang tinggal di daerah penyangga kota besar, seperti Jakarta dan Surabaya. Hal ini memperburuk kualitas hidup masyarakat, karena selain harus menempuh perjalanan jauh, mereka juga harus menghadapi kemacetan lalu lintas yang menghabiskan banyak waktu dan energi.

Navigasi Indonesia: Gagasan dan Komitmen Presiden-Wakil Presiden Republik Indonesia 2024 - 2029

Perhatian Prabowo-Gibran terhadap penanganan ketimpangan ekonomi lebih lanjut tertuang dalam visi-misinya, yaitu pada Asta Cita 6: membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Melalui misi ini, Prabowo-Gibran berkomitmen untuk melakukan pemerataan ekonomi dan memberantas kemiskinan, di antaranya dengan mempercepat penyediaan perumahan bagi rakyat Indonesia yang belum memiliki tempat tinggal. Selain itu, menjamin akses akan air bersih, terutama bagi masyarakat miskin, baik di perkotaan maupun di pedesaan, serta menyediakan transportasi publik bagi pekerja dan rakyat tidak mampu.

Selanjutnya, Prabowo-Gibran menargetkan untuk membangun/merenovasi sebanyak 3 juta rumah secara nasional mulai tahun kedua pemerintahannya. Angka ini terdiri dari pembangunan atau renovasi 2 juta rumah di pedesaan (40 rumah per desa) dan pembangunan 1 juta rumah di perkotaan (500 ribu unit rumah tapak dan 500 ribu unit hunian vertikal) per tahun. Hal ini dituangkan pada Program Hasil Terbaik Cepat ke-7 yang menggarisbawahi pentingnya melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan.

Rekomendasi Paket Kebijakan 7:

A	**Menggalakan Program Perbaikan Tata Ruang, Optimalisasi Pemanfaatan Lahan, dan Kemudahan Perizinan secara Menyeluruh**
B	**Melanjutkan Pengembangan Berbagai Program dan Inisiatif Pembiayaan Inovatif dalam Rangka Penyediaan Hunian Terjangkau serta Pemberian Bantuan Perbaikan Hunian Layak**
C	**Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Transportasi Publik**

Rincian Rekomendasi A: Menggalakan Program Perbaikan Tata Ruang, Optimalisasi Pemanfaatan Lahan, dan Kemudahan Perizinan secara Menyeluruh

I	**Meningkatkan Efisiensi Pemanfaatan Lahan Perkotaan melalui Perbaikan Kebijakan Tata Ruang**
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Lahan siap bangun yang berada di kawasan perkotaan semakin sedikit dan tidak terjangkau harganya. Sehingga lahan yang sudah ada harus ditingkatkan kepadatannya. • Sebagian besar regulasi tata ruang di kawasan perkotaan Indonesia memiliki Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang rendah pada kawasan sekitar simpul transportasi. Contoh Kebijakan RDTR Pemprov DKI Jakarta sebelum tahun 2022: pembangunan hunian vertikal dibatasi pada jalan besar dan intensitas KLB yang diberikan rendah.	**a. Melakukan evaluasi kebijakan tata ruang dan kebijakan turunannya di tingkat pemerintah daerah, khususnya pada kota-kota besar yang menjadi prioritas, serta melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan kebijakan tata ruang.** **b. Memberikan insentif kepada swasta untuk membangun hunian vertikal terjangkau melalui fleksibilitas dalam pengajuan kenaikan KLB.*** ** Walaupun implementasinya pada tingkat pemerintah daerah, perlu dibuat kerangka kebijakan secara nasional.* **c. Melakukan konsolidasi tanah vertikal pada kota dan daerah prioritas dengan pemberian dukungan pendampingan bagi warga dalam implementasi konsolidasi tanah,** untuk dibangun vertikal, baik sendiri atau bekerjasama dengan pihak swasta/ pengembang.
II	**Mengevaluasi Kebijakan Perizinan Industri Properti pada tingkat Pemerintah Daerah**
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Sejak terbit Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah diganti oleh Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Nomenklatur perizinan lain, seperti izin lokasi, *advise planning*, dll juga telah diganti untuk memberikan kemudahan dan terstandardisasi. • Masih diperlukan harmonisasi regulasi turunan UU CK pada sektor properti.	**a. Melakukan harmonisasi berbagai kebijakan turunan pendukung realisasi UU CK pada sektor properti**, termasuk memperjelas aturan, melakukan konsistensi kebijakan, serta mengisi kekosongan aturan, baik pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. **b. Melakukan sosialisasi secara terbuka dan menyeluruh terhadap berbagai perbaikan/ pembaruan kebijakan perizinan sektor industri properti.**

III	Mempercepat Pengembangan Kawasan Berbasis TOD di Perkotaan
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Terdapat kebutuhan untuk meringankan pengeluaran dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mereduksi penggunaan bahan bakar, dan mengurangi polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan bermotor dengan pengembangan *Transit Oriented Development* (TOD).	a. **Memberikan pendampingan khusus kepada pemerintah daerah pada kota-kota prioritas yang daerahnya memiliki potensi pengembangan TOD,** termasuk antara lain terkait: i) penentuan dan penetapan lokasi kawasan TOD, ii) pengembangan kawasan TOD, dan iii) kelembagaan TOD. b. **Memberikan dukungan pengembangan transportasi publik pada pemerintah daerah yang memiliki komitmen tinggi dalam pengembangan kawasan TOD.** c. **Menerapkan mekanisme *Land Value Capture* (LVC) secara strategis dan berkeadilan** untuk mengoptimalkan pendapatan dari peningkatan nilai tanah yang disebabkan oleh investasi publik, guna mendukung pengembangan program hunian terjangkau.
IV	**Mengoptimalkan Peran dan Fungsi Badan Bank Tanah**
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Ketersediaan lahan yang terbatas dan mahal menjadi kendala utama dalam pembangunan kawasan permukiman. • Terdapat Badan Bank Tanah yang dibentuk untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pada tahun 2021 berdasarkan amanat dari UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020.	a. **Memperkuat peran dan meningkatkan dukungan kepada Badan Bank Tanah sebagai *custodian land property* untuk mengelola aset tanah, dengan kewenangan untuk mengakuisisi lahan-lahan potensial yang terlantar atau kurang dimanfaatkan, serta menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk mengembangkan program penyediaan hunian terjangkau.**
V	**Memaksimalkan Potensi Penggunaan Aset Negara dan BUMN/BUMD dalam Penyediaan Hunian Terjangkau**
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Banyaknya aset Pemerintah & BUMN/BUMD, seperti tanah dan bangunan di perkotaan yang terlantar (*idle*) dan tidak dipergunakan dengan baik (*underutilized*), yang dapat dioptimalisasikan untuk penyediaan hunian terjangkau. • Terdapat Badan Bank Tanah yang salah satu tugasnya melakukan identifikasi aset pemerintah maupun BUMN/BUMD.	a. **Membuat kebijakan pemanfaatan lahan berbiaya rendah pada pemanfaatan aset pemerintah dan BUMD/BUMN yang mengikuti program penyediaan hunian terjangkau.** b. **Membuat inovasi dan terobosan kebijakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KBPU) pada sektor perumahan**.

VI	Memperluas Implementasi Kebijakan Konsolidasi Vertikal pada Wilayah Perkotaan
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Banyaknya penggunaan lahan di perkotaan yang tidak ideal karena banyak kawasan yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Di saat yang bersamaan banyak warga yang menempati hunian yang tidak layak di permukiman kumuh. Untuk mengatasi kedua permasalahan tersebut bisa melalui konsolidasi tanah vertikal. • Optimalisasi melalui pelaksanaan konsolidasi tanah vertikal ini akan menghasilkan lebih banyak jumlah hunian di lahan yang sama.	a. **Membuat kebijakan konsolidasi vertikal yang jelas,** antara lain mencakup: a) penentuan lokasi, b) insentif pembiayaan yang dapat diberikan kepada warga, dan c) kelembagaan pelaksanaan konsolidasi tanah vertikal. b. **Memberikan dukungan pendampingan dan insentif tambahan kepada pemerintah daerah yang memiliki komitmen tinggi dalam merealisasikan konsolidasi tanah vertikal.**

Rincian Rekomendasi B: Melanjutkan Pengembangan Berbagai Program dan Inisiatif Pembiayaan Inovatif dalam Rangka Penyediaan Hunian Terjangkau serta Pemberian Bantuan Perbaikan Hunian Layak

I	Memperbaiki Sistem Informasi Perkreditan dan Perkuat Pemetaan Kemampuan Kredit (*Credit Scoring*) Masyarakat
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Lebih dari 60% pekerja (83 juta) adalah pekerja informal.[15] • Terbatasnya informasi kredit khususnya pada pekerja informal membuat lembaga pembiayaan sulit untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat tersebut.	a. **Mempertimbangkan pembuatan peraturan tentang berbagi informasi kredit dengan menggabungkan informasi kredit dalam satu *database* yang terintegrasi.** b. **Memperluas sumber informasi pencatatan kredit,** seperti data telekomunikasi, pembayaran utilitas, transaksi *e-commerce*, riwayat transaksi QRIS untuk UMKM, rekomendasi dari perusahaan mitra rantai pasok, atau data non-tradisional lainnya.
II	**Merumuskan Skema Pembiayaan Sewa dan Kepemilikan pada Pekerja Informal**
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Lebih dari 60% pekerja (83 juta) adalah pekerja informal.[16] Pekerja informal memiliki keterbatasan dalam mengakses pembiayaan karena kurangnya rekam jejak kredit.	a. **Menetapkan kebijakan skema KPR sewa-beli atau *rent-to-own** yang menarik dan dengan pembagian resiko yang adil bagi berbagai aktor sektor properti.** **Skema ini dapat menawarkan solusi pemilikan rumah kepada pekerja informal yang selama ini masih terkendala dalam memenuhi administrasi perbankan akibat terbatasnya rekam jejak kreditnya.*

III	**Mengevaluasi secara Berkala Kebijakan Sasaran Penerima Bantuan Program Hunian dan Mengembangkan Variasi Produk *Mortgage* untuk Meningkatkan Peran Swasta**
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Terdapat besarnya selisih jarak antara harga rumah yang bisa dibeli dengan target sasaran masyarakat yang dibantu oleh pemerintah sehingga ada banyak masyarakat yang berpotensi tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan hunian. Contoh: Harga hunian apartemen kelas menengah di Jakarta Rp1,5 miliar, cicilan minimum Rp15 juta/bulan maka membutuhkan penghasilan Rp45 juta/bulan. Sedangkan penghasilan rata-rata masyarakat di Jakarta hanya Rp5-6 juta. • Masih terbatasnya keterlibatan swasta dalam program hunian pemerintah, salah satunya diakibatkan oleh keterbatasan dana pemerintah dalam penyediaan dana perumahan.	a. **Mengevaluasi secara berkala kebijakan penetapan sasaran masyarakat penerima** bantuan program hunian dan disesuaikan untuk masing-masing kota/daerah. b. Memperbaiki dan mengkonsolidasi data perumahan nasional agar program yang dibuat dan bantuan yang diberikan tepat sasaran. c. **Membuat produk *mortgage* yang menarik bagi swasta untuk terlibat dalam program penyediaan hunian layak dan terjangkau nasional, salah satunya dengan menambah variasinya dari sisi *loan tenure* maupun *interest rates*.** d. **Menyediakan dana yang dapat mendukung pembiayaan jangka panjang dan bunga rendah** dalam program penyediaan atau pembangunan/renovasi hunian.
IV	**Meningkatkan Anggaran Pemerintah Daerah untuk Memberi Bantuan Perbaikan Hunian Tidak Layak**
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Banyaknya masyarakat hunian yang kondisinya memprihatinkan. Contoh: terdapat lebih dari 40 ribu rumah tidak layak huni di Provinsi Kalimantan Selatan.[17]	a. **Meningkatkan anggaran Dana Desa untuk daerah yang warganya memiliki hunian dengan kondisi tidak layak.*** b. **Meningkatkan alokasi dana transfer ke daerah** dan mendukung penyediaan kebijakan kepada pemerintah daerah** agar dapat turut membantu dalam penyediaan hunian bagi warga yang membutuhkan. **Perlu dipastikan anggaran Dana Desa yang diberikan digunakan sesuai kebutuhan.* ***Didukung dengan pengawasan KPI ketercapaian penyediaan dan perbaikan kualitas hunian.*

Rincian Rekomendasi C: Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Transportasi Publik

I	**Memperluas Program dan Meningkatkan Kualitas Skema *Buy The Service* untuk Transportasi Publik Perkotaan**
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Harga rumah di pusat kota yang mahal menyebabkan masyarakat tinggal di pinggiran kota. Tidak adanya pilihan transportasi umum, biaya transportasi pribadi pun menjadi mahal karena jarak tempuh yang jauh. • Sudah ada kebijakan skema *buy the service* dari Kementerian Perhubungan.	**a. Mengevaluasi jangka waktu kerjasama kontrak** untuk memberikan kepastian usaha jangka panjang bagi operator. **b. Memperluas program kepada kota-kota lainnya.** **c. Meningkatkan pelibatan lebih banyak operator lokal dan mengintegrasikan layanan pada transport publik lokal (bus atau angkot) yang sudah ada.**
II	**Mengembangkan Skema *Private Public Partnership* (PPP)**
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Besarnya pembiayaan yang dibutuhkan untuk membangun transportasi publik berbasis rel dalam perkotaan. • Meningkatnya harga properti di sekitar tempat transit.	**a. Mengembangkan skema PPP, salah satunya dengan integrasi konsep LVC.**

Referensi

1. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28H, Ayat (1).
2. Badan Pusat Statistik. (2023). *Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)*. Diakses pada 4 Juni 2024, dari https://silastik.bps.go.id/v3/index.php/mikrodata/detail/U1BGcE5sYzFvamI2SGw0YmVUYUlDZz09
3. Jakarta Property Institute. (2020.). *Mungkinkah Kita Tinggal di Tengah Jakarta? Frequently Asked Questions*. Diakses pada 7 Juni 2024, dari https://jpi.or.id/blog/mungkinkah-kita-tinggal-di-tengah-jakarta-frequently-asked-questions
4. World Bank. (2019). *Time to ACT: Realizing Indonesia's Urban Potential*. Diakses pada 10 Juni 2024, dari https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/3d3402fd-6763-5532-b2fc-dfd980c45f58
5. Detik. (n.d.). *Membandingkan Kenaikan Harga Rumah dengan UMP di Tengah Naiknya Bunga Acuan*. Diakses pada 13 Juni 2024, dari https://www.detik.com/properti/berita/d-7321266/membandingkan-kenaikan-harga-rumah-dengan-ump-di-tengah-naiknya-bunga-acuan
6. CNBC Indonesia. (2024). *Kenaikan UMP Jadi Polemik Tiap Tahun: Paling Tinggi Tahun Berapa?*. Diakses pada 16 Juni 2024, dari https://www.cnbcindonesia.com/research/20240430164608-128-534736/kenaikan-ump-jadi-polemik-tiap-tahun-paling-tinggi-tahun-berapa
7. Katadata. (2023). *Cek Data: Cak Imin Bilang Ada Banyak Pekerja Informal, Bagaimana Datanya*. Diakses pada 18 Juni 2024, dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/22/cek-data-cak-imin-bilang-ada-banyak-pekerja-informal-bagaimana-datanya
8. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2023). *Buku Risiko Bencana Indonesia*. Diakses pada 20 Juni 2024, dari https://inarisk.bnpb.go.id/pdf/BUKU%20RBI%202023.pdf
9. Detik. (2024). *Masuk 2024, Sudah Berapa Capaian Program Sejuta Rumah*. Diakses pada 22 Juni 2024, dari https://www.detik.com/properti/berita/d-7313430/masuk-2024-sudah-berapa-capaian-program-sejuta-rumah
10. Kompas. (2023). *Sebanyak 1.663 Rencana Detail Tata Ruang di Indonesia Belum Dibuat*. Diakses pada 25 Juni 2024, dari https://www.kompas.com/properti/read/2023/01/18/183000021/sebanyak-1.663-rencana-detail-tata-ruang-di-indonesia-belum-dibuat
11. DPR RI. (2017). *Buletin APBN*. Diakses pada 28 Juni 2024, dari https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/buletin-apbn/public-file/buletin-apbn-public-33.pdf
12. Kompas. (2023). *Masyarakat di Sektor Informal Masih Sulit Lolos Pinjaman Rumah*. Diakses pada 1 Juni 2024, dari https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/01/24/masyarakat-di-sektor-informal-masih-sulit-lolos-pinjaman-rumah
13. Merdeka. (2023). *Pekerja Informal Bisa Dapatkan KPR Subsidi dengan Skema BP2BT: Ini Syaratnya*. Diakses pada 4 Juni 2024, dari https://www.merdeka.com/perbankan/pekerja-informal-bisa-dapatkan-kpr-subsidi-dengan-skema-bp2bt-ini-syaratnya.html
14. Kompas. (2022). *Gaji Kecil Terkuras Ongkos Transpor*. Diakses pada 7 Juni 2024, dari https://www.kompas.id/baca/investigasi/2022/03/16/gaji-kecil-terkuras-ongkos-transpor
15. Kompas. (2024). *60 Persen Pekerja RI Bekerja di Sektor Informal dan Gig Hadapi Tantangan*. Diakses pada 10 Juni 2024, dari https://money.kompas.com/read/2024/05/17/121606126/60-persen-pekerja-ri-bekerja-di-sektor-informal-dan-gig-hadapi-tantangan
16. Ibid.
17. DPRD Kalimantan Selatan. (2022). *40 Ribuan Rumah di Kalsel Tidak Layak Huni*. Diakses pada 2 Juni 2024, dari https://dprdkalselprov.id/40-ribuan-rumah-di-kalsel-tidak-layak-huni/

"15 Rekomendasi Paket Kebijakan untuk Mendukung Agenda Pembangunan Presiden & Wakil Presiden Indonesia 2024 - 2029"

Fokus Area 8

Digitalisasi Birokrasi: Memudahkan Perizinan, Menurunkan Biaya Berusaha

8

IBC
Indonesian Business Council

Sumber Gambar: freepik

Digitalisasi Birokrasi: Memudahkan Perizinan dan Menurunkan Biaya Berusaha

Misi Asta Cita 7 Prabowo-Gibran

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Program Prioritas No. 3 Prabowo-Gibran

Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.

Stakeholders: *Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB); Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo); Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri); Kementerian Keuangan (Kemenkeu); Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas); Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN); Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).*

> *"Melalui digitalisasi, kita kurangi kemungkinan-kemungkinan kebocoran pemerintah. Sekarang, sudah ada e-katalog, sekarang bisa dibuka, kita akan tahu persis semua barang yang bisa dibeli oleh pemerintah, kita akan tahu harga-harganya, pabrik-pabriknya, kita akan tahu sumber-sumbernya.*
> ***Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia Periode 2024 - 2029***

Transformasi Digital: Membangun Birokrasi yang Responsif dan Efisien

Birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah. Upaya digitalisasi mempercepat proses administrasi pelayanan publik, menyederhanakan birokrasi, dan mencegah korupsi. Digitalisasi membantu mengoptimalkan layanan publik sehingga memudahkan masyarakat dan dunia usaha, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pemerintah melalui digitalisasi birokrasi. Hal tersebut meliputi pembangunan infrastruktur dan penetapan berbagai peraturan tentang digitalisasi pelayanan publik, mulai dari Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Perpres No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional, serta Perpres No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Selain itu, pengembangan, implementasi, dan pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) juga mulai digunakan untuk membantu pelaksanaan digitalisasi birokrasi. Saat ini telah ditetapkan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2020-2025, di mana reformasi birokrasi masuk ke dalam lima bidang prioritas.[1] Salah satu pemanfaatan AI dalam reformasi birokrasi, yaitu pengembangan *chatbot* yang dapat melayani komunikasi dua arah dengan masyarakat selama 24 jam.[2]

Namun, sistem dan data pemerintah masih terfragmentasi. Saat ini, integrasi sistem antar Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pusat Data Nasional masih belum berjalan optimal. Sekitar 27.400 aplikasi digital milik pemerintah belum terintegrasi menyebabkan terjadinya inefisiensi pada pertukaran data antar instansi. Melalui Satu Data Indonesia,[3] pemerintah berinisiatif membuat sistem data yang terintegrasi dan transparan. Dengan adanya inisiatif ini, diharapkan pengelolaan data di Indonesia akan menjadi lebih efisien dan efektif.

Selain masalah integrasi data, proses pengurusan perizinan di daerah masih sering berjalan lambat dan berbelit-belit. Banyaknya aturan dan regulasi yang rumit di daerah membuat keterlambatan penerbitan izin,[4] berdampak terhadap peluang investasi dan pertumbuhan perekonomian daerah. Laporan pemerintah Amerika Serikat tentang *"2024 Investment Climate Statements: Indonesia"* juga menggarisbawahi kendala-kendala dalam berinvestasi di Indonesia, yaitu inefisiensi birokrasi, kesulitan dalam memperoleh izin, dan lemahnya penegakan kontrak.[5]

Pemerintah telah menerapkan OSS dan Perppu Cipta Kerja untuk menyederhanakan proses perizinan, namun masih ada beberapa kendala. Penerapan *Online Single Submission* (OSS) menyederhanakan proses perizinan secara daring, namun terkendala dalam koordinasi antar instansi dan pemahaman yang belum merata di tingkat daerah.[6] Selain itu, implementasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dinilai belum efektif dalam mendorong investasi karena sistem perizinannya masih belum optimal.[7]

Dari sisi efektivitas, reformasi birokrasi Indonesia sudah menunjukkan perbaikan termasuk dari sisi digitalisasi pemerintahan. Indeks efektivitas pemerintah Indonesia mengalami peningkatan skor sebesar 5,94 poin atau 9,9% dari tahun 2020 menjadi 66,04 (dalam skala 0-100) pada tahun 2023.[8] Selain itu, Indonesia mengalami peningkatan performa pada *e-Government Index* dengan naik 11 peringkat dari tahun sebelumnya menjadi peringkat 77 dari 193 negara pada 2022.[9] Ini menunjukkan adanya perkembangan pada digitalisasi pemerintahan.

Tabel 8.1 Peringkat Indonesia dalam e-Government Index di ASEAN

Negara	2018	2020	2022
Singapura	7	11	12
Malaysia	48	47	53
Thailand	73	60	55
Brunei Darussalam	59	57	68
Indonesia	**107**	**88**	**77**
Vietnam	88	86	86
Filipina	75	77	89
Kamboja	145	124	127
Myanmar	157	146	134
Laos	162	167	159

Sumber: UN E-Government Knowledgebase, 2022

Namun demikian, inisiatif digitalisasi belum optimal dan menyeluruh. Meskipun ada berbagai inisiatif digitalisasi pemerintahan, implementasinya masih terbatas. Masih terdapat pemerintah daerah yang menggunakan sistem manual yang rentan terhadap kesalahan dan keterlambatan. Ini didukung belum meratanya akses internet di seluruh wilayah di Indonesia,[10] di mana terdapat sebanyak 5.158 desa/kelurahan tidak terjangkau sinyal internet (*blank spot*).

Upaya digitalisasi pemerintahan juga perlu diiringi dengan langkah-langkah serius untuk melindungi data pribadi. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) menjamin hak konstitusional subjek data pribadi sebagai salah satu hak asasi manusia. UU PDP akan diimplementasikan pada Oktober 2024, paling lambat dua tahun sejak penandatanganan UU tersebut di Oktober 2022. Hal ini harus menjadi acuan bagi upaya pengembangan *e-government*. Apalagi menurut laporan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sepanjang tahun 2023 terjadi 103 kasus kebocoran data dengan insiden terbanyak (71 kasus) terjadi pada sektor administrasi pemerintahan.[11]

5 Tantangan Utama Digitalisasi Birokrasi

Aksesibilitas Digital, Konektivitas, dan Perlindungan Data di Indonesia Masih Lemah.

Infrastruktur digital saat ini belum menjangkau daerah terpencil. Infrastruktur digital yang tersedia belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah, menyebabkan kesenjangan digital yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Hal ini diperburuk oleh keterbatasan sumber daya dan investasi dalam pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di daerah-daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Sebagai akibatnya, masih banyak masyarakat yang kesulitan mengakses layanan digital dasar, yang berdampak pada akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi mereka.

Konektivitas internet di fasilitas pemerintah masih belum merata. Banyak kantor pemerintahan yang belum memiliki koneksi internet yang stabil, terutama di daerah 3T.[12] Hal ini menghambat efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, serta mengurangi kemampuan pemerintah dalam pelaksanaan transformasi digital. Keterbatasan ini juga mengakibatkan lambatnya respon pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat.

Pengelolaan data nasional belum terintegrasi. Di penghujung 2022, Pemerintah telah meluncurkan portal Satu Data Indonesia yang dirancang dan dibangun sebagai media berbagi-pakai data untuk instansi pemerintahan maupun publik. Namun, dalam praktiknya masih terjadi kendala seperti duplikasi dan replikasi pengumpulan data serta penjaminan validitas data yang masih lemah.[13] Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya kapasitas sumber daya, infrastruktur data yang tidak merata, serta masih tingginya ego sektoral.[14]

Regulasi dan perizinan masih terfragmentasi dan tidak bersinergi. Regulasi yang tidak terkoordinasi dengan baik antara berbagai lembaga pemerintah seringkali menimbulkan tumpang tindih kebijakan, yang menghambat perkembangan ekosistem digital yang sehat dan berkelanjutan. Menurut kajian I*nstitute for Development of Economics and Finance* (INDEF), regulasi yang tumpang tindih menjadi salah satu penghambat utama dalam pengembangan teknologi dan inovasi di Indonesia.

Rendahnya tingkat kesadaran keamanan data. Tingkat kesadaran akan keamanan data di Indonesia masih rendah, baik di kalangan individu maupun organisasi. Banyak masyarakat yang menjadi korban kejahatan digital. Hal ini tercermin dari paling rendahnya komponen *Digital Safety* sebagai penyusun Indeks Literasi Digital Indonesia 2022.[15] *Human error* menjadi salah satu penyebab utama (34%) dari kebocoran data pribadi, menurut Direktur Tata Kelola Ditjen Aptika, Mariam F. Barata.[16]

Navigasi Indonesia: Gagasan dan Komitmen Presiden-Wakil Presiden Republik Indonesia 2024 - 2029

Perhatian Prabowo-Gibran terhadap digitalisasi birokrasi tertuang dalam visi-misinya, yaitu pada Asta Cita 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Disebutkan bahwa digitalisasi dengan satu data terpadu akan sangat membantu efisiensi dan kesatuan pengelolaan birokrasi, serta pembinaan karir aparatur sipil negara. Selain itu Prabowo-Gibran akan melanjutkan program *government technology* (GovTech) Indonesia INA Digital yang diluncurkan Presiden Jokowi pada Mei 2024.[17]

Untuk mendukung hal ini, Prabowo-Gibran akan melakukan sejumlah upaya, di antaranya:

1. Menciptakan pemerintahan yang berbasis digitalisasi untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, inklusif, dan efisien.
2. Membenahi iklim investasi dengan kepastian regulasi yang ramah, transparan, dan kompetitif dengan negara lain.
3. Meningkatkan sinergi antar lembaga birokrasi dan antardaerah.
4. Mengembangkan sistem *smart government* untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
5. Memperbaiki sistem pelayanan kepegawaian ASN dalam platform digital yang terintegrasi secara nasional.

Rekomendasi Paket Kebijakan 8:

A	**Membangun Jaringan Internet yang Memadai hingga Pelosok Negeri**
B	**Meningkatkan Keterhubungan dan Pengolahan Data yang Efisien antar Instansi Pemerintah**
C	**Meningkatkan Perlindungan Data Digital yang Tangguh**

Rincian Rekomendasi A: Membangun Jaringan Internet yang Memadai hingga Pelosok Negeri

Kondisi Eksisting	Rekomendasi
• Infrastruktur dasar belum sepenuhnya menjangkau wilayah-wilayah terpencil dan tertinggal. • 5.158 desa/kelurahan tidak memiliki sinyal (*blank spot*); 38,12% berada di wilayah Maluku dan Papua.[18] • Kecepatan kategori *fixed broadband* di Indonesia 27,11 Mbps*, peringkat ke-8 di ASEAN.[19] **Menurut The Federal Communications Commission (FCC), lembaga komisi penyiaran Amerika Serikat, kecepatan internet yang layak adalah 100 Mbps.*[20]	a. **Memperluas infrastruktur dasar internet,** seperti *Base Transceiver Station* (BTS) dan *Fiber Optic* (FO), **hingga ke desa dan kelurahan** untuk mendukung akses digital. b. **Mengimplementasikan satelit orbit rendah (LEO) untuk wilayah dengan tantangan geografis** dengan tetap memperhatikan dampak, manfaat, dan peluang yang ada **serta memastikan kesamaan *level playing field* antar penyedia layanan internet (ISP).** c. **Memastikan implementasi UU No. 6 Tahun 2023 khususnya dalam mendorong pelaksanaan mekanisme infrastruktur bersama antar penyedia layanan internet.** d. **Melanjutkan pengembangan jaringan 5G secara bertahap untuk beroperasi secara komersial di Indonesia**

Rincian Rekomendasi B: Meningkatkan Keterhubungan dan Pengolahan Data yang Efisien antar Instansi Pemerintah

I	Mengintegrasi Data dan Mengimplementasikan Kecerdasan Buatan (AI)
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• 27.400 aplikasi pemerintah tidak terintegrasi menyebabkan layanan publik yang tidak efektif dan inkonsistensi data.[21] • Data pemerintah di Indonesia tidak terintegrasi secara menyeluruh yang menghambat pengambilan keputusan yang berbasis data di sektor publik. • Lebih dari 40% pekerja menghabiskan setidaknya seperempat minggu kerja untuk melakukan tugas manual dan berulang, seperti email, pengumpulan data, dan entri data.[22]	a. **Mengevaluasi dan memperbarui Perpres No. 39 Tahun 2019** untuk meningkatkan efektivitas penerapan kebijakan satu data. b. Memastikan **implementasi Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2023** dalam mempercepat transformasi dan integrasi digital. c. **Mengembangkan satu platform terpadu yang mengintegrasikan berbagai aplikasi pemerintah.** Contoh: UK *Government Digital Service* yang berhasil menggabungkan lebih dari 2.000 situs web pemerintah dalam satu portal. d. **Menggunakan satu aplikasi untuk layanan yang bersifat umum/*generic service*.** e. **Meningkatkan kapasitas pegawai pemerintah untuk memastikan implementasi dan adopsi sistem terintegrasi.** f. **Memperluas penerapan AI dalam pemerintahan untuk mengotomatisasi kegiatan yang berulang** guna meningkatkan efisiensi administrasi.

II	Mengoptimalisasi OSS Berbasis Risiko di Pusat dan Daerah
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Beberapa K/L belum terhubung dengan sistem OSS yang menyebabkan pengusaha harus mengurus izin secara berulang. • Pemerintah daerah (Pemda) belum sepenuhnya siap mengintegrasikan OSS sehingga menghambat proses perizinan di berbagai daerah.	**a. Mempercepat integrasi seluruh K/L dengan sistem OSS berbasis risiko** untuk memastikan proses perizinan yang terkoordinasi dan efisien. **b. Melakukan monitoring secara berkala untuk memastikan sistem tetap *up-to-date*** sesuai dengan kebutuhan dinamis investor **serta menjaga konsistensi kebijakan antara pusat dan daerah melalui PMO (*project/program management office*).** **c. Mendorong dan memfasilitasi penyusunan RDTR pada daerah yang belum memilikinya.** d. Meningkatkan kapasitas pemda untuk meningkatkan kesiapan dalam implementasi OSS berbasis risiko. **e. Memberikan kepastian perizinan dengan menggunakan indikator "Pasti Syaratnya, Pasti Prosesnya, Pasti Waktunya, dan Pasti Biayanya."**

Rincian Rekomendasi C: Meningkatkan Perlindungan Data Digital yang Tangguh

Kondisi Eksisting	Rekomendasi
• Terdapat 114 kasus pelanggaran data antara 2019-2024, sebagian besar merupakan kebocoran data.[23] • Terdapat 204 juta data pemilih yang bocor selama Pemilihan Umum Presiden 2024.[24]	**a. Memastikan pelaksanaan UU No. 27 Tahun 2022 terkait perlindungan data pribadi dan membentuk otoritas perlindungan data pribadi yang independen** sesuai dengan amanah undang-undang tersebut. **b. Menjaga standar kualitas keamanan data sesuai standar internasional yang dievaluasi secara berkala.** **c. Meningkatkan kapasitas pegawai pemerintah untuk memastikan implementasi standar keamanan data.** **d. Meninjau dan memperbarui kebijakan perlindungan data pribadi secara berkala** untuk menyesuaikan dengan tantangan digital yang berkembang.

Referensi

1. Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2020-2025. (n.d.). Diakses pada 4 Juni 2024, dari https://ai-innovation.id/images/gallery/ebook/stranas-ka.pdf
2. Kementerian PANRB. (n.d.). *Menilik Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Transformasi Digital Pelayanan Publik*. Diakses pada 7 Juni 2024, dari https://menpan.go.id/site/berita-terkini/menilik-pemanfaatan-artificial-intelligence-dalam-transformasi-digital-pelayanan-publik
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 39 Tahun 2019.
4. Seputar Birokrasi. (n.d.). *Birokrasi di Indonesia: Tantangan dan Permasalahannya*. Diakses pada 10 Juni 2024, dari https://seputarbirokrasi.com/birokrasi-di-indonesia-tantangan-dan-permasalahannya/
5. US Department of State. (2024). *2024 Investment Climate Statements: Indonesia*. Diakses pada 20 Agustus 2024, dari https://www.state.gov/reports/2024-investment-climate-statements/indonesia/
6. BeritaSatu. (2023). *Implementasi OSS belum optimal karena terganjal rencana tata ruang di daerah*. Diakses pada 17 Agustus 2024, dari https://www.beritasatu.com/ekonomi/2798475/implementasi-oss-belum-optimal-karena-terganjal-rencana-tata-ruang-di-daerah
7. Kompas. (2023). *Lagu lama kendala izin berusaha: Tematis PERPPU*. Diakses pada 1 Agustus 2024, dari https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/01/28/lagu-lama-kendala-izin-berusaha-tematis-perppu
8. Kantor Staf Presiden. (2023). *Indeks efektivitas pemerintah naik, KSP: Bukti reformasi birokrasi sudah di jalur yang tepat*. Diakses pada 2 Agustus 2024, dari https://www.ksp.go.id/indeks-efektivitas-pemerintah-naik-ksp-bukti-reformasi-birokrasi-sudah-di-jalur-yang-tepat.html
9. Public Administration International. (n.d.). *Country information: Indonesia*. Diakses pada 3 Agustus 2024, dari https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/78-Indonesia
10. Databoks. (2024). *Penetrasi internet Indonesia belum merata, terendah di Sulawesi*. Diakses pada 1 Agustus 2024, dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/01/penetrasi-internet-indonesia-belum-merata-terendah-di-sulawesi
11. Menpan. (n.d.). *Lanskap Keamanan Siber Indonesia 2023*. Diakses pada 22 Juni 2024, dari https://menpan.go.id/site/berita-terkini/lanskap-keamanan-siber-indonesia-2023
12. Manado Post. (n.d.). *Akses Internet di Seputaran Kantor Pemerintahan Tomohon 'Lalod'*. Diakses pada 25 Juni 2024, dari https://manadopost.com/akses-internet-tomohon-lalod
13. Kompas.id. (2023). *Transformasi Manajemen Data*. Diakses pada 28 Juni 2024, dari https://www.kompas.id/baca/opini/2023/01/22/transformasi-manajemen-data
14. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). *Laporan Implementasi Satu Data Indonesia*. Diakses pada 1 Juli 2024, dari https://bappenas.go.id/laporan-implementasi-satu-data-indonesia-2020
15. Kominfo. (2022). *Pilar Penyusun Indeks Literasi Digital Indonesia: Digital Skills, Digital Ethics, Digital Safety, dan Digital Culture*. . Diakses pada 4 Juli 2024, dari https://survei.literasidigital.id/indeks-literasi-digital-nasional
16. Kominfo. (2020). *34 Persen Pelanggaran Data Pribadi Akibat Human Error*. Diakses pada 7 Juli 2024, dari https://aptika.kominfo.go.id/2020/08/34-persen-pelanggaran-data-pribadi-akibat-human-error
17. Liputan6.com. (n.d.). *Menpan RB Ungkap Gibran Bakal Lanjutkan SuperApps INA Digital Jokowi*. Diakses pada 10 Juli 2024, dari https://liputan6.com/menpan-rb-gibran-superapps
18. Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2022*. Diakses pada 13 Juli 2024, dari https://bps.go.id/statistik-telekomunikasi-indonesia-2022
19. CNBC Indonesia. (2023). *Kecepatan Internet Indonesia Parah: Cek Data Terbaru*. Diakses pada 16 Juli 2024, dari https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230828152514-37-466786/kecepatan-internet-indonesia-parah-cek-data-terbaru
20. Kompas. (2024). *AS Naikkan Standar Minimal Kecepatan Download Internet Jadi 100 Mbps*. Diakses pada 18 Juli 2024, dari https://tekno.kompas.com/read/2024/03/20/07000047/as-naikkan-standar-minimal-kecepatan-download-internet-jadi-100-mbps
21. Kompas. (2024). *Ada 27.000 Aplikasi Milik Pemerintah Jokowi Tidak Terintegrasi dan Tumpang Tindih*. Diakses pada 20 Juli 2024, dari https://nasional.kompas.com/read/2024/05/27/12282521/ada-27000-aplikasi-milik-pemerintah-jokowi-tidak-terintegrasi-dan-tumpang
22. SmartSheet. (n.d.). *Workers Waste Quarter Work Week on Manual, Repetitive Tasks*. Diakses pada 22 Juli 2024, dari https://www.smartsheet.com/content-center/product-news/automation/workers-waste-quarter-work-week-manual-repetitive-tasks
23. Kompas. (2024). *111 Kasus Kebocoran Data Pribadi Ditangani Kemenkominfo pada 2019-14 Mei 2024*. Diakses pada 25 Juli 2024, dari https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/06/03/111-kasus-kebocoran-data-pribadi-ditangani-kemenkominfo-pada-2019-14-mei-2024
24. CNBC Indonesia. (2023). *204 Juta Data Pemilih Bocor: Dibobol Hacker, KPU Buka Suara*. Diakses pada 28 Juli 2024, dari https://www.cnbcindonesia.com/tech/20231129072836-37-492847/204-juta-data-pemilih-bocor-dibobol-hacker-kpu-buka-suara

"15 Rekomendasi Paket Kebijakan untuk Mendukung Agenda Pembangunan Presiden & Wakil Presiden Indonesia 2024 - 2029"

Fokus Area 9

Sistem Logistik Nasional:
Menurunkan Biaya Logistik dan Membuat Sistem Logistik yang Handal

9

IBC
Indonesian Business Council

Sumber Gambar: freepik

Sistem Logistik Nasional: Menurunkan Biaya Logistik dan Membuat Sistem Logistik yang Handal

Misi Asta Cita 2 Prabowo-Gibran

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Misi Asta Cita 3 Prabowo-Gibran

Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

Stakeholders: *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian); Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas); Kementerian Perhubungan (Kemenhub); Kementerian Perdagangan (Kemendag); Kementerian Keuangan (Kemenkeu); Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (Kementerian Investasi/BKPM); Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves); Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN); Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).*

> *Pemerintahan Prabowo ke depan akan terus memperbaiki ekosistem logistik nasional, dengan melakukan perbaikan pada upaya menekan cost logistik sambil mendorong kecepatan dan ketepatan waktu pengiriman logistik baik domestik maupun internasional. Indeks logistik kita harus lebih baik agar kompetitif.*
>
> ***Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia Periode 2024-2029***

Urgensi Perbaikan Sistem Logistik Nasional untuk Mencapai Pertumbuhan Ekonomi 8%

Pengamat industri logistik menilai, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% bisa tercapai jika pemerintah melakukan perbaikan pada sistem logistik. Sistem logistik yang optimal bukan hanya sekadar penunjang, tetapi menjadi tulang punggung dalam memperlancar distribusi barang dan jasa, meningkatkan daya saing, serta menekan biaya operasional. Dengan memperbaiki sistem logistik, pemerataan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap daerah di Indonesia diharapkan dapat tercapai, sekaligus mendukung fokus-fokus utama[1] Presiden Terpilih dengan membangun rantai pasok yang terintegrasi.

Kinerja sistem logistik Indonesia belum optimal dan perlu ditingkatkan karena berdampak langsung pada kelancaran aktivitas ekonomi. Berdasarkan *Logistic Performance Index* (LPI) World Bank, peringkat Indonesia turun dari posisi ke-46 di tahun 2018 ke posisi ke-63 dari total 139 negara di tahun 2023. Rendahnya LPI Indonesia dipengaruhi oleh lambatnya waktu *clearance* dan tingginya jumlah pemeriksaan fisik. Waktu *clearance* di Indonesia mencapai 7 hari dengan tingkat inspeksi fisik sebesar 8%.

Sebaliknya, Singapura dan Malaysia mencatat waktu *clearance* hanya 1 hari dengan tingkat inspeksi fisik 2%. India dan Filipina masing-masing memiliki waktu clearance 2 hari meskipun melakukan inspeksi fisik terhadap 19% dan 30% barang.[2] Kondisi ini menjadi tantangan signifikan, mengingat sistem logistik yang efektif dan efisien merupakan kunci utama pembangunan industri dan perdagangan nasional, sekaligus menjadi daya tarik bagi investasi asing.

Dengan sistem logistik yang mumpuni, Indonesia dapat memperbaiki *incremental capital output ratio* (ICOR). ICOR adalah salah satu parameter untuk mengukur performa dari investasi di suatu negara, yaitu semakin kecil angkanya maka biaya investasi yang dikeluarkan untuk mendapatkan output semakin efisien. Rata-rata ICOR Indonesia pada tahun 2021 hingga 2022 sebesar 7,6%, jauh lebih tinggi dibandingkan Malaysia (4,5%), India (4,5%), dan Filipina (3,7%).[3] Sebagai salah satu bagian dari rantai produksi, penurunan biaya logistik akan mendorong peningkatan output dan perbaikan daya saing investasi di Indonesia.

Biaya logistik Indonesia semakin efisien, tetapi masih tinggi dibandingkan negara lain. Berdasarkan perhitungan Bappenas, biaya logistik Indonesia sebagai persentase dari PDB turun dari 23,8% di tahun 2018 menjadi 14,29% di tahun 2023.[4] Meskipun menurun, masih lebih tinggi daripada biaya logistik negara ASEAN lainnya dan di atas rata-rata global sebesar 10,8% dari PDB.[5] Sejalan dengan itu, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian menargetkan biaya logistik nasional harus berada di bawah 10% dalam 10 tahun depan dan mencapai 8% di tahun 2045.[6]

Tabel 9.1 Perbandingan Rasio Biaya Logistik Terhadap PDB

Negara	2018/2019	2022/2023
Amerika Serikat	8%	9,1%[7]
Singapura	8%	N/A
India	13%	7,8 - 8,9%[8]
Malaysia	13%	N/A
Thailand	15%	13,7%*[9]
Indonesia	**23,8%**	**14,29%**
China	14%	14,4%[10]
Vietnam	20%	16,8 - 17%[11]

Sumber: Kontan (2019) dan berbagai sumber (2022/2023)
*nilai estimasi

Pemerintah terus berupaya membangun sistem logistik nasional yang lebih efektif dan efisien. Upaya ini dimulai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas), yang diteruskan melalui Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) Tahap XV pada 2017 untuk pengembangan usaha dan daya saing penyedia jasa logistik, dan selanjutnya dengan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional (*National Logistics Ecosystem*/NLE). Penataan NLE dilakukan dengan menyederhanakan sistem informasi antar instansi dan pelaku usaha melalui digitalisasi dan layanan single submission. Hasilnya, penerapan NLE berhasil menekan *dwelling time* nasional mencapai 2,52 hari per Agustus 2023, melampaui target 2,9 hari.[12]

Namun demikian, Cetak Biru Sislognas perlu diperbarui karena akan berakhir pada tahun 2025. Pemerintah berkomitmen meninjau dan menyempurnakan cetak biru tersebut, mempertimbangkan perubahan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Perubahan tersebut antara lain pertumbuhan sektor *e-commerce* yang pesat dan mempengaruhi industri kurir dan pergudangan, dan pertumbuhan *startup* yang merevolusi pola distribusi barang di Indonesia.[13] Perubahan lainnya yang perlu dipertimbangkan: pembentukan sistem logistik pangan guna mendukung pemerataan swasembada pangan dan optimalisasi teknologi baru, seperti *artificial intelligence*, *drone*, dan lain-lain.

Tantangan Sistem Logistik Nasional

Meskipun telah menunjukkan kemajuan, sistem logistik nasional Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerja Sama Ekonomi Internasional Bappenas, Laksmi Kusumawati, memaparkan beberapa tantangan utama Sislognas, di antaranya inefisiensi dalam jaringan logistik.[14] Hal ini tercermin dari rute dan jaringan yang belum optimal yang berakibat pada peningkatan biaya dan waktu pengiriman barang. Selain itu, rendahnya integrasi ekosistem digital dalam sektor logistik juga mempersulit koordinasi dan transparansi dalam rantai pasokan.

Laksmi kemudian menjelaskan lebih lanjut beberapa poin utama terkait inefisiensi sektor logistik di Indonesia:

1. **Integrasi antarmoda logistik**: Integrasi antarmoda logistik masih belum optimal. Penggunaan moda strategis—yaitu rel, udara, jalan darat, dan laut—belum memenuhi skalabilitas minimal. Kurangnya infrastruktur pendukung dan koordinasi antar moda transportasi menyebabkan inefisiensi dan peningkatan biaya operasional, sehingga potensi penuh dari moda strategis belum tercapai.
2. **Rute jaringan logistik**: Rute jaringan logistik masih bersifat dari titik ke titik (*point-to-point*) dan belum berupa pendulum. Rute *point-to-point* efisiensinya rendah karena setiap perjalanannya hanya melayani dua titik tanpa potensi optimalisasi rute. Sedangkan, rute pendulum dengan pengiriman barang yang bergerak bolak-balik antara beberapa titik utama dapat meningkatkan efisiensi logistik dan mengurangi biaya secara keseluruhan.
3. **Pelaku layanan logistik**: Layanan logistik belum merata dan masih didominasi sedikit pemain. Kompetisi antara perusahaan penyedia jasa logistik (*Logistics Service Provider*) perlu ditingkatkan.
4. **Layanan logistik**: Layanan logistik yang tersedia belum optimal dan merata. Misalnya, sarana dan prasarana penanganan barang logistik masih terbatas dan distribusinya belum merata di seluruh wilayah.

Akibat inefisiensi-inefisiensi di atas, biaya logistik Indonesia menjadi kurang kompetitif. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa biaya logistik Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan negara lain, yang sudah berada di level 9%-12%. Saat ini, biaya logistik Indonesia berada pada angka sekitar 14%.[15]

Selain itu, **permasalahan di bidang sumber daya manusia (SDM) masih menjadi tantangan**. Cetak Biru Sislognas menegaskan bahwa SDM yang kompeten dan profesional dibutuhkan dari tingkat operasional hingga manajerial sebagai salah satu kunci penggerak perbaikan logistik nasional. Dalam Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2019 juga disebutkan bahwa perusahaan di bidang jasa harus memiliki tenaga teknis kompeten yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.

Berdasarkan laporan USAID, berikut beberapa permasalahan manajemen SDM dalam bidang logistik nasional.[16]

- Jumlah tenaga kerja bersertifikat masih sangat kurang.
- Kurangnya lembaga pendidikan vokasi dan program studi logistik di perguruan tinggi.
- Kurangnya lembaga pelatihan dan sertifikasi di sektor swasta.
- Kurangnya kerja sama antara institusi pendidikan dan industri untuk menghasilkan tenaga kerja siap pakai yang terbiasa dengan teknologi terbaru.

Navigasi Indonesia: Gagasan dan Komitmen Presiden -Wakil Presiden Republik Indonesia 2024-2029

Perhatian Prabowo-Gibran terhadap perbaikan sistem logistik nasional tertuang dalam beberapa misinya, yaitu secara spesifik pada Asta Cita 2, 3, 5, dan 7. Asta Cita no. 2 memiliki misi untuk memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Swasembada ini dapat diwujudkan salah satunya melalui pengembangan pelabuhan simpul *transhipment* sebagai tulang punggung pembangunan infrastruktur terhubung dengan simpul logistik di Kawasan Timur Indonesia.

Program pengembangan kelembagaan pengelolaan pelabuhan dan tenaga kerja logistik dijabarkan di bawah Asta Cita 3. Program-program di dalam Asta Cita ini difokuskan pada peningkatan lapangan kerja yang berkualitas untuk mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

Asta Cita no. 5 yang berpusat pada hilirisasi dan industrialisasi juga membutuhkan optimalisasi infrastruktur penunjang hilirisasi dan industrialisasi, beberapa di antaranya berhubungan dengan sektor logistik, yaitu: pengembangan jaringan jalan pada koridor utama, konektivitas kereta api untuk angkutan barang, standarisasi infrastruktur dan fasilitas di seluruh pelabuhan dan bandara yang menjadi simpul utama, dan pembangunan pelabuhan gerbang ekspor-impor serta pusat alih muatan (*transhipment hub*) internasional.

Terakhir, Asta Cita no. 7 secara spesifik mengatur pengendalian korupsi pada Sislognas. Secara umum, Asta Cita ini membahas tentang perkuatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Pengendalian pada Sislognas ini dilakukan dengan mengintegrasikan sektor perhubungan, perdagangan dengan pertanian, perikanan, kelautan dan pedesaan. Diharapkan melalui program ini iiklim investasi di Indonesia lebih baik dan menciptakan efisiensi pada biaya produksi.

Dalam Debat Cawapres 22 Desember 2023, Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka menggarisbawahi **pentingnya akses logistik yang terkoneksi untuk meningkatkan investasi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia**. Gibran menekankan, "PR kita ke depan adalah bagaimana kita menurunkan indeks ICOR kita. Kita ingin indeks ICOR kita turun ke angka 4 atau 5 persen sehingga investasi akan naik dan akan menumbuhkan *trust* juga dari pada calon-calon investor."

Menurut Founder & CEO Supply Chain Indonesia (SCI), Setijadi, perbaikan pada sektor logistik penting untuk mendukung target Presiden Terpilih Prabowo Subianto mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dalam kurun waktu 2-3 tahun ke depan. Sektor logistik juga dapat mendukung fokus-fokus utama pemerintahan Prabowo, yaitu swasembada pangan, swasembada energi, perbaikan gizi anak-anak, dan pengolahan sumber daya alam, termasuk melakukan hilirisasi dan industrialisasi. Prabowo menegaskan, "Untuk mendukung target pertumbuhan itu, perlu perencanaan pembangunan terintegrasi antar berbagai sektor termasuk dengan sektor logistik. Paradigma pembangunan dan pengembangan sektor logistik perlu diubah dari "*ship follows the trade*" menjadi "*ship promotes the trade*", terutama untuk meningkatkan pertumbuhan wilayah-wilayah yang kontribusi terhadap PDB masih rendah."

Rekomendasi Paket Kebijakan 9:

A	**Menerapkan KPI Logistik Nasional dan Mengembangkan Sistem Manajemen Data yang Terpadu, serta Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Kompeten**
B	**Meningkatkan Efisiensi dan Harmonisasi Regulasi Sektor Logistik dan Memperkuat Kelembagaan**
C	**Meningkatkan Infrastruktur Logistik Nasional yang Terintegrasi**

Rincian Rekomendasi A: Menerapkan KPI Logistik Nasional dan Mengembangkan Sistem Manajemen Data yang Terpadu, serta Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Kompeten

I	**Menerapkan KPI Logistik Nasional yang Terpadu**
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• *Key Performance Indicator* (KPI) terkait perbaikan kualitas logistik nasional tidak terpadu dan berbagai Kementerian dan Lembaga (K/L) fokus pada pengembangan sektornya sehingga banyak aspek tidak terintegrasi.	**a. Menerapkan KPI* secara terpadu bagi berbagai K/L yang memungkinkan pemantauan kondisi logistik secara *real time* dan kuantitatif.** **Beberapa indikator KPI logistik meliputi efisiensi, biaya logistik, dan reliabilitas dalam menjaga kualitas layanan dan kecepatan pengiriman barang.*

II	**Mengoptimalisasi Integrasi Data dan Layanan Logistik Nasional**
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Masih banyaknya ditemukan praktek pungutan liar pada sentra logistik dan diikuti dengan proses pengelolaan logistik yang tidak efisien. • Data *supply* dan *demand* komoditas belum tersedia secara *real time*, layanan sistem logistik belum terintegrasi dalam ekosistem bisnis logistik, dan kurangnya keikutsertaan pelaku usaha dalam berbagi data. • Platform yang dibangun swasta (*e-Trucking, e-Warehousing, e-Shipping*) masih bersifat silo, belum tersambung antara *supply* dan *demand*.	**a. Meningkatkan integrasi data dengan platform digital yang memungkinkan pelaku usaha berbagi data terkait logistik secara *real time*.** b. Mengintegrasikan layanan logistik dalam ekosistem bisnis logistik secara menyeluruh. **c. Mempercepat digitalisasi dokumen dan proses bisnis di seluruh rantai pasok logistik.**

III	**Mengembangkan Manajemen SDM dengan Kompetensi Logistik**
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Jumlah tenaga kerja bersertifikasi atau terlatih dalam logistik masih sangat terbatas, termasuk lembaga pendidikan vokasi dan program studi logistik di perguruan tinggi yang juga terbatas. • Institusi pendidikan dan pelaku industri belum menjalin kerja sama yang optimal, sementara lembaga pelatihan dan sertifikasi di sektor swasta juga terbatas.	**a. Menetapkan peta jalan pengembangan SDM dengan kompetensi logistik yang diperlukan dan melakukan evaluasi berkala.** **b. Memperluas program sertifikasi dan pelatihan untuk tenaga kerja logistik.** **c. Meningkatkan jumlah dan kualitas lembaga pendidikan vokasi serta program studi logistik di perguruan tinggi.** **d. Memperkuat kerja sama antara institusi pendidikan dan pelaku industri** untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan sesuai kebutuhan.

Rincian Rekomendasi B: Meningkatkan Efisiensi dan Harmonisasi Regulasi Sektor Logistik dan Memperkuat Kelembagaan

I	Mengharmonisasi Regulasi dan Koordinasi Antar Instansi
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Rangkaian birokrasi rumit dan masih manual serta proses pemeriksaan dokumen lama.[17] • Tumpang tindih regulasi dari 18 kementerian atau lembaga terjadi dalam pengaturan pelabuhan.[18]	**a. Mengevaluasi berbagai regulasi* untuk memastikan keterpaduan kebijakan dan efisiensi dalam pelaksanaan pengelolaan logistik.** **termasuk berbagai rencana induk pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan pengembangan sistem logistik nasional* **b. Menetapkan peta kewenangan dan kebijakan yang jelas terkait pengelolaan Sislognas yang jelas antara instansi.** Perlu didukung oleh tim koordinasi khusus antar K/L dan BUMN untuk mengawasi, mengevaluasi dan mengimplementasikan kebijakan logistik. **c. Mengembangkan platform digital yang memungkinkan K/L dan BUMN berbagi data terkait logistik secara *real time*.**

II	Meningkatkan Peran Pelaku Lokal dan Penyedia Jasa Logistik di Indonesia
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Ketidakseimbangan volume pergerakan barang sangat memengaruhi biaya logistik. • Pemain lokal belum banyak berkontribusi terhadap pangsa pasar logistik di Indonesia. • Belum ada konsep bisnis yang jelas dalam pengelolaan Pusat Distribusi Regional (PDR), belum ada manajemen profesional.	**a. Memberikan insentif dan dukungan kepada pelaku usaha lokal dan investor** dalam rangka mendukung penyediaan jasa logistik yang efisien dan handal. b. Mengimplementasikan kebijakan yang menyeimbangkan volume pergerakan barang. c. Mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pengembangan *e-commerce*. **d. Mengembangkan dan menetapkan manajemen profesional untuk PDR.**

III	Mengevaluasi Sistem Logistik Nasional (Sislognas)
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Rencana Sislognas dan Rencana Pembangunan Proyek Strategis Nasional belum sepenuhnya sejalan.	**a. Melakukan evaluasi Sistem Logistik Nasional (Sislognas).** **b. Memastikan sinkronisasi antara Sislognas dan Pembangunan Proyek Strategis Nasional.**

Rincian Rekomendasi C: Meningkatkan Infrastruktur Logistik Nasional yang Terintegrasi

I	Meningkatkan Efisiensi Pelabuhan dan Perkapalan[19]
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Ketidakpastian waktu bongkar muat dan keberangkatan kapal yang menunggu barang penuh. • *Dwelling time* berhasil dikurangi dari satu minggu menjadi 2-3 hari. Namun, masih ada proses administrasi tambahan yang perlu diperhatikan. • Kondisi kapal banyak yang sudah tua dan tidak memadai lagi membuat biaya pemeliharaan dan operasionalnya menjadi tidak efisien.	a. **Mempercepat digitalisasi dan otomatisasi di pelabuhan, serta memperbanyak pelabuhan yang menerapkan layanan informasi satu pintu (Inaportnet).** b. **Meningkatkan kapasitas pelabuhan dengan menambah dermaga dan ruang penyimpanan, serta mengembangkan pelabuhan simpul *transhipment***, termasuk pada daerah-daerah terluar yang membutuhkan c. **Mengevaluasi implementasi kelayakan kapal laut untuk beroperasi dengan berorientasi pada efisiensi dan keselamatan.**
II	**Modernisasi Fasilitas Bongkar Muat dan Standardisasi Pengemasan**
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Minimnya peralatan bongkar muat barang.[20] • Tidak ada standar pengemasan yang diimplementasikan di beberapa daerah, bongkar muat masih dilakukan secara manual sehingga lebih lama dan mahal.[21]	a. **Meningkatkan kapasitas dan menerapkan sistem manajemen gudang pada fasilitas bongkar muat.** b. **Menetapkan standar dan panduan pengemasan nasional** sesuai dengan kebutuhan berbagai industri.
III	**Meningkatkan Infrastruktur Transportasi Multimoda**
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Ketidakselarasan antara infrastruktur serta komoditas utama dan penting (makanan, kesehatan, energi, bahan bangunan, dll). • Lokasi depo *container* dan pergudangan terpisah dan belum terintegrasi dengan kawasan industri. • Sistem transportasi antarmoda dan multimoda belum berfungsi baik.	a. **Mengevaluasi rencana pembangunan jaringan dan infrastruktur transportasi (darat, laut, dan udara)** agar terintegrasi dengan simpul logistik dan sesuai dengan kebutuhan komoditas strategis dan menetapkan prioritas untuk mendukung agenda pengembangan logistik nasional. b. **Mengembangkan koridor logistik yang terhubung dengan pelabuhan, pusat logistik, dan kawasan industri** dan memberikan prioritas dalam mendukung agenda pengembangan logistik nasional.

IV	Memajukan Perkerataapian Nasional[22]
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi***
• Jaringan kereta api memiliki cakupan yang terbatas, integrasi antarmoda masih belum optimal, dan pengembangan jaringan belum sepenuhnya terpadu dengan tata ruang wilayah.[23] • Beberapa jalur kereta api saat ini tidak aktif, sementara sarana dan prasarana belum sepenuhnya memenuhi standar internasional. • Kerjasama penelitian antara lembaga riset dan industri perkeretaapian masih terbatas dan belum optimal.	a. **Mengembangkan jaringan dan layanan kereta api dalam kota, antar kota, dan antar pulau, serta mengintegrasikan layanan kereta api dengan simpul transportasi dan industri.** b. **Melakukan reaktivasi dan peningkatan jalur KA serta modernisasi sarana dan prasarana** yang berstandar internasional. c. **Melanjutkan pengembangan produk perkeretaapian nasional dan meningkatkan kerjasama penelitian** antara lembaga riset dengan industri perkeretaapian dalam rangka meningkatkan kualitas kereta api. **Mengacu pada Rancangan Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas)*
V	**Mengembangkan Pusat Logistik dan Pelabuhan Darat (*Dry Port*)**
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Diperlukan pusat logistik terpadu yang memungkinkan pengelolaan logistik secara efisien.[24] • Fasilitas pusat logistik dan manajemen dokumen kurang optimal dan tidak terintegrasi.[25]	a. **Mengembangkan kemitraan dengan sektor swasta melalui pemberian insentif** untuk mendanai dan mengoperasikan pusat logistik dan pelabuhan darat pada lokasi prioritas pengembangan logistik nasional. b. **Menyediakan layanan *one-stop service* di pusat logistik** untuk memudahkan pelaku usaha dalam mengakses berbagai layanan dan perizinan logistik.

Referensi

1. Ketersediaan bahan pangan, ketahanan dan swasembada energi, hingga hilirisasi dan industrialisasi.
2. Junaidi, E. (2023). *Logistics performance: Lessons learned for Indonesia*. Diakses pada 20 Agustus 2024, dari https://www.pwc.com/id/en/media-centre/infrastructure-news/august-2023/logistics-performance-lessons-learned-for-indonesia.html
3. Kontan. (2024). *Ini Saran Ekonom Untuk Pemerintah Agar Efisiensi Investasi Meningkat*. Diakses pada 10 Juli 2024, dari https://nasional.kontan.co.id/news/ini-saran-ekonom-untuk-pemerintah-agar-efisiensi-investasi-meningkat
4. Pelindo. (2024). *Biaya Logistik di Indonesia Turun 40 Persen Dalam Lima Tahun*. Diakses pada 11 Juli 2024, dari https://www.pelindo.co.id/media/507/biaya-logistik-di-indonesia-turun-40-persen-dalam-lima-tahun
5. 3PL Logistics. (2024). *Global 3PL Market Size Estimates*. Diakses pada 12 Juli 2024, dari https://www.3plogistics.com/3pl-market-info-resources/3pl-market-information/global-3pl-market-size-estimates/
6. Indonesia.go.id. (2024). *Tiga Mesin Pertumbuhan Ekonomi Nasional*. Diakses pada 13 Juli 2024, dari https://www.indonesia.go.id/kategori/editorial/8008/tiga-mesin-pertumbuhan-ekonomi-nasional?lang=1
7. Supply Chain Brain. (2024). *Business Logistics Costs in the US Reach an All-Time High*. Diakses pada 14 Juli 2024, dari https://www.supplychainbrain.com/articles/37503-business-logistics-costs-in-the-us-reach-an-all-time-high
8. Reuters. (2023). *India Cuts Logistics Costs Below 9% GDP With Higher State Spending*. Diakses pada 15 Juli 2024, dari https://www.reuters.com/world/india/india-cuts-logistics-costs-below-9-gdp-with-higher-state-spending-2023-12-14/
9. National Statistical Office of Thailand. (2023). *Statistical Import Data*. Diakses pada 16 Juli 2024, dari https://www.nso.go.th/nsoweb/downloadFile/stat_impt/AE/file_xls_en
10. South China Morning Post. (2023). *China Targets Lower Logistics Costs to Boost Economy and Competitiveness*. Diakses pada 17 Juli 2024, dari https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3262379/china-targets-lower-logistics-costs-boost-economy-and-competitiveness
11. Vietnam.vn. (2023). *Chi Phi Logistics Cua Viet Nam Qua Cao So Voi Binh Quan The Gioi*. Diakses pada 18 Juli 2024, dari https://www.vietnam.vn/en/chi-phi-logistics-cua-viet-nam-qua-cao-so-voi-binh-quan-the-gioi/
12. Kompas. (2024). *NLE Terus Dikembangkan Untuk Keberhasilan Reformasi Logistik 4.0*. Diakses pada 19 Juli 2024, dari https://www.kompas.id/baca/adv_post/nle-terus-dikembangkan-untuk-keberhasilan-reformasi-logistik-4-0
13. USAID. (2023). *Logistics and Transportation Costs in Indonesia*. Diakses pada 20 Juli 2024, dari https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00ZJ2T.pdf
14. Bisnis. (2023). *Bappenas Beberkan Tantangan Sektor Logistik Nasional*. Diakses pada 21 Juli 2024, dari https://ekonomi.bisnis.com/read/20231010/98/1702748/bappenas-beberkan-tantangan-sektor-logistik-nasional
15. Kompas. (2024). *Jokowi: 10 Tahun Lalu Biaya Logistik 24 Persen, Sekarang Turun Jadi 14 Persen*. Diakses pada 22 Juli 2024, dari https://nasional.kompas.com/read/2024/02/22/11171801/jokowi-10-tahun-lalu-biaya-logistik-24-persen-sekarang-turun-jadi-14-persen?page=all
16. USAID. (2023). *Logistics and Transportation Costs in Indonesia*. Diakses pada 23 Juli 2024, dari https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00ZJ2T.pdf
17. Polimarin. (2023). *E-Jurnal Polimarin*. Diakses pada 24 Juli 2024, dari https://ejurnal.polimarin.ac.id/index.php/jmp/article/view/12/2
18. Berita Satu. (2023). *Digitalisasi Solusi Tekan Tingginya Biaya Logistik Pelabuhan*. Diakses pada 25 Juli 2024, dari https://www.beritasatu.com/ekonomi/975367/digitalisasi-solusi-tekan-tingginya-biaya-logistik-pelabuhan
19. Kompas. (2024). *Saatnya Pelabuhan Indonesia Bertransformasi*. Diakses pada 26 Juli 2024, dari https://www.kompas.id/baca/opini/2023/12/06/saatnya-pelabuhan-indonesia-bertransformasi
20. Supply Chain Indonesia. (2023). *Permasalahan Dalam Aktivitas Pelabuhan di Indonesia*. Diakses pada 27 Juli 2024, dari https://supplychainindonesia.com/permasalahan-dalam-aktivitas-pelabuhan-di-indonesia/
21. Face World. (2021). *Proses Bongkar Muat Barang Secara Manual di Pelabuhan Senghie Pontianak*. Diakses pada 28 Juli 2024, dari https://www.youtube.com/watch?v=634
22. Kementerian Perhubungan. (2011). *Rencana Induk Perkeretaapian Nasional*. Diakses pada 29 Juli 2024, dari https://www.kemenhub.go.id/
23. Kompas. (2019). *Angkutan Barang Dengan Kereta Belum Maksimal*. Diakses pada 30 Juli 2024, dari https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2019/09/04/angkutan-barang-dengan-kereta-belum-maksimal
24. Antara News. (2023). *Presiden Indonesia Harus Punya Pusat Logistik Terintegrasi*. Diakses pada 31 Juli 2024, dari https://sultra.antaranews.com/berita/279417/presiden-indonesia-harus-punya-pusat-logistik-terintegrasi
25. Republika. (2023). *Ini Tantangan Transportasi Multimoda di Indonesia*. Diakses pada 1 Juli 2024, dari https://news.republika.co.id/berita/qxof8h480/ini-tantangan-transportasi-multimoda-di-indonesia

"15 Rekomendasi Paket Kebijakan untuk Mendukung Agenda Pembangunan Presiden & Wakil Presiden Indonesia 2024 - 2029"

Fokus Area 10

BUMN Indonesia *Incorporated* & Integrasi Kebijakan: Memperbaiki Iklim dan Layanan Usaha

10

IBC
Indonesian Business Council

Sumber Gambar: freepik

BUMN Indonesia *Incorporated* & Integrasi Kebijakan: Memperbaiki Iklim dan Layanan Usaha

Misi Asta Cita 7 Prabowo-Gibran
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Program Prioritas 3 Prabowo-Gibran
Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.

Program Prioritas 4 Prabowo-Gibran
Pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Stakeholders: *Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN); Kementerian Keuangan (Kemenkeu); Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/ Bappenas); Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PanRB); Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam); Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian); Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK); Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).*

> *Kami menginginkan lebih banyak investasi masuk. Kita harus meningkatkan efisiensi, mencegah lebih banyak praktik korupsi, menegakkan hukum, dan memastikan seluruh investor mendapatkan perlindungan sesuai aturan yang berlaku.*
>
> ***Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia Periode 2024 - 2029***

Urgensi Memperbaiki Iklim dan Layanan Usaha di Indonesia

Memperbaiki iklim dan layanan usaha krusial untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Regulasi yang efektif, transparan, dan pasti membantu memastikan persaingan usaha yang adil, melindungi konsumen, menarik investasi, dan mendorong inovasi. Studi World Bank menunjukkan bahwa negara dengan iklim usaha yang baik cenderung memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.[1]

Realisasi investasi di Indonesia semakin meningkat, terutama di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Penanaman modal asing mengalami peningkatan dari US$31 miliar di tahun 2021 menjadi US$50,2 miliar di tahun 2023. Penanaman modal dalam negeri pun meningkat dari Rp447 triliun menjadi Rp674,9 triliun pada periode yang sama.[2] Namun untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8% yang dapat membawa Indonesia keluar dari *middle income trap*, Indonesia perlu menggerakkan investasi lebih besar lagi.

Masuknya investasi sangat terkait dengan iklim berusaha, dan sayangnya tingkat iklim usaha di Indonesia masih di bawah beberapa negara lain di ASEAN. Meskipun iklim investasi di Indonesia telah membaik secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, namun Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menarik investasi. Berdasarkan *Index of Economic Freedom* tahun 2024, sebuah indeks yang mengevaluasi dan mengukur tingkat kebebasan ekonomi di berbagai negara berdasarkan kriteria seperti hak kepemilikan, kebebasan perdagangan, dan kebijakan fiskal. Secara keseluruhan, Indonesia menduduki peringkat ke-61 dari 184 negara, tertinggal di bawah sebagian negara di ASEAN seperti Malaysia (peringkat 53), Singapura (peringkat 9), dan Brunei (peringkat 51).[3]

Dalam indeks ini, perolehan skor terendah Indonesia terletak pada bidang government *integrity*, *property rights* dan *investment freedom* dgn perolehan skor ≤50. Pada bidang *investment freedom* atau kebebasan berinvestasi, skor Indonesia juga di bawah skor-skor negara ASEAN lainnya.

Gambar 10.1 Performa Kebebasan Berinvestasi di Indonesia Masih Tertinggal dari Beberapa Negara ASEAN

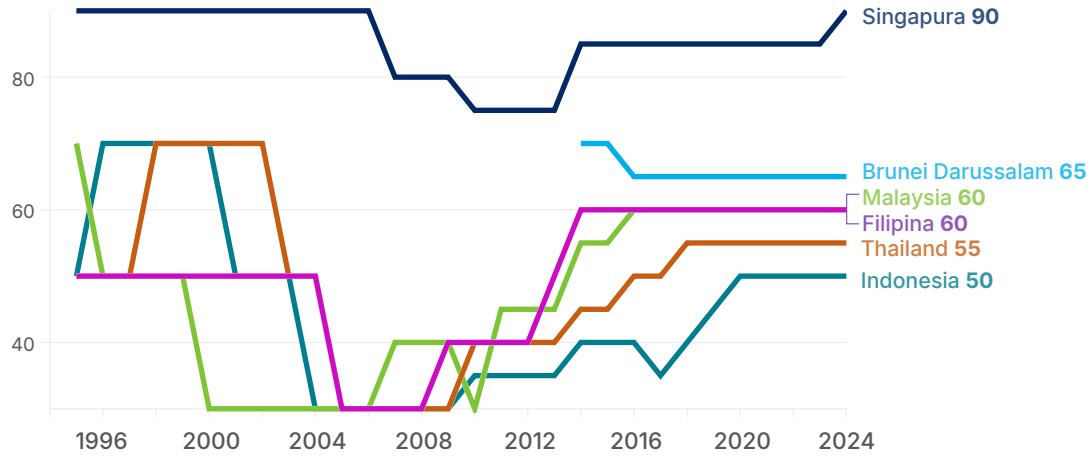

Sumber: Index of Economic Freedom, Heritage Foundation 2024

Inefisiensi birokrasi juga berkontribusi pada tingkat investasi swasta yang lebih rendah dari potensinya. Laporan pemerintah Amerika Serikat tentang *"2024 Investment Climate Statements: Indonesia"* menggarisbawahi adanya sejumlah kendala lain dalam investasi di Indonesia, termasuk inefisiensi birokrasi, kesulitan dalam memperoleh izin, dan lemahnya penegakan kontrak dalam proses

berinvestasi di Indonesia.[4] Tingkat investasi swasta di Indonesia, sebagaimana ditunjukkan dalam data pembentukan modal tetap bruto (PMTB), hanya setengah dari tingkat konsumsi rumah tangga. Selain itu, investasi juga cenderung menunjukkan tren penurunan.[5] Rata-rata kontribusi PMTB terhadap PDB Indonesia di tahun 2019 mencapai 32,35%, tapi di tahun 2023 (data sementara) menurun ke 29,33%.

Gambar 10.2 Distribusi PDB Indonesia berdasarkan Pengeluaran (2019-2023)

Sumber: BPS

Dominasi BUMN Berpotensi Menghambat Masuknya Investasi Swasta

Meningkatkan investasi dan perekonomian memerlukan sinergi antara swasta dengan badan usaha milik negara (BUMN) dan pemerintah. BUMN berperan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan memenuhi tujuan strategis nasional, khususnya dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan sektor-sektor strategis. Sedangkan perusahaan swasta berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar secara efisien dan inovatif. Kemitraan pemerintah-swasta (*public-private partnership*/PPP) juga dapat membantu mengatasi kendala pembangunan infrastruktur yang menghambat pertumbuhan ekonomi.[6]

BUMN di Indonesia memegang peran yang besar dan dominan. BUMN memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian Indonesia. Rasio aset BUMN terhadap PDB Indonesia cukup besar, di atas 40% sejak tahun 1980-an hingga 2019. Di tahun 2022, BUMN Indonesia memiliki aset senilai US$600 miliar, setara dengan 52% dari PDB Indonesia. Sementara itu, kontribusi nilai tambah BUMN pun cukup tinggi, berfluktuasi antara 6%-8% dari PDB Indonesia, antara 2008-2017.

Gambar 10.3 Aset BUMN Sebagai persentase dari PDB Indonesia

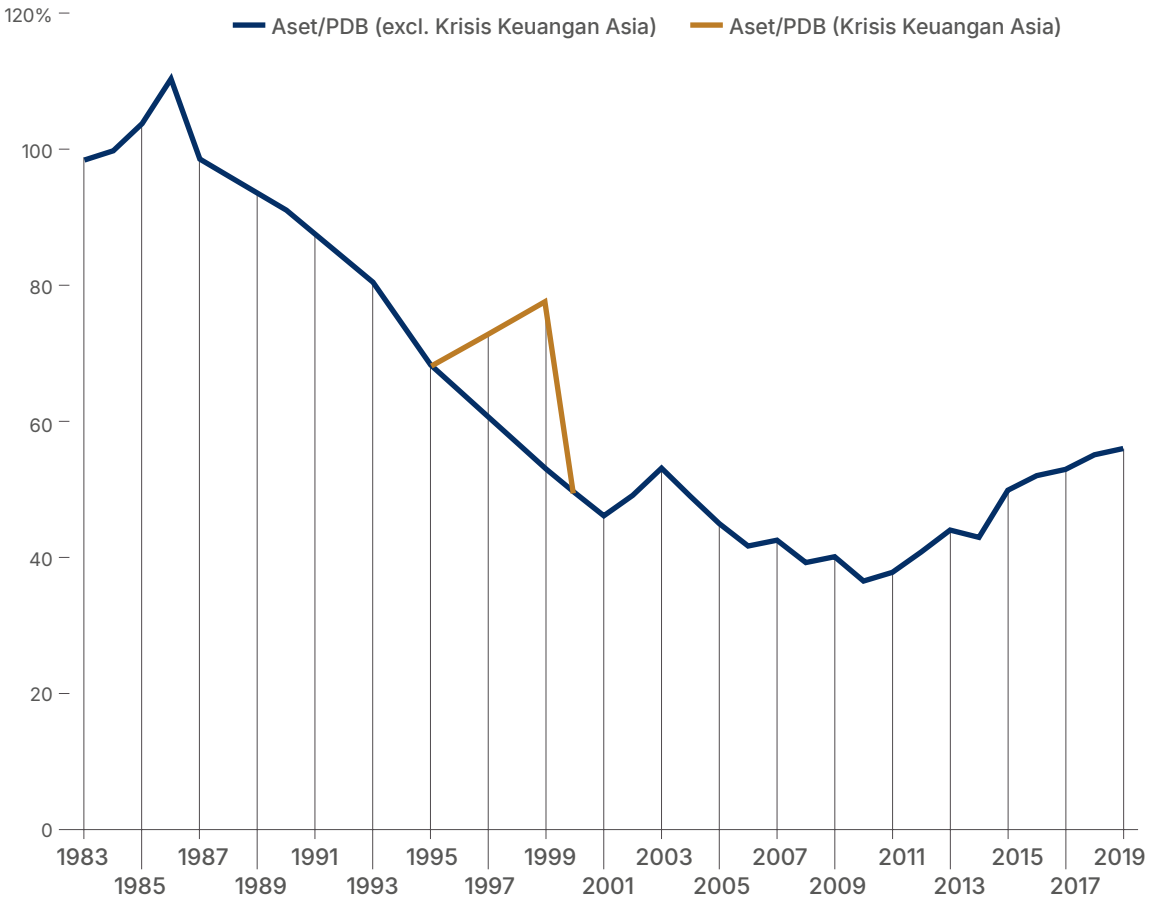

Sumber: ADB

Meskipun memiliki kontribusi yang besar, masih terjadi inefisiensi dalam pengelolaan BUMN, sehingga memerlukan orkestrasi yang lebih baik. Saat ini, tidak semua BUMN berada dalam kondisi sehat, misalnya per Juni 2024, PT Danareksa mengidentifikasi ada 14 BUMN dalam kondisi tidak baik. Kemudian, terjadi ketidakseimbangan, yaitu adanya dominasi lima BUMN terbesar yang menguasai 68,6% keseluruhan aset BUMN.

Ketidakseimbangan ini menunjukkan perlunya penataan dan pengelolaan yang lebih efektif agar semua BUMN dapat berfungsi secara optimal. Hal ini juga sudah disadari oleh Kementerian BUMN yang sudah melakukan sederet aksi korporasi—holdingisasi, merger, klasterisasi, atau menutup BUMN bermasalah—untuk mentransformasi BUMN. Hasilnya, per Januari 2024, BUMN tersisa 45 perusahaan dari 65 perusahaan pada Oktober 2024. Hingga akhir tahun 2024, ditargetkan jumlah BUMN di bawah 40 perusahaan.

BUMN sering menikmati keistimewaan termasuk akses yang lebih mudah ke pendanaan, subsidi pemerintah, dan monopoli pasar dalam beberapa sektor atau komoditas. Antara tahun 2015–2019, subsidi negara untuk BUMN mencapai rata-rata Rp158 triliun per tahun, atau sekitar 7,7% dari pengeluaran pemerintah.[7] Keberadaan subsidi yang longgar ini mengurangi insentif bagi BUMN untuk melakukan produksi secara efisien maupun melakukan inovasi. Menteri BUMN Erick Thohir telah menyatakan keinginannya untuk memangkas subsidi langsung kepada BUMN agar perusahaan BUMN tidak lagi mengejar subsidi tetapi lebih fokus untuk menjalankan dan melakukan pengembangan bisnis.[8]

Ketika beroperasi di luar sektor-sektor strategis nasional, dominasi BUMN berisiko menutup pintu bagi persaingan dari sektor swasta. Menteri BUMN Erick Thohir juga telah menyampaikan bahwa BUMN perlu dikurangi aspek "negara"-nya, dan perlu diperkuat aspek "usaha"-nya. Dalam kata lain, *"In order for SOEs to become a key part of the solution, we need less "S" (state) and more "E" (enterprise)*.[9] Perusahaan swasta perlu menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi, dengan pembagian peran yang sinergis dengan BUMN. Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam Kompas Collaboration Forum 2024 menyampaikan, target pertumbuhan ekonomi 2025 bersumber mayoritas dari investasi sektor swasta (85%).

Penganggaran yang Kurang Optimal dan Ego Sektoral Menciptakan Iklim Usaha yang Kurang Sehat

Selain dari iklim berinvestasi yang kurang kompetitif dan BUMN yang mendominasi, mekanisme penganggaran pemerintah saat ini juga membuat iklim usaha kurang sehat. Dalam banyak kasus, anggaran yang dialokasikan untuk proyek-proyek tertentu sering kali tidak diserap secara optimal akibat dari sistem penganggaran yang kurang efektif dan cenderung birokratis.

Pemerintah Indonesia memiliki dua mekanisme perencanaan pembangunan dan penganggaran yang terpisah: UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU KN) yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) yang dilaksanakan oleh Bappenas. Regulasi yang berbeda dan tanggung jawab yang terpisah antara perencanaan dan penganggaran menyebabkan ketidakselarasan antara perencanaan dan penganggaran.[10]

Mekanisme penganggaran yang kaku, terbatas pada tahun anggaran dan sulit melakukan realokasi anggaran. Saat ini mengusulkan program multi-tahun anggaran (*multi-year*) masih cukup rumit, memerlukan koordinasi antara berbagai instansi dan pemangku kepentingan. Selain itu, ada keterbatasan dalam proses realokasi anggaran di dalam tahun yang sedang berlangsung, sehingga K/L tidak dapat secara responsif untuk melakukan penyesuaian atas perubahan atau dinamika yang terjadi.

Berdasarkan analisis dalam jurnal yang disusun oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kemenkumham, penyesuaian atau revisi mata kegiatan memerlukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang sering terkendala oleh birokrasi yang lambat dan ketidakpastian waktu penyelesaian. Misalnya, proses administrasi terhambat oleh lamanya telaah fungsi dan maksud kegiatan oleh Kemenkeu yang kompetensinya terbatas dalam menelaah teknis tersebut.[11] Di sisi lain, Kemenkeu menganggap revisi DIPA yang terlalu sering sebagai hal yang kurang baik. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, revisi DIPA yang sering menunjukkan ketidakmampuan satuan kerja K/L dalam merencanakan anggaran dan mendesain program kerja secara efektif.[12]

Pola penganggaran pun lebih berorientasi lebih pada pengeluaran (*spending*) ketimbang pada hasil (*outcome*). Pola evaluasi kinerja Kementerian/Lembaga (K/L) berbasis pada indikator keuangan (*financial performance*) ketimbang pada kinerja, capaian, dan *outcome* (*performance-based budget*) oleh auditor keuangan. Akibatnya, keberhasilan anggaran cenderung ditentukan pada "menghabiskan" ketimbang "menghemat" anggaran untuk pencapaian hasil atau *outcome* yang sama.[13]

Selain itu, adanya "ego sektoral" atau *silo mentality*[14] di antara K/L menjadi faktor penghambat dalam menciptakan iklim usaha yang sehat. Di tahun ke-8 masa pemerintahannya, yaitu pada 2022, Presiden Joko Widodo mengamati masih kentalnya isu ego sektoral antara K/L yang turut menjadi penghambat dalam menyelesaikan persoalan negara: "Pemerintah daerah, kabupaten/kota, di provinsi, di pusat tidak bekerja secara terintegrasi, jalan sendiri-sendiri, egonya sendiri-sendiri. Kalau diterus-teruskan *enggak* akan rampung persoalan negara, persoalan bangsa ini *enggak* akan rampung. Persoalannya kelihatan, solusinya kelihatan, tapi tidak bisa dilaksanakan hanya gara-gara ego sektoral."[15]

***Silo mentality* ini juga mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam merespons tantangan ekonomi secara cepat dan tepat.** Ketika setiap K/L fokus pada kepentingan dan target masing-masing, koordinasi lintas sektor menjadi sulit dilakukan. Keberadaan kementerian koordinator (kemenko) yang masing-masing memiliki portofolio kementeriannya sendiri menjadi kurang efektif ketika harus mengkoordinasi isu tertentu yang cakupannya lintas kementerian dan bahkan lintas kemenko.

Bambang Brodjonegoro menggarisbawahi pentingnya koordinasi lintas kementerian sebagai salah satu tugas utama Menteri Koordinator (Menko).[16] Menurutnya, posisi dan struktur Menko hendaknya dibuat lebih fleksibel, cair, dan tidak kaku. Hal tersebut bisa dilakukan dengan menetapkan kewenangan Menko yang tidak terbatas terhadap kementerian tertentu saja. Menko diharapkan melakukan koordinasi berdasarkan isu, sehingga dapat mengambil kebijakan yang efektif. Dengan peran baru ini, Menko bisa menjangkau semua menteri yang terkait untuk pengambilan kebijakan.

Navigasi Indonesia: Gagasan dan Komitmen Presiden-Wakil Presiden Republik Indonesia 2024 - 2029

Asta Cita 3 menggaris-bawahi peran utama BUMN sebagai alat negara untuk benteng pertahanan ekonomi nasional. Ini termasuk penyediaan layanan dasar dan strategis, meningkatkan daya saing nasional, sekaligus sebagai salah satu motor pemberdayaan sektor UMKM. Untuk meningkatkan kinerja BUMN, manajemen yang profesional dan berintegritas serta bebas dari kepentingan politik juga perlu diperkuat.

Dalam dokumen visi misi, Presiden Terpilih telah merencanakan beberapa program terkait kerja sama BUMN dan swasta, antara lain untuk pengembangan industri syariah dan pariwisata; program magang dan beasiswa; pemberian kuota lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas; pelestarian warisan budaya dan seni; pendirian kilang minyak bumi, pabrik etanol, dan infrastruktur terminal penerima gas dan jaringan transmisi/distribusi gas.

Untuk meningkatkan daya saing dan investasi, Pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki target untuk memperbaiki angka ICOR (*Incremental Capital to Output Ratio*). Ini tercantum dalam dokumen visi misi, dan target untuk menurunkan ICOR Indonesia dari 7,6% ke 4-5% disampaikan oleh Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, dalam debat cawapres di bulan Desember 2023.[17] Di bawah Asta Cita 7, salah satu program kerjanya adalah membenahi iklim investasi dengan kepastian regulasi yang ramah, transparan, dan kompetitif. Selain itu, untuk menarik investasi juga direncanakan melalui pembiayaan inovatif dan reformasi perpajakan.

Presiden Terpilih Prabowo Subianto juga telah menyampaikan rencananya untuk meningkatkan peran perusahaan swasta dan mengurangi peran BUMN.[18] Melalui rencana ini, swasta nantinya bisa berkontribusi menggarap investasi yang masuk, tidak harus diberikan kepada BUMN. Menurut Prabowo Subianto, BUMN tidak harus selalu ikut serta dalam sektor ekonomi dan sudah saatnya sektor swasta semakin berperan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mempermudah bisnis dan penerimaan investasi dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.

Rekomendasi Paket Kebijakan 10:

A	**Menerbitkan Paket Kebijakan BUMN *Incorporated***
B	**Membentuk Satgas Revisi UU Keuangan Negara**
C	**Menjadikan Menko Sebagai Sistem Integrator dan Membangun Birokrasi yang Profesional dan Akuntabel**

Rincian Rekomendasi A: Mengimplementasikan Inisiatif Transformasi BUMN Indonesia Incorporated

I	**Memperbaiki Tata Kelola dan Persaingan Usaha BUMN dengan Swasta**
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Posisi BUMN over-dominan terhadap perusahaan swasta: BUMN sering menikmati keistimewaan berupa akses yang lebih mudah pada pendanaan dan subsidi pemerintah, dan monopoli pasar dalam beberapa sektor. Ini menyebabkan minimnya persaingan dan mengurangi insentif untuk inovasi dan efisiensi.	a. **Menciptakan *level playing field* yang adil antara BUMN dan swasta** dari mulai perlakuan istimewa hingga akses ke sumber daya untuk membuka pintu kompetisi sehat antara BUMN dengan swasta. b. **Memastikan keterlibatan BUMN adalah untuk program/proyek yang sulit dimasuki oleh swasta dan atau dalam rangka memastikan tumbuhnya industri unggulan nasional.**
II	**Mentransformasi BUMN untuk Memaksimalkan *Value Creation***
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• BUMN menghadapi tantangan dalam menciptakan nilai (*value creation*) ditandai dengan rata – rata ROA (*return on assets*/ pengembalian atas aset) di bawah median perusahaan pembanding di BEI (2019 – 2022), kontribusi BUMN melalui net dividen menunjukkan tren negatif (2019 – 2022), dan beberapa BUMN mengalami krisis keuangan sehingga menjadi prioritas restrukturisasi. • Frasa "yang dipisahkan" dalam konteks kekayaan negara dalam UU keuangan negara pada definisi keuangan negara berimplikasi pada pencampuradukan antara kekayaan negara dengan kekayaan perusahaan.	a. **Memperjelas definisi tujuan dan objektif BUMN dan detail struktur dan organisasi BUMN dalam UU 19/2003.** b. **Merevisi UU Keuangan Negara memperjelas turunan peraturan yang menjelaskan lebih lanjut mengenai frasa "kekayaan negara yang dipisahkan" di BUMN dan BUMD pada UU Keuangan Negara.** c. Melakukan *benchmark* kinerja global (*world class*) dari sisi *business process*. d. **Menjadikan pembinaan dan penciptaan perusahaan sejenis *non-gov* sebagai target BUMN.** Misalnya KAI harus bisa menciptakan perusahaan kereta di level daerah (BUMD atau swasta), sebagaimana Damri/Garuda berdampingan dengan swasta.
III	**Memisahkan BUMN dari Neraca Negara**
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Banyak BUMN kesulitan menjual aset yang tidak produktif karena batasan kebijakan terkait keuangan negara, contohnya larangan untuk menjual aset di bawah nilai buku.	a. **Memperjelas peraturan mengenai boleh tidaknya BUMN menjual aset atau entitas di bawah harga buku dengan meninjau Dekrit Kementerian BUMN 2021.**

Kondisi Eksisting	Rekomendasi
• Manajemen neraca keuangan yang kaku: BUMN dianggap sebagai bagian dari aset negara dengan konsekuensi yang menghambat restrukturisasi neraca, misalnya potensi dipenjara bila menjual aset dengan kerugian, pemulihan aset yang kaku.	**b. Memperjelas peraturan mengenai boleh tidaknya BUMN menjual aset atau entitas di bawah harga buku dengan meninjau Dekrit Kementerian BUMN 2021.** **c. Membuat kerangka kerja yang lebih komprehensif untuk menyetujui maupun menolak penjualan aset oleh entitas BUMN, serta menerapkan langkah-langkah ketat untuk menghindari potensi pelanggaran.** **d. Memungkinkan neraca BUMN direstrukturisasi dan tidak lagi dikelola sebagai entitas publik pemerintah tetapi sebagai perusahaan biasa.**
IV Mentransformasi Kementerian BUMN	
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Kementerian BUMN lebih berfungsi sebagai pengawas dan regulator, peningkatan arahan strategis dan koordinasi kegiatan BUMN oleh Kementerian BUMN diperlukan agar lebih efektif dalam pengelolaan portofolio BUMN secara keseluruhan. • Kontribusi BUMN terhadap objektif strategis nasional masih perlu prioritisasi. • Penunjukan kepemimpinan seringkali masih dipengaruhi kepentingan politis dibandingkan profesionalisme, pengawasan kinerja bisnis belum optimal berorientasi pada hasil. • Tantangan BUMN dalam transparansi keuangan dan kepatuhan regulasi masih memerlukan pengawasan yang ketat.	**a. Membuat strategi perencanaan portofolio BUMN yang mencakup kapabilitas,** seperti: i. Pemberian arahan strategis kepada portofolio entitas BUMN. Memberikan mandat pengamanan sektor hulu dari beberapa industri strategis seperti industri kimia dan obat yang sangat tergantung impor. ii. Kebijakan dan prioritisasi yang suportif. iii. Keselarasan antara kontribusi BUMN dengan objektif strategis nasional. iv. Antisipasi, adaptasi, dan tinjauan berkelanjutan untuk menghadapi perubahan. **b. Melakukan investasi yang mencakup kapabilitas,** seperti: i. Kemampuan mencari kesempatan investasi dan divestasi. ii. Pencarian sektor baru yang sesuai kebutuhan nasional. iii. Kemampuan kolaborasi dengan institusi lain seperti INA (*Indonesia Investment Authority*) dan lainnya. iv. Kapabilitas investasi harus didukung oleh ahli di bidang *mergers & acquisition* dan pemahaman sektoral yang dalam.

IV	Mentransformasi Kementerian BUMN
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
	c. Menambahkan nilai yang mencakup kapabilitas, seperti: i. Mentransformasi bidang usaha dengan performa kurang. ii. Meningkatkan sinergi antar entitas BUMN. iii. Penunjukkan kepemimpinan yang profesional. iv. Melakukan pengawasan kinerja bisnis. v. Memberikan dukungan fungsional seperti dukungan legal, audit keuangan, hubungan dengan institusi terkait, serta dukungan keuangan. vi. Meningkatkan fungsi Kementerian BUMN sebagai portofolio manager.

Rincian Rekomendasi B: Membentuk Satgas Revisi UU Keuangan Negara

I	Mengubah Pendekatan "*Money Follow Function*" Menjadi "*Money Follow Program*"
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• **Diskoneksi antara perencanaan dan penganggaran,** di mana perencanaan mengacu pada UU Sistem Perencanaan Pembangunan Negara (UU SPPN) yang berbasis program, sementara penganggaran mengacu pada UU Keuangan Negara (UU KN) yang berbasis fungsi. • **Diskoneksi institusi antara Bappenas sebagai perencana dan Kemenkeu sebagai penyusun anggaran** di mana Bappenas sebagai perencana hanya memiliki wewenang hingga tahap pagu indikatif, sementara proses penganggaran dilakukan oleh kemenkeu bersama dengan kementerian/lembaga lainnya dengan konsultasi DPR. Hal ini menyebabkan kompleksitas yang semakin meningkat yang dipengaruhi kuatnya faktor politik dalam proses penganggaran. • **Paradigma yang digunakan oleh K/L dalam pelaksanaan kebijakan masih berupa "menghabiskan anggaran" bukan "hemat anggaran, *outcome* tercapai".**	**a. Melakukan Revisi UU Keuangan negara dan Mengintegrasikan UU Keuangan Negara dan UU Sistem Perencanaan Pembangunan Negara menjadi UU tentang Perencanaan dan Penganggaran.**[19] Hal ini agar pendekatan "***money follow program***" dapat diadopsi tanpa perbedaan tafsir antara perencanaan dan penganggaran. Peran Bappenas harus diperkuat secara institusional untuk memantau dan mengevaluasi implementasi anggaran. **b. Memperkenalkan terobosan kebijakan dalam bentuk pemberian *grant*/hibah.** **c. Memperbanyak penganggaran multi-tahun**[20] untuk mengurangi dampak veto politik, meningkatkan perencanaan, dan kewaspadaan fiskal. **d. Menjadikan evaluasi kinerja K/L oleh Badan Pemeriksa Keuangan** berupa evaluasi berbasis indikator keuangan (*financial performance*) menjadi **evaluasi berbasis kinerja, capaian, dan *outcome* (*performance-based budget*) dengan menggunakan auditor yang memiliki keahlian pada bidang terkait, bukan auditor keuangan**, sehingga terdapat indikator capaian yang dapat diukur dan dapat dievaluasi. Anggaran boleh tidak habis asalkan *outcome* tercapai. **e. Membuat indikator capaian yang konkret dan krusial** seperti penciptaan lapangan kerja.

II	Memberikan Ruang untuk K/L Melakukan Realokasi Anggaran untuk Inovasi Kebijakan dan Program Strategis
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Proses realokasi anggaran untuk inovasi kebijakan dan program strategis di tingkat K/L seringkali terhambat oleh kendala administratif dan birokratis. Keputusan tentang realokasi anggaran sering memerlukan persetujuan yang rumit dan waktu yang lama, yang dapat menghambat respon cepat terhadap perubahan kondisi atau kebutuhan mendesak.	a. **Menyederhanakan proses persetujuan dan pemberian kewenangan lebih besar bagi K/L untuk mengelola anggaran** mereka sendiri agar dapat lebih responsif terhadap dinamika lingkungan dan lebih efektif dalam menerapkan kebijakan dan program yang inovatif dan strategis.

Rincian Rekomendasi C: Menjadikan Menko sebagai Sistem Integrator (PMO Nasional) dan Membangun Birokrasi yang Profesional dan Akuntabel

I	Menjadikan Menko sebagai Sistem Integrator (PMO Nasional)
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Peran Menteri Koordinator (Menko) saat ini terbagi dengan masing-masing Menko bertanggung jawab atas bidang tertentu tanpa keterlibatan yang kuat dalam mengintegrasikan kebijakan lintas sektor. • *Silo mentality* di berbagai K/L menghambat koordinasi dan implementasi kebijakan.	a. **Menjadikan Menko sebagai sistem integrator (PMO* Nasional) yang bertanggung jawab atas pengelolaan lintas sektor.** Menko dapat memegang beberapa program/proyek lintas kementerian dan memastikan tercapainya program pembangunan. b. Contoh: dalam hal ketahanan pangan Menko dapat memiliki wewenang mengkoordinasikan berbagai pihak untuk memperkuat koordinasi dan penyelesaian masalah secara efektif. Hal ini akan meningkatkan efisiensi, koordinasi, dan responsivitas pemerintah dalam menangani tantangan lintas sektor. c. Pendekatan PMO: tematik, holistik, integratif, spasial (THIS). **PMO (Policy, Program, Project-Management Officer)*
II	**Meningkatkan Meritokrasi serta Memperkuat Pelaksanaan Implementasi *Key Performance Indicator* (KPI) dan *Service Level Agreement* (SLA)**
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Penilaian meritokrasi yang dilakukan oleh KASN menunjukkan dari 587 lembaga pemerintah yang dinilai, 273 lembaga dikategorikan sebagai di bawah standar dan tidak memadai, dengan pengembangan karier dan rotasi pekerjaan sebagai indikator terendah.[21] • Pelaksanaan KPI dan SLA di Indonesia tidak merata, formulasi belum terstruktur, serta implementasi e-kinerja masih terkonsentrasi di beberapa wilayah seperti Surabaya, Jakarta, dan Bandung.[22]	a. **Mempercepat penetapan regulasi turunan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara No. 20 Tahun 2023.** b. **Mempercepat pembentukan dan implementasi *talent pool* untuk aparatur sipil negara (ASN).** c. **Mengevaluasi regulasi turunan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja, seperti Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 atau Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021** untuk memastikan percepatan proses perizinan berusaha.

II.	**Meningkatkan Meritokrasi serta Memperkuat Pelaksanaan Implementasi *Key Performance Indicator* (KPI) dan *Service Level Agreement* (SLA)**
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Implementasi *Online Single Submission* (OSS) masih menghadapi hambatan, dan banyak pelaku usaha masih harus mengurus izin langsung di kantor pemerintah.	

Sumber Gambar: freepik

Referensi

1. World Bank. (2020). *Doing Business 2020: Economy Profile Indonesia*. Diakses pada 2 Juli 2024, darihttps://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/75ea67f9-4bcb-5766-ada6-6963a992d64c/content
2. Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Indonesia 2024*. Diakses pada 3 Juli 2024, dari https://www.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/c1bacde03256343b2bf769b0/statistik-indonesia-2024.html
3. The Heritage Foundation. (2024). *Index of Economic Freedom*. Diakses pada 20 Agustus 2024, dari https://www.heritage.org/index/pages/all-country-scores
4. US Department of State. (2024). *2024 Investment Climate Statements: Indonesia*. Diakses pada 20 Agustus 2024, dari https://www.state.gov/reports/2024-investment-climate-statements/indonesia/
5. Badan Pusat Statistik. (2024). *Gross Domestic Product of Indonesia by Expenditure (2019-2023)*. Diakses pada 4 Juli 2024, dari https://www.bps.go.id/en/publication/2024/05/31/ea145f324f198e80194043cd/gross-domestic-product-of-indonesia-by-expenditure--2019-2023.html
6. World Bank. (2020). *The Role of PPP in Improving Economic Performance*. Diakses pada 5 Juli 2024, dari https://ieg.worldbankgroup.org/sites/default/files/Data/reports/chapters/ppp_chap1_0.pdf
7. Asian Development Bank. (2024). *Unlocking the Economic and Social Value of Indonesia's State-Owned Enterprises*. Diakses pada 6 Juli 2024, dari https://www.adb.org/documents/unlocking-economic-and-social-value-indonesias-state-owned-enterprises
8. Antara News. (2023). *Erick Berharap BUMN Tidak Lagi Terima Subsidi Energi*. Diakses pada 7 Juli 2024, dari https://www.antaranews.com/berita/1401982/erick-berharap-bumn-tidak-lagi-terima-subsidi-energi
9. Saeed, A. M., & Thohir, E. (2024). *Reimagining Indonesia's State-Owned Enterprises*. Diakses pada 8 Juli 2024, dari https://www.adb.org/documents/reimagining-indonesias-state-owned-enterprises
10. KSI Indonesia. (2018). *Critical Study on Development Planning and Budgeting*. Diakses pada 9 Juli 2024, dari https://www.ksi-indonesia.org/file_upload/Critical-Study-on-Development-Planning-and-Budgeti-06Feb2018150821.pdf
11. BPHN. (2023). *Jurnal Rechtsvinding*. Diakses pada 10 Juli 2024, dari https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/144/79
12. DJPB Kemenkeu. (2023). *Mengulik Akar Masalah Revisi DIPA*. Diakses pada 11 Juli 2024, dari https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3967-mengulik-akar-masalah-revisi-dipa.html
13. ResearchGate. (2023). *Kendala Dan Kelemahan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja Sektor Publik: Suatu Tinjauan*. Diakses pada 12 Juli 2024, dari https://www.researchgate.net/publication/371338510_Kendala_Dan_Kelemahan_Sistem_Penganggaran_Berbasis_Kinerja_Sektor_Publik_Suatu_Tinjauan
14. *Silo mentality* adalah kecenderungan setiap K/L untuk bekerja secara terpisah dan tidak terkoordinasi dengan K/L lainnya, yang menyebabkan kebijakan dan program sering kali tumpang tindih atau bahkan saling bertentangan.
15. CNBC Indonesia. (2022). *Jokowi Geram Masih Ada Ego Sektoral: Cukup Setop*. Diakses pada 13 Juli 2024, dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20220609125337-4-345671/jokowi-geram-masih-ada-ego-sektoral-cukup-setop
16. Berdasarkan *in-depth interview* IBC dengan Bambang Brodjonegoro pada Senin, 27 November 2023
17. Republika. (2023). *Mengenal Istilah ICOR yang Disebut Gibran*. Diakses pada 14 Juli 2024, dari https://ekonomi.republika.co.id/berita/s62mxv457/mengenal-istilah-icor-yang-disebut-gibran
18. Bisnis Indonesia. (2024). *Ganti Rezim Prabowo: Janji Prioritaskan Swasta Dibandingkan BUMN*. Diakses pada 15 Juli 2024, dari https://ekonomi.bisnis.com/read/20240305/9/1746736/ganti-rezim-prabowo-janji-prioritaskan-swasta-dibandingkan-bumn
19. Robinson, M., & Brumby, J. (2005). *Does Performance Budgeting Work?* Diakses pada 16 Juli 2024, dari https://www.worldbank.org/en/news/feature/2021/06/15/does-performance-budgeting-work
20. Joyce, P. G. (2012). *The Costs of Budget Uncertainty*. Diakses pada 17 Juli 2024, dari https://www.researchgate.net/publication/260053176_The_Costs_of_Budget_Uncertainty
21. Komisi Aparatur Sipil Negara. (2023). *Laporan KASN Kepada Presiden Tahun 2023*. Diakses pada 18 Juli 2024, dari https://www.kasn.go.id/wp-content/uploads/2023/01/Laporan-KASN-Kepada-Presiden-2023.pdf
22. Mubin, F., & Roziqin, A. (2018). *Meritocracy of Bureaucracy in Indonesia*. International Journal of Social Science and Humanity, 8(8), 241. Diakses pada 19 Juli 2024, dari https://www.ijssh.org/vol8/968-MY0012.pdf

"15 Rekomendasi Paket Kebijakan untuk Mendukung Agenda Pembangunan Presiden & Wakil Presiden Indonesia 2024 - 2029"

Fokus Area 11

Inovasi Produk Keuangan, Perluasan Pembiayaan untuk UMKM, Suku Bunga Rendah & Pembaharuan Kebijakan Fiskal-Makroekonomi:

Mengoptimalkan Sektor Keuangan Nasional

11

IBC
Indonesian Business Council

Sumber Gambar: freepik

Inovasi Produk Keuangan, Perluasan Pembiayaan untuk UMKM, Suku Bunga Rendah & Pembaharuan Kebijakan Fiskal-Makroekonomi:

Mengoptimalkan Sektor Keuangan Nasional

Misi Asta Cita 3 Prabowo-Gibran

Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

Misi Asta Cita 7 Prabowo-Gibran

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Program Prioritas No. 14 Prabowo-Gibran

Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya.

Stakeholders: *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian); Kementerian Keuangan (Kemenkeu); Bank Indonesia (BI); Otoritas Jasa Keuangan (OJK); Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas); Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kementerian KUKM); Pemerintah Daerah (Pemda).*

> *Kami terbuka untuk investasi, dan kami menginginkan lebih banyak investasi masuk. Untuk itu, kita harus berbenah untuk semakin baik. Sekali lagi, kita harus meningkatkan efisiensi, dan mencegah lebih banyak praktik korupsi, menegakkan hukum, dan memastikan seluruh investor dari dalam dan luar negeri mendapatkan perlindungan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.*
> ***Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia Periode 2024 - 2029***

Menuju Indonesia Emas 2045: Membangun Sektor Keuangan yang Mendalam, Efisien, dan Inklusif

Kekuatan dan kesehatan sektor keuangan Indonesia merupakan fondasi penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%, guna melepaskan diri dari *middle income trap* dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Sektor keuangan yang sehat dan tangguh akan memastikan stabilitas ekonomi, memperluas akses pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah, serta mendorong investasi yang berkelanjutan, termasuk pemenuhan percepatan pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur yang berkualitas.[1]

Menurut studi IMF, kuat dan sehatnya sektor keuangan ditentukan oleh tiga indikator, yaitu kedalaman, akses, dan efisiensi. Kedalaman mengacu pada besarnya volume aktivitas keuangan relatif terhadap perekonomian secara keseluruhan. Sementara itu, **aksesibilitas** menggambarkan kemudahan bagi individu dan bisnis dalam menggunakan layanan keuangan. Terakhir, **efisiensi** menunjukkan seberapa baik pasar dan lembaga keuangan memberikan layanan dengan biaya minimal serta mengalokasikan sumber daya secara efektif.[2]

Gambar 11.1 Financial Development Index

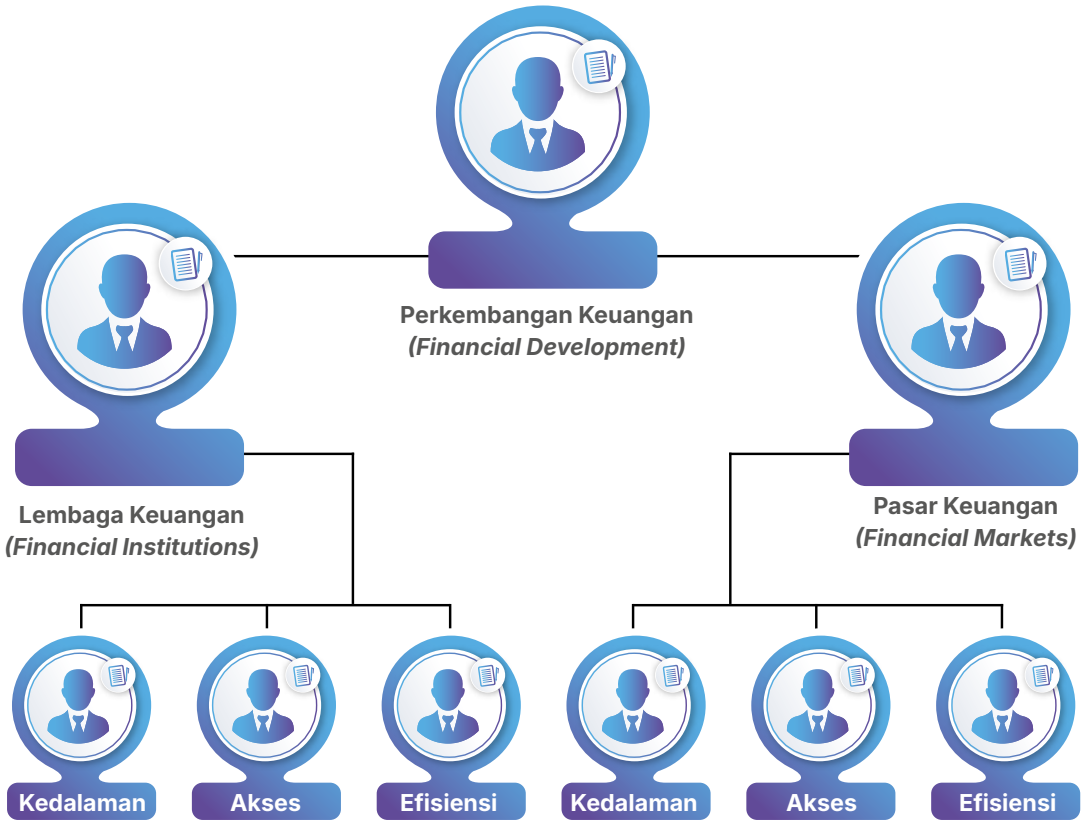

Sumber: IMF, 2015

Meskipun Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam beberapa aspek, skor pada tiga indikator utama masih lemah (*tripple trouble*), terutama jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Contohnya, rasio uang beredar dalam arti luas (M2)[3] terhadap PDB Indonesia berada di bawah 50%. Hal ini merupakan salah satu indikasi yang menandakan bahwa kedalaman sektor perbankan masih sangat terbatas dibandingkan dengan ukuran ekonomi negara.

Tabel 11.1 Rasio Uang Beredar (M2) Indonesia Termasuk yang Terendah di antara ASEAN-5

Negara	M2/GDP (%)
Indonesia	43,8
Malaysia	119
Filipina	86
Thailand	144
Singapura	149

Sumber: World Bank & Studi IBC, *Financial Development for Strong and Equitable Growth*, 2024

Selain itu, dengan aset sektor perbankan hanya sebesar 59,5% dari PDB, Indonesia menempati posisi terbawah di antara negara-negara ASEAN-5. Rendahnya berbagai rasio finansial terhadap PDB pada tahun 2021-2022 (lihat tabel 11.2), semakin memperlihatkan bahwa Indonesia masih tertinggal dalam aspek kedalaman pasar keuangan, termasuk di pasar saham, sektor perbankan, dan lembaga keuangan non-bank lainnya.

Tabel 11.2 Kedalaman Keuangan Indonesia Termasuk yang Terendah di antara Negara ASEAN-5

Negara	Aset Bank (% PDB)	Kapitalisasi Pasar (% PDB)	Aset Asuransi (% PDB)	Aset Dana Pensiun (% PDB)
Indonesia	59,5	48,3	5,8	6,9
Malaysia	198,6	109,9	20,3	59,9
Filipina	99,2	93,2	8,5	3,5
Singapura	572,1	189,0	47,5	32,2
Thailand	146,6	120,9	23,2	6,9

Sumber: Studi IBC, *Financial Development for Strong and Equitable Growth*, 2024

Tidak hanya kedalaman, indikator aksesibilitas juga belum optimal, terlihat dari terbatasnya akses masyarakat Indonesia terhadap layanan keuangan dibandingkan dengan negara-negara ASEAN-5 (lihat Tabel 11.3). Data menunjukkan bahwa hanya 13% penduduk yang dapat mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal seperti bank. Hal ini juga terjadi pada produk keuangan lainnya, seperti tabungan.

Tabel 11.3 Akses Masyarakat Indonesia* terhadap Layanan Keuangan Masih Terbatas di antara ASEAN-5

Negara	Memiliki rekening di lembaga keuangan	Memiliki tabungan di lembaga keuangan	Meminjam dari lembaga keuangan
Indonesia	51%	20%	13%
Malaysia	88%	47%	13%
Singapura	97%	60%	43%
Filipina	46%	19%	17%
Thailand	94%	52%	28%

*Penduduk usia 15 tahun ke atas
Sumber: Studi IBC, *Financial Development for Strong and Equitable Growth*, 2024

UMKM, sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia, juga menghadapi tantangan dalam mengakses layanan keuangan. Meskipun menyumbang sekitar 60% PDB, hanya sekitar 20% UMKM yang memiliki akses ke layanan keuangan formal. Kurangnya dukungan dari lembaga keuangan formal dan sulitnya pemenuhan persyaratan administratif yang diperlukan menjadi hambatan utama bagi UMKM untuk mendapatkan pembiayaan formal. Akibatnya, banyak UMKM bergantung pada pembiayaan informal.[4]

Selain kedalaman dan aksesibilitas, indikator efisiensi juga perlu mendapatkan perhatian, karena efisiensi sektor keuangan Indonesia masih tergolong rendah. Biaya dana yang tinggi dan margin bunga bersih (NIM) yang juga tinggi di industri perbankan menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat kredit di Indonesia dibandingkan di antara negara-negara ASEAN-5, yang hanya sebesar 8,5%.

Ketiga indikator ini – kedalaman, akses, dan efisiensi – saling berkaitan dan dapat menyebabkan *vicious cycle* yang saling melemahkan satu sama lain jika tidak ditangani segera. Misalnya, rendahnya kedalaman keuangan dapat menyebabkan biaya keuangan yang tinggi dan meningkatkan kerentanan terhadap risiko global.[5] Selain itu, kedalaman keuangan yang rendah juga dapat berkaitan dengan akses terhadap layanan keuangan yang terbatas. Dengan meningkatkan akses, maka sektor keuangan akan semakin dalam dan biaya intermediasi keuangan juga akan turun. Interkoneksi antara kedalaman, akses, dan efisiensi akan menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil dan inklusif.

Sebagai respon, pemerintah telah berupaya memperbaharui kebijakan untuk mengoptimalkan sektor keuangan nasional. Beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya:

1. **Mengesahkan Undang-Undang tentang Pembangunan dan Penguatan Sektor Keuangan** (UU P2SK) pada tahun 2022. UU P2SK mengatur dua aspek utama, yaitu (i) kelembagaan dan tata kelola otoritas sektor keuangan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan stabilitas sistem keuangan, dan (ii) kegiatan industri keuangan dan infrastruktur pendukungnya, termasuk sumber daya manusia, untuk mendorong inovasi, perlindungan konsumen, dan pengembangan industri keuangan yang sehat dan berkelanjutan.
2. **Menerapkan inisiatif repatriasi ekspor** untuk menghubungkan bisnis ekspor dengan sektor keuangan. Kebijakan yang mewajibkan para eksportir untuk repatriasi pendapatan ini pertama kali diperkenalkan tahun 2019 dan kemudian diperbaiki dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2023, dengan pengenaan sanksi denda. Sebelumnya, tingkat bunga domestik untuk deposito dalam dolar AS adalah 1,75%, jauh lebih rendah dari penawaran bank global sebesar 4,9%. Dengan instrumen baru ini, tingkat bunga menjadi sangat kompetitif pada 5,05% setelah margin bank.
3. **Mengatur Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial** (RPIM) melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/3/PBI/2022 yang mendorong bank menyalurkan lebih banyak pinjaman kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Aturan ini mewajibkan bank untuk mencairkan minimal 20% dari pinjaman mereka kepada UMKM, rantai pasokan UMKM, atau individu berpenghasilan rendah. Persentase ini meningkat secara bertahap menjadi 25% pada Juni 2023 dan 30% pada Juni 2024.

Sumber Gambar: freepik

Kini saatnya sektor keuangan Indonesia beralih untuk mendorong ekspansi dan inovasi. Setelah regulator dan pengambil kebijakan sektor keuangan cukup lama berkonsentrasi pada peningkatan aspek *prudentiality* sejak trauma hantaman krisis moneter di era 90-an diikuti beberapa *financial shocks* lainnya seperti *sub-prime mortgage crisis* di era 2000-an, sektor keuangan Indonesia perlu mulai menekankan pada aspek ekspansi dan inovasi dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan yang amat diperlukan Indonesia.

6 Tantangan Pengembangan Sektor Keuangan di Indonesia

IBC mengidentifikasi enam tantangan struktural yang menghambat pengembangan keuangan di Indonesia. Tantangan-tantangan tersebut berkontribusi menciptakan 3 masalah utama, yaitu kurangnya kedalaman, akses, dan efisiensi pada sektor keuangan.

1. **Peningkatan ekspor belum secara langsung menunjang cadangan devisa negara.** Ekspor menjadi salah satu pilar utama perekonomian Indonesia, dengan kontribusi sebesar 21,75% terhadap PDB di tahun 2023. Selama periode 2021-2023, pertumbuhan ekspor mencapai 11,78%. Namun, meskipun ekspor mengalami pertumbuhan dalam tiga tahun terakhir, hal ini belum berdampak signifikan pada peningkatan cadangan devisa maupun pertumbuhan sektor keuangan. Pertumbuhan cadangan devisa dan dana pihak ketiga di sektor perbankan masih satu digit. Ini menunjukkan bahwa devisa hasil ekspor (DHE) belum optimal diserap oleh sistem keuangan dalam negeri.[6]

   Beberapa faktor menjadi alasan. Salah satunya pertumbuhan impor juga tercatat tinggi, yaitu 13,09% pada 2021-2023, berakibat rendahnya net ekspor pada 2021-2023 yaitu rata-rata US$42,24 miliar.[7] Selain itu, Indonesia juga perlu mengembangkan sektor-sektor potensial lain seperti manufaktur, untuk bisa lebih meningkatkan daya saing ekspor. Pengembangan manufaktur akan menambah nilai produk dalam negeri dan bisa juga menjadi satu aspek untuk menarik investasi baru.

2. **Preferensi menabung dan berinvestasi pada produk non-finansial**. Meskipun tingkat tabungan bruto Indonesia tergolong tinggi, mencapai 36%[8] pada 2023 dan melampaui negara-negara ASEAN-5 lainnya, seperti Thailand (25%), Malaysia (27%), dan Filipina (27%), kecuali Singapura (41%), terdapat paradoks rendahnya kedalaman keuangan di negara ini. Fenomena ini menandakan bahwa sebagian besar aset masyarakat Indonesia tidak tersimpan dalam bentuk uang atau aset keuangan formal, melainkan dalam bentuk emas dan properti.

3. **Tingkat ekonomi informal yang tinggi**. Ekonomi informal mendominasi perekonomian Indonesia, dengan jumlah 84 juta pekerja informal atau 59% dari populasi pekerja.[9] Hal ini menghadirkan tantangan besar dalam mengembangkan produk keuangan yang tepat untuk meningkatkan akses keuangan.

4. **Industri perbankan yang kurang kompetitif**. Empat bank terbesar di Indonesia menguasai 60% dari total aset sektor perbankan. Namun tingkat efisiensinya rendah, ditunjukkan oleh margin bunga bersih (NIM) yang tinggi. Hal ini menunjukkan kurangnya persaingan di sektor perbankan. Untuk meningkatkan efisiensi dan menawarkan lebih banyak pilihan kepada konsumen, diperlukan inisiatif yang proaktif untuk meningkatkan kompetisi di industri perbankan.

5. **Tingkat risiko investasi di Indonesia masih tinggi.** Akibatnya, tingkat investasi yang masuk relatif lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura. Pada tahun 2023, *yield* obligasi Indonesia sebesar 6,5%[10], menunjukkan risiko yang lebih tinggi dibandingkan negara lain di Asia. Jika investasi meningkat, jumlah uang beredar akan meningkat dan *yield* obligasi akan menurun. Peringkat *Sovereign Rating Indonesia* saat ini BBB[11], menunjukkan perlunya mengurangi risiko untuk menarik lebih banyak investasi.

6. **Rasio *Non-Performing Loan* (NPL)[12] berada pada angka 2,1%,** lebih tinggi dibandingkan beberapa negara di ASEAN-5 seperti Malaysia (1,7%) dan Singapura (1,3%). Namun, lebih rendah dibandingkan Thailand (2,8%) dan Filipina (4%).[13] Walaupun tingkat NPL saat ini menggambarkan kondisi perbankan yang relatif stabil, hal ini juga bisa jadi menunjukan bahwa sektor perbankan domestik kurang agresif dalam mengambil risiko. Hal ini bisa jadi merupakan salah satu alasan utama yang membuat tingkat pertumbuhan kredit domestik di level yang rendah seperti yang telah dipaparkan sebelumnya.

Memperdalam sektor keuangan Indonesia memerlukan langkah-langkah terpadu yang strategis. Langkah-langkah ini harus menjawab tiga masalah utama: kurangnya kedalaman, akses, dan efisiensi di sektor keuangan. Hal ini menjadi tugas penting bagi pemerintahan ini untuk memastikan sektor keuangan yang lebih stabil dan inklusif.

Navigasi Indonesia: Gagasan dan Komitmen Presiden-Wakil Presiden Republik Indonesia 2024 - 2029

Prabowo-Gibran menekankan pentingnya menguatkan sektor keuangan sebagai bagian dari program kerja di pemerintahan selanjutnya. Dalam Asta Cita 7, Prabowo-Gibran menargetkan harmonisasi kebijakan sektor moneter, fiskal, dan riil untuk menstabilkan perekonomian serta mendorong pembangunan Indonesia. Selain itu, Asta Cita 3 juga menekankan kewirausahaan dan ekonomi kreatif, termasuk peluncuran kredit usaha untuk *startup* berbasis teknologi serta dorongan bagi perbankan untuk menyediakan pembiayaan bagi industri digital dan kreatif. Program Prioritas 14, pada gilirannya, juga memprioritaskan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui akses kredit usaha, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan kota-kota inovatif-berkarakteristik-mandiri lainnya.

Penguatan ekonomi digital, ekonomi biru, dan ekonomi syariah menjadi inti dalam menguatkan sektor keuangan Indonesia. Prabowo-Gibran menekankan pengembangan ekonomi digital dan ekonomi biru yang mencakup pengembangan sistem pembiayaan alternatif untuk UMKM melalui digitalisasi keuangan serta meningkatkan akses keuangan, terutama untuk sektor perikanan dan kemaritiman. Hal ini termasuk menjamin pembiayaan bagi petani, peternak, dan nelayan serta memperkuat lembaga keuangan syariah untuk memperluas ekosistem usaha syariah.

Prabowo-Gibran juga menyoroti pentingnya hilirisasi industri dan pemerataan ekonomi. Langkah-langkah termasuk mengembangkan program pembiayaan inovatif untuk menarik investasi dalam negeri serta memperluas dan mempermudah akses pembiayaan UMKM melalui *holding* pembiayaan ultra mikro seperti program PNM Mekar.

Rekomendasi Paket Kebijakan 11:

A	**Meluncurkan Inovasi Produk Keuangan untuk Meningkatkan Kedalaman Sektor Keuangan**
B	**Mempercepat Perluasan Akses Keuangan melalui Sistem Kredit dan Cakupan Lembaga Non-Bank**
C	**Meningkatkan Iklim Kompetisi Sehat dan Reformasi Kebijakan Fiskal-Makroekonomi untuk Meningkatkan Efisiensi Keuangan**

Rincian Rekomendasi A: Meluncurkan Inovasi Produk Keuangan untuk Meningkatkan Kedalaman Sektor Keuangan

I	Menetapkan Kebijakan Obligasi Pembiayaan Proyek untuk Proyek Infrastruktur
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Rasio likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) terhadap PDB Indonesia berada di bawah 50%. Ini menandakan bahwa kedalaman pasar modal dan ketersediaan instrumen investasi sangat terbatas dibandingkan dengan ukuran ekonomi negara. • Investasi infrastruktur bergantung pada model pembiayaan dan sumber pendanaan tradisional seperti obligasi dan pinjaman jangka pendek dari perbankan yang menyebabkan *mismatch* dengan arus kas masuk dari proyek infrastruktur. • BUMN dan pengembang ditugaskan untuk mengerjakan proyek konstruksi untuk pembangunan infrastruktur. Sebagian terbebani beban utang untuk pembiayaan aset yang menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran obligasi mereka.	a. **Menyusun kerangka regulasi yang diperlukan untuk penerbitan obligasi pembiayaan proyek** (*project finance bonds*), yang akan meringankan risiko kredit, memperkuat neraca para pengembang infrastruktur, dan memungkinkan berbagai pelaku, termasuk lembaga keuangan non-bank dan investor asing, untuk berpartisipasi.

Sumber Gambar: freepik

II	Menghadirkan Kebijakan Produk Keuangan Inovatif Lainnya (REITs dan *Municipal Bonds*)
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Investor memiliki pilihan terbatas dalam hal investasi di Indonesia, yaitu deposito bank, obligasi vanila biasa (*plain vanilla bonds*), reksadana, dan saham. • Pasar domestik menyediakan akses yang terbatas ke instrumen global sehingga mendorong investor potensial untuk berinvestasi ke luar negeri untuk imbal hasil yang lebih menguntungkan dan diversifikasi portofolio mereka. • Banyak aset properti yang *idle* dan belum dimonetisasi secara optimal. Di berbagai negara upaya monetisasi properti dilakukan dilakukan melalui mekanisme *Real Estate Investment Trusts* (REITs). • Di Indonesia, struktur pajaknya untuk REITs khususnya dalam hal transfer aset dan adanya pajak penghasilan ganda (*double income taxation*) menghambat perkembangan REITs. • Pemerintah daerah umumnya memiliki kapasitas keuangan yang kurang memadai untuk mendanai pembangunan daerah, termasuk untuk mencapai tujuan SDGs.	a. **Pengembangan instrumen keuangan baru dan pasar modal** sebagai berikut: i. **Mengembangkan dan mengatur struktur REITs** melalui kerangka aturan/ kebijakan. ii. **Memfasilitasi REITs untuk memperoleh aset properti tanpa dikenakan pajak** penjualan properti sehingga mendorong investor untuk membeli REITs. iii. **Menerbitkan obligasi daerah (*municipal bonds*)**, khususnya untuk mencapai tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

III	Mengintegrasikan Sandbox untuk Percepatan Pengembangan Produk Keuangan Inovatif
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Ruang Uji Coba Pengembangan Inovasi (*Sandbox*) adalah sarana dan mekanisme untuk memfasilitasi uji coba dan pengembangan inovasi yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menilai kelayakan dan keandalan ITSK. • Saat ini, *Sandbox* dilakukan secara terpisah oleh Bank Indonesia dan OJK sehingga proses uji coba produk inovasi keuangan menjadi kurang efektif dan memakan waktu. • UU No. 4 Tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), pasal 217 ayat 2 dan 4 menyebutkan bahwa BI dan OJK dapat berkoordinasi dalam melakukan program *Sandbox*.	a. **Mengintegrasikan proses *Sandbox* termasuk memperkuat koordinasi antara regulator (BI dan OJK)** untuk mempercepat proses uji coba produk inovasi dan produk keuangan baru bisa segera diimplementasikan dan nikmati oleh masyarakat luas.

Rincian Rekomendasi B: Mempercepat Perluasan Akses Keuangan melalui Sistem Kredit dan Cakupan Lembaga Non-Bank

I Memperbaiki Sistem Informasi Perkreditan dan Dukungan Khusus UMKM

Kondisi Eksisting	Rekomendasi
• Hanya 13% dari populasi yang memanfaatkan pembiayaan dari lembaga keuangan. Kecilnya populasi yang memiliki akun di lembaga keuangan formal menunjukkan adanya hambatan signifikan dalam akses ke layanan keuangan, khususnya pembiayaan.[14] • Sistem informasi kredit yang ada di Indonesia masih terfragmentasi. • Sistem penilaian kredit masih belum efisien. • Kurangnya sumber informasi yang tersedia untuk menilai kelayakan kredit. • Tingginya informalitas di sektor UMKM. • UMKM terjebak dalam peringkat kredit yang kurang baik di dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dimiliki OJK.	a. **Membuat peraturan tentang berbagi informasi kredit dengan menggabungkan informasi kredit dalam satu *database* yang terintegrasi.** b. **Memperluas sumber informasi pencatatan kredit** seperti data telekomunikasi, pembayaran utilitas, transaksi *e-commerce*, riwayat transaksi QRIS untuk UMKM, rekomendasi dari perusahaan mitra rantai pasok atau data non-tradisional lainnya. c. **Merevisi penilaian kredit agar dapat dilakukan secara holistik dan menyesuaikan dengan faktor-faktor lain yang relevan** dengan UMKM selain kemampuan peminjam untuk segera membayar (*immediate payment*). d. **Meningkatkan penggunaan produk keuangan khususnya bagi UMKM** sebagai sumber informasi riwayat kreditnya. e. **Menyusun dan mengimplementasikan strategi yang komprehensif untuk meningkatkan transisi UMKM dari sektor informal ke formal.** f. **Membuka ruang untuk adanya perluasan penghapusan utang bagi UMKM dengan kriteria dan mekanisme yang jelas.**

II Pengaturan Agunan berupa Aset Bergerak untuk Memperluas Akses Keuangan

Kondisi Eksisting	Rekomendasi
• Adanya ketergantungan pada penggunaan agunan tradisional dalam sektor pembiayaan. • Kurangnya literasi keuangan mengenai aset agunan bergerak. • Terbatasnya dukungan pembiayaan untuk UMKM.	a. **Menetapkan peraturan mengenai pengembangan ekosistem yang memungkinkan aset bergerak yang digunakan sebagai agunan** untuk dapat dinilai, dijual, atau ditransaksikan dengan cara yang mudah dan transparan. Aset bergerak dapat berupa berbagai jenis barang, seperti peralatan dan inventaris. b. **Mengurangi ketergantungan pada skema pinjaman bersubsidi seperti KUR dan merelokasi beberapa anggaran KUR ke skema jaminan UKM parsial** yang lebih luas.

III	**Meningkatkan partisipasi lembaga keuangan non-bank untuk meningkatkan cakupan pasar keuangan**

Kondisi Eksisting	Rekomendasi
• Hanya 51% dari populasi yang memiliki akun di lembaga keuangan formal.[15] • Kecilnya populasi yang menggunakan layanan pembiayaan menunjukkan adanya hambatan signifikan dalam akses ke layanan keuangan. • Kurangnya Literasi Keuangan UMKM tentang produk keuangan. Dibandingkan dengan negara lain, tingkat melek keuangan Indonesia masih relatif rendah. Data OECD, Indonesia memiliki Indeks Literasi Keuangan sebesar 57, jauh di bawah rata-rata global.	a. **Menyediakan kerangka regulasi yang mendukung pertumbuhan lembaga keuangan non-bank**, seperti perizinan yang lebih mudah, pengawasan yang proporsional, dan kebijakan fiskal berupa insentif yang mendukung. b. **Paket insentif seperti pembebasan pajak atau subsidi bagi lembaga keuangan non-bank yang beroperasi di daerah terpencil atau yang melayani segmen pasar yang kurang terlayani (*underserved communities*).** c. **Melaksanakan program literasi keuangan yang komprehensif** untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan keuangan, khususnya bagi *underserved (unbanked and underbanked) community*. d. **Memperkuat infrastruktur dan layanan *digital banking*, termasuk untuk lembaga non-bank** untuk meningkatkan akses keuangan, khususnya di daerah terpencil dan pedesaan. e. **Mengimplementasikan perubahan dalam peraturan perlindungan data pribadi untuk memperluas cakupan registrasi kredit, memastikan akses data yang ramah konsumen, dan menciptakan mekanisme penilaian kredit yang inovatif dengan menggunakan data transaksional dari QRIS.**

Sumber Gambar: freepik

Rincian Rekomendasi C: Meningkatkan Iklim Kompetisi Sehat dan Reformasi Kebijakan Fiskal-Makroekonomi untuk Meningkatkan Efisiensi Keuangan

I	Memperbaiki Iklim Kompetisi Sehat antara Lembaga Keuangan
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Sektor perbankan Indonesia didominasi oleh 4 bank komersial yang menguasai 60% dari total keseluruhan aset di sektor ini.	a. Mengevaluasi sektor perbankan nasional dan mempertimbangkan konsolidasi bank untuk mendorong daya saing perbankan dengan memfasilitasi penggabungan (*merger*) dan akuisisi.
II	**Memperbaiki Peringkat *Sovereign Credit Rating* dengan Menjaga Manajemen Fiskal dan Makroekonomi**
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Suku bunga kredit rata-rata di Indonesia di atas 8%, menunjukkan inefisiensi dalam pengelolaan dan alokasi dana • *Net Interest Margin* (NIM) yang tinggi di atas 4%. • Indonesia memiliki peringkat risiko negara yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain di kawasan.	a. **Mereformasi kebijakan suku bunga dan meninjau kembali kebijakan NIM** untuk mendorong efisiensi operasional. b. **Meningkatkan peringkat kredit suatu negara** melibatkan serangkaian strategi yang berfokus pada peningkatan stabilitas fiskal dan makroekonomi melalui antara lain: i. **Mengelola rasio utang terhadap PDB agar tetap pada level yang berkelanjutan dengan mengurangi defisit anggaran dan mengendalikan tingkat utang.** ii. **Meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan publik dan kebijakan fiskal termasuk menjalin komunikasi yang memadai kepada publik dan investor.** iii. **Memelihara stabilitas harga dan mengendalikan inflasi melalui kebijakan moneter yang efektif.** iv. **Mengambil langkah-langkah konsolidasi fiskal untuk mengurangi pengeluaran pemerintah yang tidak perlu dan meningkatkan efisiensi pengeluaran publik misalnya melalui reformasi subsidi, peningkatan sistem pajak untuk meningkatkan pendapatan, dan pengelolaan aset negara yang lebih baik.**
III	**Memperbaiki Pengelolaan Pinjaman Bermasalah**
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Rasio NPL yang mencapai 206,2% pada tahun 2023.	a. **Mempertimbangkan untuk meningkatkan jumlah penjualan pinjaman bermasalah (NPL) ke Perusahaan Pengelola Aset (AMC).**

Referensi

1. World Bank. (2024). *How Financial Deepening Can Contribute to Human Capital Development*. Diakses pada 3 Juli 2024, dari https://blogs.worldbank.org/en/psd/how-financial-deepening-can-contribute-human-capital-development
2. International Monetary Fund. (2015). *Fiscal Policy and Long-Term Growth*. Diakses pada 5 Juli 2024, dari https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1508.pdf
3. M2 meliputi M1 (uang kartal yang dipegang masyarakat dan uang giral), uang kuasi (mencakup tabungan, simpanan berjangka dalam rupiah dan valas, serta giro dalam valuta asing), dan surat berharga yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan satu tahun.
4. Mambu. (2024). *Disruption Diaries: SME Banking and Lending*. Diakses pada 7 Juli 2024, dari https://mambu.com/insights-hub/reports/disruption-diaries-sme-banking-and-lending
5. World Bank. (2022). *Indonesia Economic Prospects: Financial Deepening for Stronger Growth and Sustainable Recovery*. Diakses pada 7 Juli 2024, dari https://www.worldbank.org/in/country/indonesia/publication/indonesia-economic-prospects-iep-june-2022-financial-deepening-for-stronger-growth-and-sustainable-recovery
6. Badan Pusat Statistik. (2024). *Ekspor Desember 2023 Mencapai USD 22,41 Miliar, Naik 1,89 Persen Dibanding November 2023 dan Impor Desember 2023 Senilai USD 19,11 Miliar, Turun 2,45 Persen Dibanding November 2023*. Diakses pada 7 Juli 2024, dari https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/01/15/2298/ekspor-desember-2023-mencapai-us-22-41-miliar--naik-1-89-persen-dibanding-november-2023-dan-impor-desember-2023-senilai-us-19-11-miliar--turun-2-45-persen-dibanding-november-2023.html
7. Ibid.
8. World Bank. (2024). *Indicator: General Government Net Saving (% of GDP)*. Diakses pada 14 Juli 2024, dari https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNS.ICTR.ZS
9. Badan Pusat Statistik. (2024). *Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia: Februari 2024*. Diakses pada 8 Juli 2024, dari https://www.bps.go.id/id/publication/2024/06/14/574e2f9c7d3397fbd1754234/indikator-pasar-tenaga-kerja-indonesia-februari-2024.html
10. World Government Bonds. (2024). *Indonesia 10 Years Bond Historical Data*. Diakses pada 11 Juli 2024, dari https://www.worldgovernmentbonds.com/bond-historical-data/indonesia/10-years/
11. Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Updates on Indonesia*. Diakses pada 11 Juli 2024, dari https://www.ojk.go.id/iru/updatesonindo
12. *Non-Performing Loan* (NPL) adalah rasio kredit yang bermasalah terhadap kredit yang disalurkan perbankan.
13. World Bank. (2024). *Indicator: Non-Performing Loans (% of Total Gross Loans)*. Diakses pada 14 Juli 2024, dari https://data.worldbank.org/indicator/FB.AST.NPER.ZS?name_desc=false&skipRedirection=true&view=map
14. Statista. (2024). *Share of People Borrowing Credit from Financial Institutions in Indonesia by Population Type*. Diakses pada 14 Juli 2024, dari https://www.statista.com/statistics/942900/indonesia-share-people-borrow-credit-financial-institutions-by-population-type/
15. Statista. (2024). *Financial Institution Account Ownership Rate in Indonesia*. Diakses pada 14 Juli 2024, dari https://www.statista.com/statistics/941457/indonesia-financial-institution-account-ownership-rate/

"15 Rekomendasi Paket Kebijakan untuk Mendukung Agenda Pembangunan Presiden & Wakil Presiden Indonesia 2024 - 2029"

Fokus Area 12

Pasar Karbon:
Membiayai Implementasi Emisi Nol Bersih

12

IBC
Indonesian Business Council

Sumber Gambar: freepik

Pasar Karbon:
Membiayai Implementasi Emisi Nol Bersih

Misi Asta Cita No. 2 Prabowo-Gibran
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Program Prioritas No. 11 Prabowo-Gibran
Menjamin pelestarian lingkungan hidup.

Stakeholders: *Otoritas Jasa Keuangan (OJK); Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM); Kementerian Perindustrian; Kementerian Keuangan; Kementerian Pertanian; Kementerian Perhubungan; Badan Ekonomi Indonesia (BEI); Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI).*

> *Planet kita terus mengecil, kita punya masalah dengan perubahan iklim. Bagi kami, perubahan iklim bukan sesuatu yang teoritis. Banyak masyarakat yang kehilangan tanah, kehilangan rumahnya karena naiknya air laut.*
> ***Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia Periode 2024 - 2029***

Peran Krusial Pasar Karbon dalam Pencapaian Emisi Nol Bersih di Indonesia: Potensi Ekonomi dan Strategi Implementasi 2030

Indonesia adalah negara dengan emisi karbon terbesar ke-6 di dunia (1,2 $GtCO_2eq$)[1] di tahun 2022) dengan kontribusi sebesar 2,31% dari total emisi global pada tahun 2022.[2] Sebagai perbandingan, Cina berada di peringkat pertama dengan kontribusi sebesar 29,16%, disusul oleh Amerika Serikat (11,19%), India (7,33%), Rusia (4,80%), dan Brasil (2,44%).[3]

Gambar 12.1 Tren Emisi yang Dihasilkan Indonesia Terus Meningkat (1990-2022)

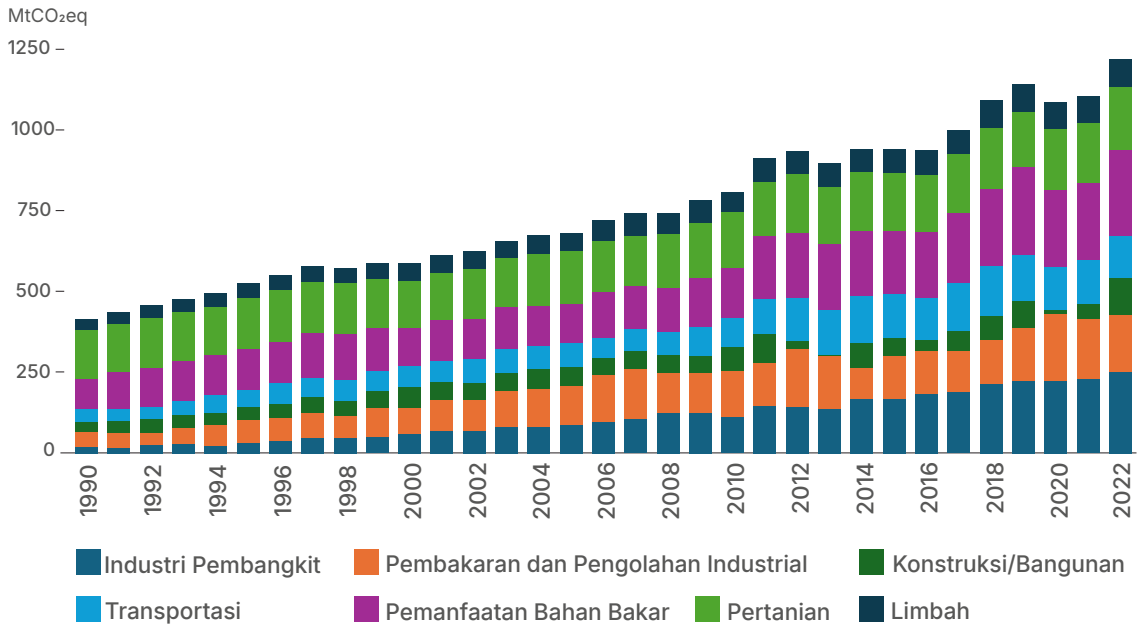

Sumber: Studi IBC, *Preparing an Innovative and Globally Competitive Carbon Market in Indonesia: Strategic Actions Towards An Impactful Carbon Market*, 2024

Di lain sisi, Indonesia memiliki 80% area penyerap karbon dunia, setara dengan potensi ekonomi hingga US$150 miliar jika dihargai 5 Dolar AS per ton CO_2.[4,5] Potensi ini didasarkan pada harga US$5 per ton CO_2eq, yang masih sangat rendah dibandingkan dengan harga kredit karbon Uni Eropa yang mencapai US$ 100 per ton CO_2eq.[6] Meskipun terdapat perkiraan lain dari Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi yang menyebutkan potensi pendapatan sebesar Rp3.000 triliun, nilai kredit karbon tetap signifikan.[7] Salah satu cara untuk mengutilisasi nilai kredit karbon adalah melalui mekanisme pasar karbon yang memungkinkan perdagangan kredit karbon. Mekanisme ini dapat mendorong investasi dalam teknologi bersih dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan Indonesia.

Atas potensi tersebut, Indonesia menggalakkan pasar karbon.[8] Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 31,89% secara mandiri (upaya sendiri) atau 43,2% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Target ambisius ini diukur terhadap skenario "*business-as-usual*" (BAU) pada tahun yang sama. Salah satu langkah konkret untuk mendukung pencapaian target tersebut dengan membentuk pasar karbon. yang memungkinkan pembiayaan untuk proyek pengurangan emisi. Langkah ini diatur dalam dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC) yang telah disepakati dalam Perjanjian Paris pada tahun 2015 dan ditingkatkan (*enhanced*) pada tahun 2022. NDC adalah komitmen suatu negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GHG).

Akselerasi pasar karbon didukung oleh Peraturan Presiden. Perpres No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Harga Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional berfungsi sebagai kerangka hukum untuk mengimplementasikan NDC menuju pembangunan rendah karbon dan tahan iklim. Peraturan ini juga mengatur penetapan harga karbon, termasuk skema perdagangan karbon, pajak karbon, dan pembayaran berbasis hasil.

Implementasi mekanisme harga karbon menjadi elemen penting dalam upaya Indonesia memenuhi komitmen NDC. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah maju pada tahun 2021 dengan memperkenalkan instrumen kunci seperti Sistem Perdagangan Emisi (*Emissions Trading System*/ETS) dan Pajak Karbon. Namun, hingga Oktober 2023, peraturan terkait Pajak Karbon belum diterapkan dan baru akan berlaku efektif pada tahun 2025.

Indonesia memiliki dua mekanisme perdagangan karbon, yaitu berbasis kepatuhan (*compliance-based*) dan sukarela (*voluntary*). Pasar karbon berbasis kepatuhan di Indonesia masih dalam tahap pengembangan awal, namun telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Diluncurkan pada Februari 2023, sektor pembangkit listrik menjadi sektor pertama yang tercakup dalam pasar karbon berbasis kepatuhan di Indonesia. Selanjutnya, pada September 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi meluncurkan IDX Carbon, sebuah platform perdagangan karbon berbasis kepatuhan dibawah Bursa Efek Indonesia (PT Bursa Efek Indonesia).

Keberhasilan implementasi pasar karbon bergantung pada kesediaan pelaku usaha yang terlibat di dalamnya. Untuk itu perlu mengevaluasi implikasi ekonomi dari pasar karbon dengan menilai tantangan dan potensi dalam instrumen pengurangan emisi (*Command-and-Control*, berbasis pasar, dan berbasis informasi). Studi IBC menunjukkan bahwa instrumen berbasis pasar adalah cara yang paling hemat biaya untuk mencapai jalur dekarbonisasi.

Saat ini, pemerintah terus berupaya mengembangkan sistem perdagangan karbon dan memberikan lebih banyak mekanisme pendukung bagi bisnis. Pasar karbon yang aktif sangat penting untuk mewujudkan visi Indonesia dalam mengurangi emisi GRK dan mencapai tujuan iklim. Untuk mencapai tujuan ini secara efektif, pemerintah harus mengatasi tantangan pasar karbon, yang dapat menghambat pengembangan pasar karbon sebagai daya tarik baru yang menarik bagi bisnis dan menjadi penghambat Indonesia dalam mencapai tujuan iklimnya.

Evaluasi Komitmen Pasar Karbon Indonesia

Sektor energi mendukung Indonesia untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah *(middle-income trap)* pada tahun 2045. Sektor energi berperan krusial dalam pembangunan ekonomi (menyerap 12,7 juta tenaga kerja di 2021) dan memberikan dampak positif terhadap lingkungan serta sebagai pengembangan energi bersih. Hal ini selaras dengan upaya mencapai pembangunan berkelanjutan, yang mencakup pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan. Oleh karena itu, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 memasukkan pengembangan ketahanan energi bersih berkelanjutan sebagai sub-pilar, selaras dengan pilar pembangunan manusia, penguasaan iptek, pembangunan ekonomi berkelanjutan, dan pembangunan yang merata.

Lebih lanjut, Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk penurunan emisi GRK dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Pada dokumen NDC, Indonesia menargetkan penurunan sebesar 31,89% (tanpa syarat) dan 43,2% (dengan syarat) pada tahun 2030. Selain itu, pada RPJMN 2020-2024 Indonesia menetapkan target peningkatan porsi EBT menjadi 23% pada tahun 2025. Pencapaian target ini akan dilakukan melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB).

Namun, manifestasi target ini membutuhkan biaya yang besar. Menurut Kementerian Keuangan Indonesia, dibutuhkan investasi sebesar US$4,4 triliun agar negara ini dapat memenuhi target iklimnya sesuai dengan NDC pada tahun 2030.

Gambar 12.2 Anggaran Ketahanan Iklim Indonesia (Rp triliun)

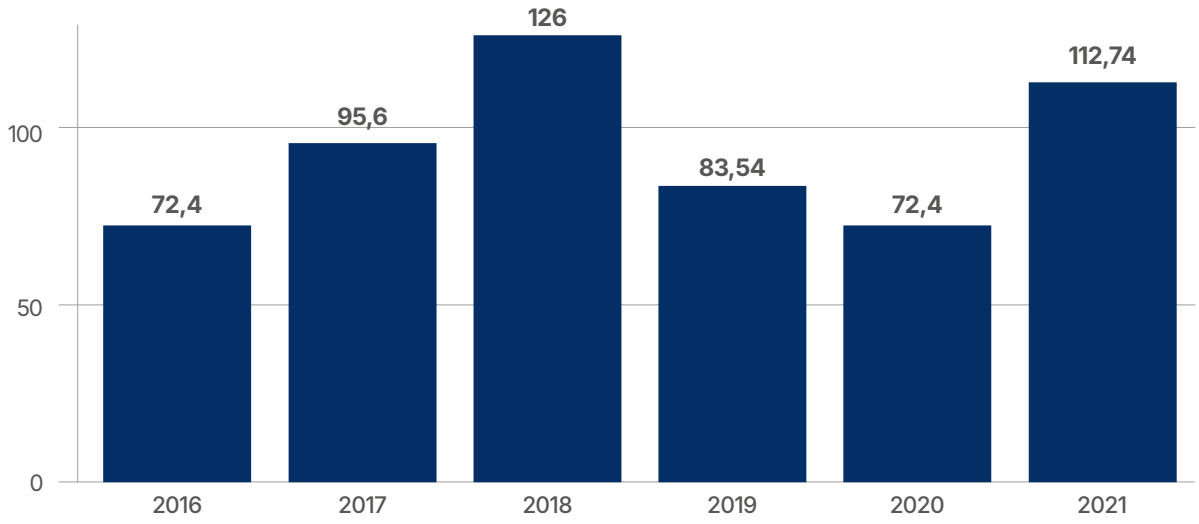

Sumber: Kementerian Keuangan

Untuk itu, Indonesia mengalokasikan lebih banyak dana pada isu iklim. Sejak pengesahan NDC pertama di tahun 2016, anggaran untuk isu ini naik pesat, hampir 50%. Tercatat, dana yang dikucurkan meningkat dari Rp72,4 triliun di tahun 2016 menjadi Rp126 triliun di tahun 2018. Mayoritas anggaran perubahan iklim Indonesia di tahun 2018 digunakan untuk kegiatan mitigasi (55%), diikuti adaptasi (34%), dan 11% sisanya dialokasikan untuk anggaran mitigasi yang juga bermanfaat bagi adaptasi.

Sayangnya, tren positif ini tidak bertahan lama. Alokasi anggaran kembali ke angka awal Rp72,4 triliun di tahun 2019 dan 2020. Namun, revisi NDC Indonesia di tahun 2021 tampaknya membangkitkan kembali komitmen pendanaan untuk isu iklim. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan alokasi anggaran yang mencapai Rp112,74 triliun.

Kondisi ini menunjukkan bahwa hanya mengandalkan anggaran nasional untuk pendanaan iklim berisiko tinggi. Diversifikasi sumber pendanaan melalui instrumen pembiayaan inovatif, akses pendanaan global, dan investasi swasta menjadi hal yang mutlak diperlukan. Salah satu alternatif pendanaan potensial yang bisa dipertimbangkan adalah melalui investasi swasta dan campuran dibawah skema Penetapan Harga Karbon.

Pasar karbon Indonesia berpotensi menghasilkan pendapatan yang besar Rp3.000-8.000 trilliun. Potensi ini dipengaruhi oleh ketersediaan kredit karbon berkualitas tinggi, kapasitas proyek pengimbangan/penyerapan emisi (*offsetting/insetting*), fluktuasi harga karbon, dan faktor lainnya.

Namun, untuk memaksimalkan potensi pendapatan tersebut, pemerintah perlu:

1. Mengembangkan peta jalan yang komprehensif dan inklusif untuk semua pemangku kepentingan, terutama pihak swasta sebagai *supplier* dan *buyer*, serta memastikan adanya dukungan institusional atau *champion* yang menjaga keberlangsungan peta jalan tersebut dalam jangka panjang.
2. Meningkatkan pengakuan kredit karbon melalui instrumen seperti SRN-PPI dan Taksonomi Berkelanjutan Indonesia (TBI), serta kerangka regulasi yang kuat erkait pendanaan dari BPDLH dan penetapan PTBAE.
3. Meregulasi standarisasi kredit karbon yang digunakan untuk *Voluntary Carbon Market* (VCM) untuk memastikan produksi kredit karbon berkualitas tinggi secara konsisten.

Selain potensi ekonomi, pasar karbon menawarkan dampak sosial dan lingkungan yang begitu besar. Pasar karbon tidak hanya dapat meningkatkan keterlibatan antar-industri, tetapi juga berpotensi memperkuat suara dan partisipasi masyarakat lokal. Selain itu, pasar karbon dapat menjadi alat transformatif dalam mengatasi keterbatasan anggaran iklim nasional dengan menghasilkan pendapatan tambahan untuk proyek-proyek belanja modal (CapEx) tinggi di sektor energi terbarukan.

2 Tantangan Utama Pasar Karbon: Sistemis dan Infrastruktur

Studi IBC mengenai Pasar Karbon telah mengidentifikasi 10 tantangan utama untuk memaksimalkan mekanisme dan implementasi Pasar Karbon di Indonesia yang mencakup area sistemik dan infrastruktur. Secara detail, tantangan tersebut diuraikan dalam tabel 12.1 berikut.

Tabel 12.1 Tantangan Pasar Karbon Indonesia

Kategori	Tantangan	Deskripsi
Sistemis	**Belum adanya *roadmap* perdagangan karbon**	Pemerintah Indonesia belum menerbitkan dokumen resmi yang mendetailkan rencana pengembangan perdagangan karbon di Indonesia secara menyeluruh.
	Konsep awal *roadmap* bursa karbon kurang detail	Fokus utama OJK hanya pada koordinasi antar K/L, kurang melibatkan pihak swasta dalam pengembangan pasar karbon.
	Kurangnya kolaborasi antar Kementerian/Lembaga (K/L)	Kurangnya sinergi antar K/L terkait, seperti KLHK, ESDM, dan Kementerian BUMN, berpotensi menghambat pengembangan pasar karbon.
	Kurangnya kolaborasi pemerintah-swasta	Kurangnya keterlibatan sektor swasta dalam pengembangan pasar karbon dapat berdampak pada ketidaksesuaian desain pasar dengan kebutuhan semua pihak.
Infrastruktur	**Masih adanya kesenjangan inovasi dalam RPJOK**	Rancangan POJK tentang Penyelenggaraan Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon belum menjelaskan secara rinci mengenai proses *Monitoring, Reporting, and Verification* (MRV) dan keterlibatan panel ahli internasional.
	Kurangnya pengakuan industri melalui bursa karbon dan taksonomi hijau	Indonesia belum memiliki kerangka kerja untuk mengakui dan memberi penghargaan kepada entitas di Pasar Karbon.
	Terbatasnya akses pengetahuan dan edukasi terkait pasar karbon	Minimnya pemahaman publik dan pelaku bisnis tentang mekanisme perdagangan karbon, termasuk metodologi berkualitas tinggi, potensi manfaat, dan signifikansi lingkungan.
	Kurangnya fasilitasi partisipasi industri	Proses penjualan kredit karbon internasional yang rumit dan kurangnya ahli terkait perdagangan karbon.
	Ketidakcukupan SRN-PPI sebagai registri nasional terpadu utama untuk karbon	Proses registrasi di SRN-PPI rumit dan kurangnya layanan pelanggan yang memadai.
	Kurangnya insentif untuk industri	Sistem harga karbon dan sistem pembayaran berbasis hasil yang ada belum secara optimal memberikan insentif finansial yang memadai bagi perusahaan untuk mengurangi emisi secara aktif.

Sumber: Studi IBC, *Preparing an Innovative and Globally Competitive Carbon Market in Indonesia: Strategic Actions Towards An Impactful Carbon Market*, 2024

Pemerintah telah mengambil langkah proaktif dengan mengeluarkan peraturan presiden tentang kerangka kerja pasar karbon di tahun 2021. Namun demikian, dibutuhkan upaya berkelanjutan untuk mengembangkan sistem perdagangan karbon dan menyediakan mekanisme pendukung bagi pelaku bisnis. Dengan mengatasi berbagai tantangan ini, diharapkan pasar karbon Indonesia dapat menjadi instrumen efektif dalam mencapai target iklim dan mendorong transisi menuju ekonomi berkelanjutan.

Navigasi Indonesia: Gagasan dan Komitmen Presiden-Wakil Presiden Republik Indonesia 2024 - 2029

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pencapaian *net zero emission* dan implementasi pasar karbon. Mereka menekankan pentingnya keberlanjutan lingkungan sebagai salah satu prioritas utama (Program Prioritas ke-12). Prabowo-Gibran berkomitmen untuk mempercepat pencapaian target pembangunan berkelanjutan, termasuk *net zero emission*. Salah satu cara yang diusulkan adalah dengan mengurangi jejak karbon (*carbon footprint*) dan jejak air (*water footprint*) dalam berbagai produk, serta memanfaatkan bioplastik dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam Asta Cita ke-3 dan ke-4, mereka juga menekankan pentingnya pengembangan infrastruktur, lapangan kerja yang berkualitas, dan penguatan pembangunan SDM. Hal ini mencakup peningkatan dana riset dan inovasi untuk mencapai 1,5-2,0% dari PDB dalam lima tahun, yang penting untuk mendukung inovasi di bidang energi hijau dan teknologi yang berkelanjutan. Selain itu, Prabowo-Gibran berfokus pada pembangunan ekonomi hijau dan biru, yang selaras dengan upaya mencapai *net zero emission* melalui pendekatan yang holistik terhadap pengelolaan sumber daya alam, pelestarian lingkungan, dan biodiversitas.

Mereka juga berencana untuk mendorong swasembada dalam sektor energi, yang mencakup penggunaan energi terbarukan dan pengembangan ekonomi hijau. Program ini termasuk dalam Asta Cita ke-3, yang menitikberatkan pada swasembada pangan, energi, dan air, yang semuanya penting dalam mencapai kemandirian dan kedaulatan negara di era globalisasi yang semakin menuntut tanggung jawab lingkungan.

Sumber Gambar: katadata/Ai

Rekomendasi Paket Kebijakan 12:

A	**Mengoptimalkan Partisipasi Dunia Usaha dan Pemain Industri dalam Pasar Karbon**
B	**Mengintegrasikan Sistem Data Karbon Nasional dan Batas Emisi**
C	**Memperkuat Peta Jalan Pasar dan Perdagangan Karbon**

Rincian Rekomendasi A: Mengoptimalkan Partisipasi Dunia Usaha dan Pemain Industri dalam Pasar Karbon

I	**Mengedukasi Pemain Industri untuk Proses *Matchmaking* dalam Pasar Karbon**
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Masih minimnya partisipasi *supply* maupun *demand* pada IDXCarbon sejak hari pertama bursa ini diluncurkan. • Tingkat pemahaman pihak swasta terhadap pasar karbon berbeda-beda, mengakibatkan kemampuan melihat dan memanfaatkan peluang sebagai *supplier* maupun *buyer* dari karbon cukup bervariasi. • Belum terdapat mekanisme *matchmaking* yang kuat dan model kerjasama yang kokoh untuk pasar karbon.	**a. Menyelaraskan pengembangan pasar karbon dengan target NDC melalui pendidikan pasar karbon yang komprehensif.** **b. Memperkuat kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat** yang didorong dengan pengawasan ahli dan tim operasional. **c. Membentuk *Indonesia Carbon Market Alliance*** untuk memajukan Pasar Karbon Indonesia bersama para *stakeholder.* **d. Membentuk *Carbon Market Knowledge Center* (CMKC)** yang bertujuan memperkuat wadah *matchmaking* antara pasokan dan permintaan karbon agar dapat menjadi *repository* serta memantik keterlibatan swasta melalui mekanisme pengakuan kontribusi karbon pihak-pihak swasta tersebut.
II	**Mengoptimalkan Pengakuan terhadap Inisiatif Hijau Dunia Usaha ke dalam Bursa Karbon**
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Dunia usaha memiliki keterlibatan dan partisipasi yang sangat terbatas dalam pasar karbon, dikarenakan minimnya pengakuan dari pemerintah terhadap *green initiatives*. • Taksonomi hijau belum mengakomodasi berbagai tipe kegiatan pengurangan karbon dari dunia swasta.	a. Meningkatkan pelibatan pemain industri dengan mengakui peranannya dalam pencapaian NDC, serta mempromosikan partisipasi yang kredibel di Taksonomi Berkelanjutan Indonesia. **b. Meningkatkan transparansi perdagangan karbon** dengan melibatkan pionir-pionir dunia usaha **serta memitigasi kekhawatiran *greenwashing*.** **c. Memperkuat komponen dan mekanisme taksonomi dan kerangka kerja berkelanjutan.**

III	Memperkuat Peran BPDLH dalam Mengakselerasi Investasi Iklim di Indonesia
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Mekanisme pendanaan dan fasilitas hibah yang telah ada belum memadai bagi pihak swasta dikarenakan keterbatasan akses dan diseminasi. • Belum adanya mekanisme yang jelas untuk mengukur dan menilai dampak sosial dari proyek-proyek yang didanai oleh BPDLH.	a. **Meningkatkan akses terhadap portal Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH)** agar insentif untuk industri semakin tinggi. b. **Meningkatkan fokus pada diseminasi informasi** yaitu dengan implementasi dari strategi komunikasi yang komprehensif dan secara aktif melibatkan BPDLH sebagai *focal point*. c. **BPDLH untuk memastikan pendanaan iklim sesuai dengan tujuan pembangunan sosial, seperti penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan UMKM.**
IV	**Menentukan *Champion* dari Pihak Swasta Dalam Pasar Karbon**
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Belum adanya pihak yang secara khusus menjaga keberlangsungan dari percepatan implementasi pasar karbon.	a. **Membentuk dan menetapkan tim akselerasi untuk membuat strategi implementasi pasar karbon di Indonesia.**
V	**Melibatkan UMKM dalam Pasar Karbon**
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Minimnya peluang dan partisipasi UMKM dalam mengambil peran di pasar karbon.	a. **Menciptakan skema yang memungkinkan keterlibatan UMKM dalam pasar karbon**. Misalnya dengan meniru apa yang sudah dilakukan di bursa saham dengan mewajibkan pelaku pasar dalam melibatkan UMKM.

Rincian Rekomendasi B: Mengintegrasikan Sistem Data Karbon Nasional dan Batas Emisi

I	Mengintegrasikan Sistem Database dan Registri Karbon Nasional
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Belum terdapat mekanisme manajemen informasi dan data yang mudah dipakai untuk pasar karbon. • Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) belum dapat mengakomodasi berbagai tipe kredit karbon dalam proses verifikasinya.	a. **Memperkuat peran SRN PPI** sebagai wadah kolaborasi antar pemangku kepentingan. b. **Menyederhanakan proses kerja** agar berfokus pada komponen registrasi dan verifikasi. c. **Meningkatkan *user interface and experience*** demi kenyamanan pengguna dalam menggunakan SRN PPI. d. **Mengimplementasikan sistem pemantauan, pelaporan, dan verifikasi (MRV) yang diakui secara internasional** untuk memungkinkan akses ke pasar global.

II	Mengembangkan Pasar Domestik dengan Menetapkan Batas Atas Emisi Nasional untuk Industri-Industri Utama
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Belum ditentukannya sektor prioritas transisi emisi serta perhitungan batas emisinya. • Batas emisi yang telah ada masih di tingkat nasional dan masih diperlukan kejelasan batas emisi untuk setiap entitas.	a. **Menghitung dan mendorong batas emisi melalui fase-fase yang sesuai di tingkat entitas.** b. **Menentukan sektor prioritas untuk transisi emisi bertahap** agar dapat meningkatkan likuiditas pasar. c. **Menyusun strategi perubahan transformatif terhadap desentralisasi batas emisi dari nasional ke tingkat entitas,** dengan melibatkan seluruh komponen Pemerintah.

Rincian Rekomendasi C: Memperkuat Peta Jalan Pasar dan Perdagangan Karbon

I	Menuntaskan Peta Jalan Pasar dan Perdagangan Karbon
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Belum kuatnya jalur koordinasi dan kejelasan peran antar Kementerian maupun pemangku kepentingan secara lebih luas. • Minimnya kapasitas manajerial maupun teknis untuk memetakan jalan pasar karbon di Indonesia. • Belum adanya peta jalan yang secara formal menjadi panduan pasar karbon di Indonesia.	a. **Menjadikan Pasar Karbon sebagai prioritas strategis nasional yang dikawal melalui PMO Nasional.** b. **Menyusun *roadmap* pasar karbon dan menetapkan target** capaian pemasukan dan investasi dari pasar internasional. c. **Kementerian teknis perlu menentukan *focal point* yang sesuai amanah dalam Instruksi Menteri KLHK No. 21 Tahun 2022.** d. **Membentuk tim ahli profesional** antara lain yang memiliki kemampuan teknis perhitungan karbon, *political economy*, manajemen bisnis, serta pemahaman akan kolaborasi multi pihak dalam perumusan peta jalan. e. **Menentukan peran dari setiap pemangku kepentingan di tingkat teknis** untuk menyelesaikan mekanisme pengelolaan rantai pasok dan permintaan, serta memastikan kebijakan yang ditetapkan konsisten dengan implementasinya.
II	**Mengkaji Kembali Peta Jalan *Carbon Exchange***
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Praktik-praktik pengembangan peta jalan *carbon exchange* selama ini belum melihat kepada contoh-contoh praktik terbaik di tingkat internasional. • Belum adanya target yang secara jelas ditetapkan terhadap mekanisme kerja *carbon exchange*.	a. **Memasukan praktik-praktik terbaik yang ada pada tingkat global ke konteks Indonesia, dengan melibatkan ahli industri** dan memastikan peta jalannya sejalan dengan prinsip spesifik dan terukur serta memiliki tenggat waktu yang jelas.

Referensi

1. Gigaton Carbon Dioxide Equivalent.
2. European Commission. (2023). *EDGAR Report 2023*. Diakses pada 5 Juli 2024, dari https://edgar.jrc.ec.europa.eu/report_2023
3. Ibid.
4. CNBC Indonesia. (2021). *Luhut: RI Kuasai Hingga 80% Cadangan Karbon Dunia*. Diakses pada 5 Juli 2024, dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20210505111302-4-243311/luhut-ri-kuasai-hingga-80-cadangan-karbon-dunia
5. Kompas. (2023). *Menanti Kehadiran Bursa Karbon*. Diakses pada 8 Juli 2024, dari https://www.kompas.id/baca/opini/2023/07/21/menanti-kehadiran-bursa-karbon
6. Kontan. (2023). *IBC Sebut Pentingnya Penguatan Ekosistem Pasar Karbon di Indonesia*. Diakses pada 11 Juli 2024, dari https://investasi.kontan.co.id/news/ibc-sebut-pentingnya-penguatan-ekosistem-pasar-karbon-di-indonesia
7. CNBC Indonesia. (2023). *Anak Buah Luhut Ungkap Potensi Dagang Karbon Lebih Rp3.000 T*. Diakses pada 14 Juli 2024, dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20230926181855-4-475759/anak-buah-luhut-ungkap-potensi-dagang-karbon-lebih-rp3000-t
8. Pasar Karbon adalah sistem perdagangan tempat kredit karbon diperdagangkan. Melalui mekanisme ini, tercipta ekosistem pertukaran karbon dan emisi gas rumah kaca sebagai komoditas utama. Emisi tersebut dapat diperdagangkan antar berbagai pemangku kepentingan, mulai dari negara, pemerintah, pelaku bisnis, hingga individu yang mengeluarkan emisi Gas Rumah Kaca (GHG) ke atmosfer (United Nations Development Programme [UNDP], 2024, *Pasar Karbon: Sistem Perdagangan Tempat Kredit Karbon Diperdagangkan*. Diakses pada 14 Juli 2024, dari https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/environment-energy/sustainable_energy/carbon-market.html)

"15 Rekomendasi Paket Kebijakan untuk Mendukung Agenda Pembangunan Presiden & Wakil Presiden Indonesia 2024 - 2029"

Fokus Area 13

2 Juta Mobil Listrik dan 13 Juta Motor Listrik:

Menjamin Swasembada Energi dan Mempercepat Realisasi Transisi Energi

13

IBC
Indonesian Business Council

Sumber Gambar: freepik

2 Juta Mobil Listrik dan 13 Juta Motor Listrik: Menjamin Swasembada Energi dan Mempercepat Realisasi Transisi Energi

Misi Asta Cita 2 Prabowo-Gibran
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Misi Asta Cita 5 Prabowo-Gibran
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Stakeholders: *Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves); Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian); Kementerian Perhubungan (Kemenhub); Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM); Kementerian Perindustrian (Kemenperin); Kementerian Keuangan (Kemenkeu); Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN); Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (Kementerian Investasi/BKPM).*

> *Satu kebijakan, merubah nasib satu bangsa. Nikel mau saya naikkan (nilai tambahnya) 67 kali. Nanti kita akan bikin mobil-mobil buatan Indonesia dari listrik. Kita tak mau hanya jadi pasarnya orang lain.*
> ***Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia Periode 2024 - 2029***

Mengurangi Impor BBM Melalui Elektrifikasi Kendaraan

Dalam 10 tahun terakhir (2012-2022), Indonesia menjadi net importir BBM (lihat Gambar 13.1),[1,2] dengan tren konsumsi yang meningkat (5,3%), dan produksi yang menurun (-6,6%). Kesenjangan antara produksi dan konsumsi ini memaksa pemerintah untuk mengimpor BBM dalam jumlah besar. Rencana pengurangan impor terhambat karena kapasitas kilang minyak tidak banyak bertambah selama 19 tahun terakhir.[3] Selain itu, kinerja produksi *lifting* minyak diperkirakan terus menurun akibat semakin berkurangnya produktivitas sumur-sumur tua dan belum berhasilnya eksplorasi untuk menemukan sumur baru.[4]

Gambar 13.1 Produksi Minyak Domestik Belum dapat Memenuhi Konsumsi BBM yang Terus Meningkat

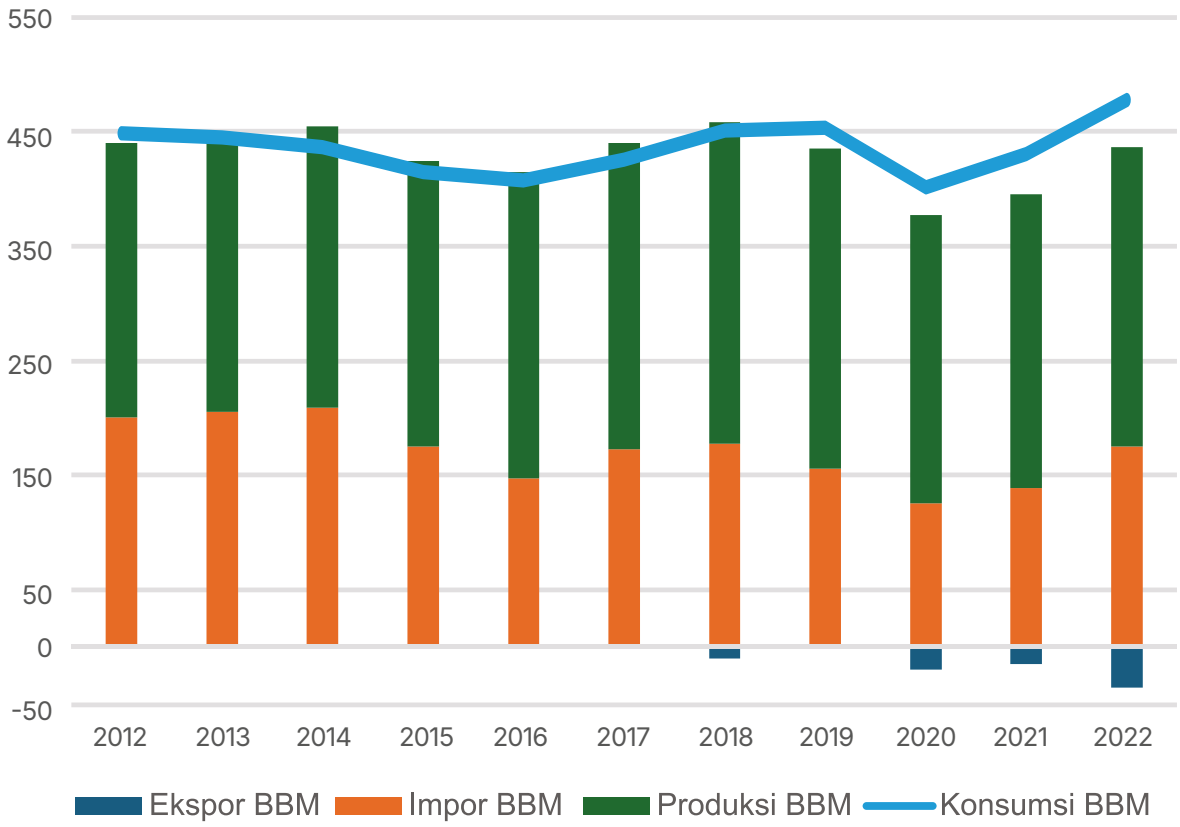

Sumber: HEESI, 2022

Kebanyakan impor BBM di Indonesia berbentuk bensin (*gasoline*) dan solar (*gasoil*), yang banyak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor. Pada tahun 2022, impor BBM mencapai 347.625 barrel per hari (bph), dengan komposisi bensin mencapai 275.214 bph atau 79,2% dari total impor, dan sisanya adalah adalah solar.[5] Ini disebabkan antara lain tren pertumbuhan kendaraan motor yang pesat. Jumlah sepeda motor di dalam negeri bertambah 48,9 juta unit (64%) selama 2012-2022.[6]

Penggunaan BBM untuk transportasi menjadi tantangan bagi lingkungan dan kualitas hidup. Bahan bakar fosil menyumbang 21,4% dari emisi gas rumah kaca (GRK) Indonesia pada tahun 2022.[7] Selain itu, hasil pembakaran BBM oleh sektor transportasi berkontribusi pada memburuknya kualitas udara di perkotaan. Kawasan metropolitan Jakarta (Jabodetabek) termasuk dalam 10 kota dengan kualitas udara terburuk di dunia.[8,9] Berdasarkan studi IESR, emisi dari sektor transportasi akan bertambah 53% antara tahun 2015 dan 2030, dan akan terus meningkat hampir dua kali lipat antara tahun 2030 dan 2060.[10]

Untuk mengatasi masalah di atas, Pemerintah telah menyusun strategi *Net Zero Emission* (NZE) tahun 2060.[11,12] Strategi tersebut mencakup:

1. Melakukan elektrifikasi transportasi, barang rumah tangga, alat industri, dan lainnya.
2. Mengembangkan energi baru dan terbarukan (EBT) melalui sistem *off-grid*,[13] *on-grid*,[14] & BBN (bahan bakar nabati).
3. Memberlakukan moratorium pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) baru dan inisiatif pensiun dini bagi PLTU eksisting.
4. Menerapkan *Carbon Capture and Storage* (CCS) atau *Carbon Capture, Utilization, and Storage* (CCUS).
5. Mengeksplorasi pemanfaatan sumber energi baru, seperti hidrogen dan amonia.
6. Menerapkan dan mereformasi kebijakan efisiensi energi.

Pengurangan impor BBM dapat dicapai dengan memadukan inisiatif biofuel dengan elektrifikasi kendaraan. Program swasembada energi, mengurangi ketergantungan impo BBM, melalui program pengembangan biofuel sudah menjadi agenda utama Presiden dan Wakil Presiden Terpilih. Selain itu, kendaraan listrik menggunakan daya yang dapat berasal dari beragam sumber energi sehingga mengurangi ketergantungan pada BBM sehingga dapat juga mendukung agenda pencapaian swasembada energi.

Transisi dari kendaraan berbasis BBM menuju kendaraan listrik baik bagi lingkungan dan ekonomi. Berdasarkan studi IESR, kendaraan listrik menghasilkan emisi 7% lebih rendah dan biaya operasional 14% lebih rendah daripada kendaraan BBM.[15] Kendaraan listrik juga dapat menghemat biaya bahan bakar dan perawatan hingga Rp17,62 juta per tahun. Di tingkat nasional, per tahunnya 1 juta mobil listrik bisa memangkas impor BBM 1,5 juta kilo liter (hemat devisa hingga Rp13,02 triliun) dan menurunkan emisi CO_2 3,21 juta ton.[16]

Transisi sumber energi dari batubara ke EBT akan membuat kendaraan listrik lebih ramah lingkungan. Penggunaan kendaraan listrik diharap dapat mendorong PLN untuk mempercepat diversifikasi sumber energinya, sejalan dengan komitmen global untuk memerangi perubahan iklim. Diversifikasi sumber energi ini tak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga meningkatkan ketahanan energi nasional dengan mengurangi ketergantungan pada impor BBM. Untungnya, biaya teknologi elektrifikasi semakin menurun dengan tren pengembangan EBT di berbagai belahan dunia.[17]

Transisi energi perlu dilakukan dengan menjaga keseimbangan antara pengurangan emisi karbon dan keterjangkauan harga. Keseimbangan ini menjadi komitmen pemerintah, sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, "Strategi Kementerian ESDM mencakup dua hal utama. Pertama, memastikan bahwa Indonesia mencapai NZE pada tahun 2060. Kedua, memastikan penyediaan listrik tidak hanya terjangkau dan bersih, tetapi juga sejalan dengan ketersediaan sumber daya yang ada."[18]

Sumber Gambar: katadata/Ai

Identifikasi Tantangan Utama Membangun Ekosistem Kendaraan Listrik di Indonesia

Pemerintah telah mendukung pengembangan elektrifikasi kendaraan, antara lain melalui:

1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 4 Tahun 2017 tentang Pengembangan Infrastruktur dan Penggunaan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai untuk mengatur pembangunan infrastruktur pengisian daya listrik dan memberikan insentif bagi penggunaan kendaraan listrik.
2. Peraturan Menteri Perhubungan No. 61 Tahun 2019 tentang Kendaraan Listrik Berbasis Baterai yang Digunakan di Jalan yang menetapkan persyaratan teknis dan prosedur pengujian untuk kendaraan listrik di jalan raya.
3. Kebijakan Fiskal termasuk pembebasan pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) dan pemotongan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi kendaraan listrik yang memenuhi persyaratan TKDN minimal 40%.
4. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2021 tentang Pengendalian Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor yang mengatur standar emisi gas buang untuk kendaraan bermotor, termasuk kendaraan listrik, sebagai bagian dari upaya pengendalian polusi udara.
5. Kementerian Perindustrian menerbitkan Peta Jalan Pengembangan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai pada tahun 2023.

IESR mengidentifikasi sejumlah tantangan utama pengembangan kendaraan listrik di Indonesia. Di antaranya adalah:

Dari Sisi Konsumen

1. **Kendaraan berbasis BBM yang dikonversi menjadi kendaraan listrik memiliki masa garansi yang pendek.** Kebanyakan berkisar antara 6 bulan hingga 1 tahun, bahkan beberapa tidak memiliki masa garansi sama sekali. Sebagai perbandingan, suku cadang untuk motor listrik roda dua baru biasanya dilengkapi dengan garansi selama 2 tahun. Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang program konversi dan minimnya pengalaman konsumen dalam menggunakan motor yang telah dikonversi menyebabkan rendahnya kepercayaan konsumen.
2. **Fasilitas pendukung (*service & spare parts*) terbatas.** Hingga Mei 2024, terdapat sekitar 50 perusahaan servis dan suku cadang kendaraan listrik di Indonesia. Jumlah ini masih jauh dari kebutuhan pasar yang terus meningkat.
3. **Terbatasnya kawasan atau zona khusus EV**. Baru sedikit pusat perbelanjaan dan gedung perkantoran yang menyediakan tempat parkir khusus kendaraan listrik. Hanya dua kawasan LEZ (*low emission zone*) yang tersedia yaitu Kota Tua dan Tebet Eco Park Jakarta.
4. **Standarisasi *spare part***. Saat ini, kendaraan listrik roda empat ringan (E4W) dengan *port* GB/T mendominasi pasar, sayangnya, *port* ini tidak mendukung pengisian cepat. Selain itu, tidak semua kendaraan roda dua (E2W) dapat menggunakan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU) karena kapasitas dan ukuran baterai yang beraneka ragam dan tidak standar.

Dari Sisi Ekosistem Industri EV

1. **Insentif yang terbatas.** Insentif bagi kendaraan listrik lebih banyak tertuju pada peningkatan penjualan (sisi permintaan) daripada produksinya (sisi pasokan). Insentif fiskal yang ada baru sebatas pembebasan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), sedangkan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan pajak kendaraan bermotor (PKB) baru akan berlaku pada tahun 2025, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
2. **Regulasi EV yang belum menyeluruh.** Indonesia mendorong industri EV melalui *local content requirement* (LCR). Namun, kebijakan LCR belum bersifat wajib untuk penjualan B2C (*Business-to-Consumer*), sehingga beberapa produsen EV memilih untuk tidak mengikuti penilaian LCR.

3. **Produksi baterai yang terbatas dan belum *end-to-end*.** Meski kaya akan nikel Indonesia masih tertinggal sebagai produsen baterai EV dari hulu ke hilir (*end-to-end*). Di lain sisi, dengan SDA tidak sebesar Indonesia, China dapat menjadi produsen mobil listrik terbesar dan terkuat di dunia saat ini.[19] Pabrik LFP (*lithium ferrous phosphate*) di Indonesia diperkirakan hanya memiliki kapasitas produksi sebesar 4 MWh per tahun (setara 31.000 unit baterai per hari), sedangkan permintaan baterai mencapai 329 MWh pada tahun 2022.
4. **Rantai pasok yang belum terintegrasi.** Investasi US$20 miliar telah digelontorkan ke rantai pasok EV dalam negeri, namun integrasinya belum terwujud. Sebagai contoh, beberapa produsen baterai dan pabrik daur ulang diperkirakan baru akan beroperasi tahun 2025. Saat ini hanya terdapat satu pabrik daur ulang baterai di Indonesia, yaitu PT Recyclindo Karya Logam di Bekasi. Kapasitasnya sekitar 2.000 ton per tahun, sedangkan Indonesia menghasilkan limbah baterai sekitar 6.000 ton per tahun.
5. **Infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang terbatas dan tidak merata.** Pada Mei 2024, terdapat sekitar 300 SPKLU di seluruh Indonesia. Ini masih jauh dari target pemerintah, yaitu 17.500 pada tahun 2025. Biaya investasi SPKLU yang tinggi, antara Rp750 juta hingga Rp1,5 miliar per unit, antara lain disebabkan oleh Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MEMR) No. 13 Tahun 2020 yang mewajibkan setiap SPKLU menyediakan tiga jenis *port* pengisian yang berbeda untuk mengakomodir sistem pengisian yang berbeda pula antar kendaraan.

Dari Sisi *Supply*: Energi Bersih

1. **Biaya investasi yang tinggi dan terbatasnya pembiayaan.** Dalam laporan *Indonesia Energy Transition Outlook* IRENA, Indonesia membutuhkan investasi sebesar US$314,5 miliar selama periode 2018-2030 untuk mewujudkan komitmen 1,5°C dalam Perjanjian Paris. Namun, akses pendanaan EBT di Indonesia masih terbatas. Bank-bank lokal belum banyak menawarkan pembiayaan untuk proyek EBT.[20]
2. **Indonesia juga memiliki potensi panas bumi/geotermal sebagai EBT untuk pembangkit listrik yang belum dimanfaatkan secara maksimal.** Potensi panas bumi Indonesia sebesar 23.465,5 Megawatt (MW) atau terbesar kedua di dunia, namun baru 9,8% (2.342,63 MW) yang dimanfaatkan. Menurut studi LPEM FEB UI tahun 2023, tantangan pengembangan geotermal terletak pada:[21]
    a. **Perizinan yang birokratis.** Proses persetujuan lingkungan dan tata ruang yang panjang dan rumit sering menjadi hambatan utama dalam pengembangan panas bumi di Indonesia. Sistem *online single submission* berbasis risiko yang baru diterapkan memperlama proses perizinan hingga lebih dari satu tahun, dibandingkan tiga bulan pada sistem sebelumnya.
    b. **Risiko finansial dan regulasi.** Pengembang menghadapi risiko yang tinggi di setiap fase pengembangan panas bumi, terutama pada fase eksplorasi. Selain itu, ketidakpastian harga listrik, regulasi yang kompleks, dan keterbatasan insentif pemerintah menyulitkan perencanaan dan pengelolaan keuangan proyek.
    c. **Keterbatasan teknologi dan TKDN.** Kesulitan memenuhi kewajiban tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) menambah kompleksitas dan biaya. Ditambah, pengembang menghadapi kesulitan menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dan memastikan tersedianya komponen lokal.
    d. **Durasi dan lokasi geografis.** Eksplorasi yang memakan waktu lama serta lokasi sumber daya yang sering terletak di daerah terpencil menambah risiko dan biaya proyek. Keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil juga menambah kompleksitas logistik dan meningkatkan risiko keterlambatan proyek.
    e. **Ketidakpastian produksi dan pendapatan.** Risiko produksi yang tidak terduga, seperti penurunan laju aliran uap, dapat mengurangi pendapatan proyek dan mempengaruhi kemampuan pengembang untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu, ketidakpastian harga listrik dan keterbatasan pengembang untuk menetapkan harga yang mencerminkan biaya produksi juga menjadi tantangan.

Navigasi Indonesia: Gagasan dan Komitmen Presiden-Wakil Presiden Republik Indonesia 2024 - 2029

Prabowo-Gibran terus-menerus menegaskan komitmennya pada swasembada energi, salah satunya melalui transisi energi hijau. Mengurangi ketergantungan pada BBM dengan cara transisi pada energi hijau dan adopsi kendaraan listrik juga disampaikan secara jelas dalam Visi Misi Prabowo Gibran Asta Cita 2 tentang memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa, salah satunya, melalui swasembada energi.

Prabowo-Gibran memiliki setidaknya 6 inisiatif untuk mensukseskan transisi energi hijau.[22]

1. Memperluas konversi BBM kepada gas dan listrik untuk kendaraan bermotor. Meningkatkan dan menambah porsi energi baru dan terbarukan dalam bauran listrik PLN.
2. Mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus menjadikan Indonesia sebagai raja energi hijau dunia (*super power*) dalam bidang energi baru dan terbarukan (*renewables*) dan energi berbasis bahan baku nabati (*bioenergy*).
3. Memperbaiki skema insentif untuk mendorong penemuan cadangan sumber energi baru untuk meningkatkan ketahanan dan kedaulatan energi nasional.
4. Merevisi semua tata aturan yang menghambat untuk meningkatkan investasi baru di sektor EBT.
5. Melanjutkan program mempensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (*coal-fired power plant retirement*) berdasarkan pada asas keadilan dan keberimbangan.
6. Mengembangkan produk biodiesel dan bioavtur dari sawit, bioetanol dari tebu dan singkong, serta energi hijau lainnya dari angin, matahari, dan panas bumi.

Selain itu, Asta Cita 5 menggarisbawahi pentingnya melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ini akan dilakukan melalui pengembangan hilirisasi untuk pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan melanjutkan infrastruktur penunjang hilirisasi dan industrialisasi. Industri kendaraan listrik memenuhi ketentuan di atas, dan Prabowo-Gibran berkomitmen untuk mendorong adopsi kendaraan listrik untuk transportasi umum.

Presiden Terpilih Prabowo Subianto juga menegaskan komitmennya dalam *Qatar Economic Forum* 2024, bahwa di bawah pemerintahannya, Indonesia akan beralih ke energi hijau dengan mengurangi penggunaan BBM.[23] Prabowo yakin dengan kesuksesan transisi energi ini, Indonesia dapat menekan impor sekaligus mendongkrak pertumbuhan ekonominya.

Sumber Gambar: katadata/Ai

Rekomendasi Paket Kebijakan 13:

A	**Meningkatkan Pengguna Kendaraan Listrik dan Membangun Ekosistem Hulu-Hilir Industri EV dalam Negeri**
B	**Mempercepat Transisi Energi Bersih untuk Mendukung Elektrifikasi EV yang Ramah Lingkungan**

Rincian Rekomendasi A: Meningkatkan Pengguna Kendaraan Listrik dan Membangun Ekosistem Hulu-Hilir Industri EV dalam Negeri

I Memberikan Insentif untuk Meningkatkan Penggunaan Kendaraan Listrik

Kondisi Eksisting	Rekomendasi
• Dibutuhkannya insentif yang cukup dan menarik untuk memastikan masyarakat menggunakan kendaraan listrik.	a. **Memberikan insentif untuk pengguna kendaraan listrik,** termasuk kemudahan administrasi, pembebasan pajak, serta diskon tarif parkir, tarif tol, dan tarif pengisian daya di SPKLU. b. **Memprioritaskan insentif untuk pengadaan transportasi umum bertenaga listrik dan sepeda motor listrik (E2W).**

II Menstandarisasi dan Memperluas Infrastruktur SPKLU

Kondisi Eksisting	Rekomendasi
• Terbatasnya kebijakan mandatori EV terutama untuk lingkup instansi atau perusahaan. • Terdapat peraturan terkait pemenuhan TKDN yang belum menyeluruh dan masih bersifat opsional.	a. **Memperluas dan mempercepat penerapan mandatori kendaraan listrik oleh instansi pemerintah dan pasar B2B** sebagai *early adopters* untuk merangsang pasar EV. b. **Mendorong produksi kendaraan listrik *multi-purpose* (MPV) dengan kapasitas 5-7 penumpang di kisaran harga Rp300-500 juta melalui pemberian insentif.** c. **Memperketat regulasi emisi kendaraan berbahan bakar fosil dan memberikan insentif ekonomi tambahan bagi pemilik kendaraan listrik.** d. **Meningkatkan implementasi TKDN secara progresif dan menyeluruh** dengan tetap mempertimbangkan keperluan dan kondisi industri dalam negeri.

III Mengembangkan Inovasi Model Pembiayaan Kendaraan Listrik

Kondisi Eksisting	Rekomendasi
• Tingginya biaya awal dan besarnya nilai depresiasi kendaraan listrik menjadi hambatan utama bagi konsumen, meskipun biaya operasional dan pemeliharaannya cenderung lebih rendah dari kendaraan bensin.	a. **Mengembangkan berbagai model pembiayaan inovatif** seperti *leasing*, *subscription*, dan *flexible loan* dengan mempertimbangkan karakteristik dan sifat kendaraan listrik dan penggunanya. **Mengembangkan program DP (*Down Payment*) rendah untuk pembelian kendaraan listrik dengan skema yang menarik.**

IV	Memperbanyak Kawasan Rendah Emisi (LEZ)
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Hanya 2 kawasan LEZ yang tersedia yaitu Kota Tua dan Tebet Eco Park Jakarta.	a. **Memberikan pedoman terkait pengembangan dan pelaksanaan LEZ bersama K/L terkait** untuk kota-kota di seluruh Indonesia, serta memberikan penghargaan bagi pemerintah daerah yang mengimplementasikannya.
V	**Meningkatkan Lokalisasi Produksi Material dan Industri Kendaraan Listrik (EV)**
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Belum adanya industri komponen EV yang dirakit atau dibuat di Indonesia menyebabkan domestikasi bahan baku EV belum *end-to-end*. • Produksi baterai untuk EV sangat terbatas dengan kapasitas produksi sebesar setara 10 GWh per tahun, sedangkan permintaan baterai mencapai 750 GWh, naik 40% dari tahun sebelumnya yang 314 GWh.[24,25] • Tingginya biaya pembangunan infrastruktur, contoh: biaya investasi SPKLU mencapai Rp750 juta hingga Rp1,5 miliar.[26]	a. **Mengembangkan kawasan industri terpadu khusus produksi material EV** yang didukung infrastruktur logistik yang memadai. b. **Memberikan insentif kepada industri EV yang memenuhi syarat TKDN**, termasuk pada proyek investasi infrastruktur pengisian daya listrik dan industri transportasi publik EV (bus listrik atau angkot listrik). c. **Memberikan insentif kepada lembaga pendidikan** yang melakukan penelitian terkait teknologi EV dengan mempertimbangkan faktor-faktor pengaplikasian dalam industri.
VI	**Memperbanyak Jumlah dan Meningkatkan Teknologi Infrastruktur SPKLU**
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Saat ini, beberapa stasiun pengisian listrik belum mendukung pengisian cepat pada kendaraan listrik roda empat yang mendominasi pasar kendaraan listrik.	a. **Mempercepat dan memperluas adopsi teknologi pengisian daya cepat secara masif melalui peningkatan investasi dalam infrastruktur SPKLU.** b. **Mendorong adopsi sistem *swap* baterai pada transportasi publik dengan target yang jelas, terutama bus, melalui pemberian insentif kepada operator.** c. **Memberikan kemudahan perizinan dan administrasi, serta insentif fiskal** bagi penyelenggara infrastruktur SPKLU.
VII	**Mengembangkan Industri Baterai dan Fasilitas Daur Ulang Baterai**
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Minimnya kapasitas pabrik daur ulang baterai di Indonesia yang hanya sekitar 1.200 ton per tahun.[27]	a. **Meningkatkan investasi dalam pengembangan dan produksi baterai listrik lokal, termasuk melalui kolaborasi dengan perusahaan global.** b. **Mengembangkan industri daur ulang baterai** dan melakukan kerja sama dengan *industry leader* pada bidangnya untuk mempercepat transfer pengetahuan dan teknologi. c. **Menerbitkan kebijakan yang mendorong pembangunan fasilitas daur ulang baterai melalui insentif atau disinsentif** kepada investor atau produsen baterai.

VIII	Memastikan Ketersediaan Pasokan Bahan Baku Industri Kendaraan Listrik
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Indonesia telah mulai menggalakkan hilirisasi, termasuk pada komoditas bahan baku industri kendaraan listrik, seperti nikel, kobalt, dan tembaga.	a. **Mendukung penguatan *value chain* industri kendaraan listrik dengan melanjutkan pemberian dukungan kepada sektor hulunya,** seperti industri pertambangan nikel, kobalt, tembaga, alumunium, dll.

Rincian Rekomendasi B: Mempercepat Transisi Energi Bersih untuk Mendukung Elektrifikasi EV yang Ramah Lingkungan

I	Melakukan Terobosan Pembiayaan untuk EBT
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Terdapat keterbatasan dukungan dan skema pembiayaan yang menarik pada sektor EBT. • Realisasi investasi energi baru dan terbarukan (EBT) hanya mencapai Rp18 triliun atau 64,94% dari target tahun 2023. Angka tersebut masih dibawah realisasi tahun 2022 sebesar Rp25 triliun.[28]	a. **Memberikan insentif, keringanan pajak, dan nilai kredit karbon yang menarik kepada perusahaan yang berinvestasi dalam energi terbarukan.** b. **Meningkatkan penerbitan obligasi hijau** oleh pemerintah untuk mendanai proyek energi terbarukan. c. **Mengakses pembiayaan di luar negeri melalui penguatan strategi diplomasi dan terobosan skema pengelolaan dana.** d. **Mengembangkan skema pembiayaan alternatif** seperti *crowdfunding* dan *crowdlending* untuk proyek pembangkit energi terbarukan (EBT). Sebagai referensi, program *WeShareSolar* di Belanda yang berhasil mendanai pengembangan proyek solar melalui *crowdfunding*.

II	Mengembangkan Pasar Karbon yang Berkelanjutan	
	• Masih terbatasnya mekanisme manajemen informasi dan data yang mudah digunakan untuk pasar karbon. • Masih terbatasnya mekanisme *matchmaking* dan model kerjasama yang optimal untuk pasar karbon. • Bervariasinya pemahaman sektor publik dan swasta tentang pasar karbon berpotensi menghambat implementasinya.	a. Menjadikan Pasar Karbon sebagai **prioritas strategis nasional.** **b. Membentuk *Indonesia Carbon Market Alliance*** untuk memajukan pasar karbon Indonesia bersama para *stakeholder*. **c. Menyusun *Roadmap* Pasar Karbon dan menetapkan target capaian pemasukan dan investasi dari pasar internasional.** **d. Mengembangkan pasar domestik dengan menetapkan batas atas emisi nasional untuk industri-industri utama.** **e. Meningkatkan kapasitas Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI)** dalam manajemen data dan informasi terkait emisi dengan fokus pada pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data serta implementasi tata kelola pelaporan yang akurat dan *real-time*. **f. Membentuk *Carbon Market Knowledge Center* (CMKC)** untuk memperkuat wadah *matchmaking* antara pasokan dan permintaan karbon serta memberikan pelatihan yang komprehensif kepada sektor publik dan swasta. **g. Membentuk tim akselerasi** yang bertugas menyusun dan mengawal implementasi strategi pasar karbon di Indonesia.
III	**Memperbaiki Tata Kelola Sektor Kelistrikan untuk Menciptakan Iklim Investasi EBT yang Lebih Menguntungkan bagi Semua Pihak**	
	Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
	• Masih belum optimalnya peraturan dan tata kelola dalam pengembangan proyek-proyek EBT.	**a. Memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar *stakeholders* di sektor publik dan swasta** dalam rangka menciptakan iklim investasi dan kebijakan yang lebih menguntungkan bagi semua pihak. **b. Menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan** pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT. **c. Meningkatkan ketersediaan data potensi EBT yang rinci, terverifikasi, dan handal** untuk dapat digunakan dalam pengembangan proyek-proyek EBT.

IV	Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pengembangan EBT
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Potensi EBT bersifat lokal dan pemerintah daerah sudah ada amanah untuk menyusun Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Namun, *awareness* dan kapasitas pemerintah lokal masih belum memadai sehingga dapat menghambat pengembangan EBT.	a. **Mengembangkan program peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah,** antara lain dalam aspek perencanaan dan memberikan kemudahan perizinan untuk memprioritaskan pengembangan EBT di daerah. Contoh: referensi program *Renewable Energy Siting through Technical Engagement and Planning* (R-STEP) di Amerika Serikat.

V	Melanjutkan Pembaruan Infrastruktur Transmisi
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Masih belum memadainya infrastruktur pendukung untuk menyebarluaskan listrik ke penjuru negeri.[29]	a. **Memperbarui dan memperluas infrastruktur transmisi** hingga ke seluruh penjuru negeri untuk mendukung integrasi sumber energi terbarukan.

VI	Mengoptimalkan Realisasi Potensi PLTS dan Mengembangkan Industri Panel Surya
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Realisasi kapasitas PLTS terpasang pada 2022 baru 271,6 MW, jauh di bawah rencana 893,3 MW, berdasarkan data Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE).[30] • Saat ini, hampir semua panel surya yang terpasang di Indonesia ialah produk impor.[31] Di sisi lain, terdapat potensi mengembangkan industri panel surya dalam negeri. Menurut Kementrian ESDM, Indonesia memiliki potensi sumber daya pasir kuarsa yang cukup besar sampai dengan 25 miliar ton.[32]	a. **Memastikan penciptaan iklim investasi dalam pengembangan program PLTS Atap** menghadirkan kebijakan yang lebih progresif sekaligus menguntungkan bagi semua pihak. b. **Mengembangkan hilirisasi pasir kuarsa untuk pengembangan industri panel surya** dalam negeri dengan memastikan keberlanjutan lingkungan dan sosial melalui pemberian insentif berupa pengurangan pajak, akses pembiayaan, serta regulasi lainnya yang mendukung. c. **Meningkatkan jumlah investasi dan riset pada industri energi solar melalui pemberian insentif seperti pengurangan pajak, dana hibah, dan penghargaan inovasi teknologi.** d. **Mengoptimalkan pemanfaatan aset Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengembangan PLTS Atap melalui pemberian insentif** yang menarik bagi pengembang dan investor.

VII	Meningkatkan Eksplorasi Panas Bumi dan Pengembangan PLTP
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Biaya investasi geotermal sangat besar, mencapai US$4-5 juta per MW, dengan tingkat keberhasilan hanya 40-50%.[33,34] • Program pengeboran pemerintah dalam panas bumi di Indonesia terbatas ketersediaan anggaran. Sepanjang 2021-2025, terdapat 20 lokasi yang akan dibor dengan biaya dari APBN.[35]	a. **Memberikan harga pembelian listrik PLTP yang menarik bagi investor** dengan mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal. b. **Melanjutkan dukungan peningkatan eksplorasi energi panas bumi, salah satunya melalui pemberian pendanaan yang memadai pada program *government drilling*.** c. **Mempertimbangkan dan mendukung implementasi dari kajian komprehensif LPEM UI** bertajuk "Analisis Bisnis dan Kebijakan untuk Mendorong Investasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Indonesia".[36]

Referensi

1. Kementerian ESDM. (2024). Impor BBM: Kok Masih Merasa Kaya Migas? Diakses pada 12 Juni 2024, dari https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/impor-bbm-kok-masih-merasa-kaya-migas.
2. CNBC Indonesia. (2020). Sampai 2025, RI Bakal Masih Impor BBM 13 Juta KL. Diakses pada 15 Juni 2024, dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20201116161459-4-202192/sampai-2025-ri-bakal-masih-impor-bbm-13-juta-kl.
3. Tirto. (2023). Tantangan Berat Indonesia Setop Impor BBM dan LPG di 2030. Diakses pada 18 Juni 2024, dari https://tirto.id/tantangan-berat-indonesia-setop-impor-bbm-dan-lpg-di-2030-gdpg.
4. Bisnis Tempo. (2024). Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2024. Diakses pada 20 Juni 2024, dari https://bisnis.tempo.co/read/1871920/lifting-minyak-terus-turun-ini-target-pemerintah-tahun-2025.
5. Katadata. (2022). Konsumsi Energi Pulih, Impor BBM Naik 26% Jadi 347.000 BPH pada 2022. Diakses pada 22 Juni 2024, dari https://katadata.co.id/berita/energi/63e1dd4d66639/konsumsi-energi-pulih-impor-bbm-naik-26-jadi-347000-bph-pada-2022.
6. Databoks Katadata. (2023). Ini Pertumbuhan Jumlah Motor di Indonesia 10 Tahun Terakhir. Diakses pada 25 Juni 2024, dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/16/ini-pertumbuhan-jumlah-motor-di-indonesia-10-tahun-terakhir.
7. Databoks Katadata. (2023). Eksploitasi Bahan Bakar Fosil: Sumber Emisi Terbesar Indonesia pada 2022. Diakses pada 27 Juni 2024, dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/29/eksploitasi-bahan-bakar-fosil-sumber-emisi-terbesar-indonesia-pada-2022.
8. IQAir. (2024). World Air Quality Ranking. Diakses pada 30 Juni 2024, dari https://www.iqair.com/world-air-quality-ranking.
9. AQICN. (2024). Air Quality Index (AQI) Rankings. Diakses pada 2 Juni 2024, dari https://aqicn.org/rankings/.
10. IESR. (2024). Ekosistem Kendaraan Listrik. Diakses pada 4 Juni 2024, dari https://iesr.or.id/tag/ekosistem-kendaraan-listrik.
11. International Energy Agency (IEA). (2024). A Roadmap to a Net-Zero Energy Sector for Indonesia. Diakses pada 7 Juni 2024, dari https://iea.blob.core.windows.net/assets/8af7e5d0-a594-4bd8-aab7-3f0eec4e878f/ARoadmaptoaNetZeroEnergySectorforIndonesia_ES_Indonesian.pdf.
12. IESR. (2023). DEK-IETD-IESR-ESDM. Diakses pada 10 Juni 2024, dari https://iesr.or.id/wp-content/uploads/2023/09/130923-DEK-IETD-IESR-ESDM.pdf.
13. Sistem off-grid mengacu pada penyediaan energi di daerah yang tidak terhubung dengan jaringan listrik utama, biasanya melalui solusi seperti panel surya atau turbin angin kecil.
14. Sistem on-grid berfokus pada integrasi energi terbarukan ke dalam jaringan listrik nasional, untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi konvensional.
15. IESR. (2024). IEVO 2023: Bangun Ekosistem Kendaraan Listrik Indonesia. Diakses pada 13 Juni 2024, dari https://iesr.or.id/ievo-2023-bangun-ekosistem-kendaraan-listrik-indonesia.
16. Kementerian ESDM. (2024). Kendaraan Listrik: Aksi Nyata Wujudkan Energi Lebih Bersih dan Ramah Lingkungan. Diakses pada 16 Juni 2024, dari https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kendaraan-listrik-aksi-nyata-wujudkan-energi-lebih-bersih-dan-ramah-lingkungan.
17. Ibid.
18. Kementerian ESDM. (2024). Ini Strategi Percepatan Transisi Energi Kementerian ESDM. Diakses pada 19 Juni 2024, dari https://esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/-ini-strategi-percepatan-transisi-energi-kementerian-esdm.
19. Kompas. (2024). Mengapa China Menguasai Pasar Mobil Listrik Dunia. Diakses pada 21 Juni 2024, dari https://www.kompas.id/baca/riset/2024/05/25/mengapa-china-menguasi-pasar-mobil-listrik-dunia.
20. Databoks Katadata. (2022). Indonesia Butuh Investasi Rp47 Kuadriliun untuk Transisi Energi. Diakses pada 24 Juni 2024, dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/26/indonesia-butuh-investasi-rp47-kuadriliun-untuk-transisi-energi.
21. LPEM. (2024). Buku Putih: Analisis Bisnis dan Kebijakan. Diakses pada 26 Juni 2024, dari https://lpem.org/wp-content/uploads/2024/02/Buku_Putih_Analisis_Bisnis_dan_Kebijakan.pdf.
22. Pokok swasembada energi, Visi Misi Prabowo-Gibran 2024-2029
23. Antara News. (2024). Di Qatar Economic Forum, Prabowo Tegaskan RI Bukan Negara Proteksionis. Diakses pada 28 Juni 2024, dari https://www.antaranews.com/berita/4105497/di-qatar-economic-forum-prabowo-tegaskan-ri-bukan-negara-proteksionis.
24. Kompas. (2023). Kemenperin Pastikan Pabrik Baterai EV Selesai Tahun Ini, Mulai Produksi 2024. Diakses pada 30 Juni 2024, dari https://otomotif.kompas.com/read/2023/10/19/170200315/kemenperin-pastikan-pabrik-baterai-ev-selesai-tahun-ini-mulai-produksi-2024.
25. Databoks Katadata. (2024). Permintaan Baterai Kendaraan Listrik China Tertinggi pada 2023. Diakses pada 2 Juni 2024, dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/06/14/permintaan-baterai-kendaraan-listrik-china-tertinggi-pada-2023.
26. Kontan. (2024). Biaya Investasi Bisnis SPKLU Mulai Rp 500 Jutaan. Diakses pada 4 Juni 2024, dari https://newssetup.kontan.co.id/news/esdm-biaya-investasi-bisnis-spklu-mulai-rp-500-jutaan.
27. Katadata. (2024). Fasilitas Daur Ulang dalam Bisnis Besar Baterai RI. Diakses pada 6 Juni 2024, dari https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/energi-baru/603d8bd90e92a/fasilitas-daur-ulang-dalam-bisnis-besar-baterai-ri.
28. Kumparan. (2024). Minimnya Investasi EBT Baru: 64 Persen dari Target 2023 Anjlok dari Tahun Lalu. Diakses pada 8 Juni 2024, dari https://kumparan.com/kumparanbisnis/minimnya-investasi-ebt-baru-64-persen-dari-target-2023-anjlok-dari-tahun-lalu-21jhVsJdPxP/full.

29. Kontan. (2024). Pemanfaatan EBT Indonesia Masih Minim: Kementerian ESDM Beberkan Tantangannya. Diakses pada 10 Juni 2024, dari https://industri.kontan.co.id/news/pemanfaatan-ebt-indonesia-masih-minim-kementerian-esdm-beberkan-tantangannya.
30. Mongabay. (2024). Sumber Melimpah Energi Surya di Indonesia Hadapi Berbagai Tantangan. Diakses pada 12 Juni 2024, dari https://www.mongabay.co.id/2024/05/03/sumber-melimpah-energi-surya-di-indonesia-hadapi-berbagai-tantangan/.
31. Kompas. (2023). Energi Surya Masih Sulit Berkembang. Diakses pada 14 Juni 2024, dari https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/03/23/energi-surya-masih-sulit-berkembang.
32. CNN Indonesia. (2023). Mengintip Potensi Pasir Kuarsa RI yang Bikin Rempang Dilirik Investor. Diakses pada 16 Juni 2024, dari https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230921121144-92-1001886/mengintip-potensi-pasir-kuarsa-ri-yang-bikin-rempang-dilirik-investor.
33. Bisnis. (2021). Masih Mahal, Pengembangan Energi Panas Bumi Capai US$4 Juta per MW. Diakses pada 18 Juni 2024, dari https://ekonomi.bisnis.com/read/20210926/44/1446933/masih-mahal-pengembangan-energi-panas-bumi-capai-us4-juta-per-mw.
34. Inaga API. (2024). Kementerian ESDM Perbaiki Kualitas Data Panas Bumi Demi Investasi EBT. Diakses pada 20 Juni 2024, dari https://www.inaga-api.or.id/news/detail/kementerian-esdm-perbaiki-kualitas-data-panas-bumi-demi-investasi-ebt.
35. Kompas. (2021). Pengeboran Panas Bumi Kurang Agresif. Diakses pada 22 Juni 2024, dari https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/08/11/pengeboran-panas-bumi-kurang-agresif.
36. LPEM. (2024). Analisis Bisnis dan Kebijakan untuk Mendorong Investasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Indonesia. Diakses pada 24 Juni 2024, dari https://lpem.org/analisis-bisnis-dan-kebijakan-untuk-mendorong-investasi-pembangkit-listrik-tenaga-panas-bumi-pltp-di-indonesia/

"15 Rekomendasi Paket Kebijakan untuk Mendukung Agenda Pembangunan Presiden & Wakil Presiden Indonesia 2024 - 2029"

Fokus Area 14

Produksi Teknologi Maju dan Tepat Guna: Membangkitkan Ekosistem Riset dan Mendukung Agenda Industrialisasi Nasional

14

IBC
Indonesian Business Council

Sumber Gambar: freepik

Produksi Teknologi Maju dan Tepat Guna: Membangkitkan Ekosistem Riset dan Mendukung Agenda Industrialisasi Nasional

Misi Asta Cita 4 Prabowo-Gibran

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

Program Prioritas No. 8 Prabowo-Gibran:

Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi.

Stakeholders: *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian); Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek); Kementerian Perindustrian (Kemenperin); Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI); Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT); Badan Standardisasi Nasional (BSN); Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).*

> *Kita akan mengirim 10.000 anak-anak pintar dari SMA, kita akan beri beasiswa ke luar negeri, untuk belajar kedokteran dan 10.000 lagi untuk belajar science, technology, engineering, and mathematics (STEM).*
> ***Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia Periode 2024 - 2029***

Mendorong Inovasi dan Daya Saing: Kebutuhan Terobosan dalam Pengembangan Ekosistem Riset dan Penciptaan Teknologi Maju dan Tepat Guna untuk Mendukung Agenda Industrialisasi Nasional

Hilirisasi dan industrialisasi merupakan pilar fundamental dalam memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Korelasi positif antara tingkat inovasi dan pertumbuhan ekonomi pada negara-negara maju seperti Swiss, Amerika Serikat, Inggris, Swedia, dan Singapura mengindikasikan bahwa kemampuan suatu negara dalam mengonversi riset menjadi produk dan jasa bernilai tambah tinggi merupakan determinan utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi.[1] Dengan mengintegrasikan hilirisasi, industrialisasi, dan pengembangan teknologi, Indonesia berpotensi meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) secara signifikan. Hal ini tidak hanya akan mendorong kemandirian ekonomi nasional, tetapi juga akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain global yang kompetitif dalam rantai nilai produksi global.

Kemajuan sebuah bangsa juga ditentukan oleh kualitas pendidikan, kemampuan berinovasi, serta penguasaan sains dan teknologi. Sayangnya, berdasarkan Indeks Inovasi Global 2023, kemampuan berinovasi Indonesia (di peringkat ke-61 sedunia) masih tertinggal dibanding negara-negara ASEAN-5 lainnya, seperti Filipina (56), Thailand (43), Malaysia (36), dan Singapura (5).[2] Dalam konteks adopsi teknologi, Indonesia pun membutuhkan banyak perbaikan. Sebagai contoh, hasil survei ADB menunjukkan 64% perusahaan manufaktur di Indonesia baru mengadopsi teknologi dasar dalam operasinya dan hanya 6% yang menggunakan teknologi terbaru.[3]

Pengembangan riset dan teknologi Indonesia masih tertinggal dibanding negara-negara ASEAN-5 Laporan UNESCO 2021 menunjukkan bahwa pengeluaran Riset dan Pengembangan (R&D) Indonesia di tahun 2018 hanya sebesar 0,23% dari PDB, jauh tertinggal dari mayoritas negara ASEAN-5, seperti Malaysia, Singapura dan Thailand (lihat Tabel 14.1).[4] Pada tahun 2024, BPS mencatat alokasi anggaran untuk R&D Indonesia tumbuh sedikit menjadi 0,28% dari PDB.[5] Artinya, dalam kurun waktu enam tahun, anggaran R&D Indonesia hanya mengalami peningkatan sebesar 0,05% dari PDB, sementara negara-negara ASEAN-5 lainnya mencatatkan peningkatan di atas 0,10%.

Tabel 14.1 Tren Pengeluaran R&D Indonesia Masih di Bawah Mayoritas Negara ASEAN-5

Negara ASEAN-5	R&D terhadap PDB (%)	
	2014*	2018*
Indonesia	**N/A**	**0,23**
Filipina	0,16	n/a
Thailand	0,62	1,00
Malaysia	1,3	1,4
Singapura	2,18	1,94

Sumber: UNESCO Science Report, 2021

*) atau tahun terdekat

Selain pengeluaran untuk R&D, Indonesia masih kekurangan jumlah peneliti dibanding mayoritas negara ASEAN-5 lainnya. Sebagai contoh, dalam Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 tercatat bahwa jumlah peneliti di Indonesia hanya 1.071 orang per sejuta penduduk.[6] Dengan rasio yang sama, jumlah peneliti di Singapura mencapai 7.000 peneliti, dan Malaysia 2.590 peneliti.[7]

Di lain sisi, Indonesia memiliki potensi *talent pool* untuk mengisi kebutuhan penelitian dan membangun ekosistem riset yang baik. Hingga tahun 2022, terdapat 17.979 orang penerima beasiswa LPDP Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang telah menyelesaikan studi, dengan 13.191 alumni S2 dan 2.694 alumni S3, baik di dalam maupun luar negeri.[8] Secara keseluruhan, terdapat 120.823 penerima beasiswa kolaborasi (beasiswa untuk program *degree* maupun *non-degree* yang diselenggarakan oleh Kemenkeu, Kemenag dan Kemendikbudristek), sebuah potensi yang sangat besar untuk dimaksimalkan dalam mendukung agenda ekosistem riset nasional.[9]

Kebijakan pemerintah yang mendukung sains dan teknologi, serta inovasi merupakan suatu keharusan. Ilustrasi dari negara-negara maju mengindikasikan urgensi alokasi dana yang signifikan untuk R&D, pembangunan infrastruktur teknologi canggih, serta sistem pendidikan yang menekankan STEM. Misalnya, pemerintah Amerika Serikat melalui *National Science Foundation* (NSF) mendanai sekitar 25% (setara dengan US$45,2 miliar) dari semua penelitian dasar yang dilakukan oleh seluruh universitas dan perguruan tinggi di negara tersebut pada tahun 2022.[10] Selain itu, ekosistem inovasi yang kondusif, seperti di Silicon Valley, menunjukkan bagaimana akses mudah ke modal ventura dan hasil-hasil riset terbaru dapat mendorong kewirausahaan di sektor sektor teknologi. Dengan mengadopsi kebijakan yang serupa, Indonesia dapat memperkuat ekosistem R&D-nya.

Perkembangan kebijakan riset di Indonesia telah mengalami berbagai transformasi, dari era Soekarno hingga Jokowi.[11] Dinamika kebijakan riset di Indonesia dimulai dari pembentukan Kementerian Riset dan Teknologi pada era Soekarno hingga penggabungannya dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di era Jokowi menjadi Kemendikbud Ristek-Dikti. Lebih lanjut, LITBANG Kompas memetakan transformasi kebijakan tersebut dalam Tabel 14.2 berikut:

Tabel 14.2 Transformasi Kebijakan Riset di Indonesia

Era Presiden	Kebijakan Utama dan Fokus Riset	Institusi dan Proyek Penting	Tantangan dan Hambatan
Soekarno	• Pembentukan Kementerian Negara Urusan Riset Nasional (1962) • Fokus pada teknologi kelautan dan kedirgantaraan	• Pendidikan tinggi teknis di luar negeri • Proyek Stadion Senayan, Masjid Istiqlal	• Struktur kementerian dan adaptasi teknis
Soeharto	• Kementerian Negara Riset dan Teknologi (1974) • Penelitian sumber daya alam dan industri	• Pusat Gempa Bumi Nasional • Pusat penelitian di Serpong	• Kurangnya koordinasi antar lembaga
BJ Habibie	• Kementerian Negara Riset dan Teknologi (1978) • Fokus pada industri strategis	• BPPT • PT IPTN • Industri pesawat terbang, PLTN	• Pendanaan riset yang terbatas
Megawati	• Reformasi riset dengan pendekatan desentralisasi	• Pemberdayaan lembaga riset daerah	• Peningkatan kualifikasi peneliti daerah

SBY	• Strategi riset nasional	• Dana abadi pendidikan • Riset prioritas nasional	• Minimnya anggaran riset • Rendahnya daya serap industri
Jokowi	• Penggabungan Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi • Pembentukan BRIN	• Konsolidasi lembaga riset • Integrasi riset ke dalam sektor industri	• Anggaran riset yang minim • Ekosistem riset yang tidak kondusif

Sumber: LITBANG Kompas 2024

Tantangan Utama Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi Indonesia

Ekosistem riset di Indonesia menghadapi sejumlah kendala struktural yang menghambat pertumbuhan inovasi. Fragmentasi kelembagaan, alokasi anggaran yang terbatas, dan kapasitas peneliti yang belum merata menjadi tantangan utama. Rendahnya serapan riset oleh industri serta kurangnya sinergi antara akademisi dan pelaku industri memperlebar *gap* antara hasil riset dengan kebutuhan pasar. Untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, transformasi ekosistem riset menjadi imperatif. Hal ini menuntut optimalisasi alokasi sumber daya, peningkatan kualitas SDM peneliti, serta penguatan kolaborasi *multi-stakeholder* guna menghasilkan inovasi yang berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Beberapa tantangan utama yang menghambat penguatan ekosistem riset di Indonesia disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 14.3 Tantangan yang Menghambat Penguatan Ekosistem Riset di Indonesia

No	Tantangan Utama	Data/Situasi
1	**Pendanaan Riset dan Tata Kelola Anggaran**	• Sebagian besar pendanaan riset di Indonesia berasal dari belanja pemerintah (75%), sementara kontribusi sektor swasta hanya 25%. Perbandingan dengan negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam menunjukkan ketimpangan yang mencolok, di mana sektor swasta memainkan peran besar dalam pendanaan riset. Menurut Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, kurangnya investasi swasta di Indonesia disebabkan oleh ketergantungan pada lisensi teknologi asing dan kurangnya dorongan untuk investasi riset dalam negeri. Hal ini menyebabkan industri lokal kurang berinovasi dan tidak berinvestasi dalam riset yang dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing.[12] • Diskoneksi dalam proses perencanaan dan penganggaran di Indonesia turut mempengaruhi ekosistem riset, kemajuan teknologi, dan agenda industrialisasi. Pertama, perencanaan yang mengikuti UU Sistem Perencanaan Pembangunan Negara (UU SPPN) berbasis program tidak selalu sejalan dengan penganggaran yang mengikuti UU Keuangan Negara (UU KN) berbasis fungsi. Selain itu, adanya diskoneksi institusi antara Bappenas sebagai perencana dan Kemenkeu sebagai penyusun anggaran mengakibatkan ketidakselarasan antara rencana strategis dan anggaran yang tersedia. Hal-hal ini menghambat tumbuhnya ekosistem riset, pengembangan teknologi, dan pencapaian agenda industrialisasi yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing industri nasional.[13]

No	Tantangan Utama	Data/Situasi
		• Terdapat kecenderungan di kalangan kementerian dan lembaga untuk menjadikan "habis anggaran" sebagai indikator keberhasilan yang lebih utama daripada kualitas output dan *outcome* dari kebijakan yang diterapkan. Fokus pada penghabisan anggaran sering kali menyebabkan pemborosan sumber daya dan mengabaikan kualitas serta dampak dari kebijakan yang diterapkan, menghambat inovasi yang memerlukan investasi awal yang substansial, dan menurunkan akuntabilitas serta efektivitas riset. Akibatnya, kualitas riset bisa menurun, kemajuan teknologi terhambat, dan hasil yang dihasilkan mungkin tidak relevan atau bermanfaat secara maksimal bagi masyarakat. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, telah menekankan pentingnya efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran negara. Terdapat kecenderungan di kalangan kementerian dan lembaga untuk menjadikan "habis anggaran" sebagai indikator keberhasilan yang lebih utama daripada kualitas output dan *outcome* dari kebijakan yang diterapkan. Fokus pada penghabisan anggaran sering kali menyebabkan pemborosan sumber daya dan mengabaikan kualitas serta dampak dari kebijakan yang diterapkan, menghambat inovasi yang memerlukan investasi awal yang substansial, dan menurunkan akuntabilitas serta efektivitas riset. Akibatnya, kualitas riset bisa menurun, kemajuan teknologi terhambat, dan hasil yang dihasilkan mungkin tidak relevan atau bermanfaat secara maksimal bagi masyarakat. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, telah menekankan pentingnya efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran negara.[14]
2	**Sumber Daya Manusia**	• Terdapat kesenjangan yang signifikan antara kebutuhan tenaga kerja berkualitas dengan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten. Berdasarkan data BPS dan Kemnaker 2022, sebesar 38,76% hingga 39,10% tenaga kerja Indonesia berpendidikan Sekolah Dasar atau lebih rendah. Persentase tenaga kerja dengan pendidikan SMA ke atas, termasuk Diploma dan Sarjana, masih relatif rendah, hanya berkisar 12,60%.[15] • Selain itu, sistem pendidikan dan pelatihan saat ini tidak cukup mempersiapkan tenaga kerja untuk kebutuhan pasar yang berkembang. Sebagai contoh, pada tahun 2020, hanya 19% dari tenaga kerja di Indonesia yang memiliki keterampilan digital dan mampu mengaplikasikannya dalam pekerjaan mereka.
3	**Infrastruktur dan Adopsi Teknologi**	• Infrastruktur penunjang transformasi digital di Indonesia masih belum merata, terutama di daerah pedesaan, yang menghambat adopsi teknologi secara luas. Menurut laporan East Ventures Digital Competitiveness Index (EV-DCI) 2024, kesenjangan infrastruktur digital antar daerah di Indonesia semakin meningkat antara 2022 dan 2023.[16] • Menurut Staf Khusus Menkominfo, pada tahun 2022 terdapat sekitar 12 ribu desa/kelurahan yang belum terhubung dengan akses internet 4G.[17] • Penggunaan teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*/AI) di sektor industri Indonesia masih di bawah 10%.[18] Rendahnya tingkat adopsi teknologi juga disebabkan oleh infrastruktur penunjang yang belum optimal, baik di lingkup pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat.

No	Tantangan Utama	Data/Situasi
4	**Skema Insentif**	• Ketergantungan pada lisensi teknologi asing dan rendahnya investasi dalam riset lokal, salah satunya disebabkan oleh skema insentif pengembangan riset yang belum cukup menarik bagi industri. Industri multinasional lebih memilih untuk melakukan riset di negara asal mereka, sementara industri lokal sering kali mengandalkan teknologi yang sudah teruji. Menurut Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, sebagian besar industri di Indonesia tidak melakukan riset mendalam karena tingginya biaya dan faktor kompleksitas.

Navigasi Indonesia: Gagasan dan Komitmen Presiden-Wakil Presiden Republik Indonesia 2024 - 2029

Visi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam pembangunan ekosistem riset di Indonesia berfokus pada penguatan inovasi nasional sebagai pilar utama untuk mewujudkan kemandirian dan daya saing global. Dalam Asta Cita ke-5, Prabowo-Gibran berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi domestik yang strategis. Selain itu, pengembangan riset juga termasuk ke dalam Program Prioritas ke-6, yaitu penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi.

Prabowo dan Gibran berkomitmen untuk mengalokasikan 1,5-2% dari APBN untuk kegiatan riset dan pengembangan (R&D) dalam 5 tahun ke depan, yang merupakan peningkatan signifikan dibandingkan alokasi saat ini. Anggaran ini diharapkan akan digunakan untuk memperkuat ekosistem riset, mendanai proyek-proyek riset strategis, serta meningkatkan kolaborasi antara industri, pemerintah, dan akademisi. Prabowo-Gibran juga menargetkan untuk meningkatkan jumlah publikasi ilmiah dan paten yang dihasilkan oleh peneliti Indonesia.

Program riset ini tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah penelitian, tetapi juga pada pengembangan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan nasional, seperti teknologi pertanian berkelanjutan, energi terbarukan, dan kesehatan. Prabowo-Gibran menekankan pentingnya riset yang aplikatif dan berdampak langsung pada masyarakat, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan rakyat dan daya saing Indonesia di tingkat global.

Rekomendasi Paket Kebijakan 14:

A	**Memperkuat Ekosistem Riset Nasional**
B	**Mendorong Transformasi Industri dan SDM untuk Meningkatkan Adopsi serta Pengembangan Teknologi Baru**

Rincian Rekomendasi A: Memperkuat Ekosistem Riset Nasional

I **Menghadirkan Terobosan Pendanaan dan Pembiayaan Riset: Mengubah Pendekatan "*Money Follow Function*" Menjadi "*Money Follow Program*" dan Meningkatkan Anggaran Riset**

Kondisi Eksisting	Rekomendasi
• Pengeluaran penelitian dan pengembangan terbilang rendah dibandingkan negara-negara sejenis. Pada tahun 2024, anggaran R&D hanya 0,28% dari PDB. • Presiden-Wakil Presiden Terpilih memiliki misi meningkatkan dana riset dan inovasi sehingga dapat mencapai 1,5-2,0% dari PDB dalam 5 tahun. • **Diskoneksi antara perencanaan dan penganggaran,** di mana perencanaan mengacu pada UU Sistem Perencanaan Pembangunan Negara (UU SPPN) yang berbasis program, sementara penganggaran mengacu pada UU Keuangan Negara (UU KN) yang berbasis fungsi. • **Diskoneksi institusi antara Bappenas sebagai perencana dan Kemenkeu sebagai penyusun anggaran,** di mana Bappenas sebagai perencana hanya memiliki wewenang hingga tahap pagu indikatif, sementara proses penganggaran dilakukan oleh Kemenkeu bersama dengan Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya dengan konsultasi DPR. Hal ini menyebabkan kompleksitas yang semakin meningkat yang dipengaruhi kuatnya faktor politik dalam proses penganggaran. • **Paradigma yang digunakan oleh K/L dalam pelaksanaan kebijakan masih berupa "menghabiskan anggaran" bukan "hemat anggaran, *outcome* tercapai".**	a. **Mengintegrasikan UU KN dan UU SPPN menjadi UU tentang Perencanaan dan Penganggaran.**[2] Hal ini agar pendekatan "*money follow program*" dapat diadopsi tanpa perbedaan tafsir antara perencanaan dan penganggaran. Diikuti dengan perkuatan peran Bappenas secara institusional untuk memantau dan mengevaluasi implementasi anggaran. b. **Memperkenalkan terobosan kebijakan dalam bentuk pemberian *grant*/hibah.** c. **Mengimplementasikan konsep penganggaran multi-tahun dalam pelaksanaan riset.*** d. **Menjadikan evaluasi kinerja K/L oleh badan pemeriksa keuangan** berupa evaluasi berbasis indikator keuangan (*financial performance*) menjadi **evaluasi berbasis kinerja, capaian, dan *outcome* (*performance-based budget*) dengan menggunakan auditor yang memiliki keahlian pada bidang terkait,** sehingga terdapat indikator capaian yang dapat diukur dan dapat dievaluasi. Anggaran boleh tidak habis asalkan *outcome* tercapai.* e. **Menaikan alokasi anggaran untuk riset disertai dengan rencana terukur** mengenai pemanfaatan dana tersebut **dalam rangka mendukung industri strategis secara selektif** yang berpotensi untuk menjadi industri unggulan Indonesia di masa depan. f. **Memperbesar alokasi dana untuk riset, utamanya bagi universitas, lembaga *think tank*, dan swasta** agar memudahkan keterhubungan hasil riset secara langsung dengan industri. **Karakter riset yang hasilnya tidak selalu bisa diukur sejak awal.*

II Memperkuat dan Memajukan Infrastruktur Digital

Kondisi Eksisting	Rekomendasi
• Teknologi digital menjadi elemen penting dalam kemajuan teknologi dan inovasi. • Berdasarkan pernyataan Staf Khusus Menkominfo, pada tahun 2022 masih ada sekitar 12 ribu desa/kelurahan yang belum tersambung akses internet 4G.[19] • Kecepatan kategori *fixed broadband* di Indonesia 27,11 Mbps*, peringkat ke-8 di ASEAN.[20] **Menurut The Federal Communications Commission (FCC), lembaga komisi penyiaran Amerika Serikat, kecepatan internet yang layak adalah 100 Mbps.*	a. **Memperluas infrastruktur dasar internet,** seperti *base transceiver station* (BTS) dan *fiber optic* (FO), **hingga ke desa dan kelurahan** untuk mendukung akses digital. b. **Mengimplementasikan satelit orbit rendah (LEO) untuk wilayah dengan tantangan geografis** dengan tetap memperhatikan dampak, manfaat, dan peluang yang ada **serta memastikan kesamaan *level playing field* antar penyedia layanan internet (ISP).** c. **Memastikan implementasi UU No. 6 Tahun 2023, khususnya dalam mendorong pelaksanaan mekanisme infrastruktur bersama antar penyedia layanan internet.** d. **Melanjutkan pengembangan jaringan 5G secara bertahap untuk beroperasi secara komersial di Indonesia.**

III Mengoptimalisasi *Talent Pool* Nasional untuk Memajukan Agenda Pengembangan Teknologi dan Inovasi

Kondisi Eksisting	Rekomendasi
• Hingga tahun 2022 terdapat lebih dari 35 ribu penerima beasiswa LPDP yang telah melanjutkan studi S2 dan S3.[21] • Secara keseluruhan, terdapat lebih dari 900 ribu lulusan pendidikan tinggi S2 dan S3.	a. **Memberikan fasilitas riset dan insentif pada periset terbaik** untuk pengembangan teknologi dan inovasi dalam rangka mendukung industri strategis secara selektif yang berpotensi untuk menjadi industri unggulan Indonesia di masa depan.

IV Memperkuat Kolaborasi antar Lembaga

Kondisi Eksisting	Rekomendasi
• Menurut Mantan Menteri Riset dan Teknologi/ Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bambang Brodjonegoro, koordinasi dan sinergi harus diperkuat antara para pelaku riset dan inovasi termasuk lembaga penelitian, swasta, perorangan, dan pendidikan tinggi sehingga tidak terjadi redudansi dan duplikasi.[22]	a. **Memperkuat kolaborasi antar lembaga riset publik, non-publik, pendidikan tinggi, dan swasta** dalam mempromosikan pengembangan teknologi baru dan mendorong dihasilkannya lisensi, komersialisasi, serta *startup* dan *spin-off*. b. **Mengevaluasi UU No. 18 Tahun 2002,** salah satunya mengenai sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut (Pasal 74-77) karena kontraproduktif bagi upaya Indonesia untuk mendorong kolaborasi riset internasional. c. Melakukan kampanye sebagai salah satu perwujudan pengarusutamaan ristek sebagai budaya bangsa.

V	Mengefektifkan Kerangka Regulasi dan Tata Kelola untuk Peneliti
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim, mengakui besarnya beban administrasi yang dihadapi oleh dosen.[23]	**a. Mengevaluasi dan mengurangi beban administrasi pada peneliti secara komprehensif.**

Rincian Rekomendasi B: Mendorong Transformasi Industri dan SDM untuk Meningkatkan Adopsi dan Pengembangan Teknologi Baru

I	Modernisasi Mesin Manufaktur
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Berdasarkan survei[24] yang dilakukan kepada industri manufaktur: o Hanya 64% perusahaan manufaktur masih mengadopsi teknologi rendah dan hanya 6% perusahaan manufaktur yang mengadopsi teknologi canggih. o Hanya 27% yang ada menggunakan robotics dan 7% yang menggunakan AI.	**a. Memberikan insentif fiskal dan keringanan pajak pada investasi yang membawa teknologi modern* dan atau untuk industri yang berhasil melakukan modernisasi alat produksi.** **b. Mempertimbangkan pemberian dukungan modernisasi alat produksi melalui kebijakan terobosan kebijakan seperti pemberian *grant*.** **Perlu dipastikan teknologi modern yang diinvestasikan adalah teknologi yang memberikan daya saing secara jangka panjang.*
II	**Meningkatkan Produktivitas SDM dan Adopsi Penggunaan Teknologi**
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Sebanyak **4 dari 10 pekerja** Indonesia **berlatar pendidikan SD dan bahkan tidak sekolah.**[25] • **Rata-rata lama sekolah di Indonesia baru mencapai 9,13 tahun**[26]**,** sedangkan sejak 2019, rata-rata lama sekolah di Malaysia sudah mencapai 10,2 tahun dan Singapura 11,5 tahun.[27] • Minimnya tenaga kerja Indonesia yang memiliki kemampuan digital (hanya mencapai 19%).[28]	**a. Memastikan akses dan kualitas pendidikan yang merata dari** PAUD hingga SMA. **b. Memperbanyak program *Triple Skilling* (*skilling*, *upskilling*, *reskilling*) di tingkat SMA/SMK/sederajat** agar siswa dan pekerja memiliki bekal keahlian untuk bekerja menggunakan teknologi. **c. Melanjutkan dan menyempurnakan program Pra-Kerja.** **i. Memperkuat dan memperluas hubungan lulusan pelatihan dengan pemberi kerja.** **ii. Memperluas penerima manfaat program pekerja dan memastikan insentif dan benefit yang sesuai.**
III	**Memberikan Kemudahan dalam Berusaha serta Perlindungan dan Insentif Pemanfaatan Paten**
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Meskipun iklim bisnis Indonesia sudah lebih baik dibandingkan dekade sebelumnya, investor AS masih mencatatkan beberapa tantangan lain, seperti lemahnya penegakkan kontrak dan ketidakefisienan birokrasi.	**a. Memastikan regulasi dan perizinan terkait kemudahan berusaha dibuat mudah, transparan dan tidak berbelit-belit** agar bisa menarik minat investor dalam berbagai kegiatan riset dan inovasi.

III	**Memberikan Kemudahan dalam Berusaha serta Perlindungan dan Insentif Pemanfaatan Paten**
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
	b. Memberikan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang kuat dan insentif yang menarik bagi pencipta teknologi yang telah mematenkan teknologinya dan memungkinkan pihak ketiga untuk menggunakan hak paten tersebut dalam mengembangkan produknya.

IV	**Menciptakan Terobosan Dukungan Pembiayaan Riset bagi Industri untuk Penciptaan Teknologi Baru**
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Pengeluaran penelitian dan pengembangan terbilang rendah dibandingkan negara-negara sejenis. Pada tahun 2024, anggaran R&D hanya 0,28% dari PDB. • Presiden-Wakil Presiden Terpilih memiliki misi meningkatkan dana riset dan inovasi hingga mencapai 1,5-2,0% dari PDB dalam 5 tahun.	**a. Membuat terobosan kebijakan skema hibah riset baru yang mengundang kontribusi industri** (dalam bentuk dana tunai maupun barang atau jasa) **dan memberikan *reward* untuk kontribusi ini berupa *co-investment* oleh Pemerintah** (nilai investasi Pemerintah biasanya diberikan efek pengganda (*multiplier*) dari nilai pendanaan industri).

Referensi:

1. World Intellectual Property Organization. (2023). *Wipo Global Innovation Index: Fastest Climbers*. Diakses pada 5 Juni 2024, dari https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2023/article_0011.html
2. World Intellectual Property Organization. (2023). *Global Innovation Index 2023*. Diakses pada 7 Juni 2024, dari https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-2000-2023-en-main-report-global-innovation-index-2023-16th-edition.pdf
3. Asian Development Bank. (2020). *Innovate Indonesia*.
4. UNESCO. (2021). *Science Report*. Diakses pada 9 Juni 2024, dari https://www.unesco.org/reports/science/2021/en/download-report
5. Badan Pusat Statistik. (2024). *Pertumbuhan PDB Indonesia Q1 2024*. Diakses pada 11 Juni 2024, dari https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/05/06/2380/indonesia-s-gdp-growth-in-q1-2024-was-5-11-percent--y-on-y--and-indonesia-s-gdp-growth-in-q1-2024-was--0-83-percent--q-to-q--.html
6. Kompas. (2024). *Visi Misi Capres-Cawapres*. Diakses pada 13 Juni 2024, dari https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/01/15/visi-misi-capres-cawapres-pemajuan-ilmu-pengetahuan-dan-teknologi-lemah
7. Ibid.
8. Katadata. (2023). *Bidang Karir Alumni LPDP*. Diakses pada 15 Juni 2024, dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/04/ini-bidang-karir-yang-banyak-dipilih-alumni-lpdp
9. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. (n.d.). *Laporan Tahunan*. Diakses pada 17 Juni 2024, dari https://lpdp.kemenkeu.go.id/en/informasi/laporan-tahunan/
10. National Center for Science and Engineering Statistics. (2023). *R&D Resources 2021–22*. Diakses pada 19 Juni 2024, dari https://ncses.nsf.gov/pubs/nsf24332
11. Kompas. (2021). *Kebijakan Riset dan Teknologi*. Diakses pada 21 Juni 2024, dari https://www.kompas.id/baca/paparan-topik/2021/08/09/kebijakan-riset-dan-teknologi-dari-soekarno-hingga-jokowi
12. Gatra. (2021). *Pendidikan Eksklusif: Ekosistem Riset*. Diakses pada 23 Juni 2024, dari https://www.gatra.com/news-575616-pendidikan-eksklusif-dirjen-dikti-ristek-prof-nizam-kupas-habis-ekosistem-riset-bagian-i.html
13. KSI Indonesia. (2020). *Dokumen Strategis Riset dan Inovasi*. Diakses pada 25 Juni 2024, dari https://www.ksi-indonesia.org/assets/uploads/original/2020/03/ksi-1585487219.pdf
14. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Anggaran 2020*. Diakses pada 27 Juni 2024, dari https://anggaran.kemenkeu.go.id/api/Medias/38316bbc-6e61-4c41-a52c-b38ffadb9a8e
15. Media Indonesia. (2024). *Isu Human Capital dalam Pilpres 2024*. Diakses pada 29 Juni 2024, dari https://mediaindonesia.com/opini/620444/mengangkat-isu-human-capital-dalam-pilpres-2024
16. East Ventures. (2024). *Digital Competitiveness Index 2024*. Diakses pada 30 Juni 2024, dari https://east-ventures-reports.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%5BBahasa+Indonesia%5D+East+Ventures+-+Digital+Competitiveness+Index+2024.pdf
17. Liputan6. (2024). *Kemkominfo: Desa dan Kelurahan Belum Tersentuh Internet 4G*. Diakses pada 2 Juni 2024, dari https://www.liputan6.com/tekno/read/4884963/kemkominfo-12548-dari-83218-desa-dan-kelurahan-belum-tersentuh-internet-4g?page=4
18. Jagat Bisnis. (2024). *Adopsi AI di Sektor Industri*. Diakses pada 4 Juni 2024, dari https://jagatbisnis.com/2024/07/17/adopsi-artificial-intelligence-ai-di-sektor-industri-indonesia-masih-rendah-wantrii-dorong-peningkatan/#gsc.tab=0
19. Liputan6. (2024). *Kemkominfo: Desa dan Kelurahan Belum Tersentuh Internet 4G*. Diakses pada 6 Juni 2024, dari https://www.liputan6.com/tekno/read/4884963/kemkominfo-12548-dari-83218-desa-dan-kelurahan-belum-tersentuh-internet-4g
20. CNBC Indonesia. (2023). *Kecepatan Internet Indonesia*. Diakses pada 8 Juni 2024, dari https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230828152514-37-466786/kecepatan-internet-indonesia-parah-cek-data-terbaru
21. Katadata. (2023). *Jumlah Penerima Beasiswa LPDP*. Diakses pada 10 Juni 2024, dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/07/ini-jumlah-penerima-beasiswa-lpdp-sampai-2022
22. Antara News. (2023). *Koordinasi Kegiatan Riset*. Diakses pada 12 Juni 2024, dari https://www.antaranews.com/berita/2304886/bambang-brodjonegoro-koordinasi-kegiatan-riset-agar-makin-diperkuat
23. Detik. (2023). *Beban Administrasi Dosen*. Diakses pada 14 Juni 2024, dari https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-7087737/nadiem-makarim-kita-pastikan-beban-administrasi-dosen-berkurang/amp
24. Asian Development Bank. (2020). *Innovate Indonesia*. Diakses pada 16 Juni 2024, dari https://www.adb.org/sites/default/files/publication/575806/innovate-indonesia-unlocking-growth.pdf
25. Kompas. (2023). *Penduduk Berpendidikan Rendah*. Diakses pada 18 Juni 2024, dari https://www.kompas.id/baca/riset/2023/11/07/penduduk-bekerja-berpendidikan-rendah-masih-dominan
26. Badan Pusat Statistik. (2023). *Rata-rata Lama Sekolah*. Diakses pada 20 Juni 2024, dari https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQyOSMy/rata-rata-lama-sekolah-penduduk-umur--15-tahun-menurut-provinsi.html
27. Kompas. (2023). *Intensitas Liburan dan Produktivitas Tenaga Kerja*. Diakses pada 22 Juni 2024, dari https://www.kompas.id/baca/english/2023/07/09/intensitas-liburan-dan-tantangan-produktivitas-tenaga-kerja?open_from=Translator_Mark
28. Katadata. (2021). *Tenaga Kerja dengan Kemampuan Digital*. Diakses pada 24 Juni 2024, dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/02/25/hanya-19-tenaga-kerja-indonesia-yang-punya-kemampuan-digital

"15 Rekomendasi Paket Kebijakan untuk Mendukung Agenda Pembangunan Presiden & Wakil Presiden Indonesia 2024 - 2029"

Fokus Area 15

Industri Kreatif dan Sektor Pariwisata: Memaksimalkan Realisasi Potensi Industri Kreatif dan Sektor Pariwisata

15

IBC
Indonesian Business Council

Sumber Gambar: katadata/Ai

Industri Kreatif dan Sektor Pariwisata

Memaksimalkan Realisasi Potensi Industri Kreatif dan Sektor Pariwisata

Misi Asta Cita No. 3 Prabowo-Gibran

Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, dan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur.

Program Prioritas No. 17 Prabowo-Gibran

Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

Stakeholders: *Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves); Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf); Kementerian Perindustrian (Kemenperin); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek); Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM); Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo); Kementerian Keuangan (Kemenkeu); Pemerintah Daerah (Pemda).*

> *Saya yakin kalau anak-anak muda tidak kalah kreatif, tapi memang harus didukung oleh pemerintah. Maka dari itu, anak-anak muda yang kreatif harus kita dorong, harus kita support.*
>
> ***Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2024 - 2029***

Transformasi Industri Kreatif untuk Mempromosikan Kekayaan Budaya Indonesia dan Mendorong Revolusi Budaya

Dalam mengembangkan industri kreatif dan pariwisata, Indonesia perlu menumbuhkan kembali budaya lokal. Indonesia perlu untuk melakukan "Revolusi Budaya" agar budaya lokal yang luhur kembali tumbuh di masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan pariwisata dan perbaikan iklim usaha. Dalam hal ini, pemerintah harus berperan aktif dan berpihak dalam pengembangan budaya. Pihak swasta dapat berkontribusi dengan mengangkat dan memperkuat budaya lokal dalam kegiatan komersialnya.

Industri kreatif Indonesia menempati posisi ke-3 di dunia dalam kontribusinya terhadap PDB, setelah Amerika Serikat dan Korea Selatan.[1] Kontribusi industri kreatif Indonesia mencapai 7,8% dari PDB 2023[2], dan menyerap sekitar 14,3 juta pekerja pada 2022. Hal ini menunjukkan pentingnya peran industri ini terhadap perekonomian nasional.

Ekonomi kreatif di Indonesia mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu subsektor ekonomi kreatif yang patut menjadi perhatian adalah industri perfilman. Pada 2023, total jumlah penonton bioskop mencapai 55 juta dengan 20 film yang mencapai masing-masing 1 juta penonton.[3] Hal ini memperlihatkan potensi besar yang dimiliki oleh industri kreatif Indonesia.

Industri kreatif dan pariwisata di Indonesia saling berhubungan erat dan perlu kolaborasi dalam pengembangannya. Kedua sektor ini saling mendukung dengan memanfaatkan daya tarik budaya, tradisi, karakter, dan keindahan alam Indonesia sebagai magnet utama bagi wisatawan. Acara berskala internasional tidak hanya memperkenalkan produk-produk kreatif lokal ke pasar global, tapi juga membantu meningkatkan kunjungan internasional. Selain itu destinasi wisata populer seperti Yogyakarta dan Bali menarik minat wisatawan internasional, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan industri kreatif lokal.

Menyadari besarnya potensi industri kreatif dan pariwisata serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerintah telah melakukan beberapa strategi kolaboratif untuk mengembangkan sektor-sektor tersebut. Salah satunya, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengeluarkan kebijakan *multiple entry visa* selama 5 tahun untuk memudahkan orang asing masuk ke Indonesia dengan tujuan bisnis dan wisata.[4] Selain itu pemerintah juga memfasilitasi pembiayaan ekonomi kreatif melalui *Indonesia Tourism Fund* (ITF) dengan dana awal Rp2 triliun.[5] Langkah ini diharapkan dapat membuka akses yang lebih luas ke pasar global dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional.

Pengembangan industri kreatif dan pariwisata juga perlu memperhatikan praktik-praktik ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan. Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, melalui penerapan praktik-praktik tersebut, Indonesia akan dapat membuka potensi besarnya sebagai tujuan pariwisata global.[6] Salah satu hal yang telah mulai diterapkan adalah hotel-hotel yang mengganti air minum kemasan dengan penyediaan dispenser air minum di setiap lantai hotel.

Tantangan Pengembangan Industri Kreatif dan Pariwisata

Tanpa dukungan kebijakan yang menyeluruh, industri kreatif dan pariwisata menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan tersebut yaitu:

- **Kebijakan pengembangan yang terfragmentasi.** Kebijakan untuk pengembangan ekosistem industri kreatif masih bersifat silo dan belum didukung secara penuh mulai dari penyediaan *hard* dan *soft infrastructure*, perlindungan hak atas karya, akses pembiayaan, hingga pemasaran. Tanpa hal-hal tersebut, ekosistem industri kreatif akan sulit untuk berkembang. Sebagai contoh, Kemenparekraf mencatat pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif masih kesulitan mendapatkan pendanaan, dimana 92,37% pelaku mengandalkan modal pribadi atau pinjaman keluarga.[7]
- **Kebutuhan dukungan yang beragam.** Secara umum, dukungan yang dibutuhkan industri kreatif adalah kepastian hukum. Selain itu, beragam subsektor industri kreatif memiliki kebutuhan dukungan yang berbeda dalam pengembangannya. Misalnya, subsektor perfilman membutuhkan dukungan SDM dan pendanaan produksi film.[8] Sementara subsektor musik dan pertunjukan membutuhkan dukungan terkait kepastian dan kemudahan perizinan penyelenggaraan pertunjukan.[9]
- **Agenda untuk meningkatkan produk dan karya Industri kreatif Indonesia di kancah global belum terkonsolidasi dan menjadi prioritas.** Industri kreatif memiliki potensi besar bagi perekonomian Indonesia, namun penggarapannya belum maksimal. Salah satunya adalah seni pertunjukan yang memiliki potensi besar menggelar *event* berskala internasional. Namun, belum didukung pendanaaan, birokrasi, dan infrastruktur yang memadai.[10] Padahal, peningkatan visibilitas global berpotensi membuka peluang pasar yang lebih luas dan meningkatkan daya saing produk lokal.
- **Infrastruktur pariwisata masih terbatas, termasuk cakupan dan kecepatan internet, jaringan jalan, serta kualitas fasilitas yang tersedia**. Berdasarkan *Travel & Tourism Development Index 2024*, aspek Layanan dan Infrastruktur Pariwisata mendapatkan skor terendah di antara 17 aspek yang dinilai, yaitu 1,90, lebih rendah dibandingkan rata-rata skor Asia Tenggara yaitu 2,35.[11] Ini menunjukkan masih banyak ruang perbaikan yang perlu dilakukan terkait infrastruktur.

Tabel 15.1 Skor Negara-negara ASEAN pada Aspek Layanan dan Infrastruktur Pariwisata TTDI 2024

Negara	Skor Aspek Layanan dan Infrastruktur Pariwisata 2024	Peringkat Travel & Tourism Development Index 2024
Singapura	4,41	13
Indonesia	1,9	22
Malaysia	2,79	35
Thailand	2,18	47
Vietnam	2,2	59
Filipina	1,55	69
Kamboja	1,97	86
Laos	1,77	91
Asia Tenggara	2,35	

Sumber: *World Economic Forum* 2024

- **Indonesia memiliki banyak destinasi pariwisata yang menarik, tapi *storytelling* sebagai bagian dari promosi belum optimal.** Narasi dalam bentuk *storytelling* untuk mempromosikan destinasi pariwisata Indonesia masih belum kuat dan belum berfokus pada kearifan dan keunikan lokal, sehingga kurang menarik wisatawan.
- **Masih terdapat "kebocoran ekonomi" di berbagai destinasi pariwisata lokal.** Kebocoran ekonomi tersebut terjadi akibat dari maraknya penggunaan produk-produk non-lokal di destinasi pariwisata. Akibatnya pemanfaatan peluang pengembangan sektor pariwisata berkelanjutan, khususnya bagi masyarakat setempat, belum optimal.

Navigasi Indonesia: Gagasan dan Komitmen Presiden-Wakil Presiden Republik Indonesia 2024 - 2029

Industri kreatif dan pariwisata menjadi salah satu fokus utama Prabowo-Gibran. Dalam Misi Asta Cita No. 3, mereka menegaskan komitmen untuk meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas dan mengembangkan industri kreatif. Selain itu, mereka juga mendorong kewirausahaan dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Upaya ini menjadi hal penting untuk mendukung pertumbuhan industri kreatif dan pariwisata.

Selain itu, Program Prioritas No. 17 menekankan pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, serta peningkatan prestasi olahraga. Dengan fokus yang jelas pada pelestarian budaya dan peningkatan sektor ekonomi kreatif, menunjukkan Prabowo-Gibran berkomitmen untuk memajukan industri ini sebagai salah satu kontributor penting ekonomi dan identitas nasional Indonesia.

Sumber Gambar: freepik

Rekomendasi Paket Kebijakan 15:

A	**Menerbitkan Paket Kebijakan Pengembangan Ekosistem Industri Kreatif**
B	**Membentuk *Task Force* Diplomasi Industri Kreatif sebagai bagian dari Diplomasi *Soft Power* Indonesia pada Kancah Internasional yang Didukung Kebijakan Komprehensif**
C	**Mengoptimalisasi Pengembangan Sektor Jasa dan Pariwisata Nasional**

Rincian Rekomendasi A: Menerbitkan Paket Kebijakan Pengembangan Ekosistem Industri Kreatif

I	**Menyediakan dan Meningkatkan Kualitas *Hard* dan *Soft Infrastructure* dalam Mendukung Ekosistem Kebudayaan dan Industri Kreatif**

Kondisi Eksisting	Rekomendasi
• Infrastruktur kebudayaan masih jauh dari memadai, gedung seni budaya, museum, cagar budaya dan taman budaya banyak yang terbengkalai dan tidak direvitalisasi, dan yang adapun penyajiannya kurang menarik.[12] • Penutupan ruang pameran seni budaya sering terjadi karena uang sewa pembayaran gedung yang mahal.[13] • Pengarsipan hasil seni budaya masih minim. Bahkan, Perpustakaan Leiden jadi jendela budaya Indonesia, koleksi manuskrip kunonya lebih banyak ketimbang yang dimiliki Perpustakaan Nasional di Indonesia. • Akses penonton terhadap film di Indonesia masih timpang, hanya 22% Kab/Kota yang memiliki layar bioskop dan 69% berada di Pulau Jawa. • Rendahnya penciptaan, perlindungan dan pemberian insentif terhadap Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*).[14]	**a. Menyediakan dan meningkatkan *hard infrastructure*** yang mendukung ekosistem kebudayaan dan industri kreatif, antara lain dengan: **i. Menciptakan simpul kreativitas (*creative hub*) di perkotaan** yang menghubungkan pekerja, investor, dan inventor kreatif. **ii. Merevitalisasi museum dan kawasan cagar budaya serta membangun pusat seni** yang mengangkat budaya dan cerita lokal di setiap daerah yang berstandar global. **iii. Mendorong pemerataan bioskop di berbagai kabupaten/kota dan memperbanyak eksibisi film.** **iv. Membangun pusat – pusat seni budaya di daerah sebagai ruang pameran hasil karya seniman.** **b. Meningkatkan penyediaan *soft infrastructure*** yang mendukung ekosistem kebudayaan dan industri kreatif, antara lain dengan: **i. Mengembangkan digitalisasi pengarsipan warisan budaya** yang handal, aman dan mudah diakses. **ii. Memberikan dukungan dan memfasilitasi keterlibatan produsen film lokal pada festival film internasional.** **iii. Memberikan insentif bagi setiap pembelian IP dari kreator lokal** untuk meningkatkan daya tarik investasi dan memperkuat kreator lokal. **iv. Menerbitkan regulasi afirmatif terhadap IP lokal** agar tidak terjadi kebocoran pasar industri kreatif di Indonesia. **v. Menyediakan teknologi untuk memberikan pengalaman berkesan dalam mengakses pusat kebudayaan dan simpul-simpul industri kreatif.**

II	Menciptakan Kebijakan yang Memastikan Bertumbuh dan Berkembangnya Para Pelaku Industri Kreatif
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Pelaku industri kreatif, khususnya seniman dan penulis, masih kesulitan mendapatkan akses *mentorship* dari profesional berpengalaman. • Keterbatasan sumber pendanaan untuk mengikuti ajang internasional dan mengembangkan karya kreatif menjadi hambatan bagi para talenta. • Minimnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan sesuai kebutuhan industri, serta terbatasnya ruang yang memadai untuk berkarya terutama bagi seniman dari daerah.	**a. Mendukung peningkatan keterampilan pelaku industri kreatif** melalui: i. **Menciptakan program residensi atau *fellowship* bagi penulis dan seniman** yang menyediakan ruang berkarya, dukungan finansial, dan akses *mentorship*. ii. **Memberikan kemudahan dan dukungan kepada pelaku industri kreatif dalam memanfaatkan fasilitas milik pemerintah.** iii. **Memberikan dukungan pembiayaan**, bisa berupa *grant*, bagi seniman berprestasi untuk ikut serta dalam ajang internasional. iv. **Menciptakan program *mentorship* bagi para penulis muda melalui pengembangan laboratorium yang memfasilitasi *workshop* dan mempertemukan penulis muda dengan mentor penulis berpengalaman.** Tujuannya, memberi kesempatan kepada penulis muda untuk berlatih menulis dan mendapatkan bimbingan langsung. Sebagai contoh, Festival Film Cannes memberikan hadiah kepada sutradara film pendek "Prenjak" asal Indonesia berupa *Next Step Lab*, yang memungkinkan *mentorship* dengan sutradara senior di Paris untuk pengembangan naskah film panjang.[15] **b. Memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas pelaku industri** kreatif dan budaya dengan cara: i. **Menjalin kerja sama dengan ahli *game developer*, film, dan penulis** untuk menciptakan program pendidikan dan pelatihan vokasi bagi calon talenta. ii. **Memberikan beasiswa untuk calon seniman dari daerah.**

III	Menjamin Perlindungan dan Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Karya Pelaku Industri Kreatif
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**

• Banyak pekerja industri kreatif (83%) yang khawatir atas ketidakpastian dan kelayakan upah.[16]
• Akses permodalan masih menjadi kendala bagi pelaku ekonomi kreatif:
  • 92% pelaku usaha ekonomi kreatif masih menggunakan modal sendiri atau pinjaman keluarga untuk menopang usaha karena kesulitan mendapatkan pembiayaan, baik dari bank maupun lembaga keuangan non perbankan.[17]
  • PP No. 24 Tahun 2022 membuka ruang untuk pembiayaan dengan agunan hak cipta (*IP-Based Collateral Loan*), namun regulasi teknis yang mengatur tentang mekanisme pembiayaan tersebut belum lengkap, sehingga risiko bagi pemberi pinjaman masih tinggi apabila memberikan *IP-Based Collateral Loan*.[18]
  • Koordinasi lembaga penilai *Intellectual Property* (IP) belum optimal dan IP belum dapat disekuritisasi di Indonesia.
	a. **Memastikan implementasi kebijakan IP-*Based Collateral Loan*** agar para pekerja kreatif dapat menjadikan *Intellectual Property* **sebagai agunan untuk mendapatkan pembiayaan dengan menurunkan risiko pemberi pinjaman, antara lain melalui:**
	  i. **Pembuatan aturan teknis tentang metode penilaian dan pengikatan aset oleh lembaga valuasi.**
	  ii. **Penyediaan insentif bagi lembaga penjamin risiko gagal bayar.**
	  iii. **Memfasilitasi IP agar dapat disekuritisasi menjadi instrumen keuangan** seperti saham dan reksadana.
	b. **Menciptakan terobosan dan inovasi kebijakan dalam pengelolaan sistem paten dan HAKI di Indonesia, termasuk melalui pemberian insentif** agar lebih banyak aplikasi paten dari dalam negeri yang mampu diekspor ke luar negeri dengan nilai dan daya saing yang tinggi.
	c. **Memperkuat data dan regulasi industri perfilman di Indonesia melalui perbaikan dan integrasi data lintas instansi, membentuk pusat data dan arsip film, serta memberantas pembajakan film.**

IV	Memperkuat tata kelola kelembagaan dan pemberian insentif yang menarik bagi pengembangan industri kreatif
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**

• Pengembangan industri kreatif bersifat lintas K/L dan dalam pengembangannya membutuhkan dukungan kebijakan serta pendanaan yang memadai. Saat ini urusan ekonomi kreatif masih ditangani hanya pada tingkat Direktorat Jenderal dibawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
• Peluang ekonomi kreatif di Indonesia masih banyak yang *underutilized*:
  • Pangsa pasar *game* nasional besar hingga 60 juta pemain dengan pendapatan US$1 miliar, namun *share* produk domestik hanya 1%.[19]
  • Pasar film Indonesia belum optimal, terhambat jumlah bioskop yang terbatas hanya di kota besar.
  • Indonesia kaya akan cerita rakyat, tapi belum dikembangkan dalam industri animasi. Disisi lain cukup banyak animator Indonesia ditarik bekerja di perusahaan luar negeri dan mengerjakan produksi film animasi.
	a. **Menciptakan tata kelola kelembagaan** yang dapat **memberikan dukungan secara penuh** dan memastikan realisasi terhadap kemajuan industri kreatif dan sektor pariwisata.
	b. **Menciptakan ekosistem pengembangan industri kreatif yang didukung oleh insentif** yang menarik antara lain dengan:
	  i. **Memberikan insentif pajak untuk berbagai bidang industri kreatif** antara lain seperti tiket konser, tiket film dalam negeri, *game* buatan dalam negeri, royalti buku, royalti musik, dan pagelaran budaya.

Rincian Rekomendasi B: Membentuk *Task Force* Diplomasi Industri Kreatif sebagai Bagian dari Diplomasi *Soft Power* Indonesia pada Kancah Internasional yang Didukung Kebijakan Komprehensif

I	Meningkatkan Promosi Brand dan Budaya Asal Indonesia di Luar Negeri
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• *Brand power* Indonesia berada pada posisi 6,4%. Kalah dibandingkan Singapura yang hampir mencapai 10% dan Thailand yang sedikit di atas Indonesia. Posisi ini berada di bawah rata-rata dunia yang mencapai 7,7%.[20]	a. **Meningkatkan pemanfaatan lokasi eksisting yang berpotensi menjadi ruang/area promosi budaya dan *brand Indonesia*** pada berbagai negara yang berpotensi berdampak signifikan pada pertumbuhan industri kreatif nasional. b. **Meningkatkan pemasaran promosi *brand* dan budaya Indonesia melalui penguatan *storytelling*** sebagai alat untuk menciptakan hubungan emosional dengan potensial *buyers* dan wisatawan, serta menciptakan identitas merek yang kuat dan menonjol.

II	Memperluas Pemberian Dukungan Industri Kuliner Indonesia di Kancah Internasional
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Jumlah restoran Indonesia di luar negeri masih kalah jauh dari Thailand, resto Indonesia hanya berkisar 1.170 sedangkan Thailand mencapai 20.000, ekspansi restoran Thailand secara besar-besaran didukung dengan banyak insentif dan kebijakan pemerintahnya.[21,22] • Sudah ada sejumlah program penyebaran soft power, seperti Indonesia *Spice Up The World* milik Kemenparekraf yang bertujuan membuka 4.000 restoran Indonesia dan mengekspor rempah-rempah senilai US$2 miliar.	a. **Memperluas pemberian dukungan dan fasilitas bagi pengusaha**, termasuk diaspora, yang ingin membuka restoran Indonesia di luar negeri antara lain dalam bentuk pinjaman pelatihan bisnis, akses ke bahan baku, akses pemasaran, dan dukungan teknologi. b. **Memastikan kebutuhan bahan baku untuk pengembangan kuliner di luar negeri** terjaga mutunya dan memiliki standar yang berkualitas.

Sumber Gambar: katadata/Ai

III	**Memberikan Kemudahan dan Insentif dalam Pengembangan Ekosistem Industri Sinema Lokal Menjadi Kelas Dunia**
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Saat ini terdapat pemberian stimulus sebesar Rp50 juta untuk pelaku film dan Rp20 juta bagi pelaku fotografi oleh Kemenparekraf.[23] • Regulasi dan perizinan yang ketat serta maraknya praktik pungli menghambat pembuatan film. Misalnya, terdapat syuting film Hollywood di Jawa Timur yang terhambat akibat adanya pungli.[24]	a. **Mengevaluasi dan melakukan perampingan perizinan pada sektor perfilman.** b. **Mempermudah produksi film** agar biaya produksi film menjadi lebih murah dan mudah. c. **Memberikan insentif bagi produsen film Indonesia** yang akan mengedarkan filmnya baik secara profesional maupun komersial di kancah internasional. d. **Memberlakukan insentif bagi produsen film internasional* yang syuting di Indonesia** termasuk melalui sistem rebate dan bagi mereka yang merekrut pemain film atau tenaga kru Indonesia dalam produksi film. **iklim perfilman yang positif asing dapat menjadi kesempatan untuk meningkatkan kapasitas SDM lokal pada industri perfilman.*

IV	**Menghadirkan terobosan pada Industri Fesyen Nasional dan Memperluas Pasar di Kancah Internasional**
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Nilai ekspor tekstil dan apparel pada 2020 adalah US$12,3 miliar, dengan US$8,5 miliar nilai impor. Meskipun masih surplus, hal ini berpotensi menjadi defisit apabila tidak dikelola dengan optimal.[25] • Nilai ekspor tersebut adalah 1,2% dari global ekspor. Nilai ini cukup rendah dibandingkan negara tetangga seperti Vietnam, Bangladesh dan China yang cukup mendominasi. • Jenis produk yang diekspor oleh Indonesia untuk sektor tekstil dan apparel masih didominasi oleh *low-value products* dan bahan mentah.	a. **Menguatkan ekosistem pengembangan tekstil dan apparel melalui sebuah Pusat Industri Kreatif (*Impact Center*)** yang mengakomodasi profesional dari berbagai disiplin ilmu (mulai dari *arts & crafts design*, *product design*, komunikasi visual, hingga ekonomi, lingkungan, sosiologi dan antropologi) untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan industri, seperti yang telah dilakukan di Eropa dan Inggris.[26] b. **Memfungsikan *Impact Center* sebagai platform untuk meningkatkan aktivitas *trial-error*** untuk produk baru dengan bahan bernilai tinggi dan ramah lingkungan, serta mendukung upgrading teknologi dan cara kerja yang efisien melalui pemberian insentif yang menarik bagi pelaku industri. c. **Mendukung program-program yang memfasilitasi kolaborasi antara desainer, produsen, dan peritel fashion Indonesia dengan mitra internasional** melalui inisiatif seperti pertukaran budaya, program residensi internasional bagi desainer muda, atau kerjasama dengan universitas dan lembaga internasional. d. **Mengembangkan strategi aktif dan mendukung partisipasi desainer dan industri lokal dalam pameran *fashion* internasional terkemuka** seperti *Paris Fashion Week, Milan Fashion Week*, atau *London Fashion Week*.

Rincian Rekomendasi C: Mengoptimalisasi Pengembangan Sektor Jasa dan Pariwisata Nasional

I Menguatkan Narasi dan *Storytelling* Sektor Pariwisata

Kondisi Eksisting	Rekomendasi*
• Indeks pariwisata Indonesia naik ke posisi 22 di dunia berdasarkan *Travel and Tourism Development Index 2024*, meningkat 4,5% dari peringkat 36 pada tahun 2019[27] dengan kontribusi utama dari daya saing harga, keterbukaan internasional, dan prioritas pada *travel & tourism.* • *Branding* sektor pariwisata Indonesia belum mencerminkan jati diri seutuhnya: • *Branding* yang digunakan kota – kota di Indonesia banyak yang menggunakan adaptasi dari budaya luar contohnya Wonosobo sebagai "*Swiss van Java*".	**a. Meningkatkan pemasaran promosi *brand* dan budaya Indonesia melalui penguatan *storytelling*** sebagai alat untuk menciptakan hubungan emosional dengan potensial *buyers* dan wisatawan, serta menciptakan identitas merek yang kuat dan menonjol. **b. Memperkuat narasi sektor pariwisata** Indonesia agar menonjolkan identitas asli Indonesia. **c. Menyediakan teknologi untuk memberikan pengalaman berkesan dalam mengakses pusat kebudayaan dan simpul-simpul industri kreatif.** **d. Menyediakan insentif bagi figur publik Indonesia untuk menjadi ambasador Indonesia** dalam menarik lebih banyak turis ke Indonesia. **Diutamakan beriorientasi internasional agar dapat menarik wisatawan asing.*

II Meningkatkan Infrastruktur untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Pariwisata

Kondisi Eksisting	Rekomendasi
• 5.158 desa/kelurahan tidak memiliki sinyal (*blank spots*) dengan 38,12% berada di wilayah Maluku dan Papua.[28] • Kecepatan kategori *fixed broadband* di Indonesia 27,11 Mbps*, peringkat ke-8 di ASEAN. • Jalan menuju lokasi wisata di Indonesia memiliki kondisi yang bervariasi, dari yang baik hingga yang rusak, sempit, berliku, rawan longsor, hingga banjir. • Implementasi teknologi digital dalam manajemen pariwisata di Indonesia belum merata dan belum optimal, meskipun beberapa destinasi sudah mulai menggunakan aplikasi *mobile* untuk pemesanan tiket, informasi wisata, dan navigasi. **Menurut The Federal Communications Commission (FCC), lembaga komisi penyiaran Amerika Serikat, kecepatan internet yang layak adalah 100 Mbps.[29]*	**a. Melanjutkan pengembangan jaringan 5G secara bertahap di destinasi pariwisata utama dan pedesaan.** **b. Memperbaiki dan memperluas infrastruktur atau jaringan jalan* menuju lokasi pariwisata melalui peningkatan anggaran kepada pemerintah daerah.** **Perlu dipastikan agar anggaran tambahan digunakan sesuai dengan kebutuhan perluasan jaringan jalan.* **c. Mendorong kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta untuk mendanai dan mengembangkan infrastruktur pariwisata**, termasuk investasi dalam infrastruktur digital dan transportasi. **d. Meningkatkan investasi dalam pengembangan industri perhotelan dengan standar internasional melalui kemudahan perizinan dan pemberian insentif** dengan tetap mempertahankan budaya Indonesia dan kelestarian lingkungan.

III	Meningkatkan Kebermanfaatan Sektor Pariwisata kepada Masyarakat Setempat
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Sebagian masyarakat lokal belum mendapat manfaat optimal dari pengembangan pariwisata. • Kebocoran ekonomi pada sektor pariwisata sering terjadi, seperti permintaan terhadap sumber daya non-lokal yang digunakan dalam pariwisata seperti bahan makanan, minuman, ataupun alat – alat yang mengharuskan impor dari luar Indonesia.[30, 31]	a. **Meningkatkan pemanfaatan produk dan kearifan lokal dalam mengembangkan sektor pariwisata berkelanjutan** yang dapat menjawab ketimpangan ekonomi serta melahirkan inovasi-inovasi bermanfaat untuk warga setempat dan ekosistemnya. b. **Memberikan insentif dan disinsentif untuk usaha yang bergerak di sektor pariwisata** guna mengurangi tingkat kebocoran ekonomi dan meningkatkan penggunaan produk lokal. c. **Memperkuat *branding* desa wisata berdasarkan keunggulan yang unik dan kompetitif melalui penyesuaian kriteria** dalam penentuan desa wisata.* **Tidak semua desa harus menjadi desa wisata karena pariwisata itu tidak terikat pada wilayah administratif*[32]

IV	Mengakselerasi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia
Kondisi Eksisting	**Rekomendasi**
• Sektor pariwisata mengkonsumsi banyak air, energi dan berperan dalam menghasilkan gas rumah kaca. • Menurut *World Travel & Tourism Council* (2021), sektor perjalanan dan pariwisata bertanggung jawab atas sekitar 11% emisi global.	a. **Memperluas implementasi penggunan sertifikasi pembangunan/operasional berkelanjutan** (berdasarkan konsep *blue, green,* atau *circular economy*) **pada sektor pariwisata yang didukung dengan pemberian insentif dan disinsentif yang sesuai serta penegakan hukum yang kuat.** b. **Memperluas program pariwisata berkelanjutan salah satunya melalui *carbon offsetting*** seperti penanaman atau konservasi pohon dan hutan terhadap skema perjalanan pariwisata dalam negeri, mulai dari travelling dengan pesawat hingga penginapan di lokasi pariwisatanya.[33] c. **Melanjutkan pengembangan pariwisata berkelanjutan yang didukung dengan pendanaan melalui sistem *crowdfunding*** yang lebih masif dan berskala besar seperti yang telah dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sejak tahun 2022 dengan program *Carbon Offsetting*.[34]

Referensi

1. Antara News. (2023). *Sandiaga Uno: Ekonomi Kreatif Bisa Jadi Penopang Indonesia Emas 2045*. Diakses pada 1 Juni 2024, dari https://www.antaranews.com/berita/3982788/sandiaga-uno-ekonomi-kreatif-bisa-jadi-penopang-indonesia-emas-2045
2. Indonesia.go.id. (2023). *Industri Kreatif Terus Moncer*. Diakses pada 3 Juni 2024, dari https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7859/industri-kreatif-terus-moncer
3. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2023). *Film Jadi Salah Satu Subsektor Ekonomi Kreatif yang Tumbuh Positif pada 2023*. Diakses pada 5 Juni 2024, dari https://kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-film-jadi-salah-satu-subsektor-ekonomi-kreatif-yang-tumbuh-positif-pada-2023
4. Antara News. (2023). *Imigrasi Keluarkan Visa Multiple Entry 5 Tahun untuk Bisnis dan Wisata*. Diakses pada 7 Juni 2024, dari https://www.antaranews.com/berita/3881190/imigrasi-keluarkan-visa-multiple-entry-5-tahun-untuk-bisnis-dan-wisata
5. Kompas. (2024). *Sandiaga: Pemerintah Siapkan Dana Bergulir Hingga Hibah untuk Ekonomi Kreatif*. Diakses pada 9 Juni 2024, dari https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/03/07/sandiaga-pemerintah-siapkan-dana-bergulir-hingga-hibah-untuk-ekonomi-kreatif
6. Antara News. (2023). *Sandiaga: Parekraf Indonesia Dikembangkan Lewat Praktik Berkelanjutan*. Diakses pada 11 Juni 2024, dari https://www.antaranews.com/berita/4072218/sandiaga-parekraf-indonesia-dikembangkan-lewat-praktik-berkelanjutan
7. Antara News. (2023). *Kemenparekraf: 92,37 Persen Pelaku Parekraf Andalkan Modal Sendiri*. Diakses pada 13 Juni 2024, dari https://www.antaranews.com/berita/3123697/kemenparekraf-9237-persen-pelaku-parekraf-andalkan-modal-sendiri
8. Kompas. (2024). *Perfilman Indonesia Butuh Banyak Perbaikan*. Diakses pada 15 Juni 2024, dari https://www.kompas.id/baca/hiburan/2024/03/28/perfilman-indonesia-butuh-banyak-perbaikan
9. Kompas. (2024). *Butuh Usaha Kolektif Optimalkan Bidang Ekonomi Kreatif*. Diakses pada 17 Juni 2024, dari https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/02/25/butuh-usaha-kolektif-optimalkan-bidang-ekonomi-kreatif
10. Kompas. (2024). *Indonesia Hadapi Sederet Masalah Kembangkan Seni Pertunjukan*. Diakses pada 19 Juni 2024, dari https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/02/26/indonesia-hadapi-sederet-masalah-kembangkan-seni-pertunjukan
11. World Economic Forum. (2024). *Travel & Tourism Development Index 2024*. Diakses pada 21 Juni 2024, dari https://www.weforum.org/publications/travel-tourism-development-index-2024/
12. Kompas. (2023). *Investasi Kebudayaan*. Diakses pada 2 Juni 2024, dari https://www.kompas.id/baca/opini/2023/04/14/investasi-kebudayaan
13. Kompas. (2023). *Benahi Tata Kelola Ruang Ekspresi Seni Budaya*. Diakses pada 23 Juni 2024, dari https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/04/25/benahi-tata-kelola-ruang-ekspresi-seni-budaya
14. Antara News. (2023). *Potensi Besar Menanti Industri Film Indonesia*. Diakses pada 25 Juni 2024, dari https://www.antaranews.com/berita/3981483/potensi-besar-menanti-industri-film-indonesia
15. Rencanamu. (2016). *Profil Wregas Bhanuteja: Sutradara Muda Pemenang Cannes*. Diakses pada 27 Juni 2024, dari https://rencanamu.id/post/profil/wregas-bhanuteja-sutradara-muda-pemenang-cannes-lewat-filmnya-tentang-alat-kelamin
16. Kompas. (2023). *Pekerja Media dan Industri Kreatif Tuntut Kesejahteraan*. Diakses pada 29 Juni 2024, dari https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/05/01/pekerja-media-dan-industri-kreatif-tuntut-kesejahteraan
17. Kumparan. (2023). *Sektor Ekonomi Kreatif Masih Sulit Dapat Pinjaman Bank*. Diakses pada 30 Juni 2024, dari https://kumparan.com/kumparanbisnis/sektor-ekonomi-kreatif-masih-sulit-dapat-pinjaman-bank-1vcvioKyWT5
18. Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi. (2023). *Peluang Ekonomi Kreatif di Indonesia*. Diakses pada 2 Juni 2024, dari https://www.kemenkomarves.go.id/kategori/editorial/7859/industri-kreatif-terus-moncer
19. CNBC Indonesia. (2019). *Ini Alasan Perusahaan Game RI Kalah Saing dengan Asing*. Diakses pada 4 Juni 2024, dari https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190425073936-37-68717/ini-alasan-perusahaan-game-ri-kalah-saing-dengan-asing
20. Media Harapan. (2017). *Brand Power Indonesia Masih Lemah*. Diakses pada 6 Juni 2024, dari https://mediaharapan.com/ternyata-brand-power-indonesia-masih-lemah/
21. Alinea. (n.d.). *Bagaimana Thailand dan Korea Menginvasi Dunia Lewat Kuliner*. Diakses pada 8 Juni 2024, dari https://www.alinea.id/dunia/bagaimana-thailand-dan-korea-menginvasi-dunia-lewat-kuliner-b1ZRP9ws
22. Kumparan. (2023). *Peluang Besar Kuliner Indonesia di Kancah Internasional*. Diakses pada 10 Juni 2024, dari https://kumparan.com/winnie-widyawati/peluang-besar-kuliner-indonesia-di-kancah-internasional-21vBbt4kqlC
23. Kompas. (2022). *Sandiaga Uno Beri Stimulus Hingga Rp 50 Juta bagi Pelaku Ekraf Film dan*. Diakses pada 12 Juni 2024, dari https://money.kompas.com/read/2022/08/15/083800126/sandiaga-uno-beri-stimulus-hingga-rp-50-juta-bagi-pelaku-ekraf-film-dan
24. Suara. (2019). *Syuting Film Hollywood Terhambat oleh Pungli*. Diakses pada 14 Juni 2024, dari https://www.suara.com/lifestyle/2019/11/20/133153/syuting-film-hollywood-terhambat-oleh-pungli-ganjar-pranowo-telepon-saya
25. Buletin Tekstil. (2021). *Kinerja Industri TPT 2020*. Diakses pada 16 Juni 2024, dari https://buletintekstil.com/2021/03/10/kinerja-industri-tpt-2020/07/03/50/2255/
26. City, University of London. (n.d.). *Culture and the Creative Industries*. Diakses pada 18 Juni 2024, dari https://www.city.ac.uk/research/centres/culture-and-the-creative-industries
27. World Economic Forum. (2024). *Travel and Tourism Development Index 2024*. Diakses pada 20 Juni 2024, dari https://www3.weforum.org/docs/WEF_Travel_and_Tourism_Development_Index_2024.pdf
28. Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2022*. Diakses pada 22 Juni 2024, dari https://www.bps.go.id/id/publication/2023/08/31/131385d0253c6aae7c7a59fa/statistik-telekomunikasi-indonesia-2022.

html
29. Kompas. (2024). *AS Naikkan Standar Minimal Kecepatan Download Internet Jadi 100 Mbps*. Diakses pada 24 Juni 2024, dari https://tekno.kompas.com/read/2024/03/20/07000047/as-naikkan-standar-minimal-kecepatan-download-internet-jadi-100-mbps
30. Universitas Jember. (n.d.). *Buku Kebijakan Pengembangan Pariwisata*. Diakses pada 26 Juni 2024, dari https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/73658/Dr.%20Anastasia_Buku%20Kebijakan%20Pengembangan%20Pariwisata_%28FISIP%29.pdf?sequence=1
31. Contoh: Persentase kebocoran hotel bintang 4 dan 5 di Bali >50% dengan komponen sumber daya manusia (GM hotel), minuman, dan bumbu – bumbu berasal dari luar Indonesia.
32. YouTube. (n.d.). *Video Dokumentasi Industri Kreatif*. Diakses pada 28 Juni 2024, dari https://www.youtube.com/watch?v=qY5vbjfqyq4&t=90s
33. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2023). *Menparekraf Luncurkan Carbon Footprint di Bali: Wujudkan Pariwisata Berkelanjutan dan Berkualitas*. Diakses pada 30 Juni 2024, dari https://kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-menparekraf-luncurkan-carbon-footprint-di-bali-wujudkan-pariwisata-berkelanjutan-dan-berkualitas
34. Ibid.

Kesimpulan dan Penutup

Di tengah lanskap geopolitik dan ekonomi global yang dinamis, kepemimpinan yang kuat dan mandiri menjadi kunci Indonesia menuju keberhasilan dan kemakmuran. Terpilihnya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka peluang besar bagi Indonesia semakin mewujudkan mandat Undang-Undang Dasar 1945.

Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah perlu melibatkan seluruh pihak, termasuk dunia bisnis. Tidak hanya dalam memberikan perspektif baru, tetapi juga memberikan ruang mengakses sumber daya lebih luas demi mewujudkan Indonesia yang lebih berdaya saing dan makmur. Melalui peran strategis *Indonesian Business Council* (IBC), sinergi antara pemerintah dan dunia bisnis dapat diwujudkan, sehingga mengidentifikasi permasalahan utama yang perlu segera diselesaikan dan peluang kunci yang perlu dimanfaatkan.

Dalam menghadapi tantangan kompleks dalam 5 tahun ke depan, seperti dipaparkan dalam bagian pendahuluan, penting bagi Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan strategi yang efektif dan adaptif. Strategi tersebut tidak hanya berfokus pada sektor ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial dan lingkungan guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

IBC melalui buku putih ini telah mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi kebijakan yang selaras dengan agenda pemerintahan yang baru. IBC merumuskan 15 rekomendasi paket kebijakan berdasarkan kerangka acuan pengelolaan bangsa untuk Indonesia yang Berdaya Saing dan Sejahtera. Kerangka acuan ini terdiri dari 4 pilar utama: Ekonomi, Sumber Daya Manusia, Tata Kelola Negara, dan Inovasi.

Rekomendasi paket kebijakan tersebut berfokus pada 15 bidang atau fokus area: mulai dari penguatan sistem pertanian dan sektor-sektor turunannya, hilirisasi, transisi energi, dan penguatan ekonomi hijau, penguatan sektor keuangan, BUMN, dan ekonomi kreatif dan digital, penguatan birokrasi, tata kelola pemerintahan, dan sistem logistik, serta peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perumahan.

Setiap fokus area terdiri dari 2 hingga 5 rekomendasi turunan yang sejalan dengan pandangan Prabowo-Gibran sebagaimana tertuang dalam Visi, Asta Cita, dan program kerja periode 2024-2029. Setelah membaca buku putih ini, diharapkan pembaca akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan strategis yang dihadapi demi mewujudkan Indonesia yang berdaya saing dan sejahtera, dan kebijakan yang perlu diprioritaskan untuk mendukung agenda pembangunan nasional. IBC berharap dapat bergerak seiring dan berkontribusi aktif dalam merealisasikan visi kepemimpinan baru.

Di antara 15 paket kebijakan rekomendasi dan turunannya, terdapat lima hal yang menurut kami dapat berdampak signifikan terhadap pencapaian agenda pembangunan, yaitu: 1) Merealisasikan potensi penambahan 6-9 juta ha lahan pertanian baru, 2) Melakukan terobosan dalam eksekusi pembangunan menggunakan APBN, 3) Meningkatkan ketahanan energi menggunakan biodiesel, 4) Mempercepat realisasi potensi ekonomi dari pengelolaan karbon senilai Rp8 ribu triliun, dan 5) Memastikan agenda Presiden-Wakil Presiden Terpilih terealisasi dengan birokrasi yang efektif, efisien, dan memanfaatkan teknologi digital, dengan peran Menko sebagai Integrator Sistem (PMO Nasional), yang bertanggung jawab atas pengelolaan program lintas sektor dan memastikan tercapainya Agenda Prioritas.

Paket kebijakan rekomendasi dan turunannya ini disusun dengan tujuan untuk mendukung realisasi visi pembangunan yang menyeluruh dan inklusif. IBC berharap bahwa rekomendasi ini akan menjadi alat bantu bagi pemerintah baru dalam merumuskan berbagai kebijakan strategis yang dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Sebagai penutup, kami kembali menegaskan komitmen IBC dan dunia bisnis untuk terus berkontribusi dalam mendukung pemerintahan baru dalam mencapai tujuan-tujuan strategis bangsa. Kami percaya bahwa dengan adanya kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, Indonesia dapat mencapai visi Indonesia Emas 2045, dimana sebuah negara yang tidak hanya berdaya saing tinggi dan makmur, tetapi juga mampu memberikan kehidupan yang layak, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyatnya.

Dalam mewujudkan visi ini, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja sama dan berpartisipasi secara aktif. Kami percaya, masa depan Indonesia berada di tangan kita bersama. Melalui upaya kolektif, kita dapat membawa Indonesia menjadi negara yang lebih berdaya saing, makmur, dan mampu berpengaruh di kancah global.

Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas

Dalam menyambut agenda pembangunan pemerintahan kedepan, IBC berinisiatif untuk merumuskan dan memberikan rekomendasi strategis kepada Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Rekomendasi ini dikemas dalam bentuk buku putih yang berjudul *"15 Rekomendasi Paket Kebijakan untuk Mendukung Agenda Pembangunan Indonesia Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2024 – 2029."* IBC telah merumuskan kerangka kebijakan yang terdiri dari empat pilar utama—Ekonomi, Sumber Daya Manusia, Tata Kelola Negara, dan Inovasi—dengan 15 Fokus Area. Kerangka kebijakan ini telah mempertimbangkan agenda pembangunan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang diperkaya dengan pandangan dunia usaha untuk mendorong peningkatan daya saing dan kesejahteraan Indonesia.

Indonesian Business Council (IBC) merupakan asosiasi pemimpin bisnis dan industri di Indonesia yang memiliki visi mendorong peningkatan daya saing dan kesejahteraan Indonesia. Visi tersebut diwujudkan melalui penciptaan iklim kebijakan publik yang baik, yang mendorong peningkatan partisipasi serta kontribusi pelaku usaha swasta dalam memajukan perekonomian nasional Indonesia. Melalui penelitian, analisis data, dan rekomendasi kebijakan, IBC berupaya menciptakan lingkungan kebijakan publik yang kondusif guna meningkatkan kemakmuran bersama dalam rangka mencapai tujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maju.

IBC
Indonesian Business Council

Indonesian Business Council (IBC)
Sequis Center Lantai 1
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 71
Jakarta Selatan 12190
Indonesia

business-council.id businesscouncil.id Indonesian Business Council businesscouncil_id